LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Bogor, 14 s.d. 17 September 2021

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dan mengetahui teknik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iii

A. PENDAHULUAN 1

A.1. Umum 1

A.2. Tujuan 3

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 4

B.1. Nama Kegiatan 4

B.2. Waktu dan Tempat 4

B.3. Peserta Kegiatan 4

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat 6

B.5. Uraian Kegiatan 6

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta 6

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan 6

B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test 7

B.5.4. Acara Pembukaan 7

B.5.5. Penyampaian Materi 8

B.5.6. Acara Penutupan 10

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN 11

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test* 11

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner 11

D. HAMBATAN 16

E. PEMBIAYAAN 17

F. PENUTUP 17

G. LAMPIRAN 18

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Dokumentasi Kegiatan**
2. **Laporan Keuangan**
3. **Jadwal Kegiatan**
4. **Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
5. **Tata Tertib Kegiatan**
6. **Bahan Penjelasan Teknis**
7. **Panduan Penggunaan SIMULTAN**
8. **Panduan Moderator**
9. **Panduan Narasumber**
10. **Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
11. **Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik**
12. **Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
13. **Surat Tugas Narasumber dan Moderator**
14. **Surat Perjanjian Kerjasama**
15. **Daftar Hadir Peserta**
16. **Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
17. **Penilaian Hasil Praktek Peserta**
18. **Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
19. **Daftar Pertanyaan Peserta**
20. **Alur Kegiatan *Online***

PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
Selasa s.d. Jumat, 14 s.d. 17 September 2021

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
    a) penghianatan terhadap negara;
    b) korupsi;
    c) penyuapan;
    d) tindak pidana lainnya;

2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparsial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada

dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha dilaksanakan secara *online*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi, Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara.

A.2 Tujuan

a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

"Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha".

B.2. Waktu dan Tempat

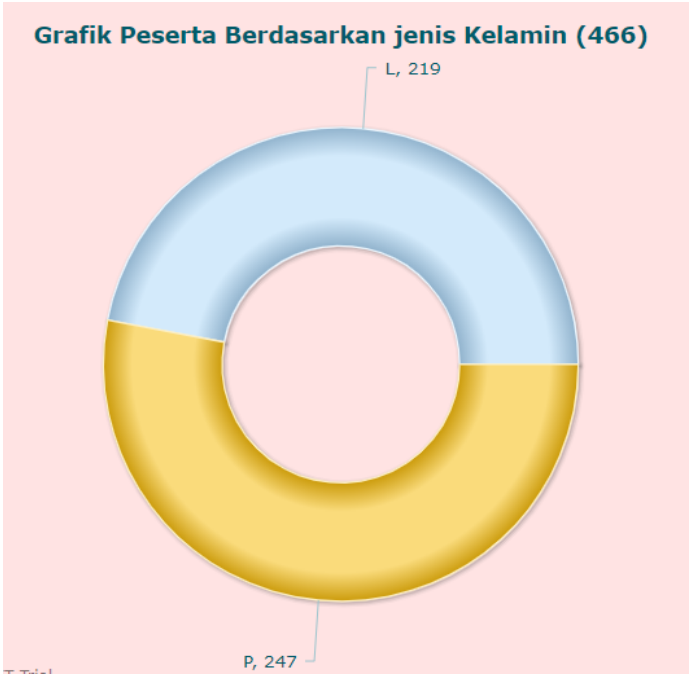
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 14 s.d. 17 September 2021 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

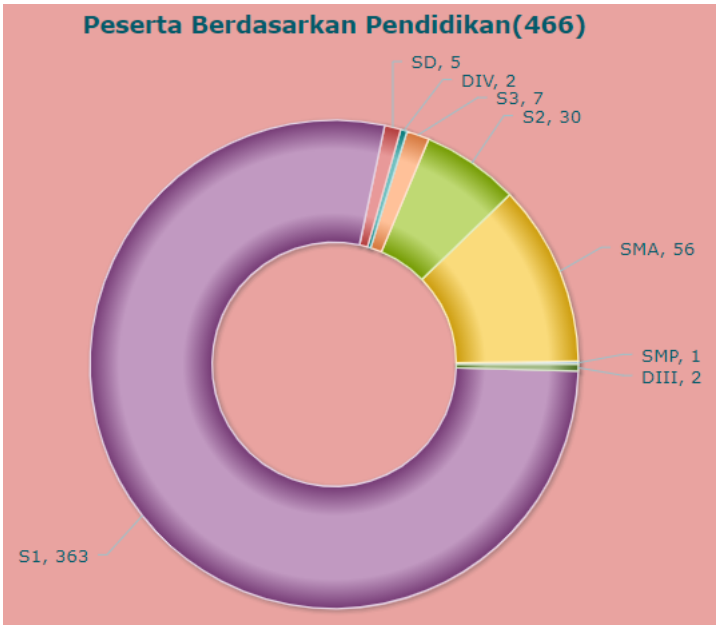
Peserta kegiatan sebanyak 466 orang Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha:

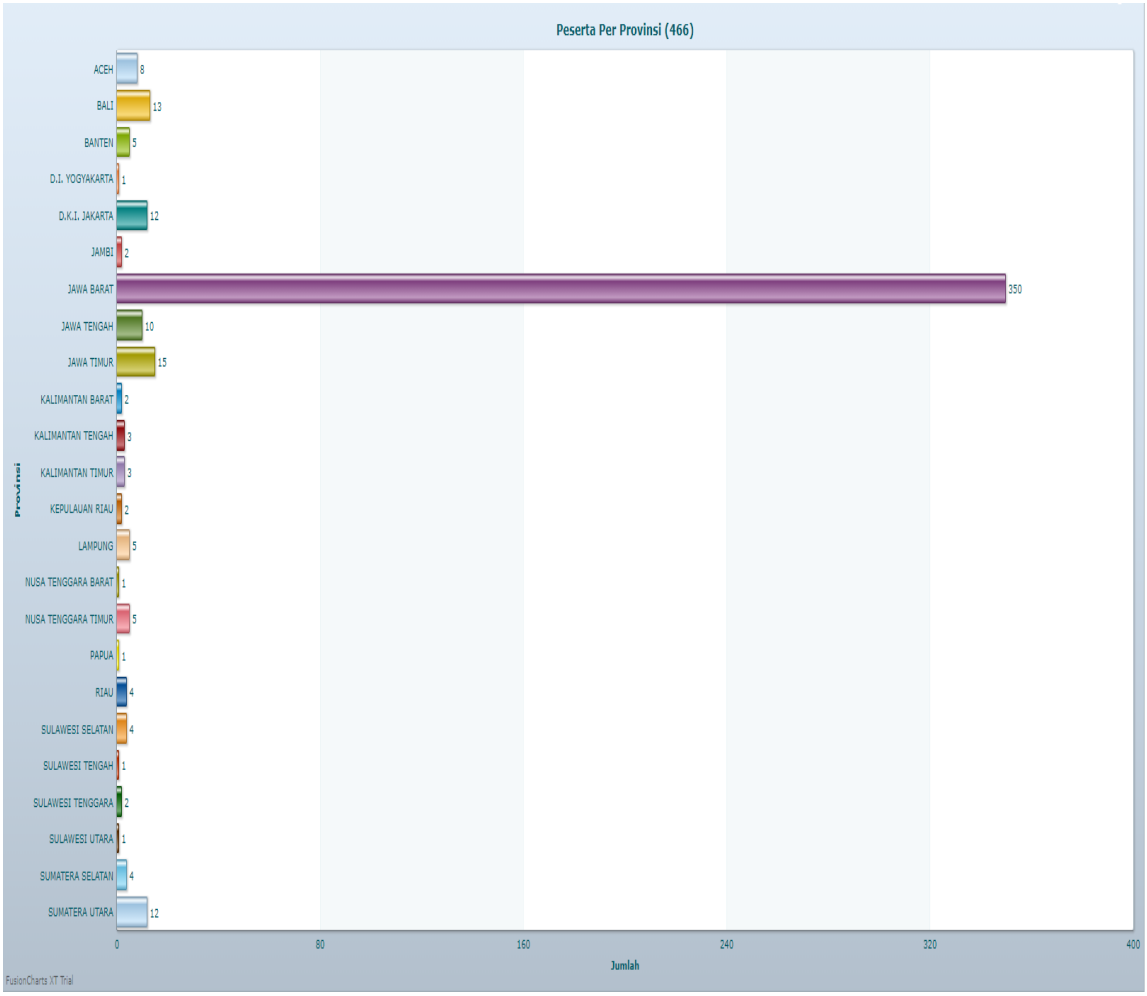
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).

b. Sertifikat

1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan.

2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1.Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta online (daring) melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link https://bit.ly/Registrasi_UniversitasKristenMaranatha;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam Grup Telegram untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting.* Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi_Nama Peserta_Asal Instansi;

3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda *"Raise Hand"* atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3.Penjelasan Teknis dan Pre Test

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 15.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 16.00 s.d. 17.00 dari Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bapak Imam Margono, dan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 18.30 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah, menyampaikan Laporan terkait Penyelenggaraan Kegiatan. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Sekretaris Jenderal, Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen

Maranatha, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas hakim konstitusi, akademisi di bidang konstitusi, panitera pengganti dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	**Konstitusi dan Konstitusionalisme**	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
2.	**Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945**	Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.
3.	**Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945**	Dr. Hesti Armiwulan, S.H.
4.	**Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
5.	**Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
6.	**Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	1. Achmad Edi Subiyanto 2. Mardian Wibowo 3. Hani Adhani 4. AA. Dian Onita 5. Wilma Silalahi 6. Fransisca 7. Jefri Porkonanta Tarigan 8. I Made Gede WTK
7.	**Sistem Informasi Perkara Elektronik**	1. Ishak Purnama 2. Mazmur Alexander Manik

NO.	MATERI	NARASUMBER
8.	**Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	1. Anna Triningsih 2. Andriani Wahyuningtyas Novitasari 3. Abdul Ghoffar 4. Mohammad Mahrus Ali 5. Rima Yumana Yustikaningrum 6. Suryo Gilang Romadlon 7. Ananthia Ayu Devitasari 8. Intan Permata Putri

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan *"raise hand"* ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint,* diupload oleh panitia ke laman *microsite* pusdik.mkri.id sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator sekaligus *host*. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh

narasumber dari Panitera Pengganti dan Peneliti yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30, Jumat, 17 September 2021 oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi secara virtual.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item.* Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masng di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 3,76 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 54 menunjukkan nilai sebesar 1,673. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test – pre test*) diperoleh skor 1,18. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam

hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal pre test dan post test, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,6 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaran kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu materi, narasumber dan moderator, administrasi pelayanan dan sarana prasarana, serta layanan teknologi informasi dan komunikasi. **Penilaian Tingkat Layanan Teknologi Informasi mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,90 yang tergolong kategori sangat baik**. Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi **nilai tingkat**

kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,84 yang tergolong kategori sangat baik.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Materi		
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,81	Sangat Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,88	Sangat Baik
3	Materi mudah dipahami	3,73	Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,75	Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,81	Sangat Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,86	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan atas Layanan Materi		**3,81**	**Sangat Baik**
	Narasumber dan Moderator		
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,90	Sangat Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,86	Sangat Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,90	Sangat Baik
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,85	Sangat Baik
11	Narasumber Kompeten dan kredibel	3,90	Sangat Baik
12	Narasumber yang paling menarik	1. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H 2. Dr. Jimmy Z. Usfunan 3. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
13	Moderator yang paling menarik	1. Ganggas Wibisono 2. Yahya Amarullah Taufik 3. Suhardi	
Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator		**3,88**	**Sangat Baik**
Administrasi Pelayanan dan Sarpras			
14	Kemudahan peserta dalam melalukan registrasi	3,75	Baik
15	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,75	Baik
16	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,85	Sangat Baik
17	Bahan materi, pedoman, dan informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite pusdik	3,88	Sangat Baik
18	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	3,81	Sangat Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,79	Sangat Baik
20	Tayangan video visual baik	3,73	Baik
Tingkat Layanan Administrasi dan Sarpras		**3,79**	**Sangat Baik**
Layanan TI			
21	Layanan TI (e-registrasi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, kuesioner online) sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	3,82	Sangat Baik
22	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,90	Sangat Baik
23	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	3,92	Sangat Baik
24	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	3,96	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan Layanan TI		**3,90**	**Sangat Baik**

Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan	**3,84**	**Sangat Baik**

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks ini diukur dengan menggunakan "*Kirckpatrick four levels evaluation model*" yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour,* level keempat - *Result.*

Dari **keempat** level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning.* Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan + Tingkat Pemahaman)}}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,18 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,36. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,84 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu (3,84+2,36)/2 = 3,1

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,1; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik.**

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  a) Kegiatan dilaksanakan secara rutin dan dapat menyentuh seluruh civitas akademis;

b) Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring);
c) Konsep kegiatan dibuat lebih menarik;
d) Mekanisme pendaftaran peserta dapat lebih disederhanakan lagi;
e) Alokasi waktu dapat lebih dipersingkat dan waktu istirahat ditambah;
f) Kurangnya komitmen para peserta dalam mengikuti dengan serius kegiatan ini;
g) Moderator harus lebih jelas dalam menyampaikan pertanyaan peserta.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  a) Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan lebih dipermudah;
  b) Kualitas audio dan mic dapat ditingkatkan.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 123 orang dari 466 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

a) Kurangnya komitmen peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sehingga jumlah peserta yang bergabung di zoom meeting kurang dari 50% dari total jumlah peserta yang melakukan registrasi;
b) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;
c) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri

masing-masing saat narasumber memaparkan materi;

d) Peserta masih banyak yang merasa kesulitan untuk mengisi daftar hadir di akun peserta;

e) Beberapa peserta merasa kesulitan mengisi kuesioner evaluasi kegiatan akun peserta;

f) Masih ada peserta yang tidak mengerjakan tugas.

E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2021 (DIPA) Nomor: 077.01.01 4246.QDC.003.051 (Peningkatan Pemahaman Warga Negara Mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 64.342.700 (enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 29 September 2021

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Digital Signature
mk1705629915210929094101

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman, serta dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan.



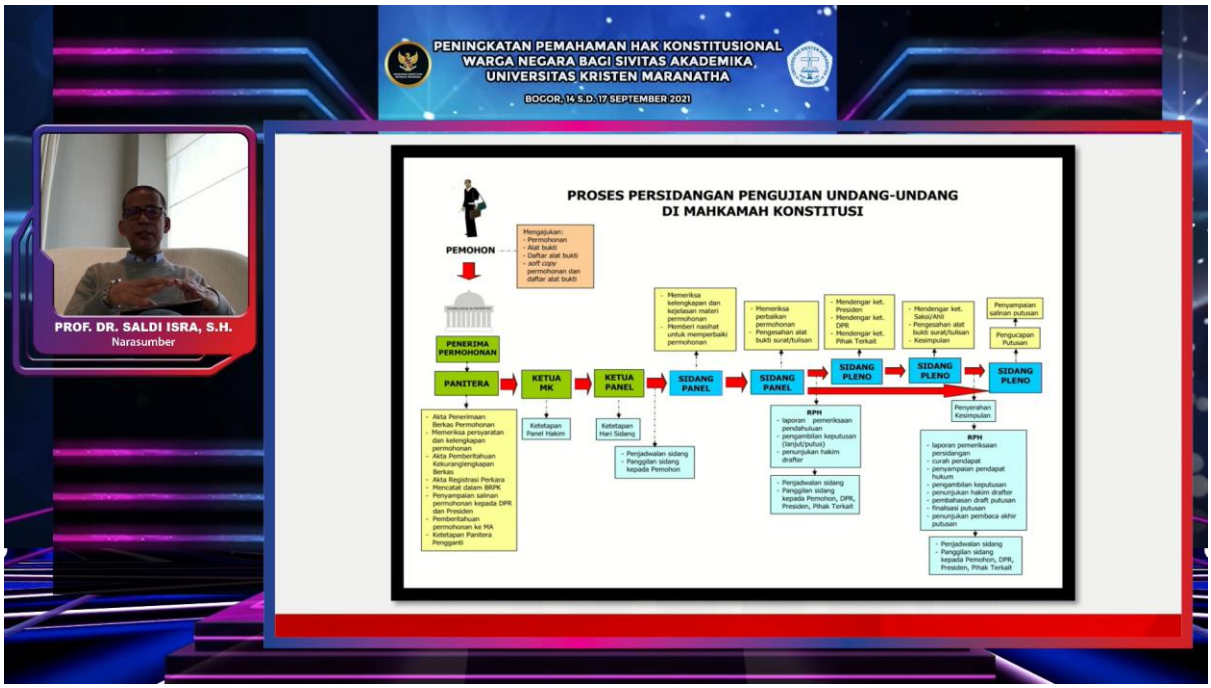
Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



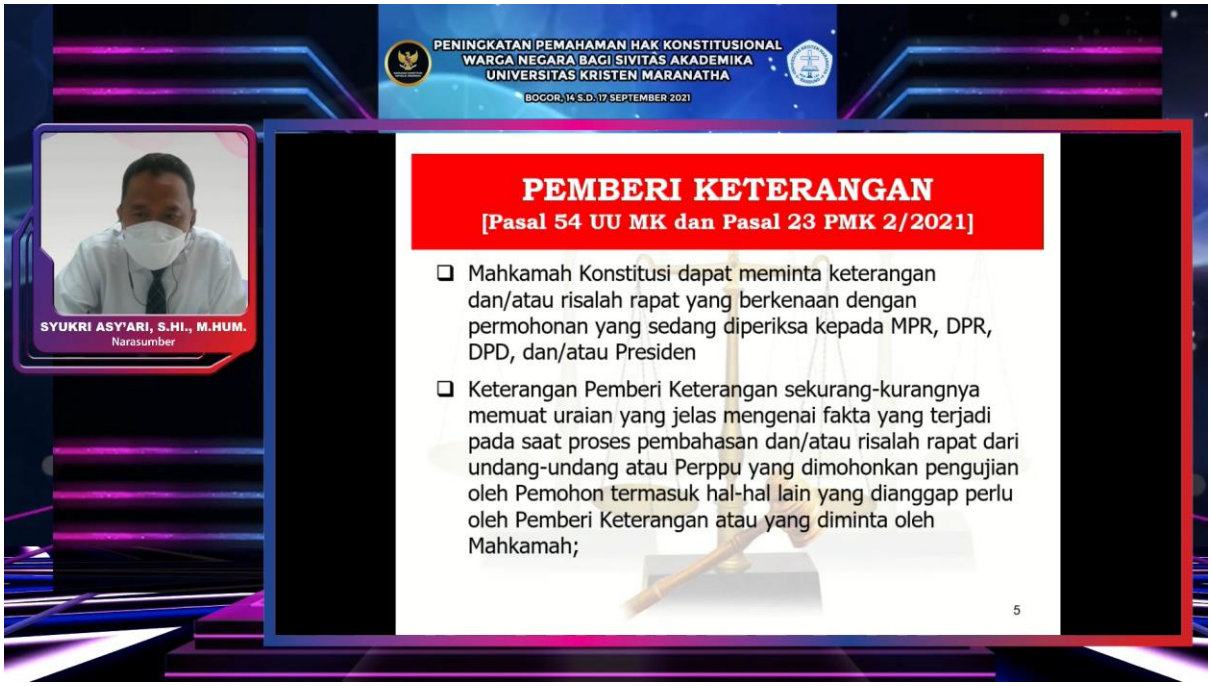
Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.



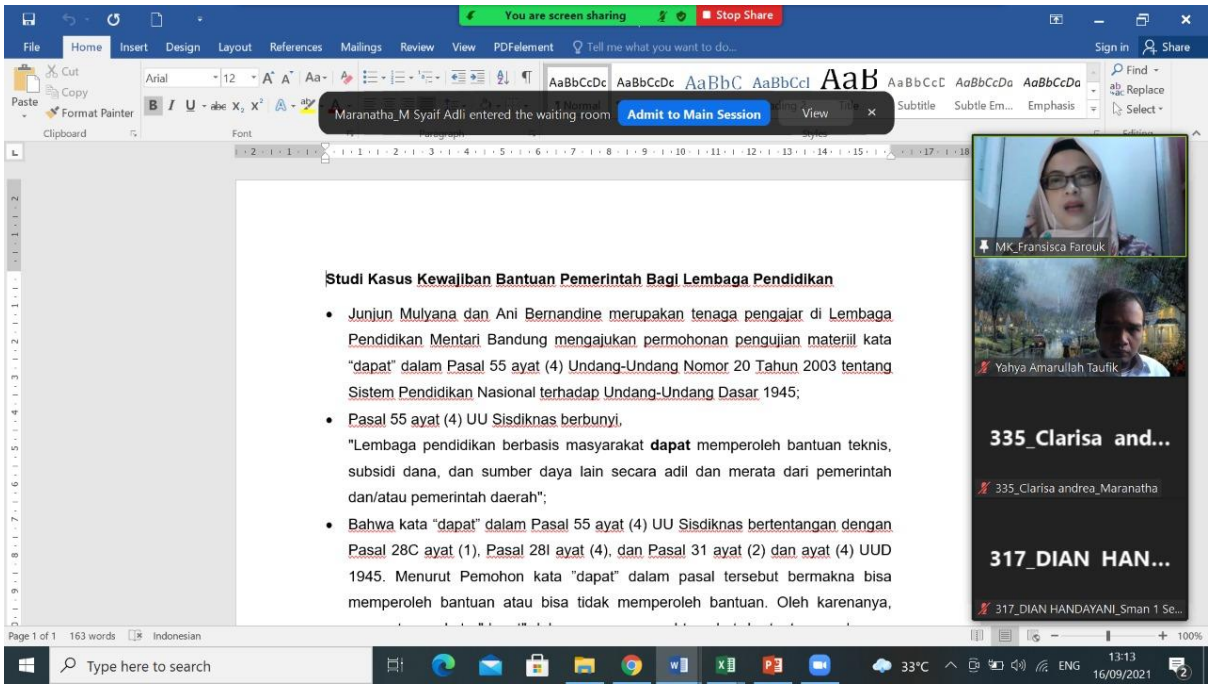
Penyampaian Materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 oleh Dr. Hesti Armiwulan, S.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Penyampaian Materi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum..



Materi Praktik dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan oleh 8 narasumber yang dibagi dalam 8 kelas.



Penyampaian Materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Tim IT Mahkamah Konstitusi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI serta dihadiri oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021

NO	KETRANGAN	NOMINAL
1	Honor Narasumber	32,050,000
2	Biaya Perjalanan Dinas	13,700,000
3	Biaya sewa Laptop	8,800,000
4	Biaya Belanja Bahan	1,150,000
5	Biaya Akomodasi	2,867,700
6	Biaya sewa kamera	5,775,000
	TOTAL	**64,342,700**

Jadwal Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 14 s.d. 17 September 2021
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Selasa 14 September 2021	15.30 – 16.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	17.00 – 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.45 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan teks Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha** **Sekretaris Jenderal MK**	Zoom

KEDUA				
Rabu **15 September 2021**	07.15 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi I:** **Konstitusi dan Konstitusionalisme**	**Narasumber:** Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II:** **Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi III:** **Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Dr. Hesti Armiwulan, S.H.	Zoom
KETIGA				
Kamis **16 September 2021**	07.15 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi IV:** **Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*		

	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi V:** **Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi VI:** **Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	**Sesi Mandiri:** **Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
KEEMPAT				
Jumat **17 September 2021**	07.00 – 07.15 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.15 – 09.15 WIB	**Sesi VII:** **Sistem Informasi Perkara Elektronik**	**Narasumber:** Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	*Coffee Break*		
	09.30 – 11.30 WIB	**Sesi VIII:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	**Narasumber:** Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	11.30 – 13.15 WIB	ISHOMA		
	13.15 – 13.30 WIB	*Post-Test* dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom

	13.30 – 15.00 WIB	**Penutupan:** 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**YM Wakil Ketua MK** **Plt. Kapusdik**	Zoom



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Bogor, 14 s.d. 17 September 2021

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penyusunan Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha dapat terselesaikan.

Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara ini diselenggarakan bagi para sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha yang memililki posisi penting dalam pembangunan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, keberadaan para akademisi memiliki peran strategis dalam memberikan warna arah bangsa dengan pembentukan karakter pada generasi penerus bangsa.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, September 2021

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001
Digital Signature
mk-159119729921091308504O

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI 1

I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi..... 2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 3
3. Visi dan Misi 3
4. Profil Hakim Konstitusi 4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 8

II PANDUAN KEGIATAN..... 9
1. Latar Belakang 9
2. Tujuan Kegiatan 9
3. Nama Kegiatan 10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan 10
5. Peserta Kegiatan 12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum..... 12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat..... 14
8. Pembiayaan..... 14
9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet 14

III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI DAN ZONA INTEGRITAS 15

IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI 25

V INFORMASI MENGENAI PUSDIK..... 27
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi..... 27
2. Sarana dan Prasarana..... 29
3. Fasilitas Ramah Disabilitas..... 32

BAB I
SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

   1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
   2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
   3) Memutus pembubaran partai politik
   4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :
- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan Universitas Gadjah Mada
S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :
- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua Ombudsman Makassar
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Karir :
- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962

Pendidikan :
- S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)

Karir :
- Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
Karir :
- Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
Karir :
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
Karir :
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	:	• Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Kupang, 15 Desember 1964
Pendidikan	:	S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990) S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995) S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
Karir	:	• Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya • Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis
Karir :
- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II
PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 adalah Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dengan para akademisi, yaitu MK mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi sedangkan para akademisi di lingkup universitas dapat menjadi pihak yang mendidik dan berpengaruh terhadap masa depan anak-anak bangsa. Dengan langkah ini diharapkan bangsa Indonesia dipenuhi oleh generasi muda yang memiliki budaya sadar berkonstitusi.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk peserta sebagai warga negara yang berkonstribusi dalam mendukung upaya pembangunan sosial, moral, dan akademik di Indonesia.

2. Tujuan Kegiatan

a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujuan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Nama Kegiatan

‘’Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 14 s.d. 17 September 2021 secara daring di kediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Selasa, 14 September 2021	15.00 – 16.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*
	17.45 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
KEDUA		
Rabu 15 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	07.30 – 09.30 WIB	**Sesi I :** **Konstitusi dan Konstitusionalisme** **Narasumber: Mahkamah Konstitusi**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*

	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II :** **Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945** **Narasumber: Mahkamah Konstitusi**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi III :** **Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945** **Narasumber: Mahkamah Konstitusi**
KETIGA		
Kamis, 16 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	07.30– 09.30 WIB	**Sesi IV :** **Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945** **Narasumber: Mahkamah Konstitusi**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffe break*
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi V :** **Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945** **Narasumber: Mahkamah Konstitusi**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi VI :** **Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945** **Narasumber: Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi**
	15.00 – 17.00 WIB	**Sesi Mandiri**
KEEMPAT		
Jumat, 17 September 2021	07.00 – 07.15 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	07.15 – 09.15 WIB	**Sesi VII:** **Sistem Informasi Perkara Elektronik** **Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi**
	09.15 – 09.30 WIB	*Coffe Break*
	09.30 – 11.30 WIB	**Sesi VIII:** **Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945** **Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi**
	11.30 – 13.00 WIB	ISHOMA

	13.00 – 13.30 WIB	*Post-Test* dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan
	13.30 – 15.30 WIB	**Penutupan:** 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan dari Peserta 4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	15.30 WIB	Selesai

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 400 (empat ratus) orang terdiri atas Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme; b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional; c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi; d. Perubahan Konstitusi.	2 x 60 menit
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-dasar Penyelenggaran Negara; c. Sistem Pemerintahan; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip *Check and Balances);* e. Otonomi Daerah.	2 x 60 menit
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM; b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional; c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM; e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; b. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; c. Ruang Lingkup Pengeritan Undang-Undang yang Diuji; d. Pengujian Formil dan Materiil: - Definisi dan Karakter Pengujian Formil & Materiil; e. Jenis Putusan: - Putusan Provisi dan Putusan Akhir; - Ultra Petita; - Sifat Putusan; - Pengambilan Putusan; - Isi Putusan; - Pendapat Berbeda; - Kekuatan Hukum Putusan; f. Aspek Umum dan Khusus Hukum Acara MK: - Permohonan; - Pendaftaran & Penjadwalan; - Permohonan *Online;* - Pembuktian; - Jenis dan Sifat Persidangan; g. Tata Cara Sidang & Tata Tertib Persidangan.	2 x 60 menit
5.	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: - Kewenangan MK; - Kedudukan Hukum; - Alasan Permohonan (Formil & Materiil); - Petitum; b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	2 x 60 menit
6.	Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Peserta Melakukan Praktik Menyusun Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.	4 x 60 menit
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara *Online*; b. Tata Cara Persidangan Jarak Jauh; c. Tata Cara Pembuktian dan Alat Bukti (Keterangan Saksi, Ahli & Para Pihak).	2 x 60 menit
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Peserta Melakukan Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Depan Kelas/Aula.	2 x 60 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan menggunakan metode dinamika kelompok dimana para pelaksana, pelatih, dan peserta pelatihan berkumpul di suatu ruangan untuk saling berkenalan, mengisi kuesioner (misalnya mengenai hal-hal yang disukai, tidak disukai, harapan, kekhawatiran, dll), membuat permainan, dst. Tujuannya

untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

   Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing,* dll.

3. Tahap Konsolidasi

   Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
b. Ketentuan e-sertifikat:

   Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

a. MK menanggung biaya penyelenggaraan yang meliputi narasumber serta bahan/materi kegiatan;
b. Biaya konsumsi, akomodasi, serta transportasi menjadi beban masing-masing peserta;
c. MK tidak memberikan uang saku kepada peserta;
d. MK tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

a. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.

b. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.

c. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting:*

1) Buka aplikasi *Zoom Meeting*
2) Klik tombol *Join a Meeting*
3) Masukkan *Meeting ID*
4) Masukkan nama sesuai format **(Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Instansi)**
5) Klik *Join*
6) Masukkan *Password Meeting*.

d. Peserta sudah dapat bergabung pada akses *link Zoom Meeting* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.

e. Peserta **wajib** mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

f. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.

g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.

h. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos)

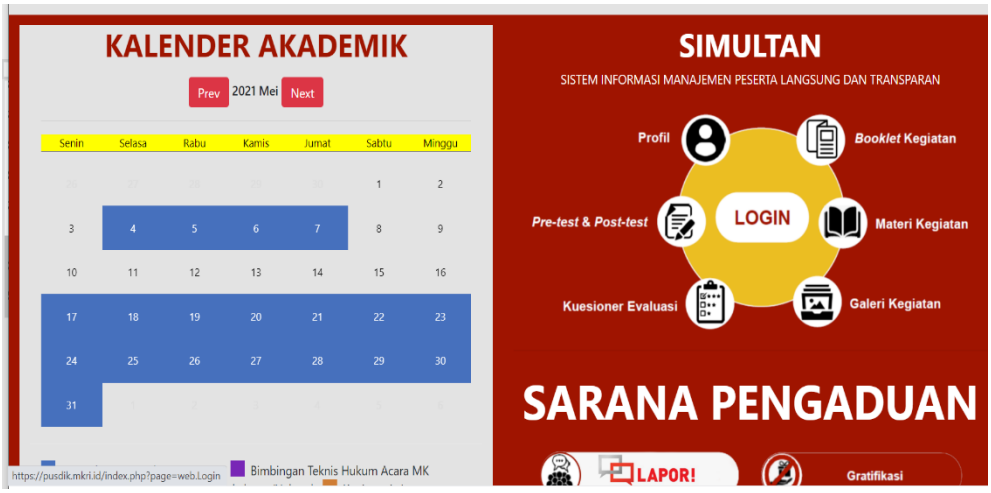
2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di bagian akhir kegitan) secara *online*;
4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.



2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik *TTD* di bagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



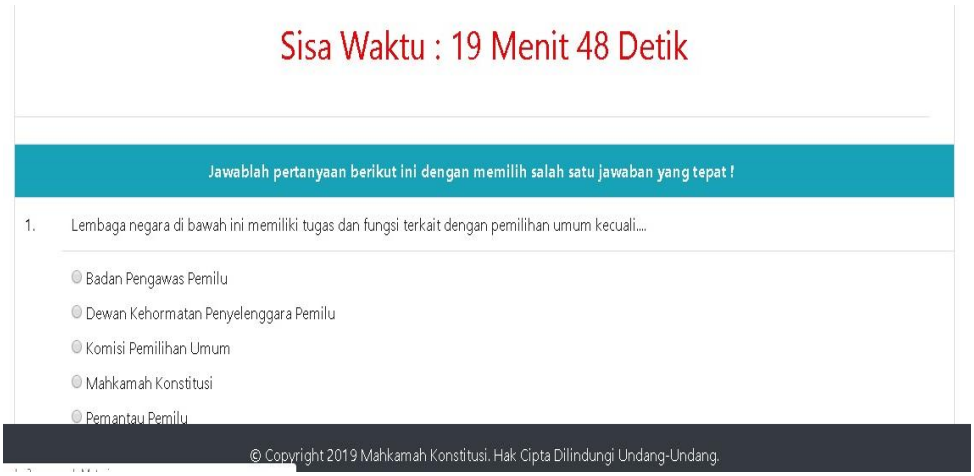
5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.



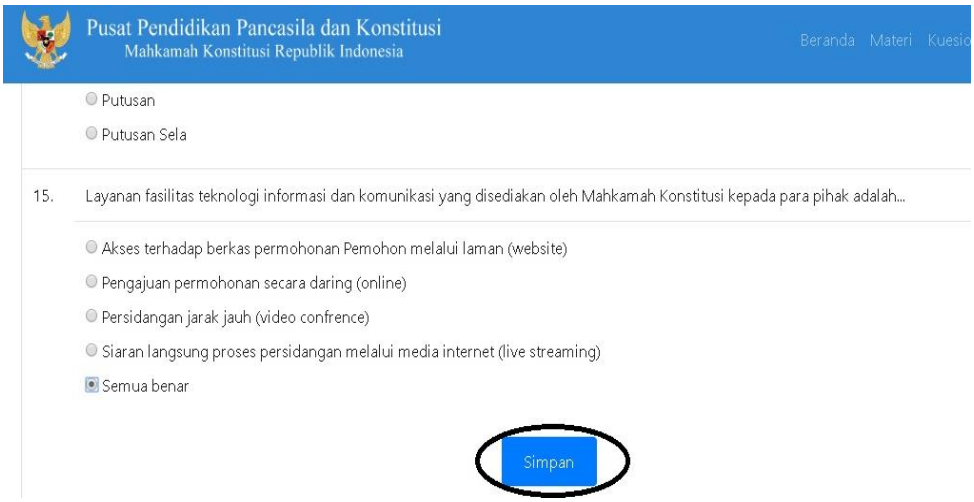
6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test, Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



7. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test,* pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



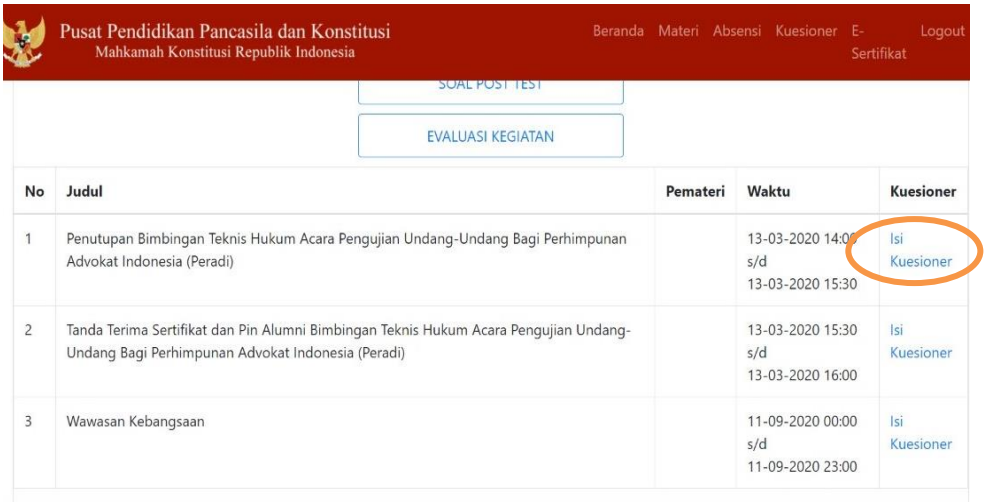
8. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test,* klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



9. Mengisi evaluasi kegiatan



10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

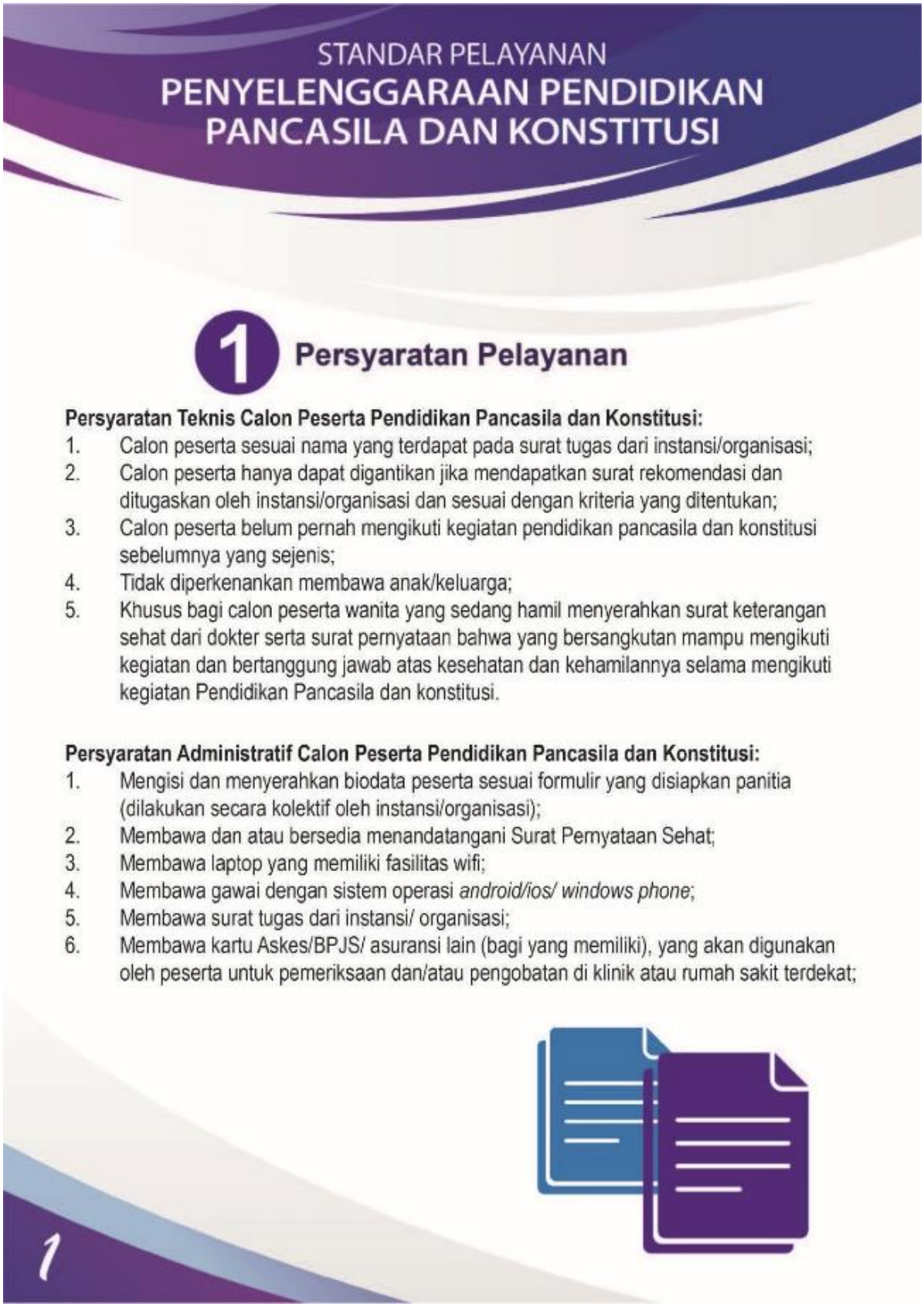
- Media *Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak daran dan pengaduan
- Media *Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan

adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:



STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV
HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

Hymne Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi
Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V
INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 18 (delapan belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5



Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6



Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla





Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MKTAMU**, *password*: **tamumkri**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Khusus Disabilitas;
2. *Elevator* (*Lift*);
3. Kamar Khusus Disabilitas; dan
4. Akses Jalur Khusus Disabilitas.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

- Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai
- *Username* menggunakan format:
  Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Instansi
  Contoh: 94_Maudy Ayunda_FH Maranatha
- Mengisi **daftar hadir** yang disediakan
- Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**
- Mengaktifkan kamera video ***Laptop/PC*** selama kegiatan berlangsung
- Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**

- Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**
- Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan ***headset, handsfree, earphone*** atau semacamnya
- Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**
- Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "***Raise Hand***"
- Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**

PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha

Selasa, 14 September 2021





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

"MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS"

www.mkri.id mahkamahkonstitusi officialMKRI Mahkamah Konstitusi RI



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.
BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS

Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

Peserta:

- Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

Narasumber:

- Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**



STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

TINGKAT KEPUASAN PESERTA PENDIDIKAN

SEMESTER 1 TAHUN 2021





UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO Gratifikasi

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



Kuesioner Online



Masukan dan Saran di Microsite

***Contact Center* Pusdik:**

0851-5792-9660

officialMKRI @officialMKRI @mahkamahkonstitusi Mahkamah Konstitusi RI www.mkri.id

Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Imam Margono
Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program dan Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)



Imam Margono
Kabag Umum



Ardiansyah Salim
Kasubid Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani
Kasubid Penyelenggaraan



Melati Kusuma W
Kasubag Tata Usaha



Bambang Sukmadi
Kasubag Sarana dan Prasarana

Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



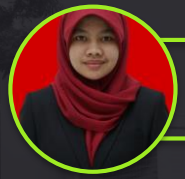
Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Ganggas Wibisono



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El Islamy



Angga Putri Gardina



Yahya Amrullah Taufik



Suhardi



Edwin Rivano



Bahan Materi dan Sertifikat

- **Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.**

- **Sertifikat:**
  - **E-Sertifikat** hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan **(kehadiran 100%)** dan yang **mengumpulkan tugas praktik** yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Pembiayaan

- Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- Biaya akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta.
- Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

- Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai
- *Username* menggunakan format:
  Nomor Registrasi_Nama Lengkap_Asal Daerah
  Contoh: 94_Maudi Ayunda_Kab. Bogor
- Mengisi **daftar hadir** yang disediakan
- Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet yang stabil**
- Mengaktifkan kamera video ***Laptop/PC*** selama kegiatan berlangsung
- Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**

- Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**
- Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan ***headset, handsfree, earphone*** atau semacamnya
- Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**
- Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "***Raise Hand***", atau:
- Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**

FASILITAS

Grha Konstitusi 1

- Rumah istirahat bagi para hakim, narasumber, dan tamu VIP
- Terdiri 12 ruangan





Grha Konstitusi 2

- Gedung kantor
- Poliklinik

Grha Konstitusi 3

- Aula (kapasitas 200 orang)
- 8 Ruang Kelas







Grha Konstitusi 4 dan 5

- Tempat istrahat untuk peserta





Grha Konstitusi 6

- Rumah jabatan bagi eselon 3 dan eselon 4



Grha Konstitusi 7

- Ruang makan peserta
- Mushola





Smoking Area

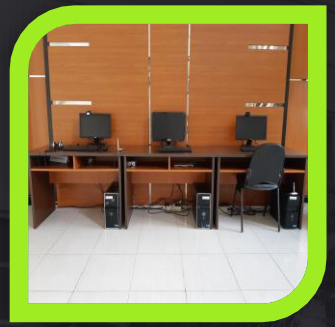






Fasilitas Lain

- ☑ Pojok Digital
- ☑ Alat Musik Band
- ☑ *Rooftop*
- ☑ Tennis Meja
- ☑ Akses Disabilitas
- ☑ *E-Kiosk*













Kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

- ☑ Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- ☑ Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi









Debat Konstitusi

Lomba debat antar mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia

Anugerah Konstitusi

Kompetisi antar guru PPKn seluruh Indonesia kerjasama Kemdikbud dan Kemenag

Desa Konstitusi

Pembinaan desa yang memiliki potensi menjadi desa sadar berkonstitusi

Halaqah Konstitusi

Sosialisasi tentang hak konstitusional warga negara bagi pengurus mesjid dan masyarakat sekitar





TERIMA KASIH

PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha

Selasa, 14 September 2021





KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan Oleh UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Pembubaran Partai Politik
- Memutus Perselisihan Hasil Tentang Pemilihan Umum
- Memberi Putusan Atas Dugaan DPR Bahwa Presiden / Wakil Presiden Melanggar UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

VISI
MAHKAMAH KONSTITUSI

“ Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya ”



MISI
MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.



FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- *The Guardian of The Constitution*
- *The Guardian of Democracy*
- *The Guardian of The State's Ideology*
- *The Protector of Human Rights*
- *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*
- *The Final Interpreter Of The Constitution*

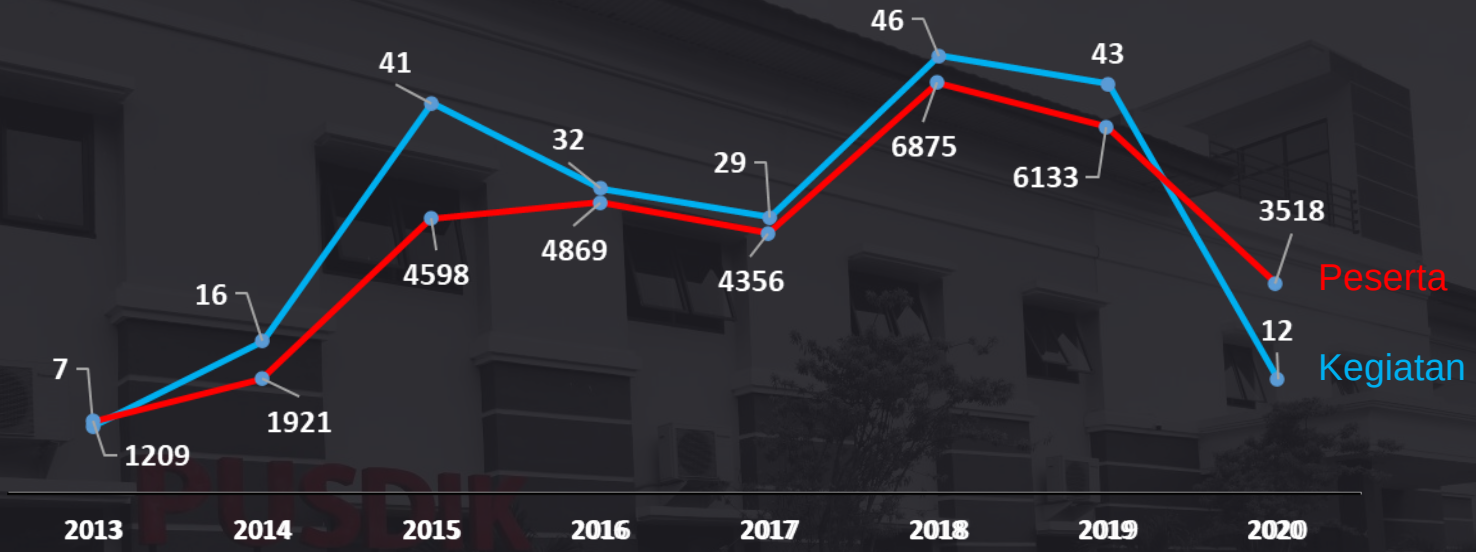




Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme
2. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
4. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik
8. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **23.385** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **30.756** orang



PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu : Selasa s.d. Jumat
14 s.d. 17 September 2021

- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 14 September 2021	15.00 – 15.30 WIB	Peserta *Sign In* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	15.30 – 16.00 WIB	Sholat Ashar
	16.00 – 17.00 WIB	Penjelasan Teknis
	17.00 – 17.45 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*
	17.45 – 18.30 WIB	ISHOMA
	18.30 – 20.30 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha 6. Ceramah Kunci dan membuka kegiatan oleh Ketua MK 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 15 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Konstitusi dan Konstitusionalisme **Narasumber: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 **Narasumber: Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.**
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi III: Jaminan Hak Konstitusional Warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 **Narasumber: Dr. Hesti Armiwulan, S.H.**
	15.30 WIB	Selesai lanjut di hari berikutnya

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 16 September 2021	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 **Narasumber: YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 **Narasumber: Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 **Narasumber: Panitera Pengganti MKRI**
	15.00 – 17.00 WIB	• Sesi Mandiri • Peserta Melanjutkan Penyusunan Tugas Mandiri Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 17 September 2021	07.00 – 07.15 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik **Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI**
	09.15 – 09.30 WIB	*Coffee Break*
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 **Narasumber: Peneliti MKRI**
	11.30 - 13.15 WIB	ISHOMA
	13.15 – 13.30 WIB	*Post test* & Evaluasi Kegiatan
	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars MK 3. Kesan & Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan dan sekaligus menutup acara oleh Wakil Ketua MK 6. Hymne MK 7. Pembacaan Doa



Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 400 orang yang terdiri dari sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓300 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber

Ketentuan Umum

- Acara dilaksanakan selama 4 hari.
- Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta mengisi presensi melalui sistem informasi peserta (SIMULTAN) *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**



Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**

Simultan
(Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

pusdik.mkri.id

- Registrasi dan Absensi
- *Pre Test* dan *Post Test*
- Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- *Softcopy* materi kegiatan
- e-Sertifikat





TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan ***Pre Test*** dan ***Post Test*** secara ***online dengan login sesuai ID peserta***



Evaluasi Narasumber dan kegiatan

Mengisi ***Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan*** (di akhir kegiatan) secara ***online***



Booklet & Bahan Paparan

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan



Daftar Hadir

Daftar hadir/absensi kami sediakan dalam bentuk digital

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

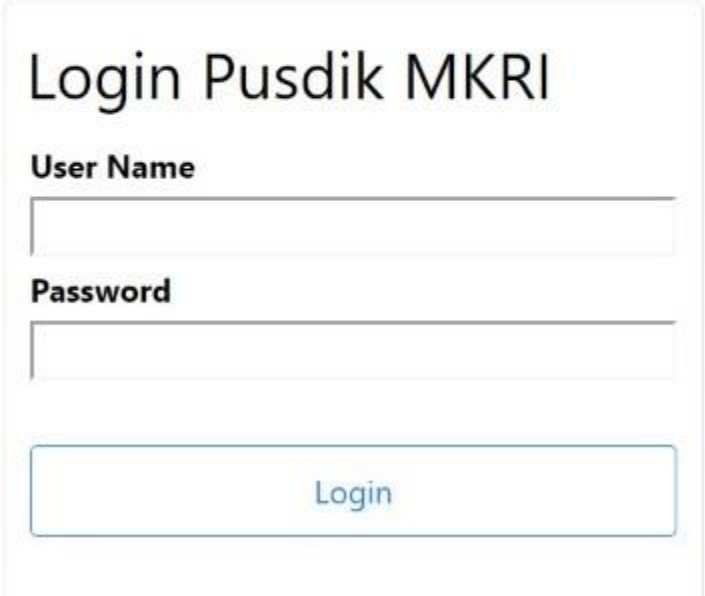


Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan Username dan Password



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Profil Peserta
PPHKWN



Nama Lengka	:	Dr. Kijiro

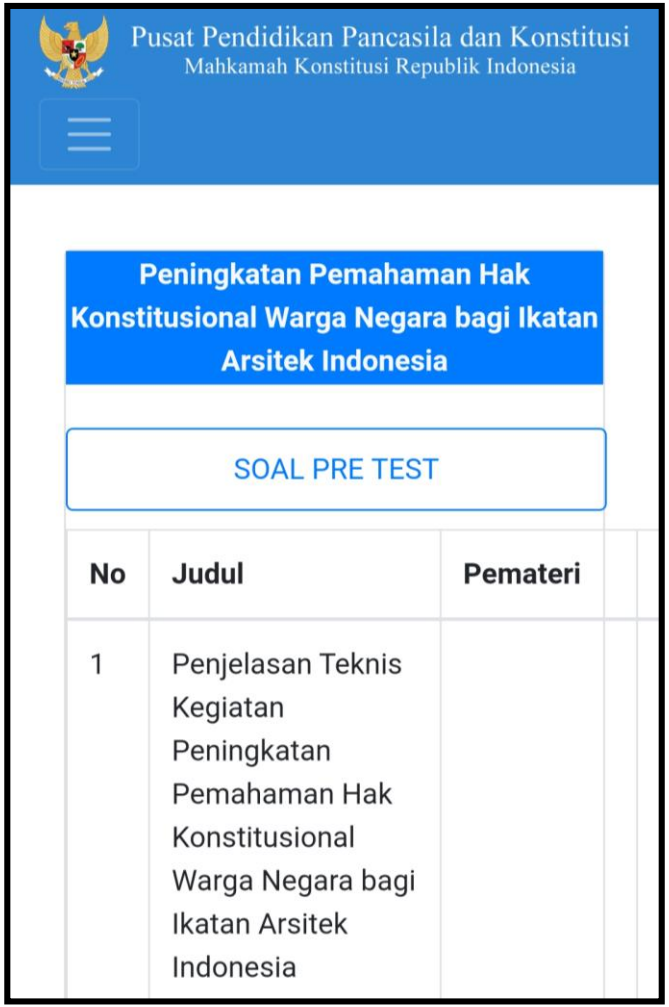
Profil Peserta

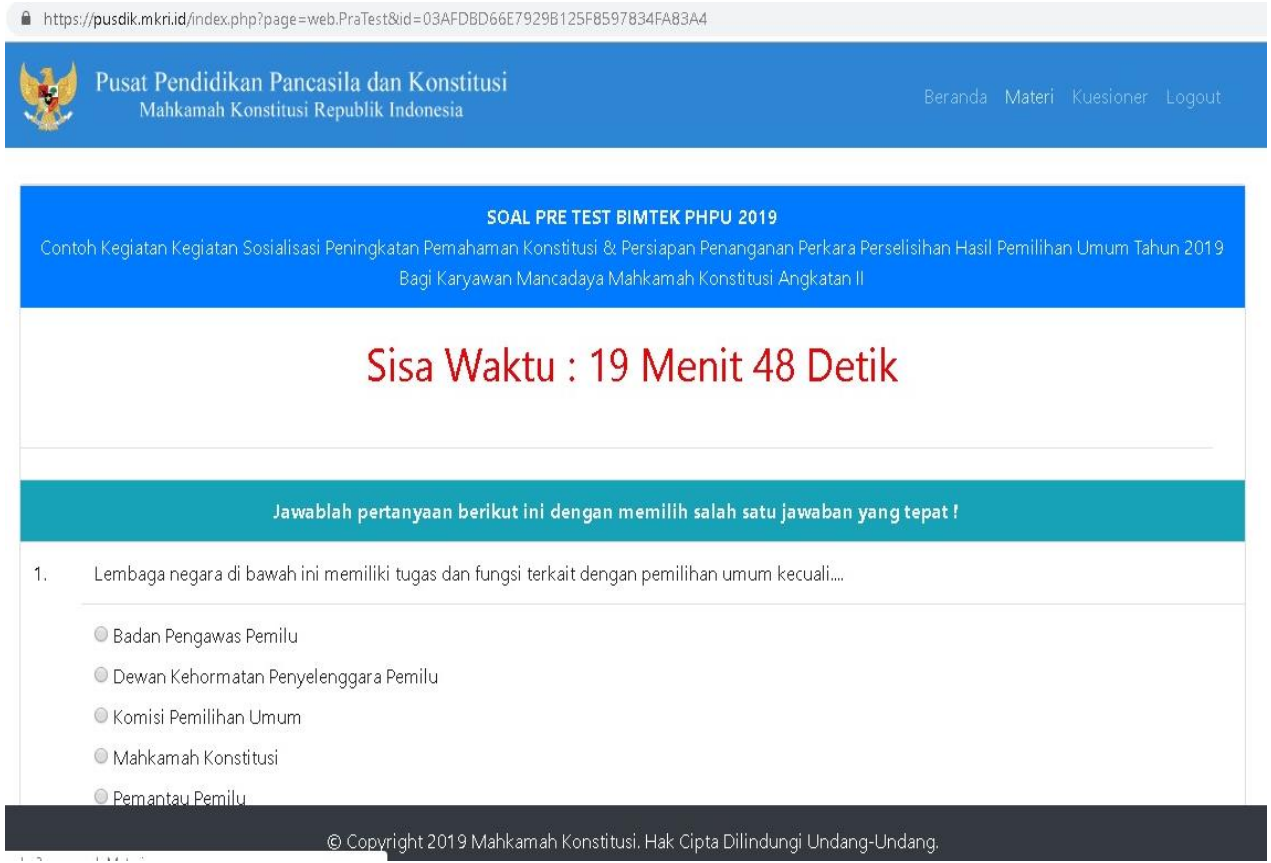
Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Klik pada tulisan

“SOAL PRE TEST”

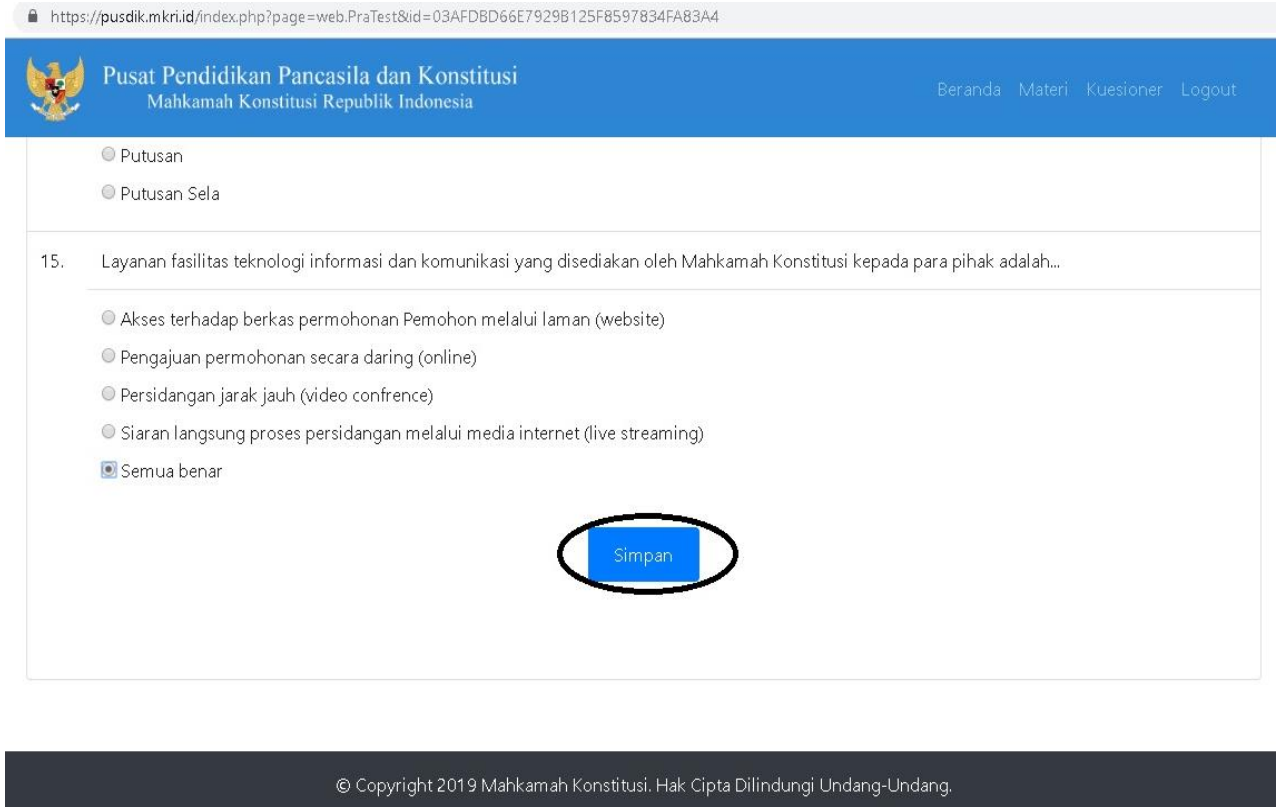




Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal ***Pre test*** dan ***Post test : 20 menit***



Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

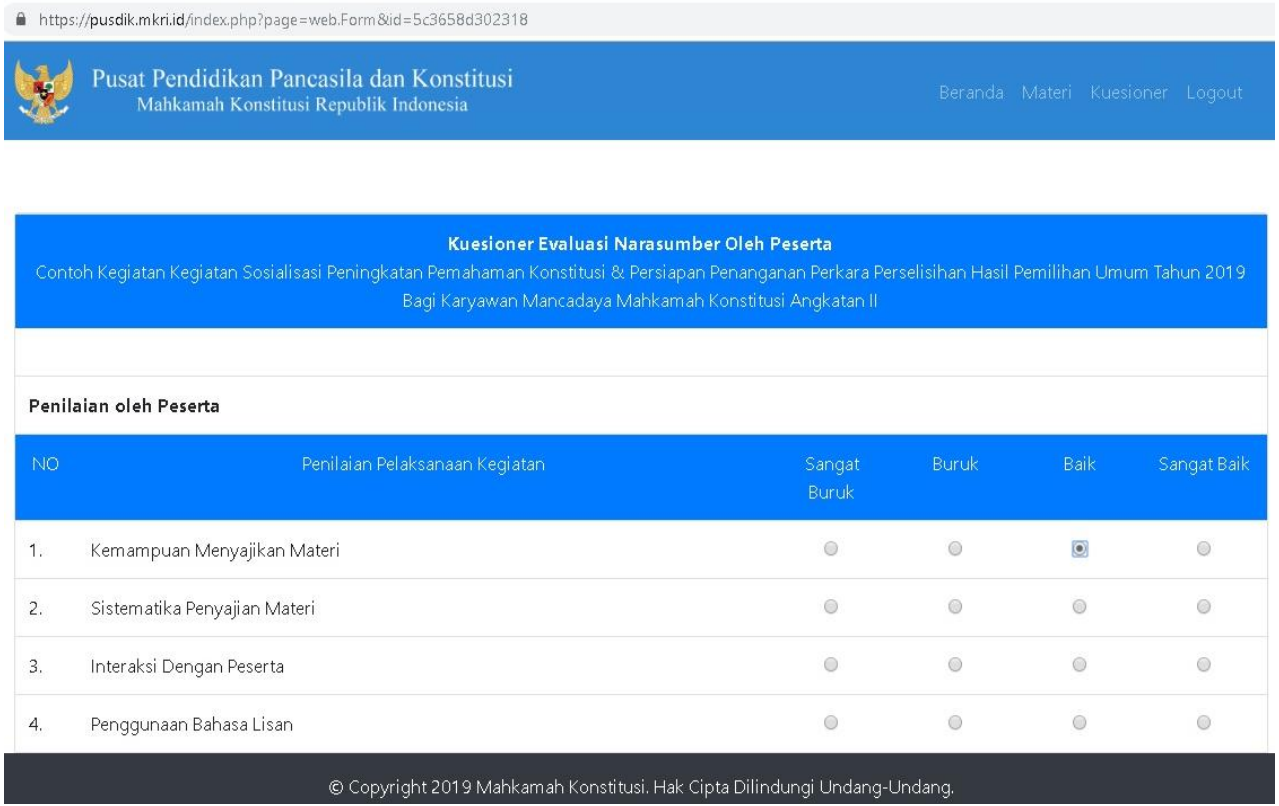


SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

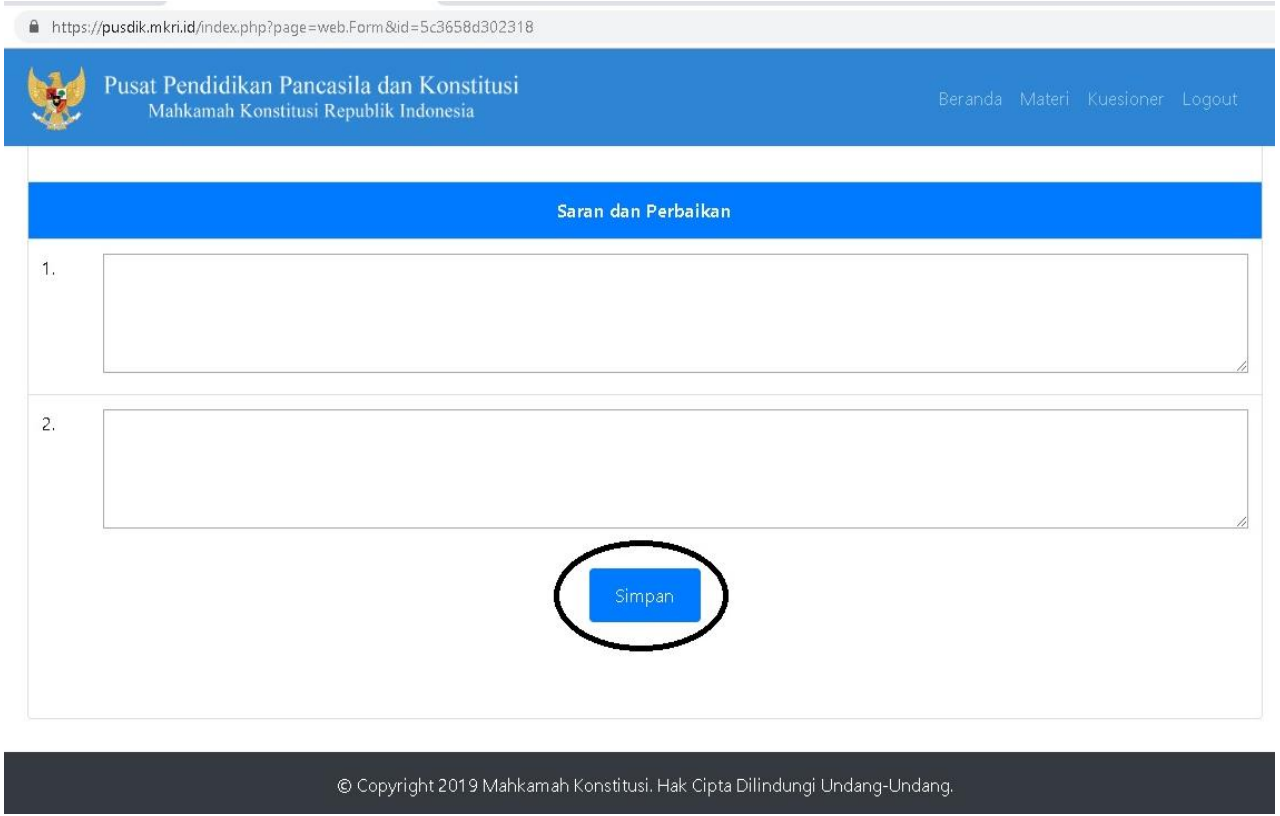
Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

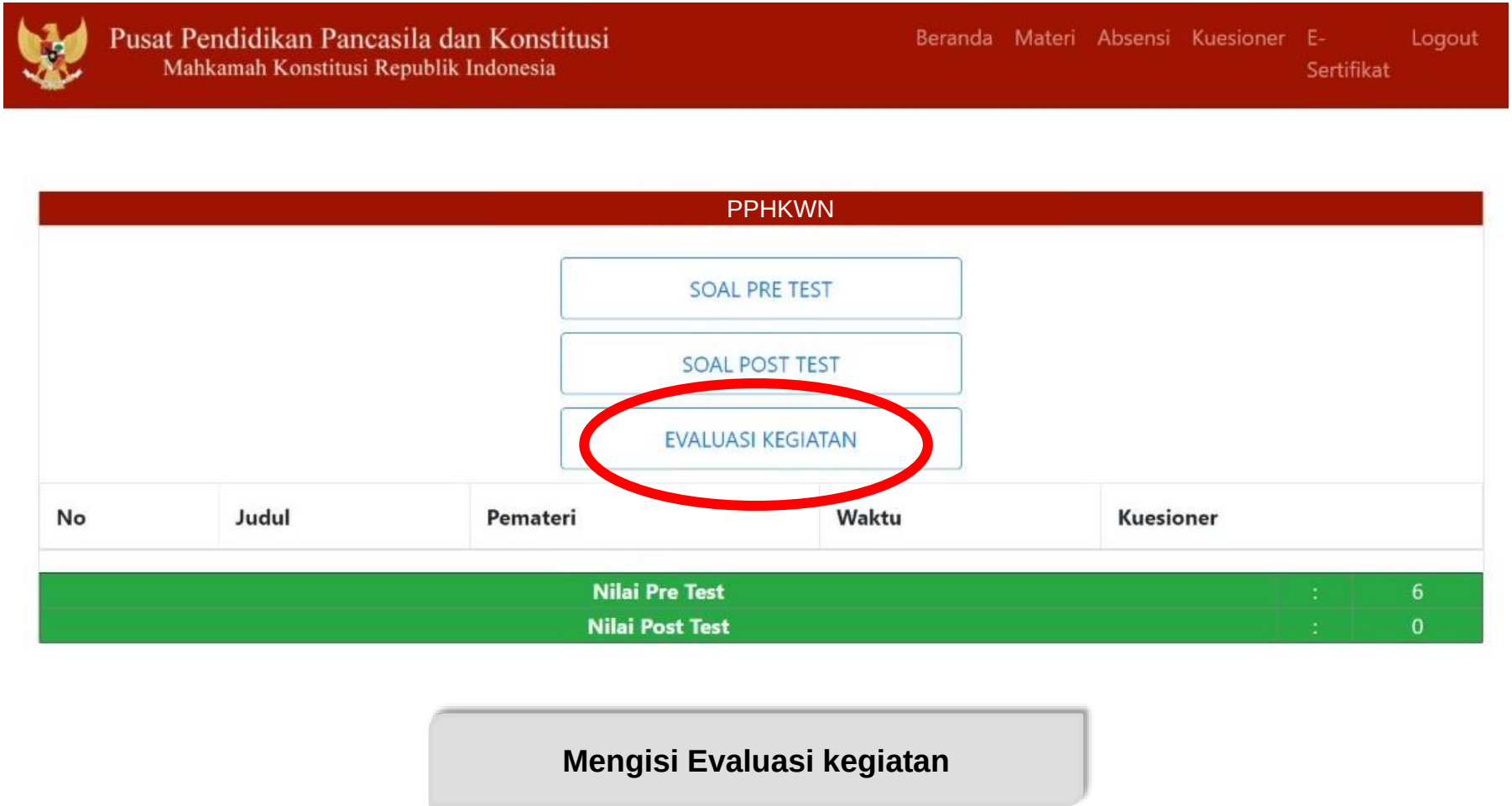
***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik "**simpan**"

***Seluruh penilaian wajib diisi**, **kecuali kolom saran dan perbaikan**


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Beranda
Materi
Absensi
Kuesioner
E-Sertifikat
Logout
PPHKWN
SOAL PRE TEST
SOAL POST TEST
EVALUASI KEGIATAN
No
Judul
Pemateri
Waktu
Kuesioner
Nilai Pre Test : 6
Nilai Post Test : 0
Mengisi Evaluasi kegiatan

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
PPHKWN

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	○	○	○	○
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	○	○	○	○
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	○	○	○	○

1.

2.

3.

Simpan

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

Klik Absensi dan TTD

*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar

Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi



TTD

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	Sudah Absen 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber

8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	File
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	File

Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagiam tulisan File

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan

1. Greetings
   a) Mengucapkan salam;
   b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
   c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
   d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
   e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
c) Perkenalan diri sebagai moderator;
d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
   - Jumlah Total Peserta;
   - Pembagian peserta online dan offline;
   - Asal daerah peserta;

C. Alokasi waktu

a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

a) Melalui fitur raise hand di zoom;
b) Melalui chat zoom;

E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;

G. Narasumber selesai memaparkan materi

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
   - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
   - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
   - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

H. Penutup

1. Menutup sesi materi:
   - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
   - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
   - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
   - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasikan untuk sesi berikutnya
   - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
   - Materi apa dan siapa pematerinya;
   - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
   - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

PANDUAN PETUGAS KELAS

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI

1. Greetings
   - Mengucapkan salam
   - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
   - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
   - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
   - Memperkenalkan diri
   - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
   - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI HASIL PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

A. SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.

b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.

c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama mengalami kendala teknis.

d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.

b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.

c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*share screen)*.

d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.

e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta dan menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*.

f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
   a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
   b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK_<Nama Lengkap>**

   Contoh: MK_Imam Margono
5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset*/*earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.

6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

A. SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.

b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.

b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.

c) Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen)* apabila diperlukan.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
   a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
   b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK_<Nama Lengkap>**

   Contoh: MK_Imam Margono
5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset*/*earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Berikan kesempatan yang seluas luasnya kepada peserta umum untuk bertanya Perbaikan untuk koneksinya
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada karena sudah baik sekali
3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	57	3.5625	- -
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	51	3.1875	Baik Sdh baik
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	saran semoga lebih semangat lagi saya kedepannya buat para pendengar tidak bosan
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	47	2.9375	
9	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	51	3.1875	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah cukup baik pelaksanaannya Materi semoga dapat dishare semua
13	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	60	3.75	- -
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada Tidak ada
15	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	53	3.3125	
16	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Sangat baik
18	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
19	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	55	3.4375	1. sudah mulai paham cara absensi dg TTD, walaupun masih sulit 2. pptx nya tidak ada ya, saya hanya melihat pembicara
20	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	Susah sangat baik
21	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	59	3.6875	Setiap 6 bulan sekali di adakan wabinar MK ini -
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
26	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Power point materi tolong ditampilkan
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
30	4	4	4	4	3	4	2	2	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3.5625	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
32	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	Sudah bagus
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
34	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
35	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	57	3.5625	Penyampaian materi oleh narasumber sangat luar biasa walaupun media ajarnya hanya disampaikan secara verbal. Akan lebih baik menyesuaikan dengan fasilitas yang digunakan, misalnya memanfaatkan fitur share screen untuk membagikan bahan ajarnya. Terima kasih.
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	dilanjutkan untuk civitas akademi PTS lain dan tidak perlu dibatasi hanya fakultas Hukum karena setiap warga negara PERLU MEMAHAMI Pancasila dan Kostitusi negara
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
46	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	55	3.4375	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	46	2.875	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SANGAT BAIK SANGAT BAIK
49	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	51	3.1875	Secara keseluruhan sudah cukup baik. Agar diperbaiki dalam variasi media pengajaran
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	akan lebih baik jika penjelasannya lebih singkat dan mudah dimengerti sudah cukup baik dalam penyampaian materi
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
55	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

57	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	54	3.375	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada. Prof Jimmly sudah sangat baik dalam penyampaian materinya
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sosialisasi yang kurang menggerakan mahasiswa sehingga banyak mahasiswa tidak tau dan tidak mengerti
61	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	53	3.3125	
62	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	2	3	53	3.3125	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup Cukup
65	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Baik Baik
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penjelasannya sangat jelas dan tepat sasaran.
68	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	50	3.125	baik, semoga lebih bagus kedepanmya
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Terimakasih Sangat baik
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Keren
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Semuanya sangat baik , materi dan pembawaan pembicara sangat baik
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
75	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	2	3	2	4	3	3	48	3	Semua materi yang disampaikannya sudah baik dan sangat membantu. Tidak ada komplain, tetap pertahankan cara menyampaikan materinya.
76	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
77	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	59	3.6875	
78	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	Waktu untuk dialog kurang Sering2,di jadikan Nara sumber
79	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	57	3.5625	Semuanya sudah bagus Sangat keren
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	lebih ditingkatkan lagi dalam menyampaikan presentasi
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
84	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	54	3.375	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
86	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
87	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61	3.8125	
88	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	57	3.5625	
89	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
90	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	56	3.5	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
94	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3.875	
95	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3.1875	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	50	3.125	
97	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	54	3.375	mungkin cara berbicaranya jangan terlalu cepat, agar kami dapat lebih mengerti mengenai materi yang digunakan.
98	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	60	3.75	
99	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	55	3.4375	Menurut saya, seminarnya sudah cukup baik dari materi yang di sampaikan, cukup di kembangkan cukup baik
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	51	3.1875	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Waktunya lebih lama lagi karena materi yang di sampaikan sangat jelas dan mudah dipahami
107	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	56	3.5	
108	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	54	3.375	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
112	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3.8125	Karena selama acara berlangsung saya rasa semua berjalan dengan lancar, walaupun diadakan secara online tetapi komunikasi antara narasumber dan peserta tetap berjalan baik.
113	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	Lebih konsisten lagi dengan waktu
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sungguh pemaparan yang luar biasa terima kasih Prof Sungguh sempurna
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah sangat Baik Sangat mudah dipahami

117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bafus Bagus
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
128	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	materi disampaikan secara tegas dan jelas, informasi dapat dicerna dengan baik. menyajikan ppt saja agar tidak abstrak
129	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
130	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
132	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	60	3.75	
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	Saran agar disediakan ppt materi, agar bagi yang terkendala sinyal bisa menyimak dari materi yang sudah di share.
135	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
136	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
138	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
139	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
140	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	55	3.4375	
141	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	59	3.6875	
142	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	56	3.5	
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	bagus
																RATA-RATA		**3.6**	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha
Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada karena sudah baik sekali
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Semoga materi dapat dishare seusai acara Webinar
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	59	3.6875	+ -
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
9	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57	3.5625	
10	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	56	3.5	
11	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	53	3.3125	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	62	3.875	Pemaparan materi tidak jelas Semoga bisa di tingkatkan kualitas pemaparan materinya
13	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	Sudah baik
14	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	61	3.8125	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Semangat selalu pak,, semoga kedepannya dapat lebih baik lagi,, terima kasih atas materinya Penjelasan dari materi yang diajarkan masih kurang saya pahami, dikarenakan suara yang putus putus dan bahan ajar yang kurang jelas alias kabur, terima kasih
16	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	59	3.6875	Sebenarnya bukan saran, tetapi saya berusaha untuk dapat mengerti materi, tetapi sangat sulit ya, karena saya sudah lama tidak mengenal hal hal yang berkaitan dengan hukum. Semua pemateri nya keren sih ...
17	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	54	3.375	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat Baik Sangat Baik
20	4	4	3	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	3	3	58	3.625	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik cukup
22	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47	2.9375	Secara keseluruhan sudah cukup baik dalam penyampaian materi nya. Intonasi suara agar diperbaiki.
23	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sempurna Sungguh sempurna dan mudah dipahami
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sinyal pembicara putus" jadi sedikit mengganggu
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3.5625	Mungkin narasumber ada sedikit kendala di input suara, sehingga di awal terdengar sedikit putus-putus. Selebihnya sangat baik termasuk pemaparan materi yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan.
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	63	3.9375	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	53	3.3125	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	Sudah bagus
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
46	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah sangat baik penyampaiannya Sangat mudah dipahami
49	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3.6875	
50	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	56	3.5	Terimakasih Berjalan sangat baik
51	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	58	3.625	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	52	3.25	
54	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	58	3.625	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	45	2.8125	jaringan pembicara lebih ditingkatkan lagi.
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	60	3.75	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	63	3.9375	
59	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	4	2	3	3	4	3	48	3	Semuanya sudah berjalan dengan baik. Saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu, terima kasih.
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup baik
64	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	Saran saya supaya pemberian materi melalui ppt tulisannya tidak terlalu kecil, agar peserta dapat melihat tulisannya dengan jelas sambil mengikuti penjelasan dari narasumber
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	62	3.875	disosialisasikan kepada seluruh universitas agar pemahaman pemuda terhadap konstitusi lebih baik seperti periode P4
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SANGAT BAIK SANGAT BAIK
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	informasi dapat diterima dengan baik dan jelas. interaktif dengan peserta seharusnya lebih ditingkatkan
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup Cukup
79	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
83	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	54	3.375	
84	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	54	3.375	Sudah cukup baik, tidak ada yang perlu di perbaiki karna saya sudah memahami materinya
85	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	56	3.5	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	cukup bagus tidak ada yg perlu diperbaiki sudah cukup baik
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	50	3.125	
88	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tidak ada tidak ada
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
93	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
95	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
97	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	59	3.6875	Dalam pengajian materi dan penjelasan sangat baik buat saya dan yang lainnya dalam mendapatkan wawasan yang lebih dalam lain. saran saya ke depannya terus seperti ini ke pada mahasiswa terlebih kepada mahasiswa hukum
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	3.125	
99	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	57	3.5625	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3.3125	bagus
102	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	54	3.375	Semoga bisa berjumpa kembali dilain waktu Terimakasih atas ilmunya
																RATA-RATA		**3.6**	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha
Dr. Hesti Armiwulan, S.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Berikan ruang yang seluas luasnya kepada peserta untuk menanggapi materi tersebut Perbaikan koneksi
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada karena sudah baik sekali
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	47	2.9375	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Semoga materi dapat dishare
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	53	3.3125	baik, semoga kedepannya lebih bagus lagi
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Kejelasan tampilan materi kurang jelas Semoga kedepannya dapat diperbaiki
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	lebih ditingkatkan lagi dalam menyampaikan informasi
13	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	54	3.375	
14	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	56	3.5	
15	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	51	3.1875	
16	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	61	3.8125	
17	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	52	3.25	Seminarnya sudah cukup baik tidak ada yang perlu di perbaiki hanya perlu di kembangkan
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	bagus nice
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Waktunya lebih lama lagi karena materi yang di sampaikan sangat jelas dan mudah dipahami
20	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	Konsisten waktu
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Sangat baik
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Baik Baik
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat mudah dipahami Pemateri sungguh luar biasa dalam menyampaikan pemaparan
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah cukup baik
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	56	3.5	
32	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	56	3.5	maaf ... saya kurang memahami materinya
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	Materi yang disampaikan mudah dimengerti Penyampaian sangat baik
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Suara pembicara putus"
36	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	51	3.1875	Secara keseluruhan sudah cukup baik dalam penyampaian materi. Perlu perbaikan dalam kualitas suara.
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	61	3.8125	Perlu dibuat variasi karena jam ngantuk
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
40	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
41	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
42	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	51	3.1875	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	47	2.9375	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	52	3.25	

60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3.9375	Materinya cukup komprehensif tetapi disampaikan dengan baik dan tidak tergesa-gesa, akan tetapi waktu untuk berdiskusi/tanya jawab menjadi berkurang karena pemaparan materi yang cukup panjang.
61	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
62	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	53	3.3125	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah bagus
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3.6875	Terimakasih baik sekali
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
69	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	54	3.375	
70	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
71	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	58	3.625	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
73	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
75	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	4	2	50	3.125	Materi-materi yang disampaikannya cukup menarik dan berguna bagi saya. Kekuarangannya adalah dari cara berbicaranya yang agak tegang dan tidak terlalu santai.
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
77	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	58	3.625	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	4	46	2.875	suara dari pembicara cukup mengganggu.
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
82	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	saran saya intonasi suara nya ditinggikan karena tidak kedengaran volumenya tidak kedengaran
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	seminar berjalan dengan baik dan sesi pertanyaan dijawab secara lengkap. terimakasih atas seminarnya semoga kedepannya dapat menyajikan ppt secara menarik
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
86	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	54	3.375	
87	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3.5625	- -
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
90	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	60	3.75	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
92	3	3	2	3	3	3	4	2	4	4	3	2	2	3	3	3	47	2.9375	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
94	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	54	3.375	
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Cukup Cukup
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
100	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	62	3.875	
101	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	50	3.125	
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada Tidak ada
105	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	53	3.3125	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	61	3.8125	
113	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	59	3.6875	
114	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	56	3.5	untuk materi yang berikan sangat baik terlebih bagi saya dan lainnya sehingga kita dapat memahami materi tersebut terlebih saya sebagai mahasiswa baru sedikit mengenal tetang materi ilmu hukum. saran saya untuk ke depannya kiranya dalam memberikan penjelasan lebih mudah di pahami sebagai kami mahasiswa baru dan juga kiranya Variasi media pengajaran yang digunakan lebih bervariasi terlebih sekarang yang di adakan secara online agar kami lebih bersemangat dan tidak mudah bosan.
115	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	55	3.4375	
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3.3125	bagus

118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
															RATA-RATA		3.6	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha
YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada karena sudah baik sekali
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tidak ada Tidak ada
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik Bagus pemaparannya, semoga dapat dishare seusai acara semua materinya
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Maunya sering sering dilakukan sangat baik sekali jika bahawasanya pengenalan hukum mengedepankan pelajar
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	sinyalnya harus lebih stabil lagi
7	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	52	3.25	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3.6875	Sudah bagus Mudah dipahami
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SANGAT BAIK SANGAT BAIK
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Baik Baik
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat Baik Sangat Baik
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	lebih baik lagi dalam menyampaikan materi
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	54	3.375	bagi saya yang orang awan sama sekali, sulit untuk menerima materi yang baik tapi cukup berat, maaf yaaa ...
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah sangat baik sekali
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Secara keseluruhan sudah cukup baik.
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
28	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	58	3.625	
29	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	57	3.5625	_ -
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	46	2.875	Kejelasan layar nya lebih diperbaiki -
34	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	52	3.25	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	Menurut saya Prof. Saldi sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik, beliau mampu meringkas penjelasan yang ada di bahan ajar, sehingga waktu yang digunakan cukup efektif dan sesi diskusi berjalan cukup panjang.
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	62	3.875	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada Tidak ada
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	50	3.125	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	50	3.125	Cukup Cukup
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
49	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	
50	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	56	3.5	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	60	3.75	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	60	3.75	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik tidak ada
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
56	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	48	3	Materinya cukup menarik dan bermanfaat bagi saya. Untuk kekurangan, menurut saya pribadi tidak ada. Maka dari itu, tolong tetap pertahankan cara penyampaian materinya. Saya ucapakan terima kasih.
57	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	sudah bagus
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
64	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Menurut saya seminarnya sudah cukup baik, namun saya kurang memahami materinya karna masih baru sudah cukup baik
65	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	59	3.6875	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	suaranya kurang kedengaran penyajian prof sudah baik tapi suaranya kurang kedengaran
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik jika kegiatan ini dibangun seperti pelaksanaan Penataran P4 zaman Orde Baru keseluruh siswa SMU/sederajat dan perguruan tinggi dan menjadi komponen penilaian kelulusan untuk meminamilisisr pemahaman radikal dan kecintaan menjaga konstitusi
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
71	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	60	3.75	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
73	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	56	3.5	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
75	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	59	3.6875	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
80	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58	3.625	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	3.125	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	penyampain dilakukan dengan jelas dan menarik menyediakan acara ice breaking agar tidak mengantuk
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	cukup cukup
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	50	3.125	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
90	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	tidak ada tidak ada
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
93	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
95	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	60	3.75	
96	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	55	3.4375	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	3.125	bagus
99	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	53	3.3125	Terimakasih atas ilmunya Semoga bisa mengikuti lain waktu
																RATA-RATA		**3.7**	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha
Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Berikan akses yang seluas luasnya kepada peserta untuk penyajian materi tersebut Perbaikan koneksi
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada karena sudah baik sekali
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tidak ada Tidak ada
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus pemaparannya Mohon materi dapat dishare
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	43	2.6875	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Waktunya lebih lama lagi karena materi yang di sampaikan sangat jelas dan mudah dipahami
10	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	56	3.5	baik tidak ada
11	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
12	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	48	3	Semoga sinyalnya bisa lebih baik lagi, tapi udah bagus kok
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Terima kasih sangat bermanfaat
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	59	3.6875	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
22	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Baik Baik
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik tidak ada
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah sangat Bajk Materi yang disampaikan mudah dimengerti
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	49	3.0625	sepertinya sama dengan terdahulu ... mungkin cara penyampaian mrk orang orang hukum seperti itu ya ... nggak apa apa, sy baru sedikit terbiasa belajar hukum seperti itu Terimakasih saya jadi belajar banyak .... sekali lagi terimaksih ...
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah cukup baik
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
34	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	60	3.75	Seminarnya sudah cukup baik materi yang di ajarin saya sudah mengerti dan tidak perlu di perbaikin, sudah cukup baik
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	55	3.4375	Secara keseluruhan sudah cukup baik dalam penyampaian materi pembelajaran nya.
38	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	Sudah bagus
39	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	58	3.625	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat Baik Sangat Baik
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah sangat baik dan penjelasan mudah dipahami
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	63	3.9375	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
49	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	60	3.75	Penyampaian dari narasumber sangat baik dan mudah dipahami, akan tetapi suaranya sedikit tertahan karena narasumber menggunakan masker.
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3.3125	
51	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	50	3.125	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	
58	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	

59	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	sudah cukup baik tidak ada yg perlu diperbaiki saya suka dalam penyampaiannya
60	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	42	2.625	jangan terlalu cepat menjelaskan materinya.
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	62	3.875	
67	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	4	2	3	3	2	48	3	Sama seperti sebelumnya, materi yang disampaikannya singkat, padat, dan jelas. Itu tentunya sangat membantu saya dalam memahami materinya. Kekurangannya tidak ada, jadi tetap pertahankan seperti itu.
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
69	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	59	3.6875	- -
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
71	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	55	3.4375	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
74	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
76	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3.5	
77	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	58	3.625	
78	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
81	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57	3.5625	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	penyampaian materi dilakukan secara baik penambahan ice breaking agar participants seminar tidak mengantuk
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
84	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	53	3.3125	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	cukup cukup
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	50	3.125	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
91	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	53	3.3125	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
93	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	58	3.625	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	63	3.9375	
95	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	61	3.8125	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3.6875	bagus
																RATA-RATA		**3.6**	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada karena sudah baik sekali
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SANGAT BAIK SANGAT BAIK
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
9	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	57	3.5625	Cukup baik Cukup
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Baik Baik
13	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	Sudah baik
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah cukup baik
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat Baik Sangat Baik
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	56	3.5	Bu Wilma sangat sabar membimbing saya
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara keseluruhan sudah cukup baik dalam penyampaian materi pembelajaran nya.
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49	3.0625	
31	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	54	3.375	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	60	3.75	Bapak Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. menyampaikannya dengan baik dan cukup rinci sehingga mudah dipahami peserta.
33	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	jangan terlalu cepat dalam menyampaikan materi terlalu cepat dalam menyampaikan materi
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
36	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
37	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	_ _
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	sedih otak aku belum nyampe ke materi nya pa,bu:(
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
49	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	53	3.3125	Materinya mudah dimengerti. Terima kasih. Saya sangat terbantu dengan apa yang sudah disampaikan.
50	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	56	3.5	Seminar nya sudah cukup baik dalam menyampaikan materi dan menjawab pertanyaannya sudah cukup baik
51	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	3.125	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	lebih baik lagi dalam menerangkan materi
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	penyampaian teknis pengisian surat permohonandisampaikan secara baik interaktif secara participants kurang harusnya ditingkatkan
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sering sering mengadakan Seminar atau acara lagi Tidak ada
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
71	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	60	3.75	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik penyampaiannya Cukup
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	cukup cukup
76	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	54	3.375	
77	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	56	3.5	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	50	3.125	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
80	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	62	3.875	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Baik Sudah sangat Baik
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	tidak ada tidak ada
87	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3.25	
88	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	55	3.4375	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
93	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	57	3.5625	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3.3125	bagus
98	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	55	3.4375	
																RATA-RATA		**3.6**	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Berikan akses yang seluas luasnya kepada peserta untuk bertanya Perbaikan koneksi
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada karena sudah baik sekali
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tdk ada Tdk ada
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus pemaparannya Luar biasa
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Uraian materi hak nya perlu pendalaman
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Waktunya lebih lama lagi karena materi yang di sampaikan sangat jelas dan mudah dipahami
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SANGAT BAIK SANGAT BAIK
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Terimakasih sudah sangat baik
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	53	3.3125	Seminarnya sudah cukup baik menurut saya tidak ada yang perlu di perbaiki lagi
22	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	62	3.875	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
24	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
25	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	59	3.6875	- -
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	52	3.25	Secara keseluruhan sesi ini baik
28	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	52	3.25	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat Baik Sangat Baik
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah baik
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3.3125	
32	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	60	3.75	
33	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	60	3.75	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik baik
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara keseluruhan sudah cukup baik dalam penyampaian materi pembelajaran nya.
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
50	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
52	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	Sudah bagus
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	cukup baik baik
56	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
57	3	3	4	2	3	3	2	3	3	4	3	3	2	3	3	4	48	3	Materinya bagus dan menarik. Saya ucapkan terima kasih atas ilmunya. Kekurangannya ada di cara berbicaranya yang terasa sedikit tegang dan tidak terlalu santai.
58	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	58	3.625	
59	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
60	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	45	2.8125	kurang menarik dalam berbicara
63	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	58	3.625	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
65	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	56	3.5	
66	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	60	3.75	
67	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
68	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
71	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
80	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	56	3.5	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	webinar terlalu kepagian selebihnya informasi dijelaskan secara baik
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Penyampaian sangat mudah dipahami Sudah sangat baik
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	50	3.125	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
86	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	55	3.4375	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3.9375	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
90	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3.3125	bagus
94	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	54	3.375	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.6**	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha
Peneliti Mahkamah Konstitusi

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tidak ada karena sudah baik sekali
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SANGAT BAIK SANGAT BAIK
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus materi dan penyampaiannya Cukup
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
11	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
12	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	54	3.375	Pada sesi ini sudah cukup baik dalam penyampaian Materinya sudah cukup baik tidak perlu di perbaikin
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	49	3.0625	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	50	3.125	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
22	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	tidak ada
23	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah baik
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Secara keseluruhan sudah cukup baik dalam penyampaian materi pembelajaran nya.
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	bagi saya berbicaranya sangat cepat, sulit di tangkap untuk telinga saya yang orang awam
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat Baik Sangat Baik
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	Penyampaian evaluasi dan koreksi oleh Peneliti MK sangat mudah dipahami dan interaksinya cukup baik, hanya saja kebanyakan peserta kurang responsif.
47	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3.25	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat baik pemaparannya Cukup
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3.9375	
50	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	59	3.6875	
51	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	58	3.625	Sudah baik secara penyampaian materi serta memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, izin memberi saran mungkin tinggal segi pendekatan kepada para peserta saling perkenalan terlebih dahulu di awal agar lebih enak dalam waktu diskusi, dan saat diberi sesi pertanyaan para peserta akan lebih banyak yg aktif untuk bertanya lagi 🙌.
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	51	3.1875	Terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikannya. Untuk kekurangannya tidak ada.
54	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	57	3.5625	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	48	3	tidak ada karena penjelasannya sudah jelas
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	52	3.25	baik cukup
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
59	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	

60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
61	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	51	3.1875	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sudah sangat baik
63	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	53	3.3125	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	52	3.25	
67	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	62	3.875	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
70	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
71	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
73	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	54	3.375	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	penyampaian dilakukan secara interaktif oleh participant dan panitia webinar mengadakan acara ice breaking time
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3.3125	bagus
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.6**	

NO.	Kesesuaian materi dengan mata ajar	Materi informatif dan bermanfaat	Materi mudah dipahami	Alokasi waktu materi sesuai	Materi menyajikan isu yang problematik	Materi meningkatkan keterampilan analisis	Materi yang paling menarik	SUM	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	Narasumber mampu menginterpretasikan materi dan mutakhir	Narasumber menjawab pertanyaan secara komprehensif	Moderator memandu sesuai dengan baik	Narasumber kompeten dan kredibel	Narasumber yang paling menarik	Moderator yang paling menarik	SUM	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	Informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsoft pusdik	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	Kualitas audio dan video baik	Tayangan video visual baik	SUM	Layanan TI sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	SUM	YOY	RATARATA	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	YM Hakim Konstitusi - Prof. Saldi Isra		30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
2	3	3	3	3	3	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	19	3	3	3	3	4	YM Hakim Konstitusi - Prof. Saldi Isra		16	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	79	3.6	
3	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H		28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
4	3	4	3	4	3	3	Sistem Informasi Perkara Elektronik	20	3	4	4	4	4	Ishak Purnama	semua cobar n sangat cekap (median(	19	3	4	3	3	3	3	3	22	3	3	3	4	13	74	3.4	baik , belum ada saya kurang PD untuk mengisi post test
5	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Heni Adhani, S.H., M.H.	Mba Santhy	30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
6	4	4	4	3	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD Nkri Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H	Bapak Soebekti	30	4	4	4	3	4	4	3	26	4	4	4	4	16	85	3.9	
7	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H		30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
8	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H	Suhardi	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Gungguh acara ini sangat bermanfaat untuk saya yang tidak memahami hukum Terus maju berkarya MK Terima kasih MK
9	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Kak Ganggas Wibisono	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
10	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Heni adhani S.H, M.H	30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
11	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Heni Adhani, S.H., M.H.	Ganggas Wibisono	20	3	3	4	4	4	3	3	29	4	4	4	4	16	84	3.8	
12	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H		28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Terimaksih Sangat baik sekali ingin merasakan seminar secara offline
13	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	18	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H		20	4	4	4	4	4	4	2	26	4	4	4	4	16	90	3.6	dilanjutkan keseturuh civitas akademi terutama para Siswa SMU/Sederajat, Mahasiswa Tahap Akhir S1/S2 agar PAHAM terhadap Konstitusi Negara dan Hak Kewarganegaraannya dan dijadikan tersndiri sehingga terbentuk masyarakat sadar konstitusi
14	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H	Semua	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Sudah sangat baik
15	3	3	3	4	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	30	3	4	3	3	4	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Abdul Ghoffar	17	4	3	4	3	4	3	3	24	3	3	4	4	14	71	3.4	lebih baik lagi kedepannya lebih menarik agar tidak bosan dan ngantuk overall keren dan bagus
16	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum	Ibu Santhy	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	saran akan lebih baik bila banyak kelas dibreak out room agar lebih seru karena adanya sesi diskusi.
17	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Ganggas wibisono	30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Untuk mahasiswa baru terlalu berat jadi pasti anak anaknya kebingungan
18	4	4	3	3	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	22	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H	pemaparp menarik	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	86	3.9	sudah bagus --
19	4	4	4	3	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	23	4	3	4	3	3	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H	Suhardi	17	3	4	4	3	4	4	4	26	4	3	4	4	15	81	3.7	Secara keseluruhan sudah cukup baik dalam kegiatan ini. Agar kegiatan serupa untuk disebkan lagi kedepan nya. Guna menambah wawasan tentang pemahaman konstitusi dan hak warga negara. Terima kasih untuk semua panitia kegiatan. Dan semoga ke depannya lebih sukses dalam menyelenggarakan kegiatan serupa.
20	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H	Semua menarik dan panda membawakan acara dan membagi waktu 👍👍👍	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Sudah cukup baik pelaksanannya Mas sebaiknya dishare secara keseluruhan dalam bentuk Google Drive utk memudahkan peserta mendownload. Jadi tidak terpisah - pisah
21	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H	Ganggas Wibisono	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
22	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H	hadian	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
23	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H		20	1	1	2	4	4	4	4	20	1	4	4	4	13	77	3.5	
24	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum	Pak Hadian	20	3	4	4	4	3	4	3	25	3	4	4	4	15	84	3.8	tidak ada tidak ada tidak ada
25	4	4	3	3	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD Nkri Tahun 1945	22	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H		30	3	3	4	4	3	3	3	33	3	4	4	4	15	80	3.6	
26	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	3	4	YM Hakim Konstitusi - Prof. Saldi Isra	Nanda Adytianoyah	19	4	4	4	4	4	3	3	26	4	4	4	4	16	85	3.9	rangkaian acara yang dilakukan sudah sangat baik, baik dari segi materi, penyajian, moderartor hingga narasumber. acara seperti ini bisa terus dilakukan untuk memberikan pengetahuan serta praktik kepada civitas akademik
27	4	4	3	4	3	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Nkri Tahun 1945	22	4	4	4	4	4	YM Hakim Konstitusi - Prof. Saldi Isra	Nanda Adytianoyah	20	3	3	4	4	3	4	4	26	4	4	4	4	16	84	3.8	Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung untuk meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat.
28	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD Nkri Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H		30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	

29	4	4	4	4	3	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H	Yehya Amarullah Taufik	20	3	3	4	3	3	4	4	24	3	4	3	4	16	61	3.7	Sistem pendaftaran rumit.. bisa disederhanakan lg ---
30	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.		30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
31	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H	Hariska Akhalfa	30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	sudah baik sudah baik sudah baik
32	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	FM Hakim Konstitusi - Prof. Saldi Isra	Sesi 8	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
33	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H	Suhardi	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Media yang dipilih lebih menarik. Semua waktu lebih dipersingkat Materi lebih singkat, padat, dan jelas
34	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
35	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Andriansi Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H	Suhardi	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
36	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum		30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
37	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum	Suhardi	30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
38	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Andriansi Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H	Pak Suhardi	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
39	2	2	2	2	2	2	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	12	4	4	4	4	4	Andriansi Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H		30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	76	3.5	Sangat bermanasfaat sekali acara dan menambah wawasan yang lebuh spesifik mengenai materi" yang telah pembicara berika
40	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H		30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
41	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	tidak ada	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	sangat baik sangat baik sangat baik
42	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H	Gieggas Wibisono	20	4	3	4	4	3	4	4	26	4	4	4	4	16	86	3.9	
43	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.		30	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
44	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Baik-baik ibaik
45	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Secara keseluruhan sudah sangat baik
46	3	4	2	3	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	20	3	3	3	2	3	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Yehya Amarullah Taufik	14	3	3	2	2	3	2	2	18	4	3	3	4	14	64	3.0	moderator harus lebih jelas dalam menyampaikan pertanyaan moderator mengurangi candaan yang kurang menarik waktu istirohat nya terlalu singkat. minimal 1 1/2 jam.
47	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Dr. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum	Menurut saya cukup menarik semuanya	28	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	sudah sangat baik semuanya
48	3	4	3	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	21	4	3	3	3	3	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Yehya Amarullah Taufik	16	3	3	3	3	3	3	3	21	3	4	4	4	15	73	3.3	
49	3	4	3	3	3	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	19	4	3	4	3	3	Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Gieggas Wibisono	17	4	3	2	4	3	4	3	24	3	3	3	4	13	73	3.3	
50	3	4	2	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	4	3	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H	Apk yang berada di Kelompok yang sela sibar saat berbicara terus menerus tanpa ada yang mau bertanya. "cupa semangat	26	4	4	4	4	4	3	3	26	4	4	4	4	16	76	3.5	
51	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	18	3	3	3	3	3	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Olafid Sugianto	15	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	1	10	64	2.9	belum ada belum ada belum ada
52	4	4	4	4	4	4	Penjelacan Teknis	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
53	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
54	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H	Yehya Amarullah Taufik	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
55	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H	semua menarik dan bagus	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	sudah sangat bagus dan mengedukasi bisa diadakan offline bagus
56	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Yehya Amarullah Taufik	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	waktu istirahat yang terlalu sepat jam mulai webinar terlalu pagi bakcsoundnya dan sound effect kurang menarik
57	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Yehya Amarullah Taufik	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	-
58	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Yehya Amarullah Taufik	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	waktu webinar terlalu lama webinar dilakukan terlalu pagi webinar dilakukan kurang interaktif antara participants dibutuhkan ice breaking
59	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H	semua	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
60	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum	-	15	2	2	3	3	3	3	3	19	4	4	4	4	16	68	3.1	
61	4	4	4	4	4	4	Penutupan Kegiatan	24	4	4	4	4	4	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	tidak ada	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	

62	4	4	4	3	4	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	22	4	3	4	3	4	Dr. Merdian Wibowo, S.H., M.Si.		18	4	3	3	4	4	3	3	19	4	4	4	4	16	80	3.6	
63	3	4	3	4	3	4	Sistem Informasi Perkara Elektronik	21	4	4	4	4	4	Mizanur Alexander Manik		20	3	4	4	4	3	4	4	26	4	4	4	4	16	83	3.8	
64	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Yahya Amarullah Taufik	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Istirahatnya kurang
65	4	4	4	4	4	4	Pembukaan Kegiatan	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Sangat baik Cukup Cukup
66	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Hakim Konstitusi - Prof. Saldi Isra		20	4	3	3	4	4	3	3	24	3	3	4	4	14	82	3.7	
67	4	4	3	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	22	4	4	4	4	4	Dr. Jimmy Z. Usfunan	Yahya Amrullah Taufik	20	4	4	4	4	3	4	4	27	4	4	4	4	16	85	3.9	Semoga lebih mantap lagi ke depannya Semangat selalu, jangan lupa undang-u selalu,, terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat Saya banyak belajar dari kegiatan ini,, semoga saya bisa menjadi advokat suatu saat nanti, saya yakin saya mampu, terima kasih sekali
68	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Intan Permata Putri, S.H., M.H	ashalin riadi	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	sangat mengedukasi
69	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H	semua moderato r	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Menurut saya, sudah bagus dan materi yang di sampaikan sehingga mudah di pahami
70	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	4	4	4	4	4	Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	MC_Gangg as Wibosono	20	3	3	4	4	4	4	4	26	4	4	4	4	16	90	3.6	Sangat bagus, mudah-mudahan sering diadakan acara/seminar seperti ini lagi Kuesioner Evaluasi Kegiatan sangat buruk, pelayanan bahkan tidak menyediakan jalan keluar alternatif. Au dan Mic juga harus diperbaiki Sekian dri saya.
71	4	4	4	4	4	4	Sistem Informasi Perkara Elektronik	24	4	4	4	4	4	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Chafid	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Materi diharapkan lebih ringkas Efisien waktu dipertahankan Materi diharapkan lebih singkat
72	4	3	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	23	4	3	4	4	4	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.		19	3	4	4	4	3	3	3	24	3	4	3	4	14	80	3.6	
73	4	4	4	3	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Hakim Konstitusi - Prof. Saldi Isra	Herlika	20	4	4	4	4	4	3	3	26	4	4	4	4	16	85	3.9	Bagusss kegiatan ini memberikan banyak pelajaran yg bermanfaat Tapi Audio nya kurang kedengaran
Rata	3.81	3.88	3.73	3.75	3.81	3.86			3.90	3.86	3.90	3.85	3.90				3.75	3.75	3.85	3.88	3.81	3.79	3.73		3.82	3.90	3.92	3.96	15.60	84.43	3.84	

Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD 1945

Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ketua Departemen Organisasi Pengurus Pusat Pengajar HTN-HAN

Bahasan

- Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
- Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara
- Sistem Pemerintahan
- Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara
- Otonomi Daerah

A. POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945

- Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, **maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan**, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

→ Pernyataan sikap bhw penjajahan itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan

Prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam evaluasi keadaan yang dirasakan

- Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, **yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.**

→ Kondisi Bangsa Indonesia yang siap atas kemerdekaan, untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (tujuan negara)

Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagai tujuan negara.

- **Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur**, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

→ Rasa syukur kepada Tuhan YME, atas rahmatnya dan disambut dengan keinginan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Religiusitas, (kesalehan, keimanan) sebagai manusia yang menyembah Tuhan

- Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan **Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat** dengan **berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

→
- Tujuan negara dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
- Negara yang berkedaulatan rakyat
- Penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila

Internalisasi Nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara

RM. AB Kusuma (mengutip apostel)

- A futurology
- Values
- A praxeology, or methodology, or theory of action:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, **maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.**

Dan **perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia**, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial**, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan UUD memuat Core Values, Values, Norms, Hierarchy of Norms dan Struktur Pemerintahan; Dan bahwa kebaikan hukum positif Indonesia, termasuk UUD, harus diukur dengan asas, nilai dan norma yang tercantum di Pembukaan UUD yang merupakan **“kaidah**

Pokok Pokok Yang Terkandung dalam Pembukaan UUD (Penjelasan UUD 1945)

Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam "pembukaan" Undang-undang Dasar.

- "Negara" begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam "pembukaan" itu diterima aliran pengertian Negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. **Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.**
- **Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.**
- Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah **Negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan**. Oleh karena itu sistim Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
- Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam "pembukaan" ialah **Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab**. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

B. Dasar Penyelenggaraan Negara

Pancasila sebagai Dasar Penyelenggaraan Negara

Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013

- Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945:
- Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan berpartisipasi dalam ketertiban dunia.

Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai ideologi negara, dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika/moral, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara

Putusan MK No. 100/PUU-XI/2013 juga menyatakan bahwa Pancasila merupakan materi yang penting dan mendasar untuk diketahui, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Penjelasan:

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara dalam UUD NRI1945

- Bentuk Negara
- Kedaulatan Rakyat
- Negara Hukum

1. Bentuk Negara

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945: **Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan**, **yang berbentuk Republik**.

Bentuk Negara Kesatuan dalam artian susunan negara

Republik, dalam arti bentuk pemerintahan negara

2 perspektif negara kesatuan (Unitary State):

- Kedaulatan
- Susunan Negara

Miriam Budiarjo (*Dasar-Dasar Ilmu Politik,* 2009: 270)
Hakikat negara kesatuan ialah **kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan (*unitary state constitution*) tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat**. Adanya kewenangan pemerintah daerah (legislatif daerah) untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri (Perda) bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan tertinggi dalam negara kesatuan tetap terletak di tangan pemerintah pusat.

F.J Isjwara (Pengantar Ilmu Politik, 1974:179)
Negara kesatuan dikenal dengan **negara bersusunan tuggal atau tidak terdiri dari beberapa negara** seperti yang terdapat dalam negara federasi (*bondsstaat*). Karenanya hanya terdapat satu pemerintahan yakni pemerintah pusat.

Susunan negara federal ada dua organisasi pemerintahan federal dan organisasi pemerintahan negara bagian.

2 klasifikasi Negara Kesatuan

Sentralisasi

Negara Kesatuan dengan sistem Sentralisasi: negara kesatuan yang tidak membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah otonom atau hanya menjadikan wilayahnya bersifat admistratif belaka.

Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi : Negara kesatuan yang membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah otonom, daerah otonom tersebut diberi kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Desentralisasi

Republik

- Republik yang berasal dari kata 'res' dan 'publika' berarti kembali kepada publik (rakyat).

	Monarki	Republik
Georg Jellinek	Terkait dengan Kehendak Negara hanya 1 orang saja yang memimpin.	Terkait dengan kehendak Negara, banyak orang yang terlibat dalam Majelis. Termasuk kehendak rakyat juga menentukan.
Leon Duguit	Pengangkatan Pemimpin berdasarkan keturunan	Melalui Pemilu untuk masa jabatan yang ditentukan

Prinsip Kedaulatan Rakyat - Demokrasi

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

→ Demokrasi (Rakyat yang berkuasa) dilaksanakan menurut UUD

Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. (UUD 1945 sebelum amandemen)

Catatan :
Pelaksanaan kedaulatan dilakukan dengan cara konstitusional, meski dilakukan oleh Lembaga negara yang beragam.

Aktualisasi kedaulatan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan

Langsung

Implementasi tugas dan fungsi (termasuk check and balances)

Lembaga Negara dalam Kekuasaan Eksekutif	Lembaga Negara dalam kekuasaan Legislatif	Lembaga Negara dalam Kekuasaan Yudisial

Perwakilan

Partisipasi publik melalui

DPR dan DPD (fungsi legislasi & kontrol)

Sumber : Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2006:

Kedaulatan Rakyat dalam artian kehendak dalam Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang memutus judicial review atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum **yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu sebagaimana disebut di atas adalah inkonstitusional**. Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat **bahwa terpilihnya wakil-wakil rakyat yang benar-benar memperoleh legitimasi serta dikenal dekat dengan rakyat yang menjadi massa konstituennya.**
- Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. **Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya.**

3. Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 :

Indonesia adalah "negara hukum"

Penjelasan UUD dijadikan norma

Penjelasan UUD 1945:
Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechsstaat) Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Cara pandang Civil Law (asas legalitas)

Konsep "*rule of law*" oleh A.V Dicey, di identifikasi dalam 3 unsur, diantaranya : (1) *supremacy of law*, (2) *equality before the law*, (3) *the constitution based on individual rights*. **(Anglo Saxon)**
Friedrich Stahl, membagi 4 unsur dari negara hukum "*rechstaat*" **Civil Law**: Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, Adanya pemisahan dalam kekuasaan negara, Setiap tindakan negara harus didasarkan atas undang-undang yang telah ditetapkan terlebih dahulu, Adanya peradilan administrasi negara. Serta Perkembangan Negara Hukum ***Internasional Commission of Jurists*** **dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965**.

Pasal 28I ayat (5) UUD 1945:
Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan

C. Sistem Pemerintahan

- Bagir Manan : sistem pemerintahan merupakan suatu pengertian **yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam suatu tatanan negara demokrasi**. (Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah 2001:250)
- Jimly Asshiddiqie : sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian **penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif**. (Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, 2007 : 317)

Sistem Pemerintahan

Sistem presidensil

Sistem Parlementer

Sistem Campuran

SISTEM PRESIDENSIAL (DOUGLAS VERNEY)

- *The Assembly remains an as Assembly only* **(Majelis tetap sebagai majelis)**
- *The executive is not divided but is a President elected by the people for a definite term at the time of Assembly elections.* **(Eksekutif tidak dibagi tetapi hanya ada seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu pada saat majelis dipilih)**
- *The Head of Government is Head of State* **(Kepala Pemerintahan adalah Kepala Negara)**
- *The President appoints heads of departments who are his subordinates* **(Presiden mengangkat Kepala Departemen yang merupakan bawahannya)**
- *The President is sole executive* (**Presiden adalah eksekutif tunggal)**
- *Members of the Assembly are not eligible for office in the administration and vice versa* **(Anggota Majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan dan sebaliknya)**
- *The executive is responsible to the constitution* **(Eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi)**
- *The President cannot dissolve or coerce the Assembly* **(Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa Majelis)**
- *The Assembly is ultimately supreme over the other branches of government and there is no fusion of the executive and legislative branches as in a parliament* **(Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian pemerintah lain dan tidak ada peleburan bagian eksekutif dan legislatif seperti dalam sebuah parlemen)**
- *The executive is directly responsible to the electrorate* **(Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada para pemilih)**
- *There is no focus of power in the political system* **(Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik).**

Sumber: Arend Lijhpart (editor), *Parliamentary versus Presidential*

SISTEM PARLEMENTER

- Majelis Menjadi Parlemen
- Eksekutif dibagi 2 bagian (kepala Negara dan Kepala Pemerintahan)
- Kepala Negara Mengangkat Kepala Pemerintahan
- Kepala Pemerintahan Mengangkat Menteri
- Menteri (Pemerintah) adalah Badan Kolektif
- Menteri biasanya merupakan anggota Parlemen
- Pemerintah Bertanggung jawab secara Politik Kepada Majelis
- Kepala Pemerintahan dapat Memberikan Pendapat kepada Kepala Negara untuk Membubarkan Majelis
- Parlemen sebagai suatu kesatuan memiliki supremasi atas kedudukan yang lebih tinggi dari bagian-bagiannya pemerintah dan parlemen, tetapi mereka tidak saling menguasai.
- Pemerintah sebagai suatu kesatuan hanya bertanggung jawab tak langsung kepada para pemilih
- Parlemen adalah fokus kekuasaan dalam sistem politik.

SISTEM PEMERINTAHAN CAMPURAN

Sistem pemerintahan campuran yaitu sistem pemerinta-han suatu negara yang tidak menganut sistem pemerintahan parlementer murni dan sistem pemerintahan presidensial murni.
Bentuk campuran dapat menunjukkan ciri-ciri presidensial atau parlementer yang lebih menonjol.

Giovanni Sartori mengemukakan karakter umum sistem pemerintahan semi-presidensial sebagai berikut:

a. Kepala negara (presiden) dipilih melalui pemungutan suara – baik secara langsung maupun tidak langsung – untuk suatu jabatan tetap.
b. Kepala negara berbagi kekuasaan eksekutif dengan perdana menteri, sehingga memasuki struktur otoritas ganda yang tiga kriteria penentunya adalah:
c. Presiden independen dari parlemen, tetapi tidak berhak memerintah sendiri atau langsung dan oleh karena itu kehendaknya harus disampaikan dan diproses melalui pemerintahannya.
d. Sebaliknya, perdana menteri dan kabinetnya adalah presiden-independen karena mereka bergantung pada parlemen: mereka tunduk pada kepercayaan parlemen atau tidak (atau keduanya), dan kedua kasus membutuhkan dukungan mayoritas parlemen.
e. Struktur otoritas ganda semi-presidensial memungkinkan keseimbangan yang berbeda dan juga untuk pergeseran dominasi kekuasaan di dalam eksekutif, di bawah kondisi ketat bahwa 'potensi otonomi' dari setiap unit komponen eksekutif tetap ada.

Giovanni Sartori. *Comparative Constitutional Enginerring*. 1997.

PENDAHULUAN
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Tuntutan Reformasi

Antara lain:
- Amandemen UUD 1945
- Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
- Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
- Otonomi Daerah
- Kebebasan Pers
- Mewujudkan kehidupan demokrasi

Sebelum Perubahan

- Pembukaan
- Batang Tubuh
  - 16 bab
  - 37 pasal
  - 49 ayat
  - 4 pasal Aturan Peralihan
  - 2 ayat Aturan Tambahan
- Penjelasan

Latar Belakang Perubahan

- Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
- Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
- Pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan multitafsir
- Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
- Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

Tujuan Perubahan

Menyempurnakan aturan dasar, mengenai:
- Tatanan negara
- Kedaulatan Rakyat
- HAM
- Pembagian kekuasaan
- Kesejahteraan Sosial
- Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
- Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

Dasar Yuridis

- Pasal 3 UUD 1945
- Pasal 37 UUD 1945
- TAP MPR NO.VIII/MPR/1998
- TAP MPR No.IX/MPR/1999
- TAP MPR No.IX/MPR/2000
- TAP MPR No.XI/MPR/2001

Kesepakatan Dasar

- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mempertegas sistem presidensiil
- Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
- Perubahan dilakukan dengan cara "adendum"

Sidang MPR

- Sidang Umum MPR 1999
  Tanggal 14-21 Okt 1999
- Sidang Tahunan MPR 2000
  Tanggal 7-18 Agt 2000
- Sidang Tahunan MPR 2001
  Tanggal 1-9 Nov 2001
- Sidang Tahunan MPR 2002
  Tanggal 1-11 Agt 2002

Hasil Perubahan

- Pembukaan
- Pasal-pasal:
  - 21 bab
  - 73 pasal
  - 170 ayat
  - 3 pasal Aturan Peralihan
  - 2 pasal Aturan Tambahan

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat, tidak kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pemberlakuan prinsip pemisahan Kekuasaan/Pembagian Kekuasaan

Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggung- jawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi



Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena bertanggung-jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen

Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem presidentil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas peerintahan, ditentukan pula bahwa **masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan**

D. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara

Eksekutif
(Pelaksana UU)

Legislatif
(Pembentuk UU)

Yudisial
(Peradilan)

UUD NRI 1945

Pasal 4 ayat (1)
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan

BPK

Pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang undang.

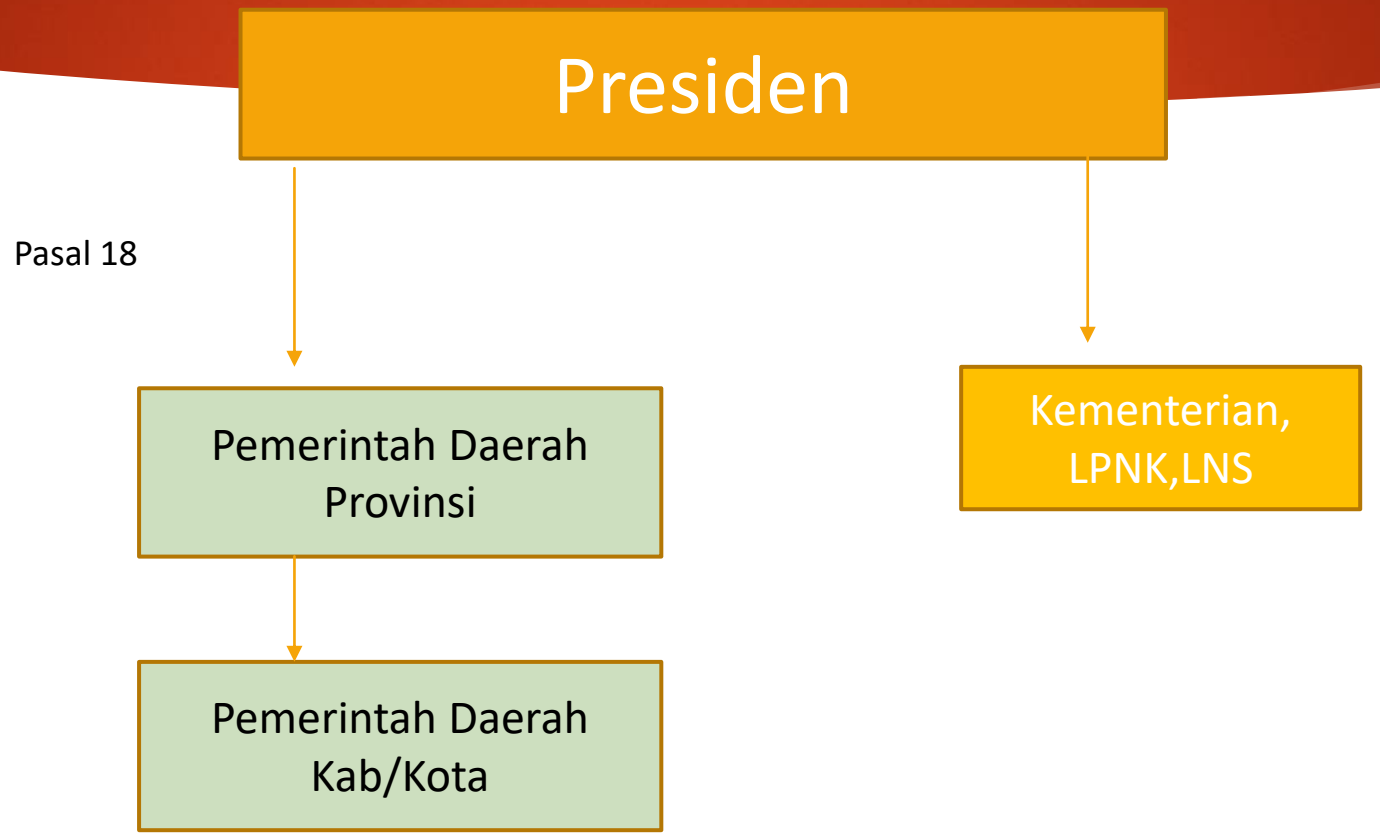
MPR dan DPD

Pasal 24 ayat (2)
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Komisi Yudisial

Lanjutan,…… Konstruksi Pemerintahan UUD 1945

UUD NRI 1945



Main State Organs

Auxiliary State Organs

Lembaga-lembaga negara tersebut di antaranya: Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan lain-lain.

Perkembangan Lembaga Negara

- Abad ke-20, di negara-negara demokrasi yang telah mapan seperti Amerika Serikat dan Perancis berkembang lembaga-lembaga baru yang disebut dengan state auxiliary organs, sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.
- Lembaga tersebut di Amerika Serikat misalnya dikenal dengan; Federal trade Commission (FTC), Federal Communication Commission (FCC). Lembaga-lembaga tersebut bukan NGO's (non governmental organizations). Namun keberadaannya tidak dalam ranah cabang kekuasaan legislative, eksekutif maupun yudikatif. Ada yang bersifat independen dan quasi independen. Namun demikian sebagian ahli lain memasukkan independen agensi ini kedalam ranah kekuasaan eksekutif.
- Lembaga-lembaga independen yang menjalankan fungsi regulasi dan pemantauan biasanya ada ditingkat federal (pusat). Di As disebut dengan the headless fourth branch of the government. Selain itu juga ada komisi-komisi/komite yang menjalankan fungsi pelayanan umum (management of public service), yang berada tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah.

Alasan-alasan perkembangan kelembagaan negara

1. *Konsep Welfare State* (negara kesejahteraan) sehingga dituntut lembaga menjalankan fungsinya dengan tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada.
2. Peningkatan fungsi *public service,* berada di Badan eksekutif akibat perkembangan kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang semakin kompleks.
3. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, dalam perkembangan kondisi sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh arus globalisasi.

Politik Hukum Putusan MK No. 70/2019

1. **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
2. **Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsiadalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".**

Politik Hukum Putusan MK bahwa Lembaga Independen, tetap dalam 3 kekuasaan meski tidak dipengaruhi independensinya. Pertimbangan Hukum MK

"Hal ini yang menjadi salah satu karakter dari keberadaan lembaga negara yang independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam

Posisi Kelembagaan Negara di Indonesia

Lembaga Negara Yang kewenangannya dalam UUD NRI 1945

Lembaga Negara Yang kewenangannya diberikan oleh UU, PP maupun Perpres

LN dalam UUD NRI 1945

- Presiden
- DPR
- DPD
- BPK
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Komisi Yudisial

LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UU, PP MAUPUN PERPRES

Lembaga Non Struktural (LNS)

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pengaturan LNS dalam PerUUan

Pengaturan dalam Undang-Undang :
a. disebut dengan jelas menggunakan huruf besar
b. Tidak dicantumkan dengan nama jelas (menggunakan huruf kecil)

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah

Pengaturan dalam Peraturan Presiden

Pengaturan dalam Keppres

PENGATURAN LNS DALAM UU (NAMA DICANTUMKAN JELAS)

1. Komisi Kepolisian Nasional
2. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
4. Komisi Banding Merek
5. Komisi Banding Paten
6. ~~Komisi Pengawas Haji Indonesia~~
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
8. Komisi Pemilihan Umum
9. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
11. Lembaga Kerja Sama Tripartit
12. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
13. ~~Dewan Riset Nasional~~
14. Dewan Pengupahan Nasional
15. Dewan Energi Nasional
16. Dewan Pers
17. Dewan Pertimbangan Presiden
18. Dewan Sumber Daya Air Nasional
19. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
20. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
21. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
22. Dewan Jaminan Sosial Nasional
23. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
24. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
25. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
26. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
27. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
28. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
29. Ombudsman Republik Indonesia
30. Konsil Kedokteran Indonesia
31. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
32. ~~Badan Pertimbangan Telekomunikasi~~
33. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
34. Komisi Aparatur Sipil Negara
35. Komite Perdagangan Nasional
36. Komite Industri Nasional
37. Komisi Penyuluhan Nasional
38. Badan Koordinasi Penyuluhan
39. Badan Amil Zakat Nasional
40. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
41. Komite Profesi Akuntan Publik
42. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
43. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
44. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
45. Komite Akreditasi Nasional
46. Badan Pengawas Pemilihan Umum
47. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
48. Otoritas Jasa Keuangan
49. Badan Pertimbangan Kepegawaian
50. Konsil Tenaga Kesehatan
51. Konsil Tenaga Keperawatan
52. Dewan Insinyur Indonesia
53. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
54. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
55. Komisi Nasional Disabilitas

PENGATURAN LNS DALAM UU (NAMA TIDAK DICANTUMKAN JELAS)

1. Komisi Kejaksaan
2. ~~Komisi Nasional Lanjut Usia~~
3. Komisi Penyiaran Indonesia
4. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
7. Badan Pengelola (Perbatasan) di Tingkat Daerah
8. ~~Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia~~
9. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
10. Badan Pelaksana Penyuluhan
11. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
12. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
13. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
14. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
15. Lembaga Sensor Film
16. Badan Perfilman Indonesia
17. Lembaga Produktivitas Nasional
18. Komite Nasional Keamanan Penerbangan
19. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
20. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan

PENGATURAN LNS DALAM PP

1. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
   Pasal 1 angka 24 PP 21 Tahun 2005 Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik:
   "Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, yang selanjutnya disingkat KKH, adalah komisi yang mempunyai tugas memberi rekomendasi kepada Menteri, Menteri berwenang dan Kepala LPND berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG."

2. Komite Anti Dumping Indonesia
   Pasal 94 ayat (1) PP No 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan:
   "Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk KADI yang bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi."

3. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
   Pasal 95 ayat (1) PP No 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan:
   "Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk KPPI untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor."

4. ~~Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan~~
   ~~Pasal 95 ayat (1) PP No 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan:~~
   ~~"Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan, Pemerintah membentuk Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional."~~

5. ~~Badan Olahraga Profesional~~
   ~~Pasal 37 ayat (2) PP No 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan:~~
   ~~Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh Badan Olahraga Profesional pada tingkat nasional~~.

6. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
   Pasal 1 PP No. 8 Tahun 1994 Tentang Perfilman:
   "Untuk memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman kepada Pemerintah, dibentuk Badan Pertimbangan Perfilman

PENGATURAN LNS DALAM PERPRES

1. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
2. ~~Dewan Ketahanan Pangan~~
3. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
4. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
6. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
7. Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
8. ~~Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura~~
9. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
10. Kantor Staf Presiden
11. ~~Komite Ekonomi dan Industri Nasional~~
12. Badan Restorasi Gambut
13. Badan Otorita Danau Toba
14. Komite Nasional Keuangan Syariah
15. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

PENGATURAN LNS DALAM KEPPRES

1. Badan Promosi Pariwisata Indonesia
   Keppres 22/2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia:
   a) Pasal 2 ayat (1) “Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia.”
   b) Pasal 2 ayat (2) “Badan Promosi Pariwisata Indonesia merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang berkedudukan di ibu kota negara.”
2. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
   Pasal 1 ayat (1) Keppres No. 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional:
   “Membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, yang selanjutnya disebut Dewan TIK Nasional.”
3. Dewan Ketahanan Nasional
   Pasal 1 Keppres No. 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional:
   "Dewan Ketahanan Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Wantannas, adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden."
4. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations



Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Dalam Pasal 1 ayat (1) Keppres 103/2001 menentukan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.

Dalam Pasal 151 ayat (1) Perpres 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPNK, menyatakan: “Kepala LPNK adalah Jabatan Negeri”

Penggolongan LPNK menurut fungsinya:

1. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang manajemen pemerintahan, seperti: LEMHANNAS, BAPPENAS, LKPP, LAN, ANRI, BKN, PERPUSNAS, LEMSANEG dan BPKP.
2. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang substansi pemerintah tertentu, seperti : BPS, BASARNAS, BNPT, BMKG, BNPB, BNPT, BKKBN, BSN, BAPPETEN, BATAN, LAPAN, BAKORSURTANAL, LIPI DAN BPPT.
3. LPNK yang masih menyelenggarakan fungsi pelayanan publik dan regulasi Publik, seperti: BPN, BPOM, BKPM dan BNP2TKI.
4. LPNK yang berfokus pada tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian, seperti: LIPI, LAN, BPPT, BATAN dan LAPAN.

Sumber : Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur LAN, Laporan Akhir, Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014 – 2019), Jakarta, 2013, h. 74

Pengaturan LPNK melalui PerUUan



Melalui Undang-Undang ada 10 Lembaga: Arsip Nasional, BMKG, BNP2TKI, Batan, BPS, BPN, BIG, BKN



Peraturan Pemerintah ada 1 lembaga : Badan Standardisasi Nasional



Peraturan Presiden ada 4 Lembaga : Lemhannas, BNPT, LKPP, LAN



Keputusan Presiden ada 11 lembaga: LIPI, LAPAN, Lemsaneg, BPPT, BPKP, BKPM, Bapeten, Bappenas, BKKBN, Perpusnas, BPOM

Struktur kelembagaan LNS yang ada di Indonesia, sebagai berikut:

1. LNS yang anggotanya terdiri dari pejabat dari lingkungan kementerian atau organisasi pemerintah lainnya dan diketuai oleh Presiden. Tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dan pelaksanaan program tertentu antar organisasi pemerintah yang memiliki kerumpunan.
2. LNS yang anggotanya terdiri dari masyarakat atau swasta dan unsur pemerintah. LNS ini dibentuk untuk dapat memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada Presiden.
3. LNS yang anggotanya melibatkan pakar atau professional yang ahli pada bidang tertentu dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu secara teknis dan urgen untuk dibentuk.

Catatan : Hingga saat ini belum ada Peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang LNS

E. Otonomi daerah

Bagir Manan menyatakan otonomi adalah, “Kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfsatndigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.

Pasal 18 UUD 1945

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia **dibagi atas** daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu **dibagi atas** kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota **mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan**.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota **memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang anggota-anggotanya **dipilih melalui pemilihan umum**.

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai **Kepala Pemerintah Daerah** Provinsi, Kabupaten dan Kota **dipilih secara demokratis**.

(5) **Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya**, **kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat**.

(6) Pemerintahan daerah **berhak menetapkan peraturan daerah dan**

2 Pendekatan Pembagian Urusan Pusat dan Daerah

Pendekatan Historis

UU 23 /2014 → Desentralisasi
Pembagian urusan lebih efektif

UU 32 /2004 → Desentralisasi

UU 22 / 1999 → Desetralisasi

UU 5 / 1974 → Sentralisasi

UU 18 / 1965 → Desentralisasi

UU 1 / 1957 → Desentralisasi

UU 22 / 1948 → Desentralisasi

UU 1 / 1945 → Sentralisasi

- **struktur geografis wilayah negara Indonesia yang sangat luas serta kondisi masyarakat yang majemuk, perlu memerlukan pemberian otonomi kepada daerah**.
- Fenomena hubungan Pusat dan Daerah berlanjut pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kepresidenan di awal tahun 1998. → sebagai tuntan reformasi
- Pratikno dalam Syamsuddin Haris menulis: Indonesia belum pernah berhasil menyelesaikan ketegangan antara Pusat dan Daerah. Sejak tahun 1950-an, republik ini digoncang oleh beberapa pemberontakan daerah. Sebagian ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Pendekatan Norma

Pasal 18 (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI 1945

- Konsep "dibagi atas"
- Mengatur urusan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan UU

UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

- absolut
- Konkuren
- Pemerintahan Umum

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

UUD NRI 1945

Pasal 18

(1)Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Secara konseptual Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 telah menunjukkan adanya derivasi kekuasaan dari pusat hingga ke daerah. Kekuasaan yang diberikan kepada daerah tersebut, berimplikasi pada kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, sebagai aktualisasi dari kebijakan desentralisasi yang bertolak belakang dari sistem sebelumnya yakni sentralisasi.

Konsekuensi dari susunan pemerintahan ini, diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yakni Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. Kemudian Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah **menunjukkan jelas relasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah berkenaan dengan :**

a. Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah

b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah

Otonomi, Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi Daerah — desentralisasi

Kebebasan mengatur daerahnya

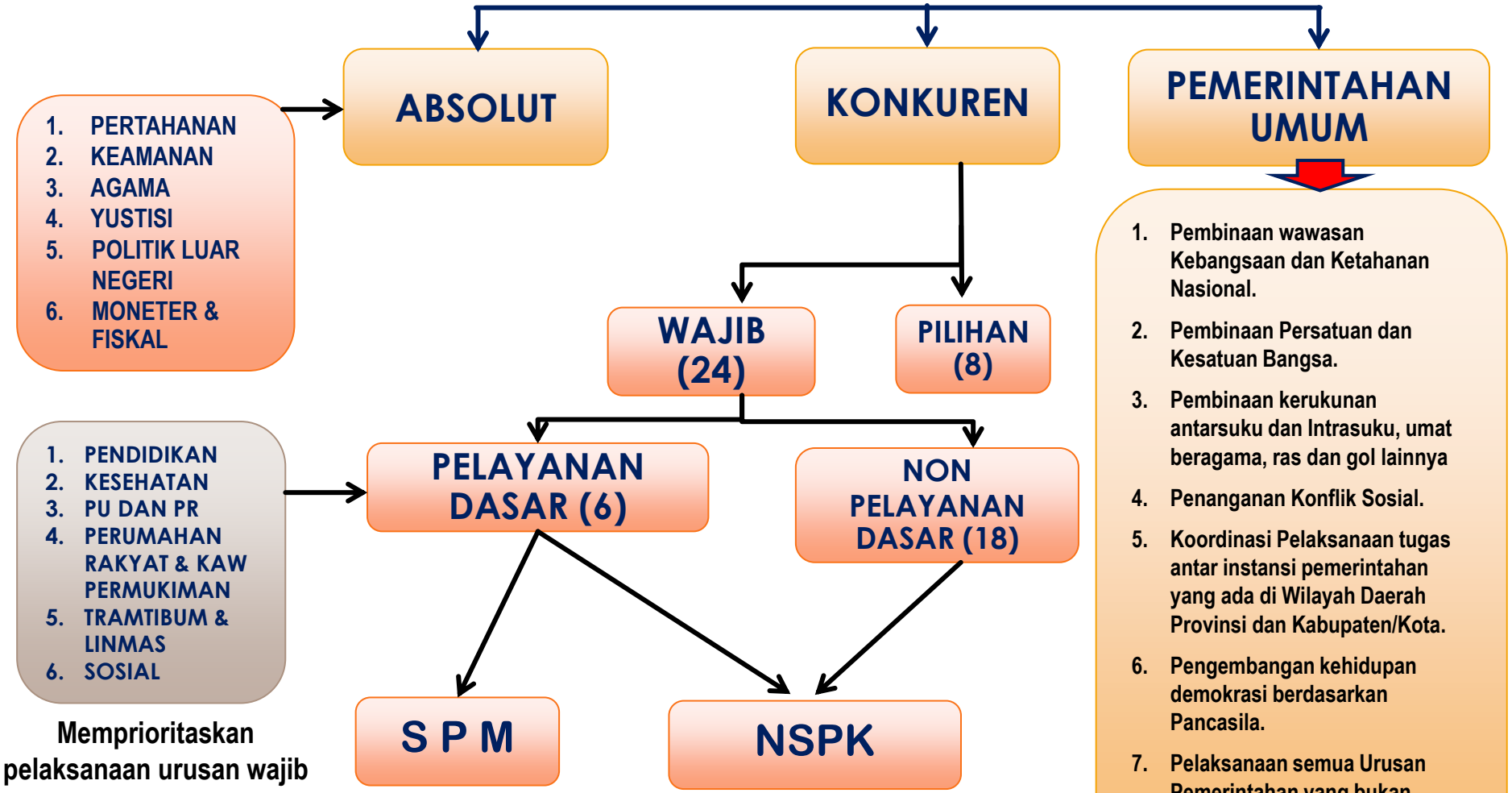
Tugas Pembantuan

Konkuren (pusat-prov-kab/kota)

Pasal 236 ayat (1) UU Pemda Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

- Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
- Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung

URUSAN PEMERINTAHAN



1. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras dan gol lainnya
4. Penanganan Konflik Sosial.
5. Koordinasi Pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Wilayah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Urpem Konkurer

WAJIB

Yan Dasar

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Non Yan Dasar

1. **tenaga kerja;**
2. **pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;**
3. **pangan;**
4. **pertanahan;**
5. **lingkungan hidup;**
6. **administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;**
7. **pemberdayaan masyarakat dan Desa;**
8. **pengendalian penduduk dan keluarga berencana;**
9. **perhubungan;**
10. **komunikasi dan informatika;**
11. **koperasi, usaha kecil, dan menengah;**
12. **penanaman modal;**
13. **kepemudaan dan olah raga;**
14. **statistik;**
15. **persandian;**
16. **kebudayaan;**
17. **perpustakaan; dan**
18. **kearsipan.**

PILIHAN

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

Oleh :

Hesti Armiwulan

Disampaikan dalam acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha
Mahkamah Konstitusi -Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Rabu, 15 September 2021

1. Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia ?



PASAL 1
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

SETIAP ORANG

- Dilahirkan merdeka
- Mempunyai martabat dan hak-hak yang sama
- Dikaruniai akal dan hati nurani
- Hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan

Pengertian HAM

UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

- Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME
- Merupakan anugerah-Nya
- Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
- Oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang
- Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

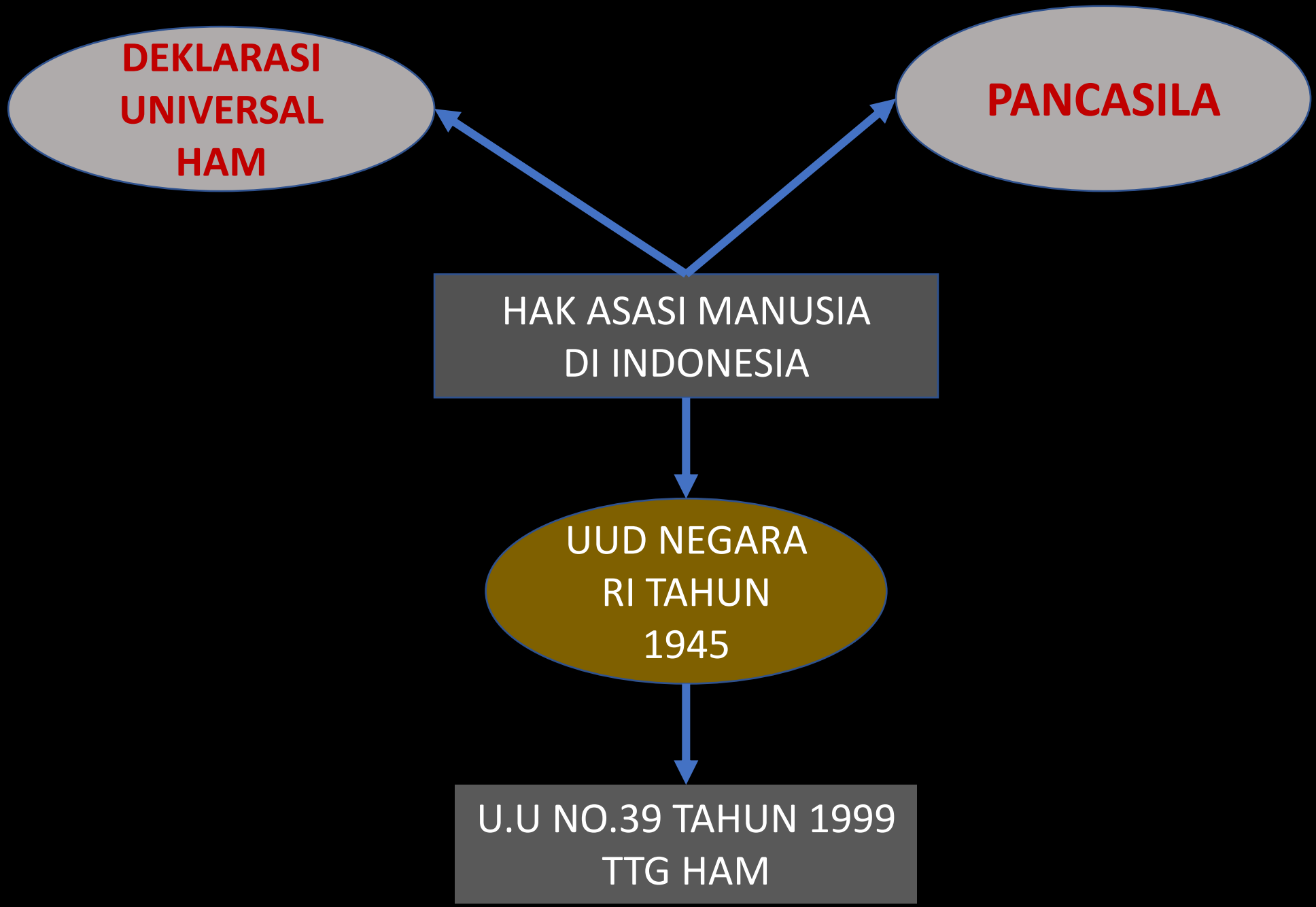
25 juni 1993
Konferensi dunia (PBB) tentang Hak Asasi Manusia → di Vienna

DEKLARASI VIENNA & PROGRAM AKSINYA

↓

- MENGAKUI BAHWA HAM BERSIFAT UNIVERSAL, TIDAK DAPAT DIPISAHKAN, SALING BERGANTUNG DAN BERHUBUNGAN
- NAMUN DIAKUI ADANYA RELATIVITAS DALAM HAM KARENA ADANYA PERBEDAAN SEJARAH, BUDAYA & MAGAMA PADA MASING-MASING MASY


HAK ASASI MANUSIA
UUD NEGARA RI TAHUN 1945
HAK INDIVIDUAL + HAK SOLIDARITAS
HAK SIPIL DAN POLITIK
HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Undang-Undang No.12 Tahun 2005
The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (ICESCR)
Undang-Undang No. 11 Tahun 2005


DEKLARASI UNIVERSAL HAM
PANCASILA
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
UUD NEGARA RI TAHUN 1945
U.U NO.39 TAHUN 1999 TTG HAM

Hak asasi manusia

Kewajiban asasi manusia



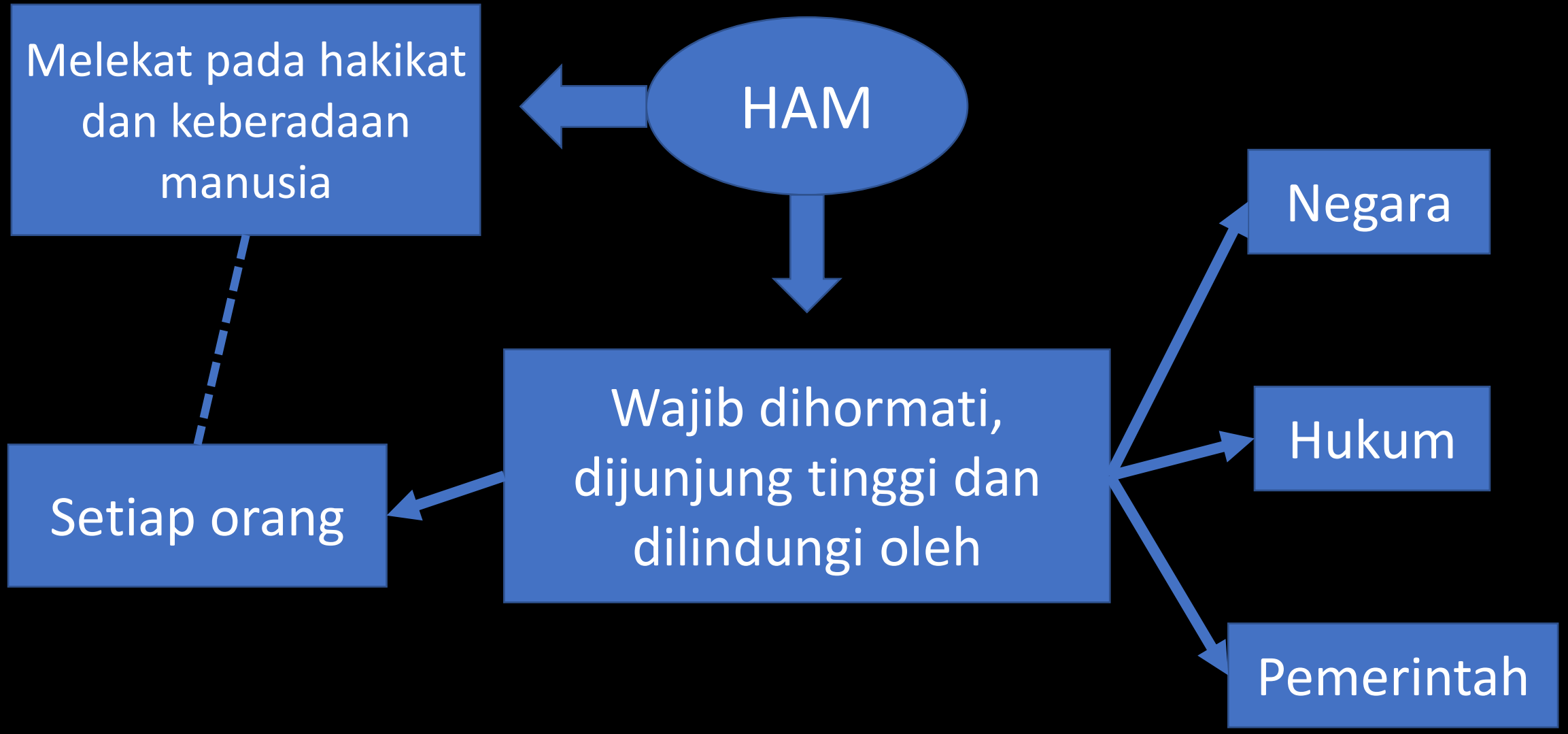
Tanggung jawab asasi manusia

Hak yang secara kodrati melekat pada setiap orang

Kewajiban menghargai dan menghormati HAM orang lain



Tanggung jawab menggunakan HAM


Melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
HAM
Negara
Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
Hukum
Setiap orang
Pemerintah

HAM DI INDONESIA

DEKLARASI UNIVERSAL
HAK ASASI MANUSIA

PANCASILA

UNIVERSAL

&

PARTIKULARISTIK



2.

SIAPA YANG BERKEWAJIBAN MENJAMIN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM & KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Copyrights:hesti2021

Pasal 2
UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA

- **Negara RI** mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai :
- Hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan

PSL 28I AYAT (4)
UUD NEGARA RI TAHUN 1945

PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAM ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA, TERUTAMA PEMERINTAH

KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL

PASAL 2 (ICESCR & ICCPR)

- Kewajiban setiap negara pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam kovenan ini
- Berjanji untuk memastikan pelaksanaannya bagi semua individu di wilayah negara ybs, tanpa ada pembedaan apapun

negara mempunyai kewajiban (*obligation*) dan tanggung jawab (*responsibility*) seperti yang dimandatkan oleh hukum internasional., yaitu : menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*).

3. APA WUJUD TANGGUNG JAWAB NEGARA/PEMERINTAH



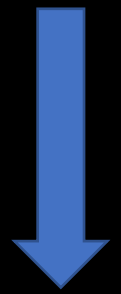
Copyrights:hesti2021

PSL 28I AYAT (5)
UUD NEGARA RI TH.1945

UNTUK MENEGAKKAN & MELINDUNGI HAM SESUAI DGN PRINSIP NEG HUKUM YG DEMOKRATIS, MAKA PELAKSANAAN HAM DIJAMIN,DIATUR, DAN DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NEGARA TELAH MENJAMIN PERLINDUNGAN HAM, APABILA TELAH DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011



UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

HUKUM

PERATURAN PER U-U AN

UNDANG-UNDANG

MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI JAMINAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM

Copyrights:hesti2021

KEWAJIBAN DAN PEMBATASAN HAK

1.	**Pasal 28 J Ayat (1)**	**Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**	**Kewajiban menghormati HAM**
2.	Pasal 28 J Ayat (2)	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang **ditetapkan dengan undang-undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	Pembatasan HAM

KEBEBASAN BEREKSPRESI BERDASARKAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Pasal 28 F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Pasal 28 E ayat (3)
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 28E Ayat (2)
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani

Copyrights:hesti2021





UNDANG-UNDANG NO.44 TH 2008 TENTANG PORNOGRAFI









UU No.9 Th 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

UU No. 40 Th 1999 Tentang Pers





UU No. 19 Th 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Th 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Copyrights:hesti2021

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI
PASAL 24C (1)

Berwenang mengadili pada tingkat Pertama & terakhir yang putusannya bersifat final untuk a.l.

- menguji UU thd UUD

MAHKAMAH AGUNG
Pasal 24 A (1)

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan perundang-undangan Di bawah UU thd UU

4. Kapan suatu perbuatan disebut sebagai pelanggaran HAM ?

PELANGGARAN HAM

Pelanggaran HAM terjadi Ketika Negara / Pemerintah tidak melaksanakan Tanggung Jawab dan kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM

Pelanggaran HAM merupakan jenis kejahatan yang berbeda dengan pelanggaran hukum/pidana.

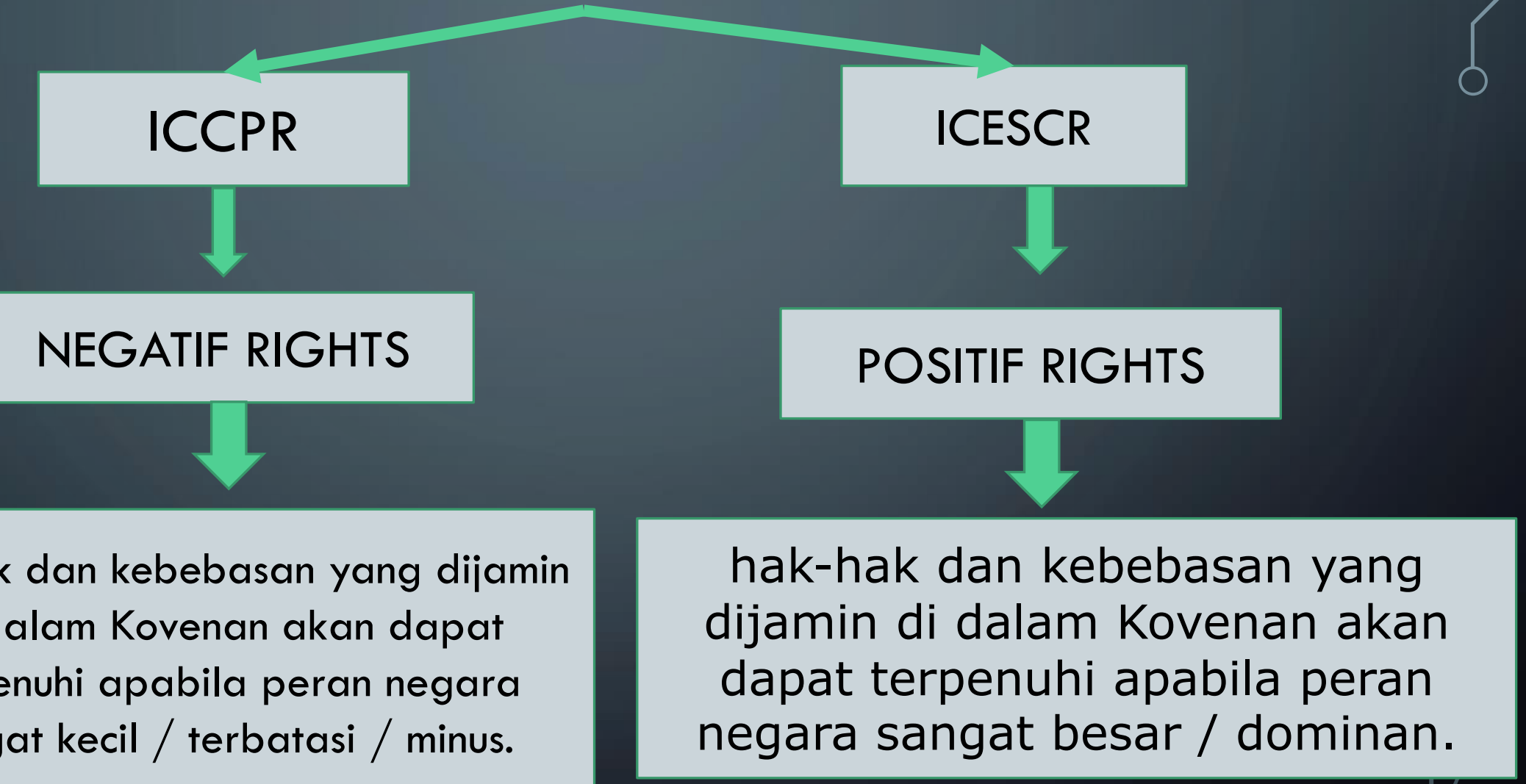
Pelanggaran HAM (*human rights violations*) adalah segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara (*state actor*) melalui sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yaitu berupa tindakan langsung (*act of commision*) maupun dengan pembiaran (*acts of ommission*).

JENIS PELANGGARAN HAM

- PELANGGARAN HAK EKOSOB
- PELANGGARAN HAK SIPIL & POLITIK

PELANGGARAN HAM BERAT

TANGGUNG JAWAB NEGARA (STATE RESPONSIBILITY)



KLASIFIKASI HAK ASASI MANUSIA
KOVENAN HAK SIPIL & POLITIK

NON DEROGABLE RIGHTS

Yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat

DEROGABLE RIGHTS

Yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara peserta

PASAL 28 I Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

NON DEROGABLE RIGHTS

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

KLASIFIKASI HAK ASASI MANUSIA
KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

PROGRESSIVE REALIZATION

Pemenuhannya dilakukan secara bertahap dan sangat bergantung pada kemampuan dari negara peserta.

MEKANISME PENEGAKAN PELANGGARAN HAM

Pembentukan Institusi/Lembaga negara yang independent dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM oleh Negara/Pemerintah

1. MAHKAMAH KONSTITUSI
2. KPU
3. KOMNAS HAM
4. OMBUDSMAN RI
5. KPK

U.U. NO. 39 TH 1999
PASAL 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum nasional dan hukum internasional mengenaiHAM yang telah diterima negara RI

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara RI yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional

Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945



Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945

HAK DALAM
HUKUM & PEMERINTAHAN

Pasal 27 Ayat 1	**Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.**		**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**	**Pasal 28 D Ayat (1)**
			Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Pasal 28 D Ayat (3)

HAK ATAS
PEKERJAAN & PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Pasal 27 Ayat (2)	**Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.**		**Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**	**Pasal 28 D Ayat (2)**

HAK UNTUK BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN BERPENDAPAT

Pasal 28	**Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.**		**Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat**	**Pasal 28 E Ayat (3)**

HAK ATAS PENDIDIKAN

Pasal 31 Ayat (1)	Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan		Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.	Pasal 28 C Ayat (1)

HAK & KEWAJIBAN BELA NEGARA

Pasal 30 Ayat (1)	**Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara**	**Hak Sipil**

HAK SIPIL

Pasal 28 A	**Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**
Pasal28 D Ayat (4)	Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E Ayat (1)	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih Kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Pasal 28E Ayat (2)	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 28G Ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28 G Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

NON DEROGABLE RIGHTS

PASAL 28 I Ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

HAK SOSIAL -EKONOMI

Pasal 28B Ayat (1)	**Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**
Pasal 28C Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28 H	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 28H Ayat (3)	Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
Pasal 28H Ayat (4)	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

HAK ANAK

Pasal 28 B Ayat (2)	**Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**

PERLAKUAN KHUSUS (AFFIRMATIVE ACTION)

Pasal 28 H Ayat (2)	**Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**

HAK BUDAYA

Pasal 28 I Ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban	Masy tradisional

NON DISKRIMINATIF

PASAL 28 I AYAT (2)

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

KEWAJIBAN DAN PEMBATASAN HAK

1.	**Pasal 28 J Ayat (1)**	**Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**	**Kewajiban menghormati HAM**
2.	Pasal 28 J Ayat (2)	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	Pembatasan HAM

PENGERTIAN HAK KONSTITUSIONAL

HAM

SETIAP ORANG

MENGETAHUI HAK-HAKNYA

MENGETAHUI BATASAN MENGGUNAKAN HAK

KEWAJIBAN MENGAKUI, MENGHORMATI DAN MELINDUNGI HAK-HAK ORANG LAIN

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

B E R A C A R A
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”



Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

UUD 1945

Pasal 24C
ayat (1)
dan ayat (2)

UU No. 24 Tahun 2003

tentang
Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011(Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2020

UU No. 48 Tahun 2009

tentang
Kekuasaan Kehakiman
Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2)

Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki Lima Kewenangan Sebagai Salah Satu Pemegang Kekuasaan Kehakiman



Kewenangan Mahkamah Konstitusi (1)

1

Menguji UU terhadap UUD

2

Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara



3

Memutus Pembubaran Partai Politik

4

Memutus Perselisihan Hasil Pemilu

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (2)

5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.



Dalam Perkembangan



1. Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).

2. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU

Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang *(judicial review)*

a. Pengujian Formil dan/atau
b. Pengujian Materiil



Pengujian Formil

pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.
(Pasal 4 ayat (3) PMK No. 06/PMK/2005).



Pengujian Materiil

pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
(Pasal 4 ayat (2) PMK No. 06/PMK/ 2005).

Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU:

01

Pemohon

- Perorangan warga negara
- Kesatuan masyarakat hukum adat
- Badan hukum publik atau privat
- Lembaga Negara
- (vide Pasal 51 UU MK)

02

Objek

- Formil : Proses pembentukan UU
- Materiil : materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU



Pemberian Kuasa dalam Beracara di MK

- Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum.
- Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya;
- Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat;
- Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi di dalam persidangan.

Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang:

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
    a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
    b. Kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*);
    c. Alasan-alasan permohonan pengujian *(posita).*
    d. Hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*)



Syarat “anggapan” adanya kerugian konstitusional



- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam pengujian UU dikenal dengan Permohonan bukan Gugatan

01 Dalam UU MK istilah yang digunakan adalah “permohonan” bukan “gugatan”. Karena Pada hakikatnya hanya terdapat satu Pihak sebagai Pemohon (*Voluntair*).

02 Presiden/Pemerintah dan DPR dan Lembaga negara lainya bukan sebagai Pihak Termohon namun hanya sebagai pemberi Keterangan.

03 Istilah “permohonan” menunjukkan bahwa pengujian undang-undang sesungguhnya bukan sengketa kepentingan para pihak (*contensiosa, adversarial, inter parties)*

04 Putusan MK Sifat *erga omnes*, meskipun dimohonkan oleh perseorang/individu, namun keberlakuan putusan secara umum dan mempengaruhi Hukum di Indonesia.

Tata cara pengajuan permohonan di MK

1. Permohonan secara langsung

- Pemohon datang langsung ke MK dengan membawa permohonan secara tertulis dalam berbahasa Indonesia;
- Permohonan ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa hukum sebanyak 12 rangkap
- Permohonan harus disertai alat Bukti
- Sebelum mengajukan permohonan, pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai tata cara mengajukan permohonan ke Kepaniteraan MK.



Tata cara pengajuan permohonan di MK

2. Permohonan Online

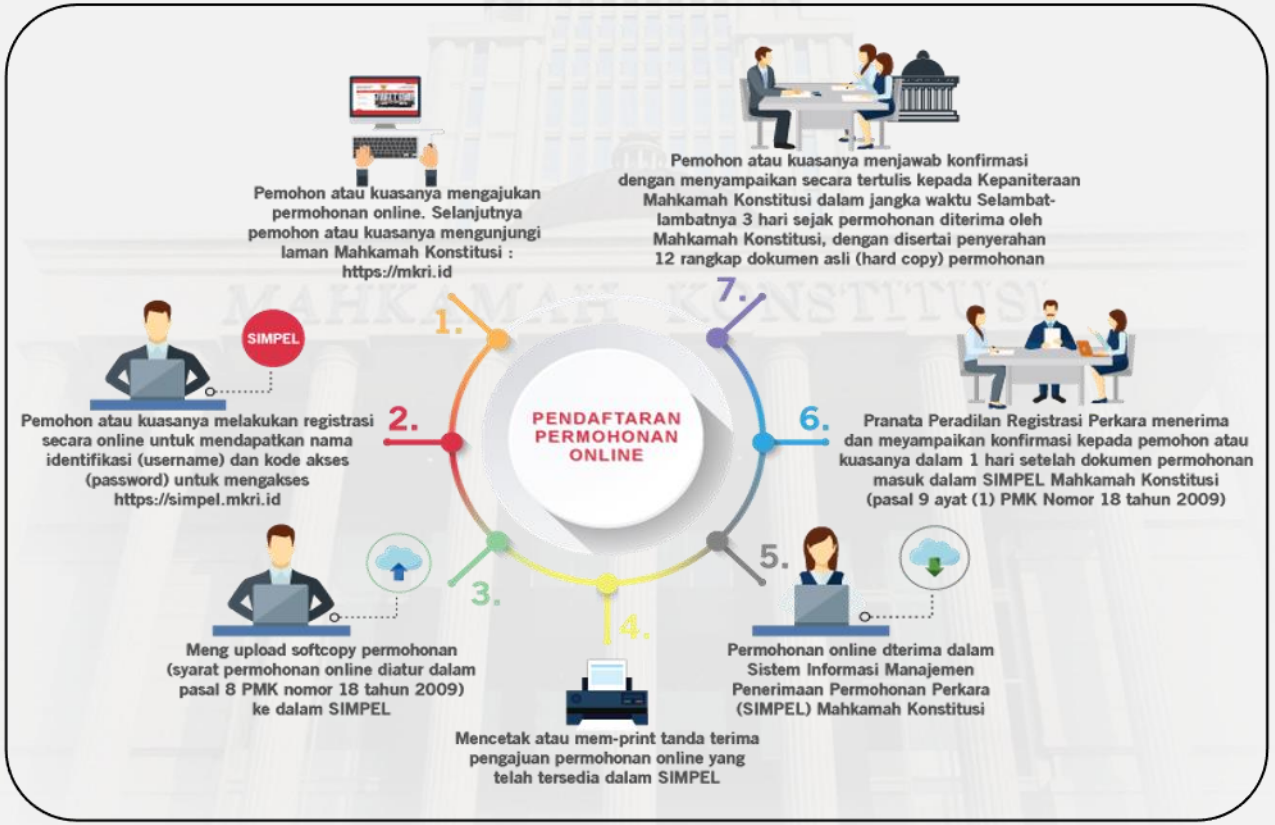
- Permohonan pengujian undang-undang dapat juga dilakukan secara online (*acces to juctice* bagi pencari keadilan);
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* kelengkapannya sama dengan permohonan secara *offline*



Catatan :

Di samping permohonan dapat diajukan secara online, para pihak juga dapat melakukan sidang Jarak Jauh dengan menggunakan *Video Conference* yang telah difasilitasi oleh MK dengan bekerjasama dengan kampus-kampus di daerah yang sudah ditunjuk oleh MK.

Teknis pengajuan Permohonan Online



PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PEMOHON

Mengajukan:
- Permohonan
- Alat bukti
- Daftar alat bukti
- *soft copy* permohonan dan daftar alat bukti

PENERIMA PERMOHONAN

PANITERA

- Akta Penerimaan Berkas Permohonan
- Memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan
- Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas
- Akta Registrasi Perkara
- Mencatat dalam BRPK
- Penyampaian salinan permohonan kepada DPR dan Presiden
- Pemberitahuan permohonan ke MA
- Ketetapan Panitera Pengganti

KETUA MK

Ketetapan Panel Hakim

KETUA PANEL

Ketetapan Hari Sidang

SIDANG PANEL

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan

SIDANG PANEL

- Memeriksa perbaikan permohonan
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan

RPH
- laporan pemeriksaan pendahuluan
- pengambilan keputusan (lanjut/putus)
- penunjukan hakim drafter

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Presiden
- Mendengar ket. DPR
- Mendengar ket. Pihak Terkait

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Saksi/Ahli
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan
- Kesimpulan

SIDANG PLENO

Penyerahan Kesimpulan

RPH
- laporan pemeriksaan persidangan
- curah pendapat
- penyampaian pendapat hukum
- pengambilan keputusan
- penunjukan hakim drafter
- pembahasan draft putusan
- finalisasi putusan
- penunjukan pembaca akhir putusan

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

SIDANG PLENO

Pengucapan Putusan

Penyampaian salinan putusan

Pemeriksaan Sidang Pendahuluan (vide Pasal 39 UU MK)

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.

Karena pada hakikatnya bukan sengketa Kepentingan, maka undang-undang mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.

Terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari MK memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/kelangkapan.

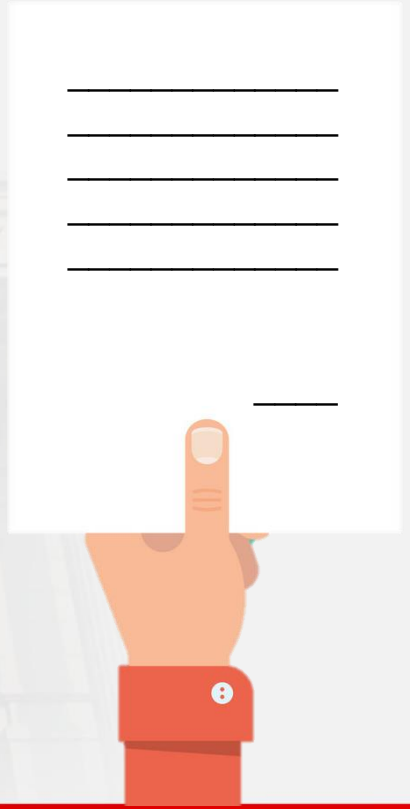
Sidang Perbaikan Permohonan

- Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, selanjutnya Mahkamah menyelanggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan.

- Bahwa terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan permohonan yang diserahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan.

Catatan :

Nasihat panel hakim bersifat tidak mengikat,artinya jika Pemohon tidak menerima substansi yang dinasihatkan oleh panel hakim, maka pemohon dapat mengesampingkannya.



1. Pemeriksaan Persidangan (vide Pasal 40, 41 UU MK)



- Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang bersifat khusus menghendaki untuk itu.
- Pemeriksaan persidangan adalah persidangan dengan agenda untuk memeriksa permohonan yang ditindaklanjuti dengan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR, atau Lembaga negara lainnya, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain yang dipandang perlu bagi Mahkamah.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Pihak

- MPR
- DPR
- DPD
- Presiden
- BPK
- Pemerintah Daerah
- Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD

Objek

Kewenangan konstitutional lembaga negara yang dianggap diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain

3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU Legislatif)

01

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung:

1. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon;
2. Partai politik peserta pemilu Pemohon;
3. Partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon;
4. KPU sebagai Termohon

02

Disamping para pihak tersebut di atas, Bawaslu dan pihak terkait (jika ada) juga merupakan bagian dari pihak yang diperlukan kehadirannya dalam persidangan.

03

Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU

4. PHPU Presiden dan Wapres

01

Para pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
2. KPU sebagai Termohon.

02

Di samping para pihak tersebut di atas, Bawaslu dan pihak terkait (jika ada) juga merupakan bagian dari pihak yang diperlukan kehadirannya dalam persidangan

03

Objek PHPU Presiden dan Wapres adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

1. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wapres (dalam hal lebih dari 2 pasangan), atau
2. Terpilihnya pasangan calon sebagai Presiden dan Wapres.

5. Pembubaran Partai Politik

- **Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.**

- **Termohon adalah parpol yang diwakili oleh pimpinan parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.**

- **Parpol dapat dibubarkan oleh MK apabila:**

  1. ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau
  2. Kegiatan parpol bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.



6. Kewenangan MK dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres

- **Pihak yang memohon putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya.**

- **Pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan /atau diwakili oleh kuasa hukumnya.**



- **DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:**

1. Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
2. Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.

7. Perselisihan Hasil Pilkada

Pihak

- Pasangan Calon yang mendapat suara lebih sedikit sebagai Pemohon
- Pasangan Calon yang mendapat suara lebih banyak bisa menjadi Pihak Terkait
- KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota sebagai Termohon
- Bawaslu/Panwaslu sebagai Pemberi Keterangan



Objek

- Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada (dalam hal terdapat lebih dari 2 pasangan calon), atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

Kewenangan MK untuk mengadili sengketa Pilkada merupakan kewenangan tambahan.

Dasar kewenangan MK diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yang menyatakan :

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan **peradilan khusus**.”



Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)



- RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlakasananya RPH.

- RPH membahas perkembangan perkara,menjatuhkan putusan ataupun ketetapan.

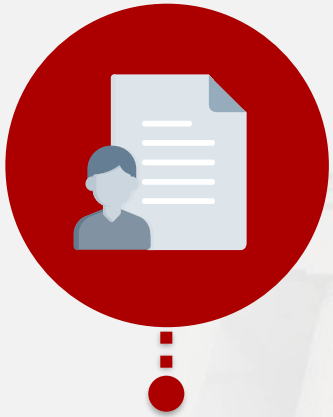
Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

- **Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.**

- **Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan (bukan dibacakan) dalam sidang pleno terbuka untuk umum.**



Amar Putusan Mahkamah Konstitusi



Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*NO*)



Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau Sebagian



Permohonan ditolak untuk seluruhnya.



Permohonan dikabulkan secara bersyarat termasuk menunda keberlakuan putusan.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH



TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

PARA PIHAK
[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

a. Pemohon;

b. Pemberi Keterangan; dan

c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN
[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

PIHAK TERKAIT
[Pasal 26 PMK 2/2021]

- Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

PERMOHONAN
(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

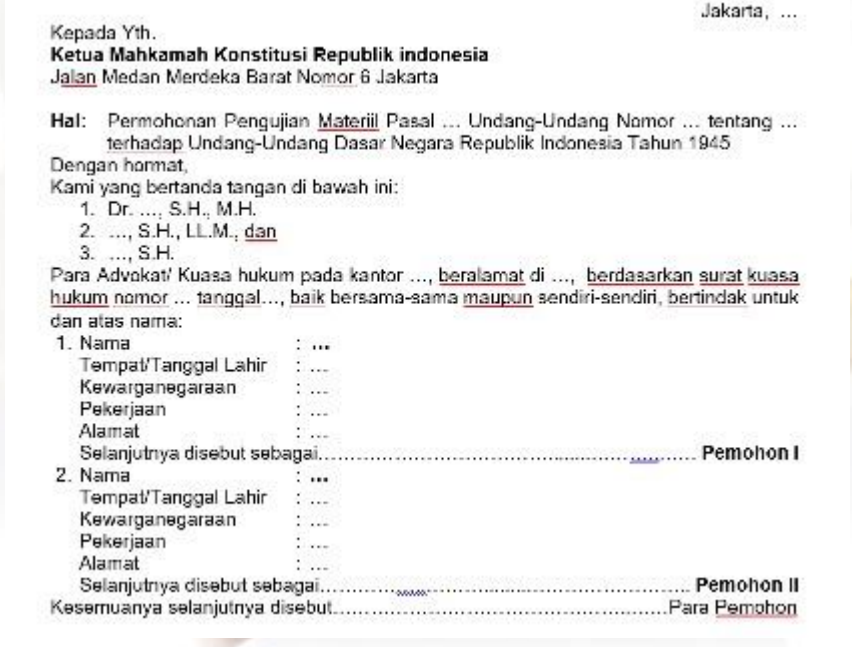
- Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN
[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
   b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
   c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
   a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
   b. Kewenangan Mahkamah;
   c. Kedudukan hukum Pemohon;
   d. Alasan permohonan; dan
   e. Petitum.
4. Permohonan diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

IDENTITAS PEMOHON
[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.



Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokat/ Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **...**
   Tempat/Tanggal Lahir : ...
   Kewarganegaraan : ...
   Pekerjaan : ...
   Alamat : ...
   Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**
2. Nama : **...**
   Tempat/Tanggal Lahir : ...
   Kewarganegaraan : ...
   Pekerjaan : ...
   Alamat : ...
   Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Kesemuanya selanjutnya disebut.....Para Pemohon

KEWENANGAN MAHKAMAH
[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan …
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang … (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan …
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal … Undang-Undang Nomor …, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM
[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan ….
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan…
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai …
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut…
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia …
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia …
8. Bahwa Pasal …
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA
[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM
[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiil, meliputi:

a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitum inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SEKIAN
TERIMA KASIH

Studi Kasus Kewajiban Bantuan Pemerintah Bagi Lembaga Pendidikan

- Junjun Mulyana dan Ani Bernandine merupakan tenaga pengajar di Lembaga Pendidikan Mentari Bandung mengajukan permohonan pengujian materiil kata “dapat” dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas berbunyi,
  "Lembaga pendidikan berbasis masyarakat **dapat** memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah";
- Bahwa kata “dapat” dalam Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Menurut Pemohon kata ”dapat” dalam pasal tersebut bermakna bisa memperoleh bantuan atau bisa tidak memperoleh bantuan. Oleh karenanya, pencantuman kata "dapat" dalam rumusan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945;
- Sebagai tim kuasa hukum Pemohon, buatlah Permohonan sesuai dengan template yang sudah diberikan;
- Masing-Masing harus merumuskan bagian Permohonan terkait **Kedudukan Hukum** atau *Legal Standing* Pemohon, **Alasan-Alasan Permohonan**, dan **Petitum**

- Kop surat -

…,...,...,20..

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal … Undang-Undang Nomor … tentang … terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. …, S.H., M.H., LL.M
2. …, S.H., M.H.
3. …, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum …, yang beralamat di Jalan …, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal …, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : …
   Kewarganegaraan : …
   Pekerjaan : …
   Alamat : …
   Selanjutnya disebut sebagai…….....…… **Pemohon I**

2. Nama : …
   Kewarganegaraan : …
   Pekerjaan : …
   Alamat : …
   Selanjutnya disebut sebagai…….. **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai……**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal … Undang-Undang Nomor … tentang … (selanjutnya disebut UU …) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
   a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
   a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas … UU… yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
   …
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU … terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
   a. perorangan WNI;
   b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
   c. badan hukum publik dan privat; atau;
   d. lembaga negara”.

   Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

   ”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945”.
2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
   a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
   b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
   c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
   d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
   e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon merupakan …. sebagaimanana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf … UU MK, yang memiliki hak konstitusional …. sebagaimana dijamin dalam Pasal … UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon I merupakan … (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
5. Bahwa Pemohon II merupakan … (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
6. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan …. merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk …
7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka …
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal … UU … yang menyatakan …
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal …, Pasal …, dan Pasal … UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

   …
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur … bertentangan dengan Pasal …, Pasal …, dan Pasal … UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

   …
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal … UU … bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal … Undang-Undang Nomor … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

   atau

   Menyatakan Pasal … Undang-Undang Nomor … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai …;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. …*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



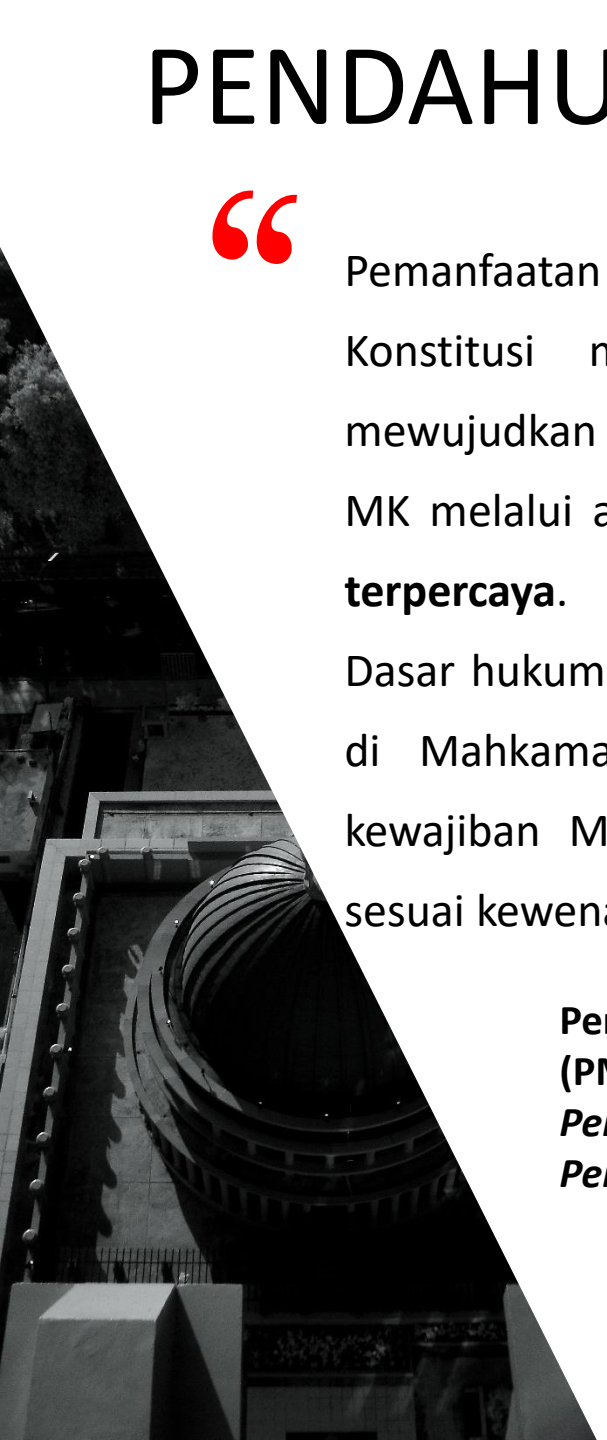
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

PENDAHULUAN



“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang *“Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”*

”

APA PERADILAN MODERN ITU?



Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (*information, communication, and technology*), memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada ICT (*integrity, clean, and trustworthy*) :

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET DI MK

500 Mbps

Bandwith 500 Mbps untuk jaringan Internasional

1000 Mbps

Bandwith 1000 Mbps untuk jaringan lokal



Dukungan 24/7 dari CNI dan Telkom untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SYSTEM SECURITY DI MK

1. **PALOALTO (FIREWALL)**
   Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

2. **IRON PORT (EMAIL SECURITY)**
   Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

3. **ANTI DDOS**
   Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

4. **MIRRORING SERVER**
   Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup

SYSTEM SECURITY DI MK



Web Application Firewall
Untuk melindungi serangan – serangan dari sisi aplikasi.

Honeypot
Sistem yang sengaja dijadikan sebagai umpan untuk penyerang, agar penyerang tidak dapat masuk ke dalam jaringan sebenarnya.

Sekurity Monitoring(IDS)
Berfungsi untuk memonitoring serangan dari luar dan dalam.

SDM personel dari BSSN

Akses Berperkara di MK

01 Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

02 Website Mahkamah Konstitusi

03 Portal Informasi Pilkada 2020

04 Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan MK

05 Click MK

06 Case Tracking dan Case Retrieval

07 Konsultasi dan Tanya Jawab Online

08 Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang



PERMOHONAN ELEKTRONIK





"Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

"Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah"

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

"Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi."

SIMPEL
(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, **termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).**

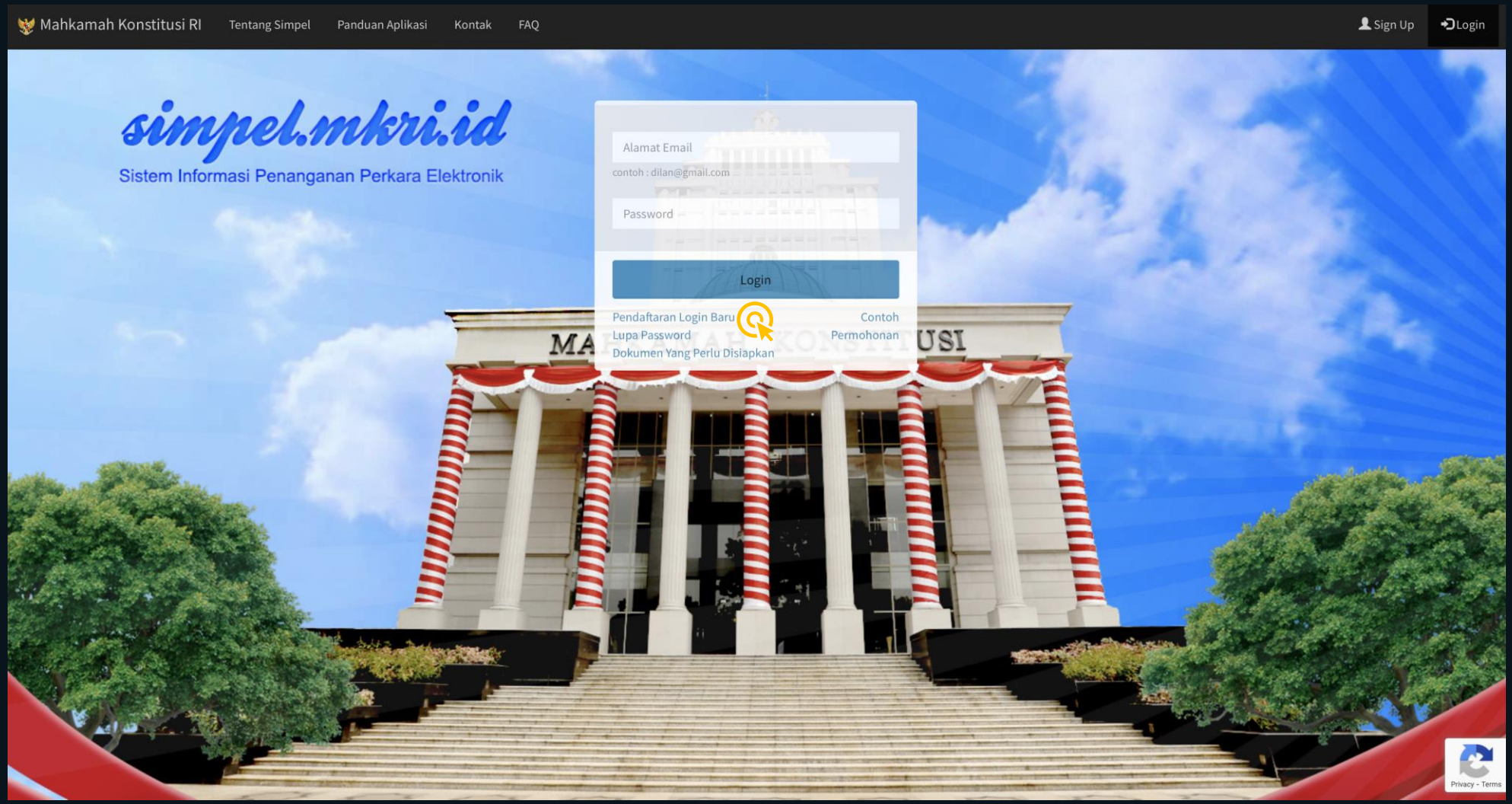
PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

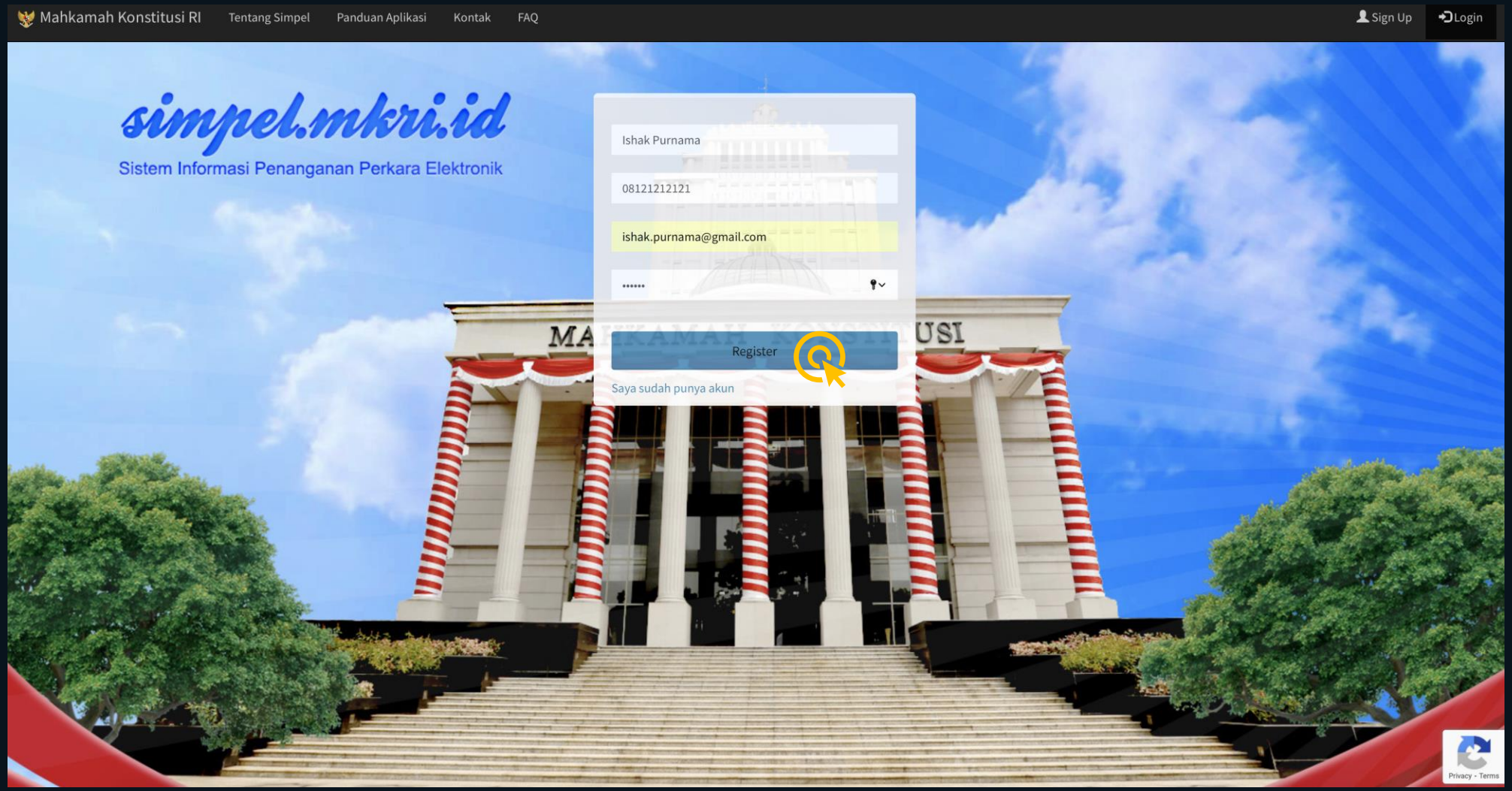
Permohonan Online (E-Perkara) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui E-Perkara, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



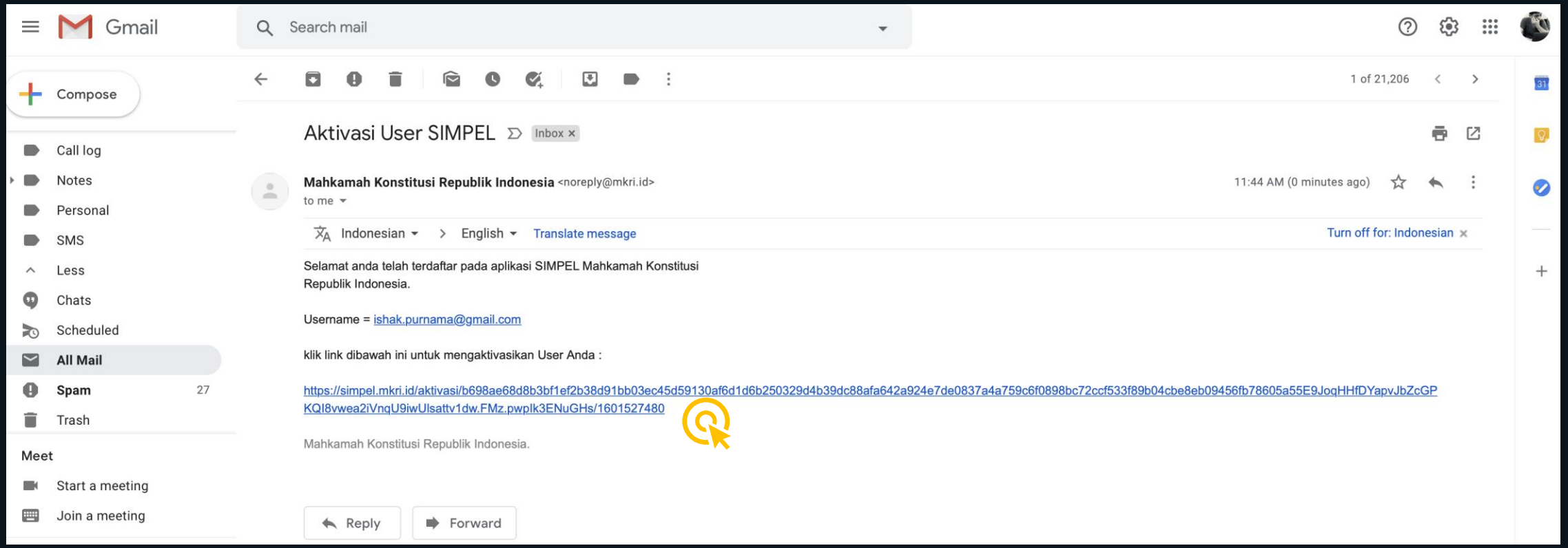
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



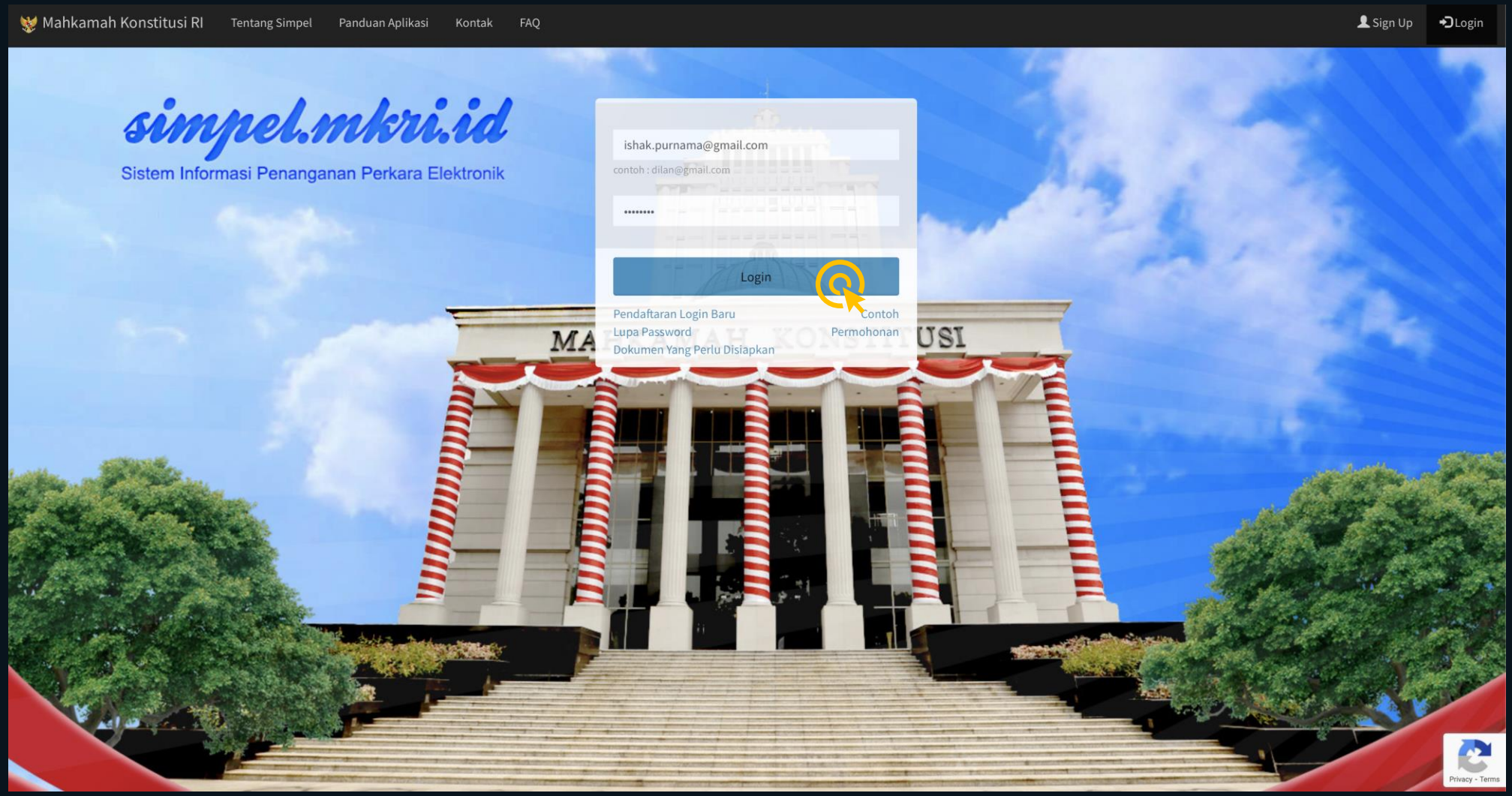
Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”. Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



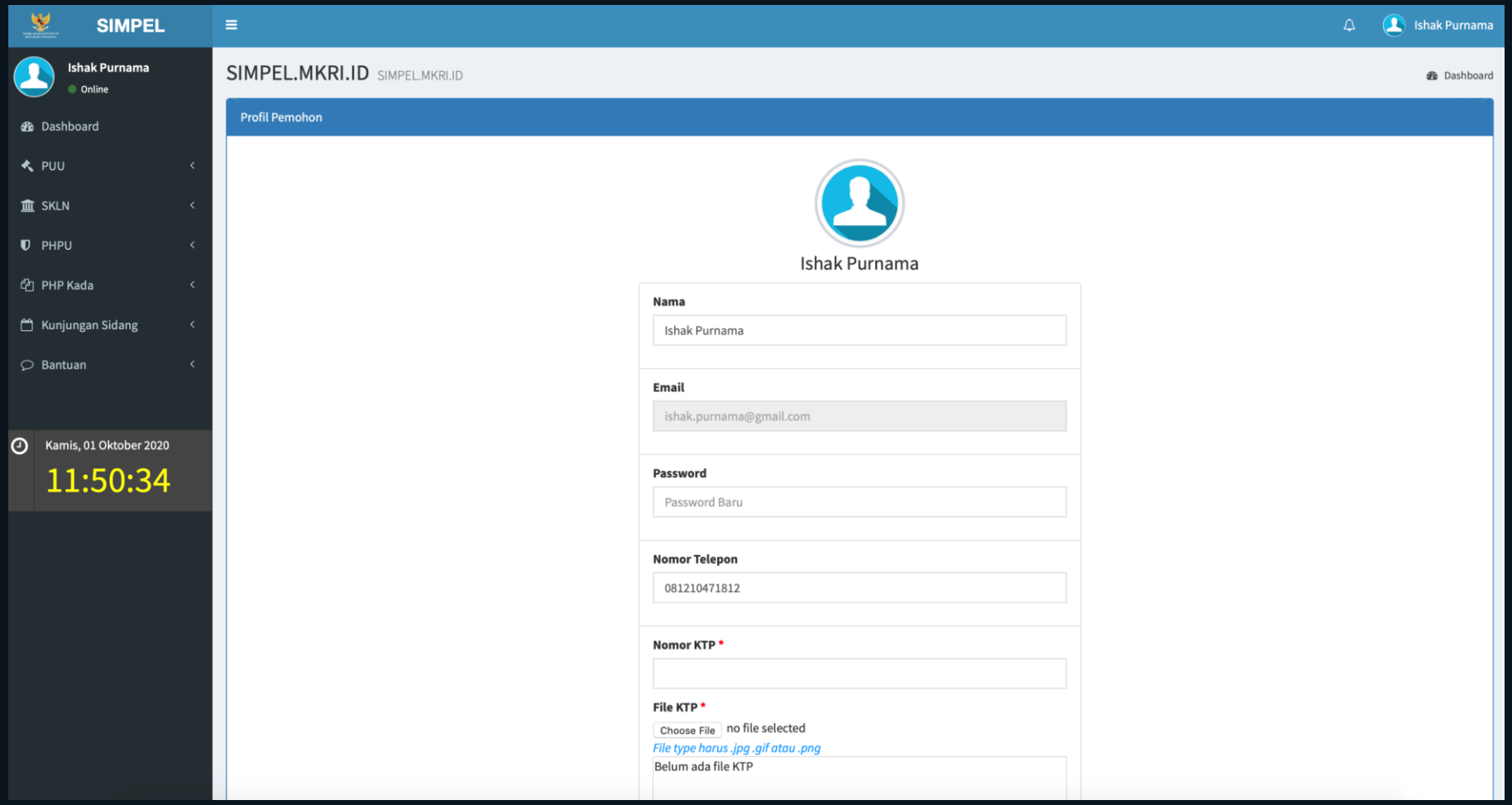
Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



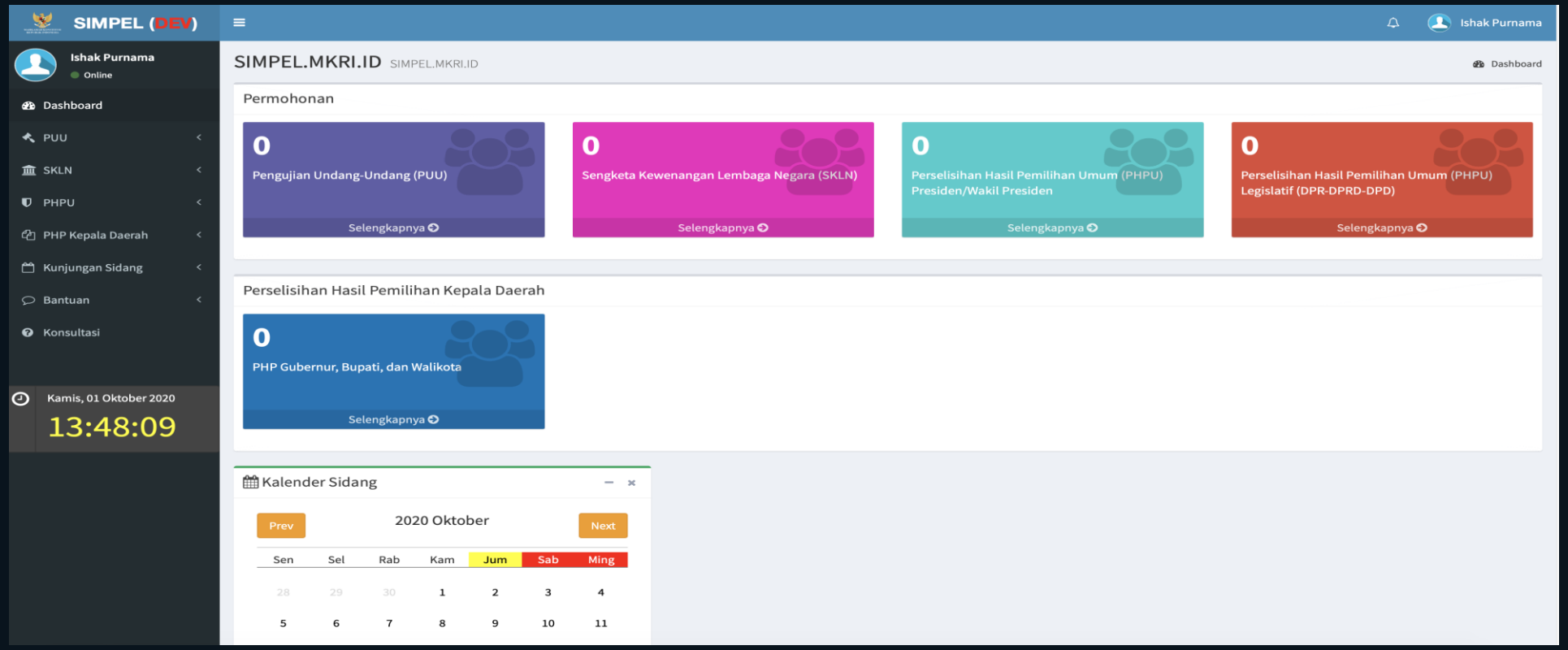
Setelah akun sudah teraktivasi selanjutnya masukkan alamat email dan password pada halaman login untuk masuk kedalam aplikasi simpel

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



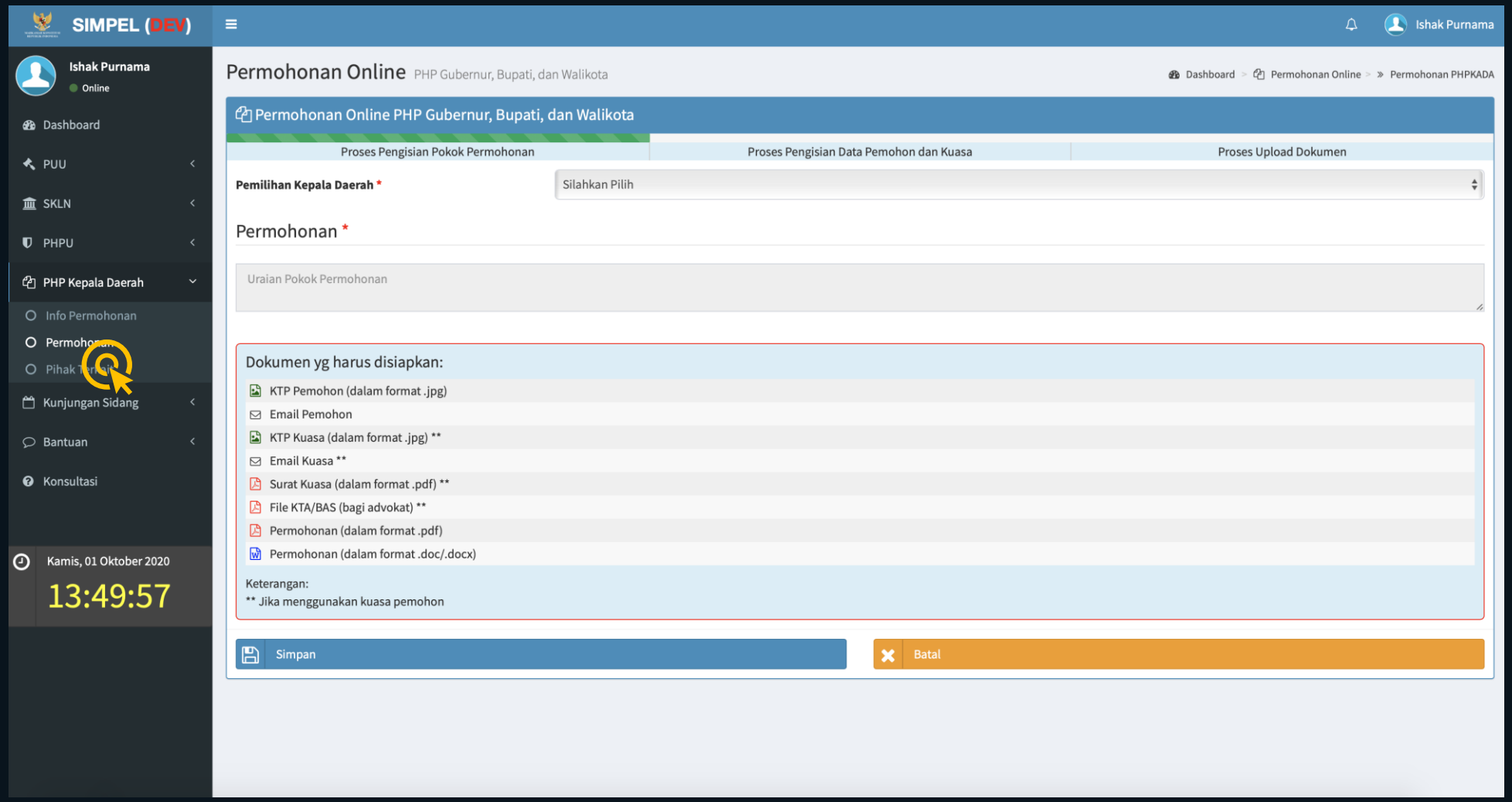
Setelah login untuk pertama kali, user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun. Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



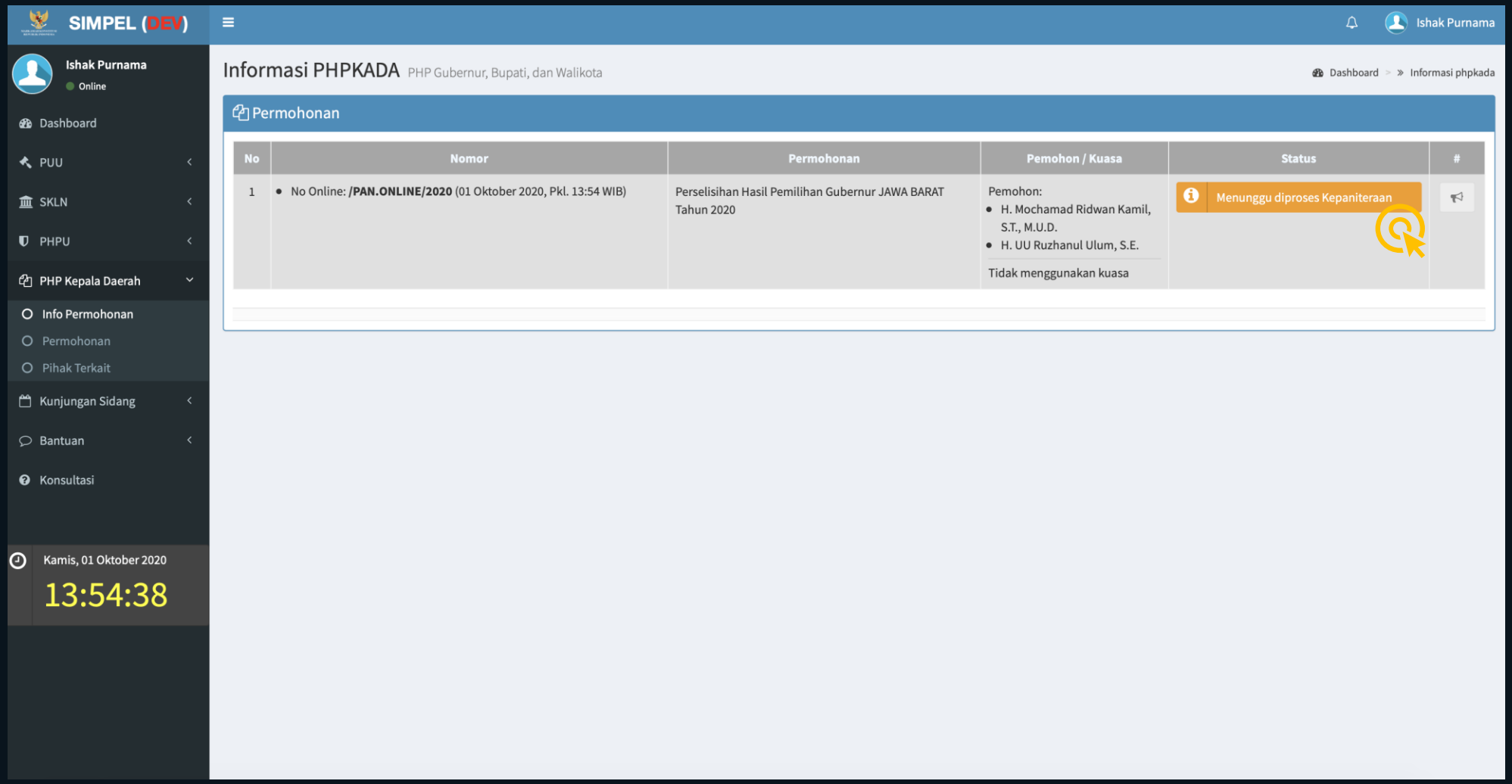
Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



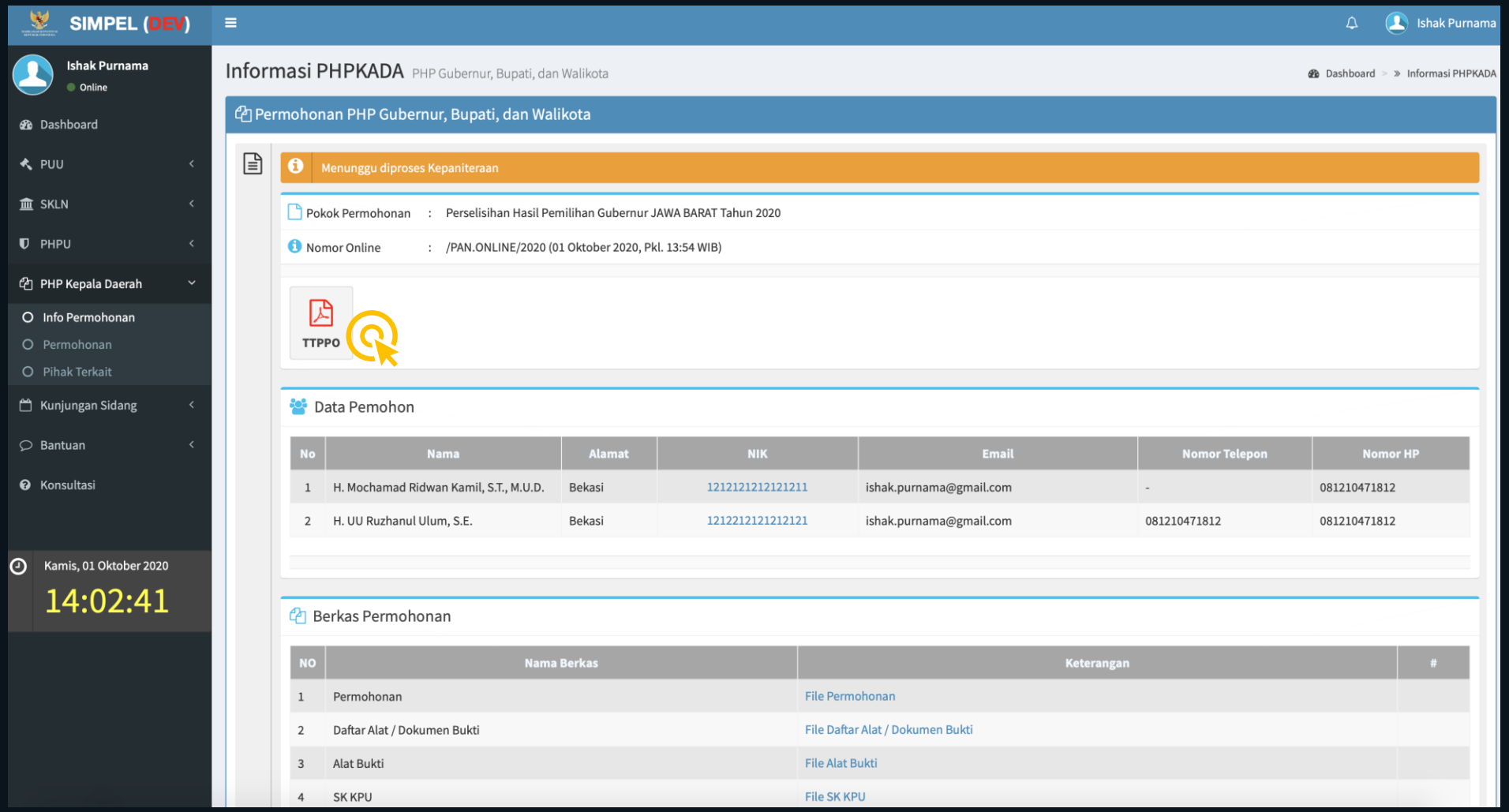
Untuk mengajukan permohonan PHP Kepala Daerah. Ikuti proses yang dipandu dalam penginputan form permohonan, kemudian nanti setelah selesai submit dan sukses maka akan diarahkan ke halaman status permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Halaman informasi permohonan menunjukkan status permohonan yang telah di submit. Untuk mencetak TTPO dan dokumen akta-akta dengan menekan tombol status.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Halaman detail informasi permohonan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

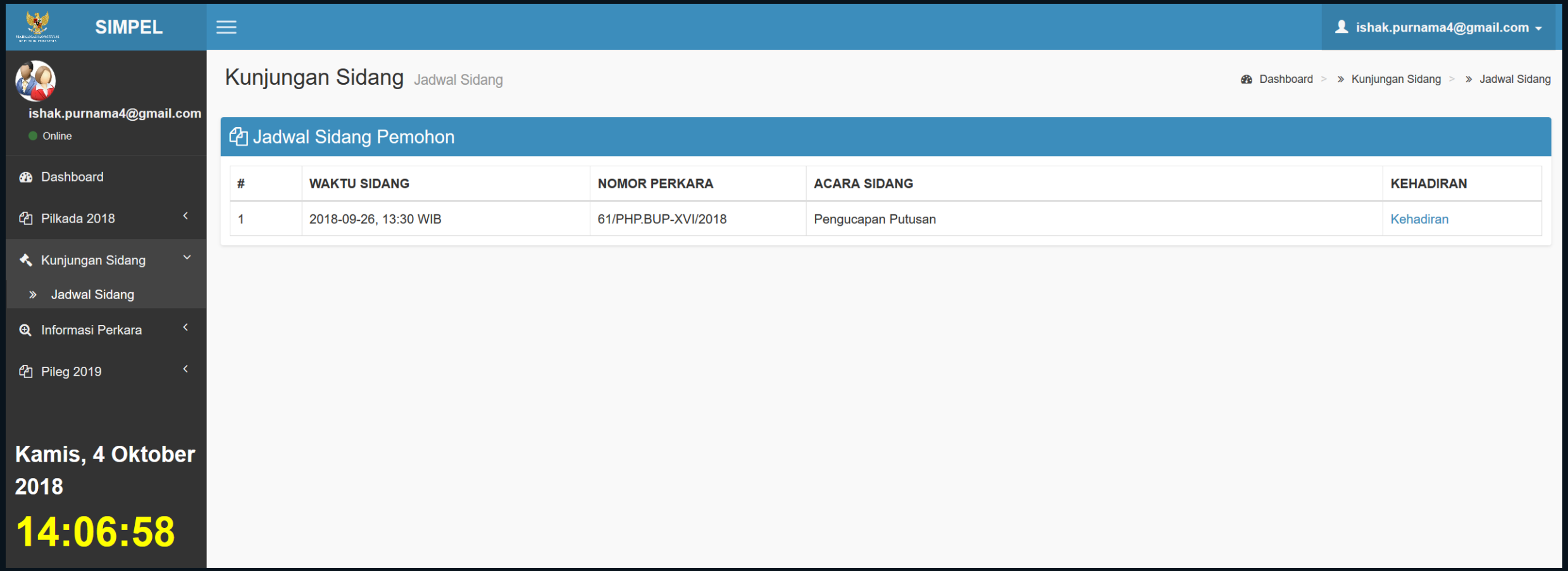
Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO

Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang



List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

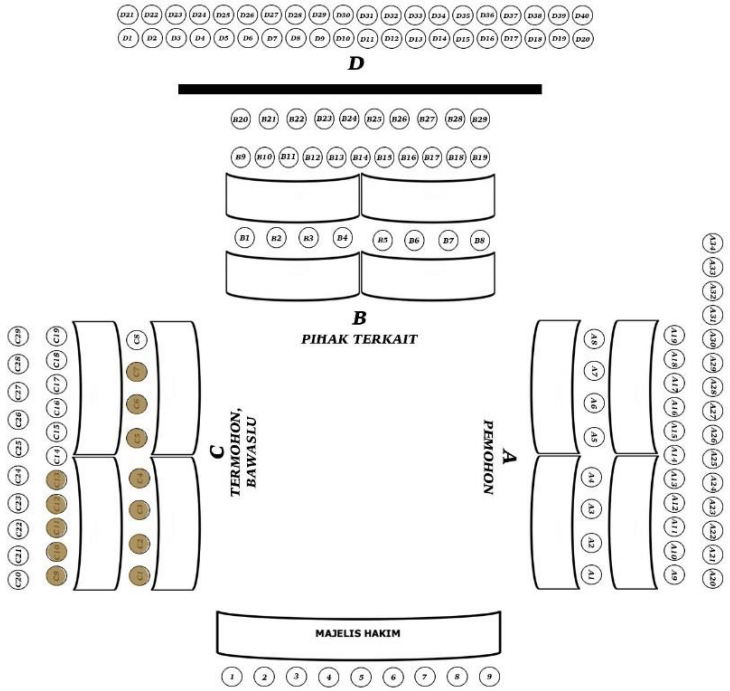
Penentuan Tempat Duduk Sidang

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang

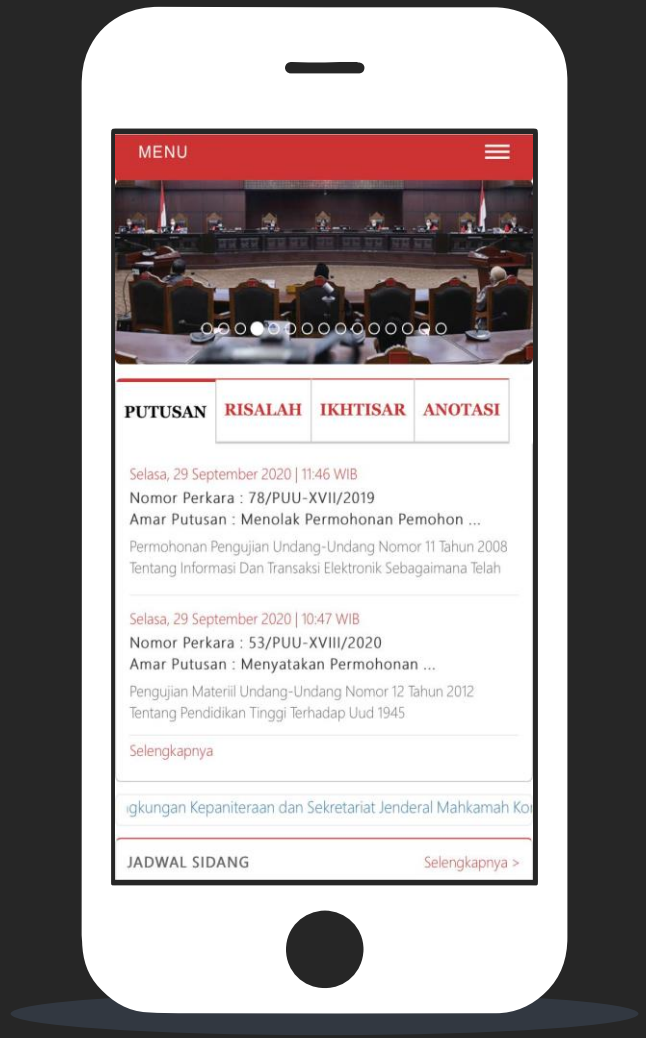
Dashboard > » Kunjungan Sidang > » Jadwal Sidang

Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3



Denah ruang sidang



WEBSITE MK

Dapat diakses di www.mkri.id

MENU WEBSITE



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Rabu, 07 Oktober 2020

English

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA | PERADILAN | HAKIM | PERKARA | PERATURAN | ADMINISTRASI UMUM

PUTUSAN | RISALAH | IKHTISAR | ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB
Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019
Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB
Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020
Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya



Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020 -

JADWAL SIDANG — Selengkapnya >

BERITA SIDANG | BERITA NON SIDANG | INFO PUBLIK | PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG

JADWAL SIDANG



Selengkapnya

esia TA 2020. :::

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 (2)	2	3	4
5 (4)	6 (2)	7 (3)	8 (7)	9	10	11
12 (3)	13 (3)	14 (4)	15	16	17	18
19	20 (2)	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Sidang Putusan Keduanya L Libur



Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

BERITA SIDANG | BERITA NON SIDANG | INFO PUBLIK | PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference









BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

si Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020 - 2023. ::: Pengumuman Hasil Review Penilaian Tahap II Penelitian Kompetitif Kerjasama antara Mahkamah Konstitu

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 (2)	2	3	4
5 (4)	6 (2)	7 (3)	8 (7)	9	10	11
12 (3)	13 (3)	14 (4)	15	16	17	18
19	20 (2)	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Sidang Putusan Keduanya L Libur

BERITA SIDANG | BERITA NON SIDANG | INFO PUBLIK | PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG - UNDANG


Hakim Konstitusi


Putusan


Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara


Pusdik MKRI



AACC



LPSE MKRI



JDIH


Gedung MK


Perpustakaan


Pusat Sejarah Konstitusi


Streaming dan Video Conference



Putusan Landmark



Majalah Konstitusi



Jurnal Consrev



Jurnal Konstitusi



Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran


Konsultasi

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya



Jh (download) secara gratis :::Pengumuman Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 202(

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 (2)	2	3	4
5 (4)	6 (2)	7 (3)	8 (7)	9	10	11
12 (3)	13 (3)	14 (4)	15	16	17	18
19	20 (2)	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Sidang Putusan Keduanya L Libur



Siaran Pers



Pengumuman





BERITA SIDANG | BERITA NON SIDANG | INFO PUBLIK | PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



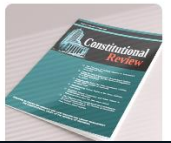
Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference









MENU DAN PORTAL PILIHAN





Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran


Konsultasi

BERITA SIDANG

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



2020 UNDANG - UNDANG


Hakim Konstitusi


Putusan


Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara


Pusdik MKRI


AACC



LPSE MKRI



JDIH


Gedung MK


Perpustakaan


Pusat Sejarah Konstitusi


Streaming dan Video Conference



Putusan Landmark



Majalah Konstitusi



Jurnal Consrev



Jurnal Konstitusi


2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110

TANYA JAWAB



DEWAN ETIK



HUBUNGI MK



WHISTLEBLOWING



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



Tracking Perkara

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

PENELUSURAN PERKARA MAHKAMAH KONSTITUSI

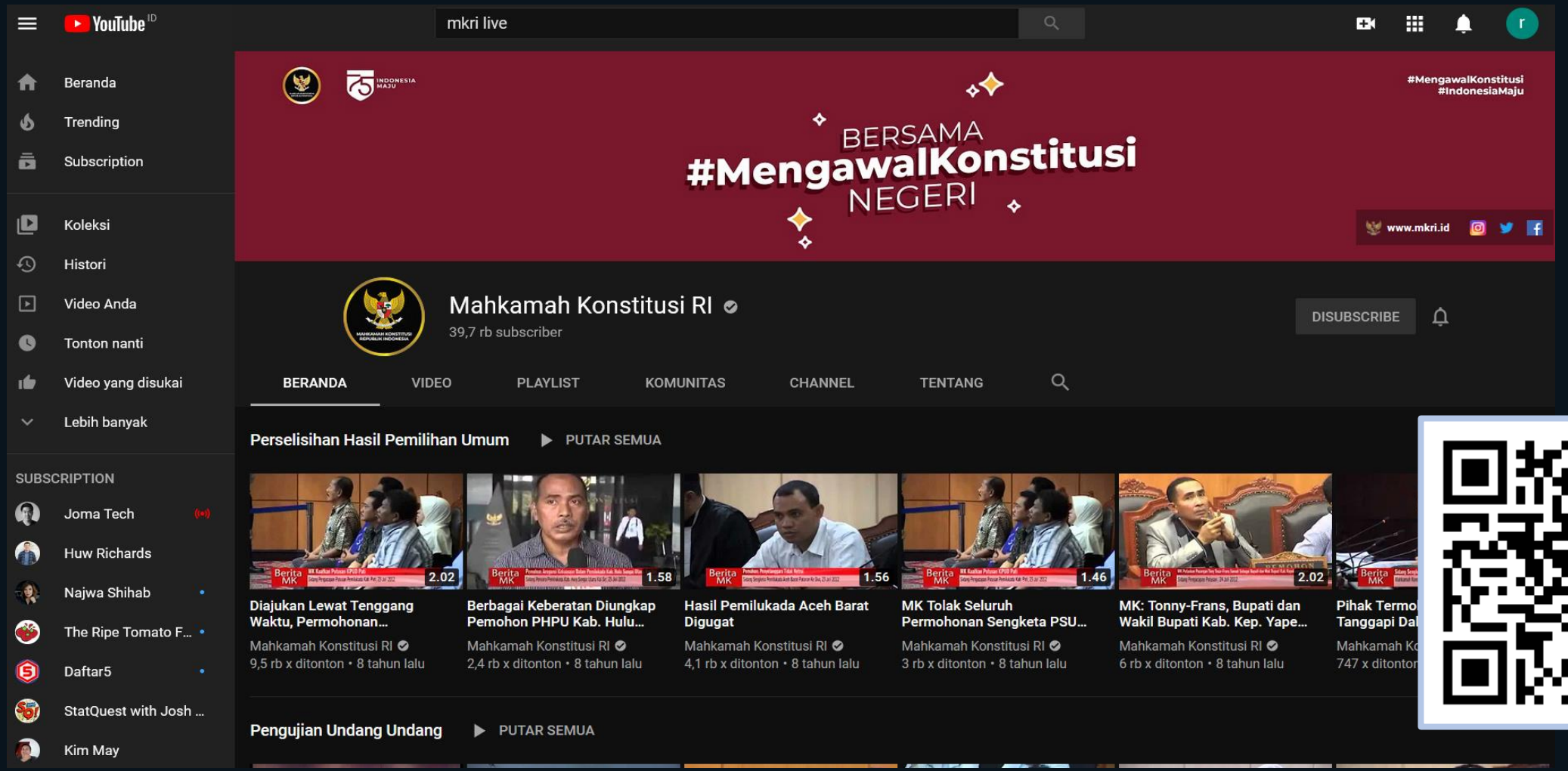
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945



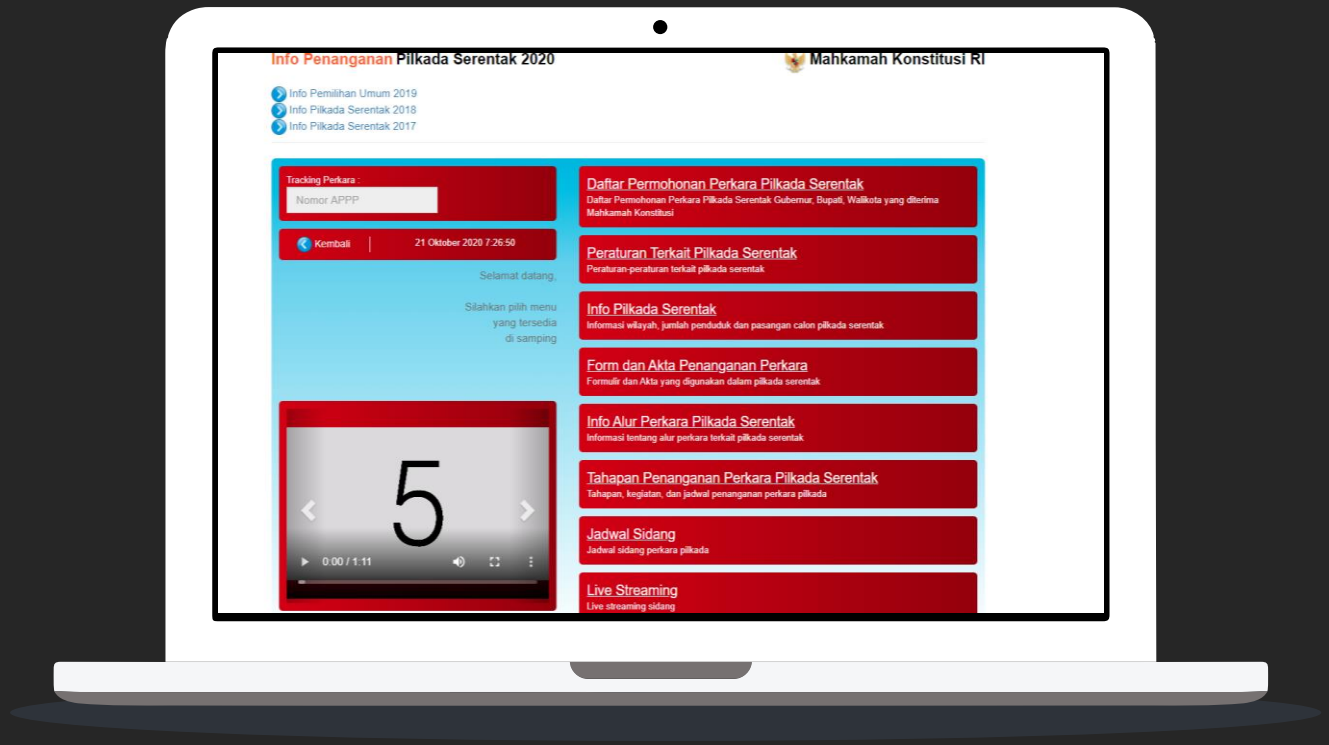
Monitoring status perkara

Pelayanan Persidangan live Youtube

Link :: https://www.youtube.com/user/mahkamahkonstitusi



Portal Informasi Pilkada 2020



Dapat di akses di laman MK

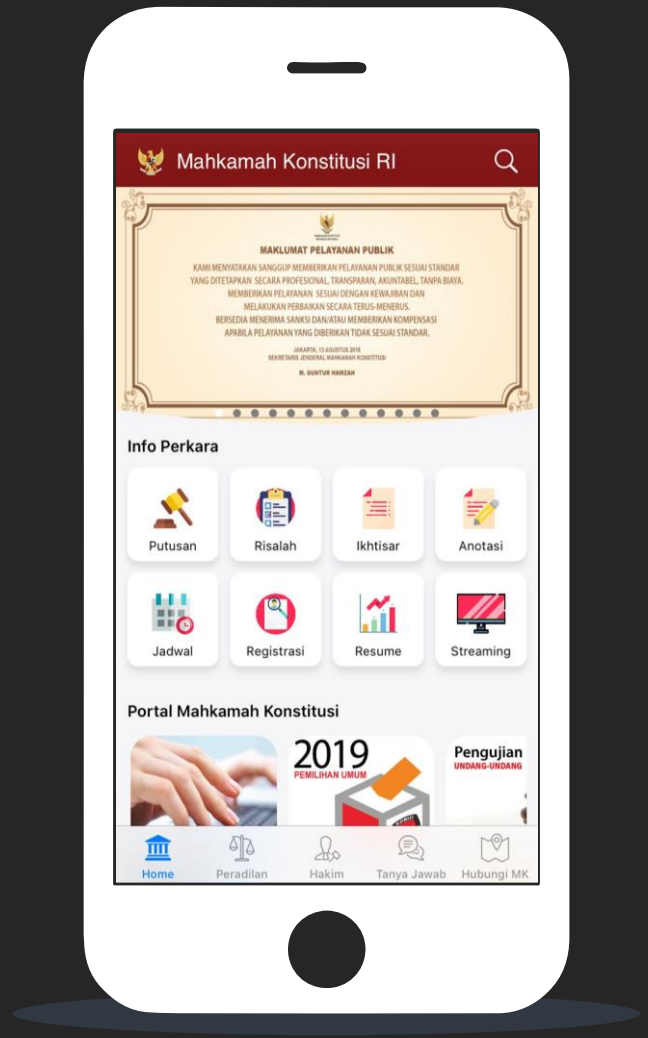
Memberikan informasi seputar Pilkada 2020

CONTOH PORTAL INFORMASI PILKADA 2018

Mahkamah Konstitusi RI

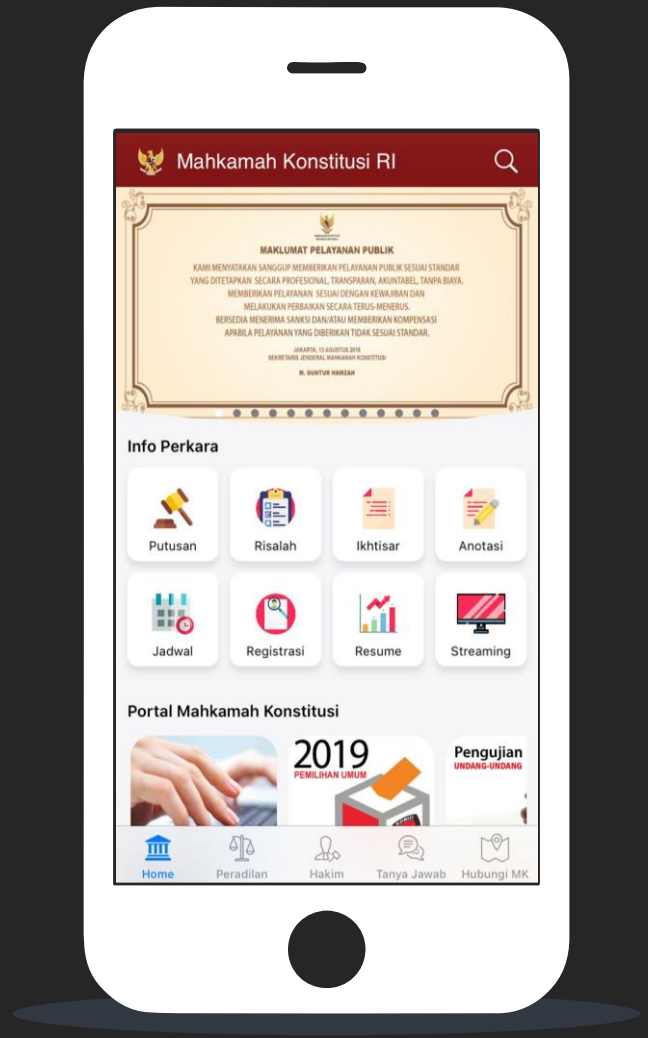
Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2018

NO	TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Kamis, 05 Juli 2018 10:14:00 WIB	PHP Walikota Tegal Tahun 2018 APPP Nomor : 1/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 1/PHP.KOT-XVI/2018	Pemohon: **K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E.** dan **Tanty Prasetyoningrum**	Kuasa Pemohon: Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., F.A. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., dkk	1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Perbaikan Permohonan 6. Keterangan Bawaslu 7. Perbaikan Permohonan 8. Jawaban Termohon 9. Keterangan Pihak Terkait	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
			Termohon: KPU Tegal	Kuasa Termohon: Ali Nurdin, S.H. S.T.		
			Pihak Terkait: H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhammad Jumadi, S.T., M.M. (Nomor Urut 3)	Kuasa Pihak Terkait: R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk.		
2	Jumat, 06 Juli 2018 14:27:00 WIB	PHP Walikota Pare-Pare Tahun 2018 APPP Nomor : 2/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018	Pemohon: **DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M.** dan **Asriady Samad, A.Md.**	Kuasa Pemohon: Andi Lilling, S.H., dkk	1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Keterangan Pihak Terkait 6. Keterangan Bawaslu 7. Jawaban Termohon 8. Kesimpulan	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
			Termohon: KPU Pare-Pare	Kuasa Termohon: Marhumah Majid, S.H., M.H dkk		
			Pihak Terkait: Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim (Nomor Urut 1)	Kuasa Pihak Terkait: Anwar, S.H. dkk		

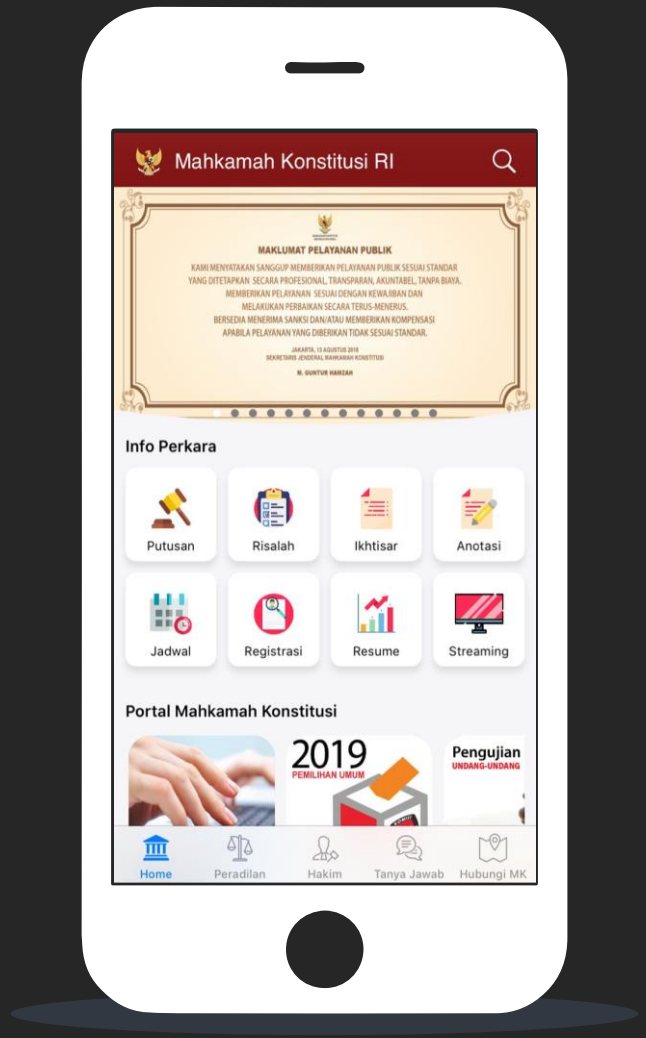


CLICK MK

Download on the and



CLICK MK
Versi Android



CLICK MK Versi IOS

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference, Zoom)



zoom

PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE)*

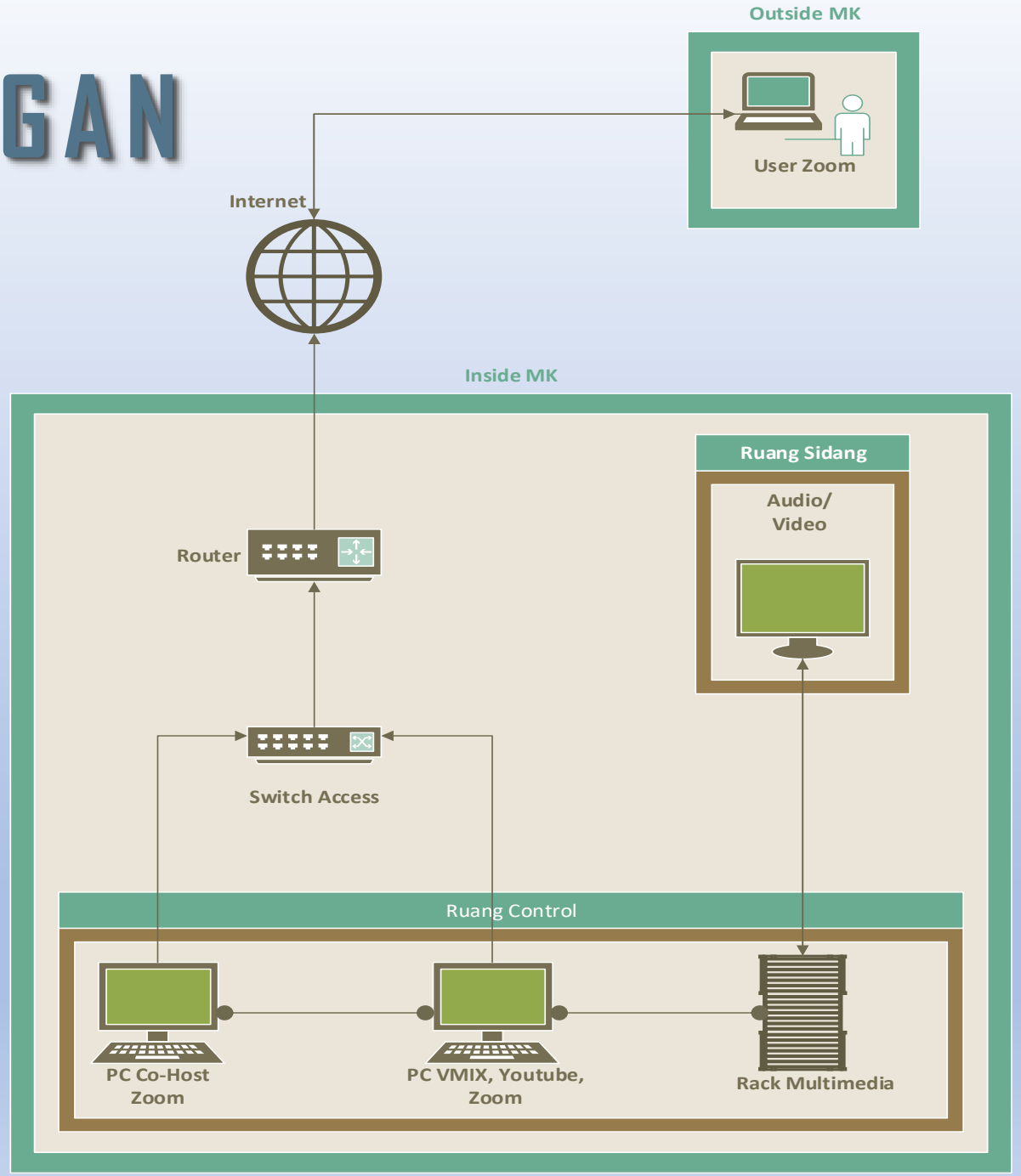
Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

"Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline."

TOPOLOGI PERSIDANGAN



PERSIDANGAN VIRTUAL

PERSIDANGAN ONLINE MENGGUNAKAN ZOOM

zoom

YouTube

Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi

PERSIDANGAN SECARA LIVE STREAMING DI KANAL YOUTUBE DAN WEBSITE MK

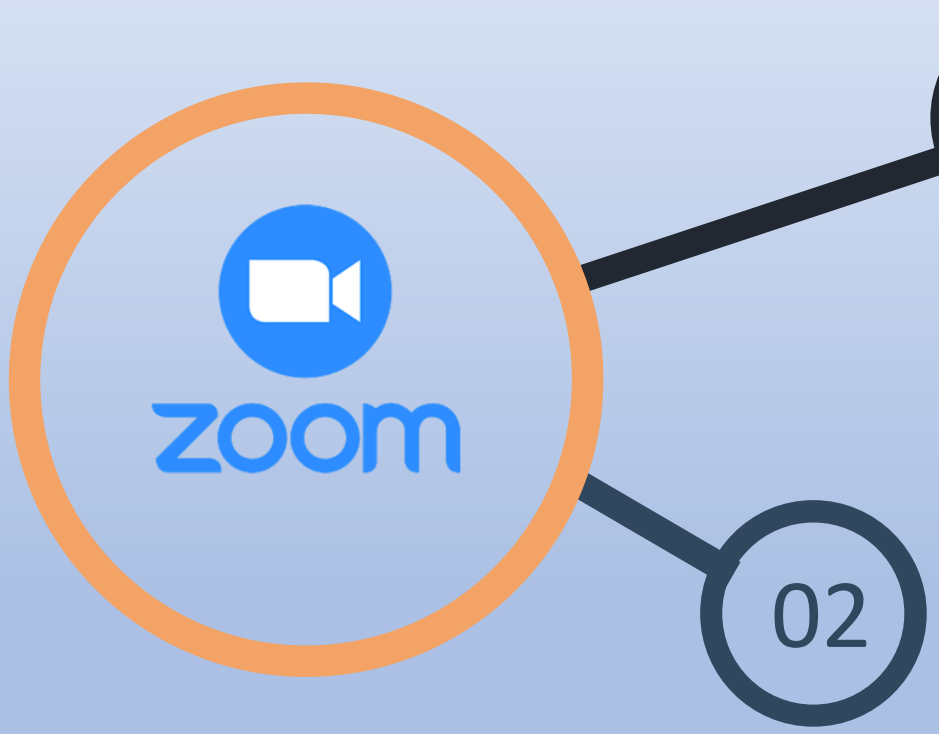
MKRI.ID

Live Streaming

Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi

PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*ZOOM*)

Tahap Persiapan



IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

IT & Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

Alur Persidangan Online

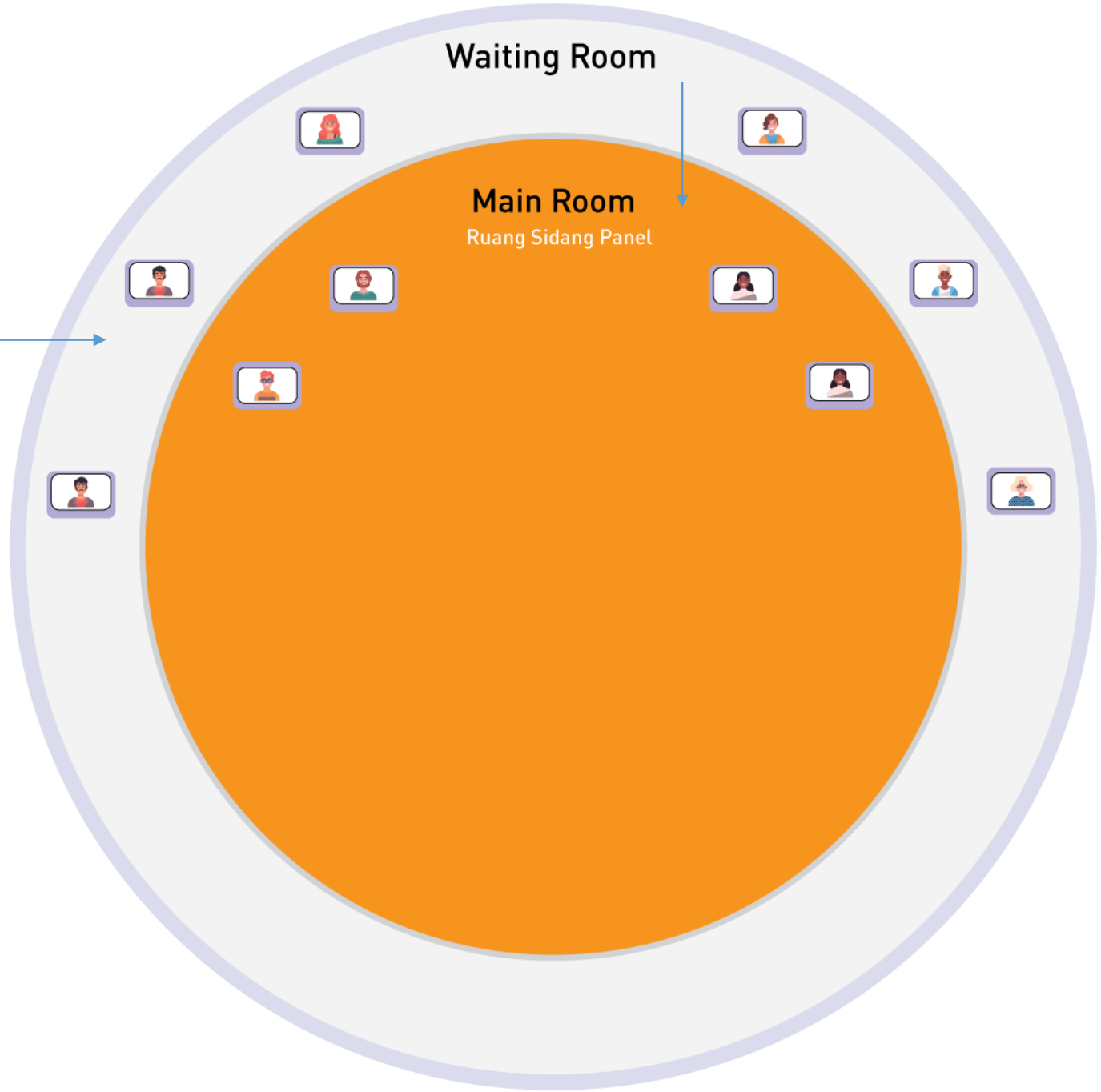


1. Para pihak Menyiapkan device (laptop/smartphone/tab) kemudian join zoom melalui link yang sudah dikirimkan sehari sebelumnya

2. Para pihak menunggu Host/Co-Host melakukan admit (approve) di waiting room

3. Host/Co-Host melakukan admit (approve) akun zoom para pihak sesuai daftar yang diberikan Juru Panggil

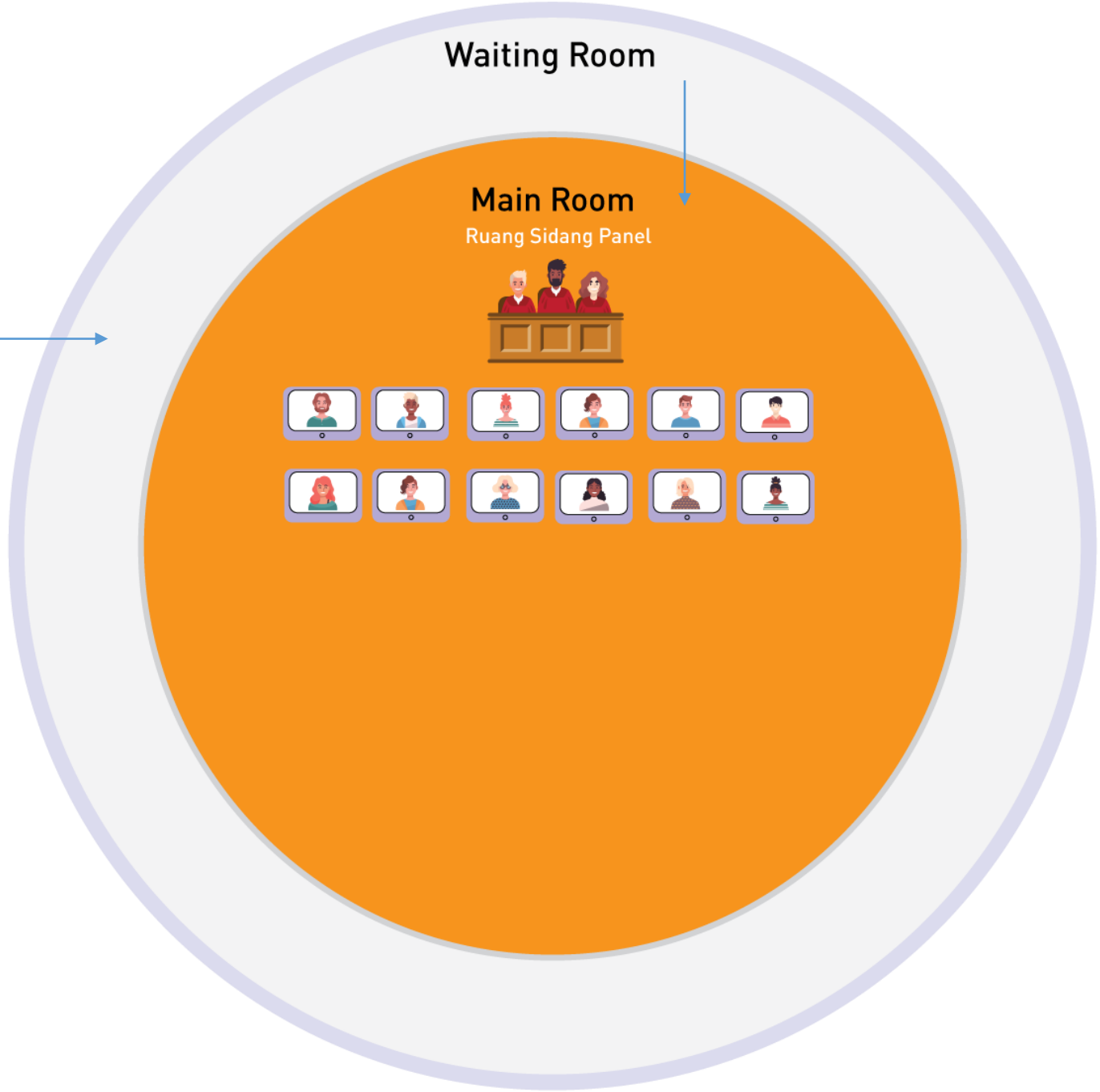




Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**

Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengakapan para pihak baik itu **Format Nama**, **Pakaian, dll**.





Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan

PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE*)

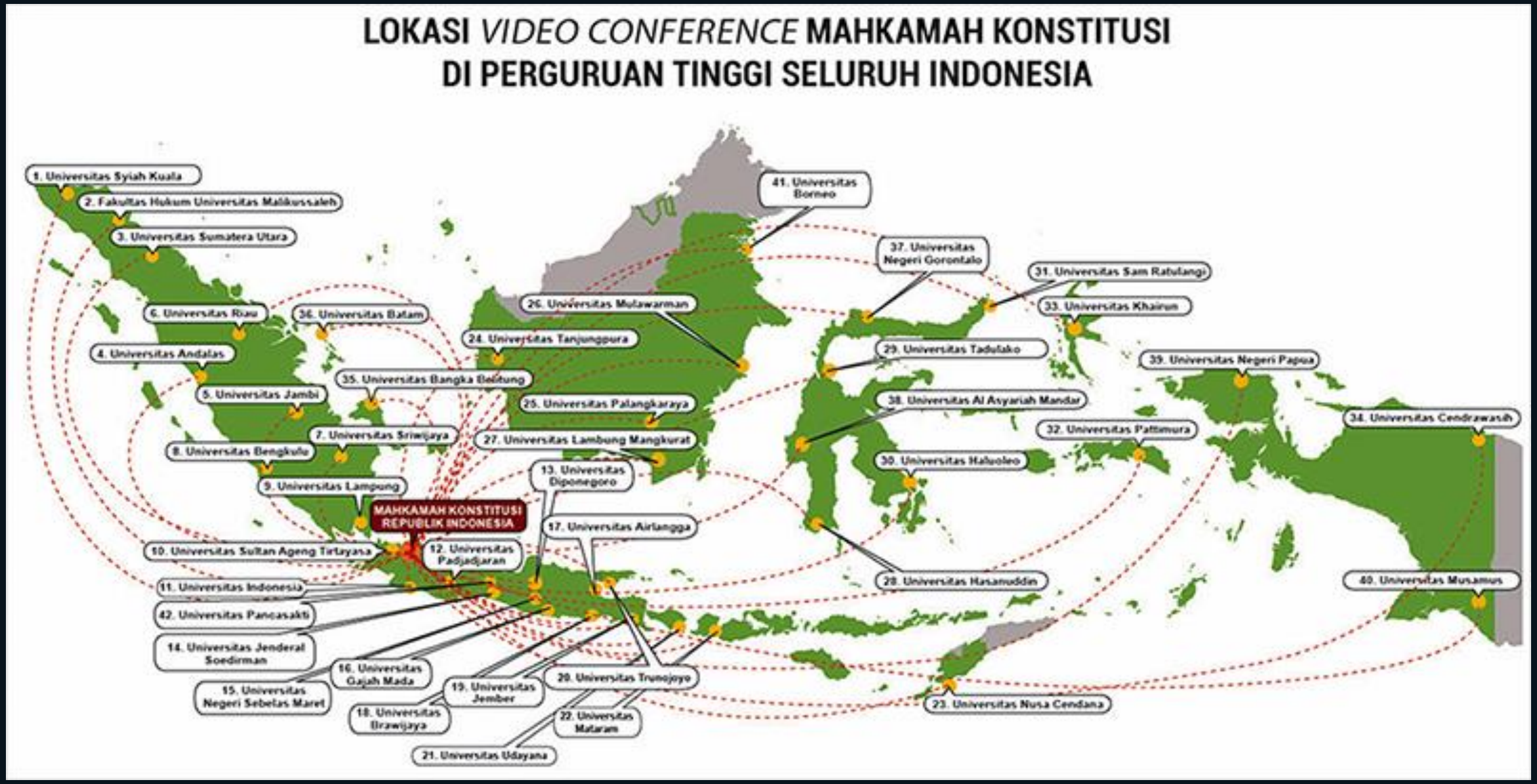
NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat

NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference)*

NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
24	FH Universitas Tanjungpura	Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat
25	FH Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
26	FH Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245
29	FH Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara)	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232
31	FH Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	FH Universitas Patimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
33	FH Universitas Khairun (Ternate)	Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719
34	FH Universitas Cenderawasih	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358
35	FH Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
36	FH Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
37	FH Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
38	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
39	Universitas Negeri Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
40	FISIP Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke
41	FH Universitas Borneo	Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170
42	FH Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference)*



Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference)*



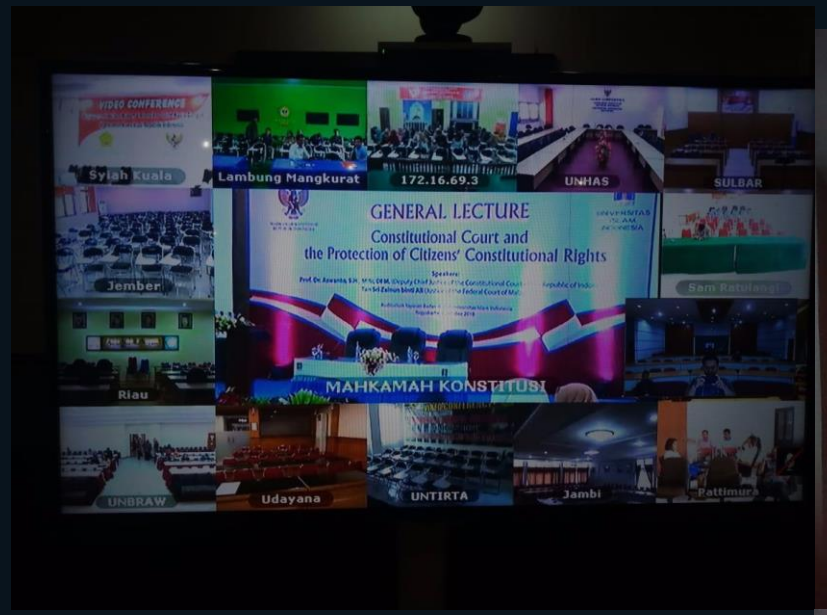


Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

6 Agustus 2018

Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*









Kuliah Umum /
General Lecture
dan Symposium
Nasional /
International



Tanda Tangan Elektronik

Aswanto	**Saldi Isra**
ttd.	**ttd.**
Arief Hidayat	**Wahiduddin Adams**
ttd.	**ttd.**
Suhartoyo	**Manahan M.P. Sitompul**
ttd.	**ttd.**
Enny Nurbaningsih	**Daniel Yusmic P. Foekh**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

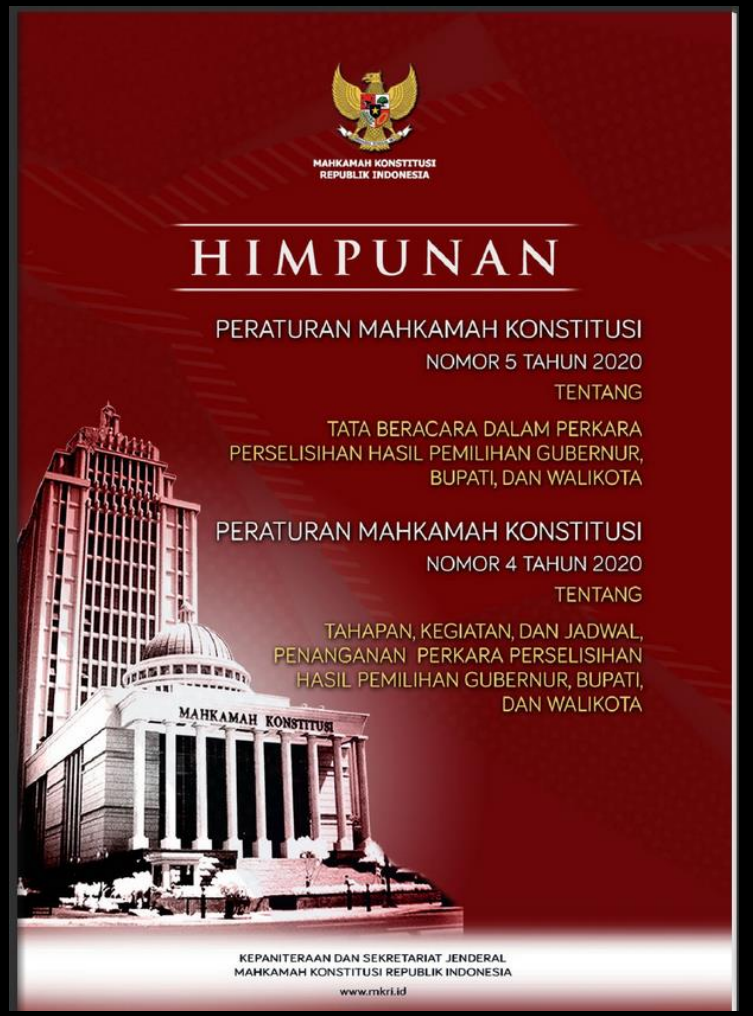
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Ebook Himpunan Peraturan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada

online.fliphtml5.com/zqllp/wcne

QRCode



TERIMA KASIH

NOTA DINAS
NOMOR 104/2600/DK.00/06/2021

Kepada Yth : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKWN dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
Tanggal : 02 Juni 2021

Dengan hormat, sehubungan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Adapun hasil rapat koordinasi kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021;
2. Pembiayaan kegiatan meliputi biaya narasumber dan penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi;
3. Biaya paket data, transportasi, akomodasi, serta konsumsi menjadi beban masing-masing peserta;
4. Konsep kegiatan ini adalah Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan usulan materi dan narasumber sebagai berikut:

No.	Materi	Narasumber
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	**Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum** / Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	**Prof. Dr. Nimatul Huda** / Dr. Ilham Hermawan
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	**Dr. Hesti Armiwulan, S.H.** / Prof. Amzulian Rifai

No.	Materi	Narasumber
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	**Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.** / Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Panitera Pengganti: Rizki Amalia
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Panitera Pengganti: 1. I Made Gede WTK 2. Hani Adhani 3. A. Edi Subiyanto 4. Ria Indriyani 5. AA. Dian Onita 6. Nurlidya Stephanny 7. Fransisca 8. Jefri Porkonanta
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Pusat TIK
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Peneliti: 1. Titis Anindyajati 2. Alboin Pasaribu 3. Suryo Gilang 4. Anna Triningsih 5. Luthfi Widagdo 6. Andriani W.N 7. Ananthia Ayu 8. Rima Yumana Y

5. Terlampir kami sampaikan konsep jadwal kegiatan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Sekjen. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Nomor : 243/DK.06.00/05/2021 18 Mei 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Daftar Nama Terlampir
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 16 September 2021 secara daring melalui aplikasi *meeting online*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 31 Mei 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan :
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Lampiran Surat
Nomor : 243/DK.06.00/05/2021
Tanggal : 18 Mei 2021

Daftar Peserta Rapat

1. Imam Margono
2. Nanang Subekti
3. Ardiansyah Salim
4. Santhy Kustrihardiani
5. Bambang Sukmadi
6. Melati Kusuma Wardani
7. Nanda Adityansyah
8. Hadian Taofik Rahman
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Muhlis Nova
11. Bangkit Panji Anarogo
12. Chafid Sugianto
13. Edwin Rivano
14. Fazlur Rahman El Islamy
15. Suhardi
16. Angga Putri Gardina

Nomor : 246/DK.06.00/05/2021 18 Mei 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn.
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 16 September 2021 secara daring melalui aplikasi *meeting online*.

Selanjutnya, kami mengharapkan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dalam penyelenggaraan kegiatan, terutama dalam hal penentuan dan pemanggilan peserta. Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud, yang meliputi narasumber dan bahan materi akan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak beserta **2 (dua)** orang pegawai/staf untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 31 Mei 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdri. Angga Putri Gardina, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 818/DK.00/04/2021 23 April 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Maranatha
Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn.
di Tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Bapak Nomor 014/FH-UKM/EXT III/2021 bertanggal 25 Maret 2021 tentang permohonan tindak lanjut kerjasama Penyelenggaraan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak dan Tim untuk hadir secara daring pada:

Hari, tanggal : Selasa, 27 April 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Join Zoom Meeting
ID : 856 0131 4726
Passcode : 401285
Agenda : Pembahasan Tindak Lanjut Kerjasama HKWN

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 820/DK.00/04/2021 23 April 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Daftar Nama Terlampir
di Tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Bapak Nomor 014/FH-UKM/EXT III/2021 bertanggal 25 Maret 2021 tentang permohonan tindak lanjut kerjasama Penyelenggaraan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak/Ibu untuk hadir secara daring pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 27 April 2021
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Join Zoom Meeting ID : 856 0131 4726 Passcode : 401285
Agenda	:	Pembahasan Tindak Lanjut Kerjasama HKWN

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan :
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Lampiran Surat
Nomor : 820/DK.00/04/2021
Tanggal : 23 April 2021

Daftar Peserta Rapat

1. Imam Margono
2. Nanang Subekti
3. Ardiansyah Salim
4. Santhy Kustrihardiani
5. Bambang Sukmadi
6. Melati Kusuma Wardani
7. Nanda Adityansyah
8. Hadian Taofik Rahman
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Muhlis Nova
11. Bangkit Panji Anarogo
12. Chafid Sugianto
13. Edwin Rivano
14. Fazlurrahman El Islamy
15. Suhardi
16. Angga Putri Gardina

Nomor : 862/DK.06.00/09/2021 07 September 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Ykh.
Panitera Pengganti Tk. I
Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 16 September 2021
Waktu	:	10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.

GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
5.	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: – Kewenangan MK; – Kedudukan hukum Pemohon; – Alasan Permohonan (formil & materiil); – Kerugian Konstitusional; – Petitum. b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	Ceramah & Diskusi	120 Menit

Nomor : 863/DK.06.00/09/2021 07 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Achmad Edi Subiyanto**
2. **Mardian Wibowo**
3. **Hani Adhani**
4. **AA. Dian Onita**
5. **Wilma Silalahi**
6. **Fransisca**
7. **Jefri Porkonanta Tarigan**
8. **I Made Gede WTK**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 16 September 2021
Waktu	:	13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono - NIP. 19690331 198912 1 001
Digital Signature
mk-304890248210907095534

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Nomor : 864/DK.06.00/09/2021 07 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

Kepada Ykh. Saudara/i:
1. **Anna Triningsih**
2. **Andriani Wahyuningtyas Novitasari**
3. **Abdul Ghoffar**
4. **Mohammad Mahrus Ali**
5. **Rima Yumana Yustikaningrum**
6. **Suryo Gilang Romadlon**
7. **Ananthia Ayu Devitasari**
8. **Intan Permata Putri**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Jumat, 17 September 2021
Waktu	:	09.30 s.d. 11.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi *Zoom Meeting* (*Link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Nomor : 867/DK.06.00/09/2021 07 September 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 16 September 2021
Waktu	:	07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Panitera Mahkamah Konstitusi.

GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi; b. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; d. Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; e. Komponen karakteristik Hukum Acara MK antara lain: – Kekhasan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, baik berupa persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata, pidana, dan TUN; – Persidangan terbuka untuk umum; – Mahkamah Konstitusi bersifat pasif (tidak boleh mencari perkara) dan hakim bersifat aktif di persidangan (dalam rangka mencari kebenaran materiil); – MK adalah judicial rerview (pengujian UU); – Independen dan imparsial – *Conditionally constitutional* dan *Unconditionally constitutional* – *Non executor/self-implementing* – *Dissenting* dan *concuring opinion*	Ceramah & Diskusi	120 Menit

		f. Asas-Asas Hukum Acara MK: – *Speedy administration of justice* (peradilan cepat, sederhana, dan tanpa dipungut biaya). – *Ius curia novit* (tidak boleh menolak perkara yang diajukan) – Hak didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*) – Asas Praduga keabsahan (*rechmategheid/preasumptio iustae causa*) – Asas Final dan Mengikat (*final and binding*) – *Erga omnes* (berlaku untuk seluruh warga negara) – *Ultra petita* (MK dapat mengabulkan lebih dari apa yang dimintakan) – *Nebis in idem (MK tidak boleh mengadili perkara yang sama, kecuali terdapat alasan yang berbeda)* – *Unus testis Nullus testis (satu saksi bukan saksi)* – *Actori incumbit probatio (siapa yang mendalilkan, maka dia wajib membuktikan)* – *Beyond reasonable doubt* (hakim harus mencari kebenaran materiil yang tanpa diragukan) – Larangan *contempt of court* (larangan menghina peradilan) g. Perkembangan Hukum Acara MK; h. Sumber Hukum Acara MK.		

Nomor : 868/DK.06.00/09/2021 07 September 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth.
Dr. Hesti Armiwulan, S.H.
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 15 September 2021
Waktu	:	13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Tembusan:
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM; b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional; c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM; e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.	Ceramah & Diskusi	120 Menit

Nomor : 876/DK.06.00/09/2021 08 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan dan Permohonan Memberikan Sambutan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn.
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting.*

Dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan dimaksud sekaligus memberikan sambutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 14 September 2021
Waktu : 19.00 – 21.00 WIB
Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*
(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 900/DK.06.00/09/2021 10 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

Kepada Ykh. Saudara:
1. Mazmur Alexander Manik
2. Ishak Purnama
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Jumat, 17 September 2021
Waktu	:	07.15 s.d. 09.15 WIB
Tempat	:	Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Nomor : 901/DK.06.00/09/2021 10 September 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth.
Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 15 September 2021
Waktu	:	10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-Dasar Penyelenggaran Negara; c. Sistem Pemerintahan; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip *Check and Balances);* e. Otonomi Daerah.	Ceramah & Diskusi	120 Menit

Nomor : 982/DK.06.00/09/2021 12 September 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth,
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 15 September 2021
Waktu	:	07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Konstitusi dan Konstitusionalisme

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional; c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi; d. Perubahan Konstitusi.	Ceramah & Diskusi	120 Menit

Nomor : 987/DK.06.00/09/2021 13 September 2021
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.
Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha** pada tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menghadiri rapat teknis persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal	:	Senin, 13 September 2021
Waktu	:	13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Di kediaman masing-masing secara daring (*Link rapat akan disampaikan lebih lanjut*)
Agenda	:	Rapat Persiapan Kegiatan PPHKWN bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha dan Kelayakan Efisiensi Bandwidth Limiter bagi Kualitas HD pada Primary Broadcast Kegiatan Online.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

SURAT TUGAS

2251/DK.06.00/09/2021

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf ***a.***

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

Kepada	:	**Nama Terlampir**
Untuk	:	Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha
Hari/tanggal	:	Selasa s.d. Jumat/ 14 s.d. 17 September 2021
Waktu	:	**Jadwal Terlampir**
Tempat	:	Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal

M. Guntur Hamzah

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 2251/DK.06.00/09/2021
Tanggal: 14 September 2021

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	14 September 2021
2	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.	Narasumber	17 September 2021
3	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	16 September 2021
4	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Narasumber	15 September 2021
5	Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.	Narasumber	15 September 2021
6	Dr. Hesti Armiwulan, S.H.	Narasumber	15 September 2021
7	Syukri Asy'ari	Narasumber	16 September 2021
8	Achmad Edi Subiyanto	Narasumber	16 September 2021
9	Mardian Wibowo	Narasumber	16 September 2021
10	Hani Adhani	Narasumber	16 September 2021
11	Anak Agung Dian Onita	Narasumber	16 September 2021
12	Wilma Silalahi	Narasumber	16 September 2021
13	Fransisca	Narasumber	16 September 2021
14	Jefri Porkonanta Tarigan	Narasumber	16 September 2021
15	I Made Gede WTK	Narasumber	16 September 2021
16	Mazmur Alexander Manik	Narasumber	17 September 2021
17	Ishak Purnama	Narasumber	17 September 2021
18	Anna Triningsih	Narasumber	17 September 2021
19	Andriani Wahyuningtyas Novitasari	Narasumber	17 September 2021

18	Abdul Ghoffar	Narasumber	17 September 2021
19	Mohammad Mahrus Ali	Narasumber	17 September 2021
20	Rima Yumana Yustikaningrum	Narasumber	17 September 2021
21	Suryo Gilang Romadlon	Narasumber	17 September 2021
22	Ananthia Ayu Devitasari	Narasumber	17 September 2021
23	Intan Permata Putri	Narasumber	17 September 2021
24	Imam Margono	Moderator	16 September 2021
25	Nanang Subekti	Moderator	15 September 2021
26	Ardiansyah Salim	Moderator	15 September 2021
27	Santhy Kustrihardiani	Moderator	16 September 2021
28	Melati Kusuma Wardani	Moderator	15 September 2021
29	Bangkit Panji Anarogo	Moderator	16 dan 17 September 2021
30	Ganggas Wibisono	Moderator	16 dan 17 September 2021
31	Suhardi	Moderator	16 dan 17 September 2021
32	Angga Putri Gardina	Moderator	16 dan 17 September 2021
33	Chafid Sugianto	Moderator	16 dan 17 September 2021
34	Hadian Taofik Rochman	Moderator	16 dan 17 September 2021
35	Edwin Rivano	Moderator	16 dan 17 September 2021
36	Yahya Amarullah Taufik	Moderator	16 dan 17 September 2021
37	Nanda Adytiansyah	Moderator	17 September 2021

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

NOMOR : 42/PK/2021
NOMOR : 032/PKS/DN/FUKM/VIII/2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Agustus**, tahun **Dua ribu dua puluh satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Imam Margono,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Christian Andersen, S.H., M.Kn.,** Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, berkedudukan di Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65 Bandung – 40164, Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 233/SK/ORG/UKM/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, yang kewenangannya atas Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan atas Surat Keputusan Rektor Nomor 002/SK/MNJ/UKM/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dan sebagai media untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara *online* (daring).

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara *online* (daring) dan Narasumber.

c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha.

b. Menjamin peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha belum pernah

mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.

c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 7 September 2021.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 7 September 2021.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya terkait dukungan teknis untuk kegiatan virtual (pembelian paket data, transport, akomodasi, dan konsumsi) menjadi tanggungan masing-masing peserta.

(2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak menanggung biaya-biaya yang ditimbulkan oleh peserta.

(3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
(2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**
(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	Fakultas Hukum
Mahkamah Konstitusi RI	Universitas Kristen Maranatha
Imam Margono	**Christian Andersen, S.H., M.Kn.**
Plt. Kepala Pusat	Dekan Fakultas Hukum
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	

MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

METERAI TEMPEL 10000 0B9D5AJX239607302

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA BANDUNG FAKULTAS HUKUM

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

NOMOR : 42/PK/2021
NOMOR : 032/PKS/DN/FUKM/VIII/2021

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Agustus**, tahun **Dua ribu dua puluh satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Imam Margono,** Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Christian Andersen, S.H., M.Kn.,** Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, berkedudukan di Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65 Bandung – 40164, Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 233/SK/ORG/UKM/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, yang kewenangannya atas Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan atas Surat Keputusan Rektor Nomor 002/SK/MNJ/UKM/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dan sebagai media untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

(3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 14 s.d. 17 September 2021 secara *online* (daring).

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU.**

b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara *online* (daring) dan Narasumber.

c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 400 (empat ratus) orang sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha.

b. Menjamin peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha belum pernah

mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.

c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 7 September 2021.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 7 September 2021.

(2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

(1) Biaya terkait dukungan teknis untuk kegiatan virtual (pembelian paket data, transport, akomodasi, dan konsumsi) menjadi tanggungan masing-masing peserta.

(2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak menanggung biaya-biaya yang ditimbulkan oleh peserta.

(3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha ditutup.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

(1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
(2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK.**
(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
(2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	Fakultas Hukum
Mahkamah Konstitusi RI	Universitas Kristen Maranatha
Imam Margono	**Christian Andersen, S.H., M.Kn.**
Plt. Kepala Pusat	Dekan Fakultas Hukum
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ryan Azali	 14-09-2021 16:01:10 WIB
2	M. Wafi Jauhar	 14-09-2021 16:02:27 WIB
3	Nicholas Jonathan	 14-09-2021 16:03:34 WIB

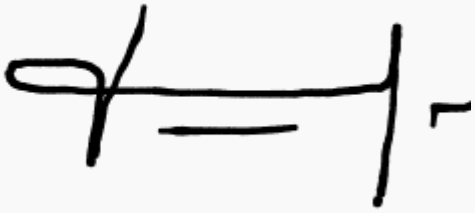
NO	NAME	TTD
4	EDY SANTOSO, S.A.P.	 14-09-2021 16:04:18 WIB
5	Sarwan pujianto	 14-09-2021 16:07:05 WIB
6	Ari Surya Kusuma	 14-09-2021 16:08:45 WIB

NO	NAME	TTD
7	Andrew Bagastio	 14-09-2021 16:09:47 WIB
8	M.Bahri Al Soddik	 14-09-2021 16:14:48 WIB
9	Benny Andreas Sinaga	 14-09-2021 16:14:51 WIB

NO	NAME	TTD
10	Krisbiantoro Lumbantoruan	 14-09-2021 16:14:53 WIB
11	Eko Winarno	 14-09-2021 16:15:17 WIB
12	Ekklesia Rohani H	 14-09-2021 16:15:44 WIB

NO	NAME	TTD
13	Mochammad Luthfi Mubarak	 14-09-2021 16:16:45 WIB
14	ATO SUPRIANTO, S.ST.	 14-09-2021 16:17:14 WIB
15	Sofhie Angela Hagiyanto	 14-09-2021 16:18:16 WIB

NO	NAME	TTD
16	TIFFANI JOANE SETIAWAN	 14-09-2021 16:19:28 WIB
17	Dian Handayani	 14-09-2021 16:22:29 WIB
18	Viktaria Taradifa	 14-09-2021 16:25:48 WIB

NO	NAME	TTD
19	Vinni El Alexandra	 14-09-2021 16:26:17 WIB
20	Arif Qomarudin	 14-09-2021 16:26:21 WIB
21	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	 14-09-2021 16:26:56 WIB

NO	NAME	TTD
22	Winfritz Jeremia Abner	 14-09-2021 16:28:29 WIB
23	Dewi Lestari	 14-09-2021 16:29:05 WIB
24	MAHARDHIKA G. SITORUS	 14-09-2021 16:35:16 WIB

NO	NAME	TTD
25	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	 14-09-2021 16:39:12 WIB
26	Muhammad Abdul Aziz Nurambiya	 14-09-2021 16:42:16 WIB
27	Jennifer Debora Tri Lestari	 14-09-2021 16:45:30 WIB

NO	NAME	TTD
28	ELVIRA GABRIELA KEREH	 14-09-2021 16:46:54 WIB
29	Ardian Harefa	 14-09-2021 16:48:15 WIB
30	Jason Arnold Sugiono	 14-09-2021 16:48:31 WIB

NO	NAME	TTD
31	Nazmi Khaerunisa	14-09-2021 16:49:48 WIB
32	Ismono,S.H.	 14-09-2021 16:49:51 WIB
33	Vannessa Gan	 14-09-2021 16:50:43 WIB

NO	NAME	TTD
34	Albert Adhisurya	 14-09-2021 16:54:46 WIB
35	Almira Carissa Bastyan	 14-09-2021 16:55:35 WIB
36	Khairullah	 14-09-2021 17:00:31 WIB

NO	NAME	TTD
37	Dewi Kurna Ningrum	 14-09-2021 17:01:44 WIB
38	Jamhur Wardi Saputra	 14-09-2021 17:05:48 WIB
39	Shalma Azzahra Putri Wijaya	 14-09-2021 17:07:18 WIB

NO	NAME	TTD
40	Kevin Alim Rabbani	 14-09-2021 17:08:41 WIB
41	Billy Junior Budiono	 14-09-2021 17:09:30 WIB
42	Ai Permanasari	 14-09-2021 17:11:37 WIB

NO	NAME	TTD
43	Dhiyaa Dinanza Akbariansyah	 14-09-2021 17:12:34 WIB
44	Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	 14-09-2021 17:12:36 WIB
45	Firdayanti Novalinda	 14-09-2021 17:12:46 WIB

NO	NAME	TTD
46	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	 14-09-2021 17:12:46 WIB
47	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	 14-09-2021 17:15:43 WIB
48	Siti Khumairoh Kusuma Arum	 14-09-2021 17:17:01 WIB
49	LIANA SALWA IRENE	14-09-2021 17:17:56 WIB

NO	NAME	TTD
50	Aldo Bathara	 14-09-2021 17:18:39 WIB
51	Cynthia Monica Az Zahro	 14-09-2021 17:19:04 WIB
52	Budi Sibuea	 14-09-2021 17:19:18 WIB

NO	NAME	TTD
53	Callista Rachelia	 14-09-2021 17:19:21 WIB
54	Felicia Chang	 14-09-2021 17:19:53 WIB
55	Vianica Herman	 14-09-2021 17:19:53 WIB

NO	NAME	TTD
56	MAUDY SANDRA, S.S	 14-09-2021 17:20:53 WIB
57	Nadya Natalie Santosa	 14-09-2021 17:20:55 WIB
58	Nur Bagus Sajiwo	 14-09-2021 17:22:16 WIB

NO	NAME	TTD
59	Jihan thufailah rizky	 14-09-2021 17:23:00 WIB
60	Anindya Zahra Srisena	 14-09-2021 17:23:19 WIB
61	safa luthfia gumilang	 14-09-2021 17:26:56 WIB

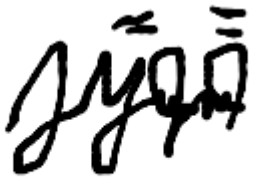
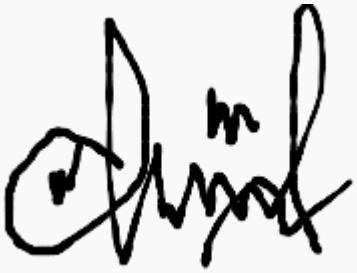
Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Fidella Febriyani	 14-09-2021 18:30:35 WIB
2	ENDA ARIFIN ZULKARNAIN SIREGAR	 14-09-2021 18:32:01 WIB
3	Ayu Jessy Yustifa Maharani	 14-09-2021 18:32:50 WIB

NO	NAME	TTD
4	Ari Surya Kusuma	 14-09-2021 18:33:00 WIB
5	Jamhur Wardi Saputra	 14-09-2021 18:33:16 WIB
6	Callista Rachelia	 14-09-2021 18:34:02 WIB

NO	NAME	TTD
7	Vannessa Gan	 14-09-2021 18:35:06 WIB
8	Mochammad Luthfi Mubarak	 14-09-2021 18:35:10 WIB
9	Ardian Harefa	 14-09-2021 18:35:14 WIB

NO	NAME	TTD
10	Irma Yundira	 14-09-2021 18:35:14 WIB
11	Dewi Kurna Ningrum	 14-09-2021 18:35:34 WIB
12	Jennifer Debora Tri Lestari	 14-09-2021 18:35:40 WIB

NO	NAME	TTD
13	Nur Bagus Sajiwo	 14-09-2021 18:35:43 WIB
14	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	 14-09-2021 18:35:53 WIB
15	Ai Permanasari	 14-09-2021 18:35:55 WIB

NO	NAME	TTD
16	EKO BUDIYANTO	 14-09-2021 18:36:03 WIB
17	Steven Tirta Putra	 14-09-2021 18:36:06 WIB
18	Kevin Alim Rabbani	 14-09-2021 18:36:20 WIB

NO	NAME	TTD
19	Albert Adhisurya	 14-09-2021 18:36:58 WIB
20	Ryan Azali	 14-09-2021 18:37:59 WIB
21	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	 14-09-2021 18:38:32 WIB

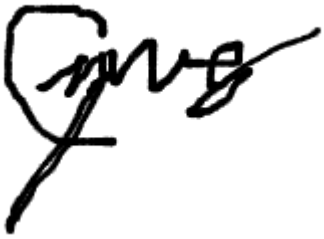
NO	NAME	TTD
22	Winfritz Jeremia Abner	 14-09-2021 18:39:15 WIB
23	Nicholas Jonathan	 14-09-2021 18:39:39 WIB
24	RIO CAHYA YOGA PRATAMA	 14-09-2021 18:39:44 WIB

NO	NAME	TTD
25	Almira Carissa Bastyan	 14-09-2021 18:40:10 WIB
26	Nadya Natalie Santosa	 14-09-2021 18:41:04 WIB
27	Siti Khumairoh Kusuma Arum	 14-09-2021 18:41:39 WIB

NO	NAME	TTD
28	Benny Andreas Sinaga	 14-09-2021 18:42:12 WIB
29	Dian Handayani	 14-09-2021 18:42:13 WIB
30	Shelly Kurniawan	 14-09-2021 18:42:52 WIB

NO	NAME	TTD
31	Firdayanti Novalinda	 14-09-2021 18:43:07 WIB
32	Daniel Hotma Christofel Hutagaol	 14-09-2021 18:43:22 WIB
33	MAHARDHIKA G. SITORUS	 14-09-2021 18:43:37 WIB

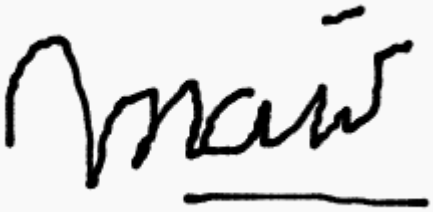
NO	NAME	TTD
34	Muhammad Abdul Aziz Nurambiya	 14-09-2021 18:43:52 WIB
35	Laily Dyah Rahmatika, S.Pd.	 14-09-2021 18:44:16 WIB
36	Gabriel Batistuta Manullang	 14-09-2021 18:44:27 WIB

NO	NAME	TTD
37	Nona Fitria Elyusra	 14-09-2021 18:46:12 WIB
38	Cyrus Dalbert	 14-09-2021 18:47:55 WIB
39	Krisbiantoro Lumbantoruan	 14-09-2021 18:48:30 WIB

NO	NAME	TTD
40	Dewi Lestari	 14-09-2021 18:49:04 WIB
41	IFAANO BUASISOKHI HARITA	 14-09-2021 18:51:22 WIB
42	Felicia Chang	 14-09-2021 18:52:20 WIB

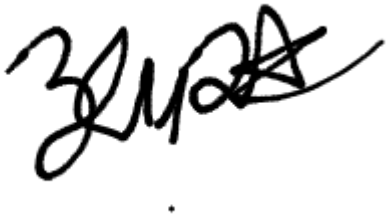
NO	NAME	TTD
43	Ismono,S.H.	 14-09-2021 18:53:20 WIB
44	Rickardo Christian Ferdinant	 14-09-2021 18:56:50 WIB
45	Hari Setyanto, S.Si.,M.M.,Apt.	 14-09-2021 18:58:44 WIB

NO	NAME	TTD
46	Eko Winarno	 14-09-2021 18:59:12 WIB
47	Ekklesia Rohani H	 14-09-2021 19:01:36 WIB
48	Levina Abigail Chandra	 14-09-2021 19:01:46 WIB

NO	NAME	TTD
49	Jason Arnold Sugiono	 14-09-2021 19:05:04 WIB
50	ARIF SETIAWAN	 14-09-2021 19:06:46 WIB
51	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	 14-09-2021 19:13:57 WIB

NO	NAME	TTD
52	Cynthia Monica Az Zahro	 14-09-2021 19:16:19 WIB
53	Jovinsca Haylie Venesia	 14-09-2021 19:18:03 WIB
54	Sarwan pujianto	 14-09-2021 19:18:34 WIB

NO	NAME	TTD
55	Tambunan Andi	 14-09-2021 19:20:39 WIB
56	Angelia Wulandari	 14-09-2021 19:21:30 WIB
57	Vianica Herman	 14-09-2021 19:24:27 WIB

NO	NAME	TTD
58	Aldo Bathara	 14-09-2021 19:25:44 WIB
59	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	 14-09-2021 19:27:05 WIB
60	ELVIRA GABRIELA KEREH	 14-09-2021 19:29:25 WIB

NO	NAME	TTD
61	Stevanus Reysover Bobby	 14-09-2021 19:34:11 WIB
62	Dhiyaa Dinanza Akbariansyah	 14-09-2021 19:35:08 WIB
63	Angga Aldi Saputra	 14-09-2021 19:37:36 WIB

NO	NAME	TTD
64	Jihan thufailah rizky	 14-09-2021 20:17:07 WIB
65	TIFFANI JOANE SETIAWAN	 14-09-2021 20:18:55 WIB
66	MAUDY SANDRA, S.S	 14-09-2021 20:19:30 WIB

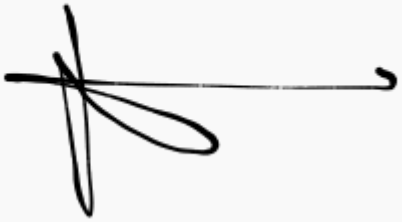
NO	NAME	TTD
67	safa luthfia gumilang	 14-09-2021 20:24:25 WIB
68	Anindya Zahra Srisena	 14-09-2021 20:25:14 WIB
69	Alvianus Dhima Nuwatiwa	 14-09-2021 20:29:57 WIB

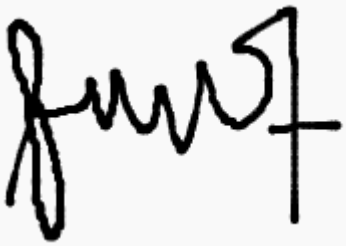
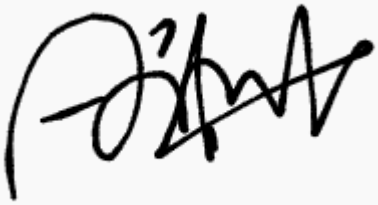
NO	NAME	TTD
70	Dominiques Reggy	 14-09-2021 20:35:01 WIB

Konstitusi dan Konstitusionalisme

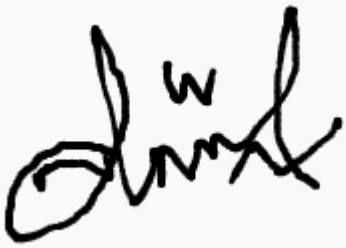
SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Callista Rachelia	 15-09-2021 07:30:43 WIB

NO	NAME	TTD
2	Steven Tirta Putra	 15-09-2021 07:30:53 WIB
3	Nicholas Jonathan	 15-09-2021 07:31:57 WIB
4	Mochammad Luthfi Mubarak	 15-09-2021 07:32:04 WIB

NO	NAME	TTD
5	Fidella Febriyani	 15-09-2021 07:33:35 WIB
6	Jovinsca Haylie Venesia	 15-09-2021 07:33:55 WIB
7	Ai Permanasari	 15-09-2021 07:35:27 WIB

NO	NAME	TTD
8	Nadya Natalie Santosa	 15-09-2021 07:36:44 WIB
9	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	 15-09-2021 07:39:57 WIB
10	Dian Handayani	 15-09-2021 07:40:11 WIB

NO	NAME	TTD
11	Dewi Kurna Ningrum	 15-09-2021 07:40:22 WIB
12	Ari Surya Kusuma	 15-09-2021 07:41:37 WIB
13	Jason Arnold Sugiono	 15-09-2021 07:41:48 WIB

NO	NAME	TTD
14	MAUDY SANDRA, S.S	 15-09-2021 07:42:02 WIB
15	Muhammad Abdul Aziz Nurambiya	 15-09-2021 07:42:09 WIB
16	Daniel Hotma Christofel Hutagaol	 15-09-2021 07:42:17 WIB

NO	NAME	TTD
17	Nur Bagus Sajiwo	 15-09-2021 07:42:49 WIB
18	Benny Andreas Sinaga	 15-09-2021 07:43:07 WIB
19	Cynthia Monica Az Zahro	 15-09-2021 07:44:21 WIB

NO	NAME	TTD
20	Andrew Bagastio	 15-09-2021 07:44:27 WIB
21	IFAANO BUASISOKHI HARITA	 15-09-2021 07:44:33 WIB
22	Felicia Chang	 15-09-2021 07:45:29 WIB

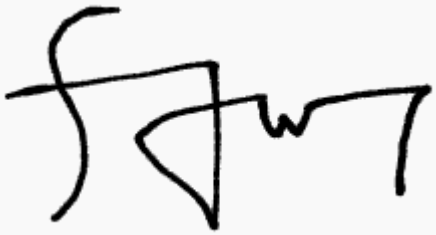
NO	NAME	TTD
23	Ayu Jessy Yustifa Maharani	 15-09-2021 07:45:58 WIB
24	Rickardo Christian Ferdinant	 15-09-2021 07:47:27 WIB
25	Levina Abigail Chandra	 15-09-2021 07:47:30 WIB

NO	NAME	TTD
26	Jamhur Wardi Saputra	 15-09-2021 07:48:26 WIB
27	ALDO YUDISTIRA	 15-09-2021 07:48:53 WIB
28	Angelia Wulandari	 15-09-2021 07:49:06 WIB

NO	NAME	TTD
29	Kevin Alim Rabbani	 15-09-2021 07:49:21 WIB
30	Winfritz Jeremia Abner	 15-09-2021 07:51:08 WIB
31	Albert Adhisurya	 15-09-2021 07:51:36 WIB

NO	NAME	TTD
32	Vannessa Gan	 15-09-2021 07:51:52 WIB
33	ELVIRA GABRIELA KEREH	 15-09-2021 07:53:00 WIB
34	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	 15-09-2021 07:53:06 WIB

NO	NAME	TTD
35	Lucky saputra	 15-09-2021 07:53:24 WIB
36	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	 15-09-2021 07:53:38 WIB
37	LIANA SALWA IRENE	15-09-2021 07:54:10 WIB
38	TIARA GUMILANG HAMDANI	 15-09-2021 07:54:12 WIB

NO	NAME	TTD
39	Nomensen Freddy Siahaan, S.H., LL.M.	 15-09-2021 07:54:38 WIB
40	Claudia Megumi	 15-09-2021 07:54:39 WIB
41	Velia Fransisca	 15-09-2021 07:54:43 WIB

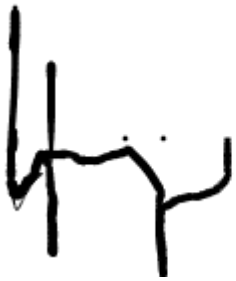
NO	NAME	TTD
42	Eko Winarno	 15-09-2021 07:56:22 WIB
43	Billy Junior Budiono	 15-09-2021 07:57:39 WIB
44	Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	 15-09-2021 08:02:28 WIB

NO	NAME	TTD
45	Marsya Shalviera Imanda	 15-09-2021 08:06:36 WIB
46	Nona Fitria Elyusra	 15-09-2021 08:08:57 WIB
47	M.Bahri Al Soddik	 15-09-2021 08:09:14 WIB

NO	NAME	TTD
48	Ryan Azali	 15-09-2021 08:11:49 WIB
49	Firdayanti Novalinda	 15-09-2021 08:13:58 WIB
50	ARIF SETIAWAN	 15-09-2021 08:14:54 WIB

NO	NAME	TTD
51	Angga Aldi Saputra	 15-09-2021 08:19:13 WIB
52	Angelica Cassandra Bareto	 15-09-2021 08:19:48 WIB
53	Dhiyaa Dinanza Akbariansyah	 15-09-2021 08:21:22 WIB

NO	NAME	TTD
54	Irma Yundira	 15-09-2021 08:21:25 WIB
55	TIFFANI JOANE SETIAWAN	 15-09-2021 08:21:45 WIB
56	EKO BUDIYANTO	 15-09-2021 08:21:47 WIB

NO	NAME	TTD
57	Graciela Brenda Louisa	 15-09-2021 08:22:23 WIB
58	ENDA ARIFIN ZULKARNAIN SIREGAR	 15-09-2021 08:22:23 WIB
59	safa luthfia gumilang	 15-09-2021 08:22:25 WIB

NO	NAME	TTD
60	Nova	 15-09-2021 08:23:04 WIB
61	Laily Dyah Rahmatika, S.Pd.	 15-09-2021 08:26:06 WIB
62	MAHARDHIKA G. SITORUS	 15-09-2021 08:27:41 WIB

NO	NAME	TTD
63	Leonardo	 15-09-2021 08:31:39 WIB
64	Dominiques Reggy	 15-09-2021 08:35:21 WIB
65	Shelly Kurniawan	 15-09-2021 08:35:39 WIB

NO	NAME	TTD
66	Tambunan Andi	 15-09-2021 08:41:44 WIB
67	Hari Setyanto, S.Si.,M.M.,Apt.	 15-09-2021 08:45:58 WIB
68	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	 15-09-2021 08:46:43 WIB

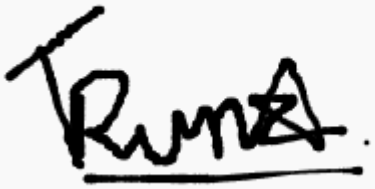
NO	NAME	TTD
69	Magfirah	 15-09-2021 08:48:13 WIB
70	Aldo Bathara	 15-09-2021 08:53:40 WIB
71	RIO CAHYA YOGA PRATAMA	 15-09-2021 08:59:27 WIB

NO	NAME	TTD
72	Dewi Lestari	 15-09-2021 09:00:09 WIB
73	Leo Natanael Simanjorang	 15-09-2021 09:00:35 WIB
74	Budi Sibuea	 15-09-2021 09:00:40 WIB

NO	NAME	TTD
75	Jihan thufailah rizky	 15-09-2021 09:01:23 WIB
76	Ekklesia Rohani H	 15-09-2021 09:01:35 WIB
77	HARTINI, S.PD	 15-09-2021 09:04:00 WIB

NO	NAME	TTD
78	Almira Carissa Bastyan	 15-09-2021 09:05:55 WIB
79	Jennifer Debora Tri Lestari	 15-09-2021 09:06:18 WIB
80	Evan Grady	 15-09-2021 09:07:05 WIB

NO	NAME	TTD
81	Arif Qomarudin	 15-09-2021 09:15:06 WIB
82	Ulfah Qisthina Indraswari Sjaf	 15-09-2021 09:15:35 WIB
83	Ismono,S.H.	 15-09-2021 09:17:40 WIB

NO	NAME	TTD
84	Abdul Zakaria Al Islamey, S.E	 15-09-2021 09:17:40 WIB
85	Adzhar Anugerah Trunapasha	 15-09-2021 09:19:11 WIB
86	Francisco Yudies Nur Mahesa	15-09-2021 09:20:36 WIB

NO	NAME	TTD
87	Irvan Mikhael Sumarlie	 15-09-2021 09:20:53 WIB
88	Vinni El Alexandra	 15-09-2021 09:24:12 WIB
89	Diarola Bernike	 15-09-2021 09:30:32 WIB

NO	NAME	TTD
90	Sony Setiawan	 15-09-2021 09:31:05 WIB
91	Krisbiantoro Lumbantoruan	 15-09-2021 09:34:41 WIB
92	Sarwan pujianto	 15-09-2021 09:39:27 WIB

Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Callista Rachelia	 15-09-2021 10:01:49 WIB
2	Mochammad Luthfi Mubarak	 15-09-2021 10:01:59 WIB
3	Eko Winarno	 15-09-2021 10:03:06 WIB

NO	NAME	TTD
4	Fidella Febriyani	 15-09-2021 10:03:30 WIB
5	Vannessa Gan	 15-09-2021 10:03:30 WIB
6	Levina Abigail Chandra	 15-09-2021 10:04:00 WIB

NO	NAME	TTD
7	Nicholas Jonathan	 15-09-2021 10:04:10 WIB
8	Ai Permanasari	 15-09-2021 10:04:51 WIB
9	Daniel Hotma Christofel Hutagaol	 15-09-2021 10:05:25 WIB

NO	NAME	TTD
10	Dian Handayani	 15-09-2021 10:05:33 WIB
11	Jennifer Debora Tri Lestari	 15-09-2021 10:05:49 WIB
12	Dewi Kurna Ningrum	 15-09-2021 10:05:54 WIB

NO	NAME	TTD
13	Lucky saputra	 15-09-2021 10:06:20 WIB
14	Cynthia Monica Az Zahro	 15-09-2021 10:07:26 WIB
15	Jamhur Wardi Saputra	 15-09-2021 10:07:30 WIB

NO	NAME	TTD
16	Angelia Wulandari	 15-09-2021 10:07:52 WIB
17	Ardian Harefa	 15-09-2021 10:07:53 WIB
18	Albert Adhisurya	 15-09-2021 10:08:18 WIB

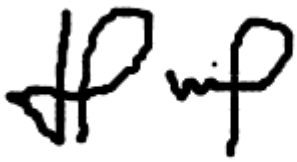
NO	NAME	TTD
19	MAUDY SANDRA, S.S	 15-09-2021 10:09:29 WIB
20	Krisbiantoro Lumbantoruan	 15-09-2021 10:09:31 WIB
21	ALDO YUDISTIRA	 15-09-2021 10:09:50 WIB

NO	NAME	TTD
22	Angelica Cassandra Bareto	 15-09-2021 10:10:12 WIB
23	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	 15-09-2021 10:12:33 WIB
24	Steven Tirta Putra	 15-09-2021 10:12:37 WIB

NO	NAME	TTD
25	Benny Andreas Sinaga	 15-09-2021 10:13:10 WIB
26	TIARA GUMILANG HAMDANI	 15-09-2021 10:13:15 WIB
27	Nadya Natalie Santosa	 15-09-2021 10:13:17 WIB

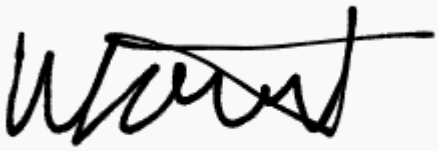
NO	NAME	TTD
28	Velia Fransisca	 15-09-2021 10:14:37 WIB
29	Magfirah	 15-09-2021 10:16:40 WIB
30	Almira Carissa Bastyan	 15-09-2021 10:16:48 WIB

NO	NAME	TTD
31	Irma Yundira	 15-09-2021 10:17:38 WIB
32	Andrew Bagastio	 15-09-2021 10:17:56 WIB
33	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	 15-09-2021 10:18:12 WIB

NO	NAME	TTD
34	Kevin Alim Rabbani	 15-09-2021 10:18:31 WIB
35	Kezia Immanuella Kamsari	 15-09-2021 10:18:55 WIB
36	Rickardo Christian Ferdinant	 15-09-2021 10:19:01 WIB

NO	NAME	TTD
37	Ekklesia Rohani H	 15-09-2021 10:21:02 WIB
38	Abdul Zakaria Al Islamey, S.E	 15-09-2021 10:21:57 WIB
39	Ayu Jessy Yustifa Maharani	 15-09-2021 10:22:00 WIB

NO	NAME	TTD
40	Nailur Rohmatul Azkiya	 15-09-2021 10:22:26 WIB
41	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	 15-09-2021 10:23:39 WIB
42	Ryan Azali	 15-09-2021 10:24:39 WIB

NO	NAME	TTD
43	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	 15-09-2021 10:26:03 WIB
44	Ari Surya Kusuma	 15-09-2021 10:26:55 WIB
45	Felicia Chang	 15-09-2021 10:29:34 WIB

NO	NAME	TTD
46	Aldo Bathara	 15-09-2021 10:32:36 WIB
47	Prayoga Hadiningrat	 15-09-2021 10:34:39 WIB
48	Lusian Riva	 15-09-2021 10:38:24 WIB

NO	NAME	TTD
49	Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	 15-09-2021 10:38:26 WIB
50	MAHARDHIKA G. SITORUS	 15-09-2021 10:38:30 WIB
51	TIFFANI JOANE SETIAWAN	 15-09-2021 10:39:10 WIB

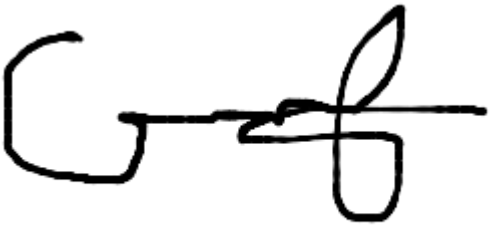
NO	NAME	TTD
52	Leonardo	 15-09-2021 10:40:47 WIB
53	Winfritz Jeremia Abner	 15-09-2021 10:41:59 WIB
54	safa luthfia gumilang	 15-09-2021 10:42:00 WIB

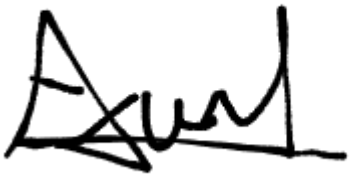
NO	NAME	TTD
55	Salsabila suci cahyani	 15-09-2021 10:42:01 WIB
56	Jihan thufailah rizky	 15-09-2021 10:42:08 WIB
57	Nomensen Freddy Siahaan, S.H., LL.M.	 15-09-2021 10:42:33 WIB

NO	NAME	TTD
58	RIO CAHYA YOGA PRATAMA	 15-09-2021 10:42:59 WIB
59	Dominiques Reggy	 15-09-2021 10:46:06 WIB
60	Nur Bagus Sajiwo	 15-09-2021 10:46:43 WIB

NO	NAME	TTD
61	Laily Dyah Rahmatika, S.Pd.	 15-09-2021 10:48:25 WIB
62	EKO BUDIYANTO	 15-09-2021 10:50:07 WIB
63	Muhammad Abdul Aziz Nurambiya	 15-09-2021 10:50:08 WIB

NO	NAME	TTD
64	Adzhar Anugerah Trunapasha	 15-09-2021 10:51:43 WIB
65	Angga Aldi Saputra	 15-09-2021 10:52:02 WIB
66	Jovinsca Haylie Venesia	 15-09-2021 10:53:35 WIB

NO	NAME	TTD
67	ARIF SETIAWAN	 15-09-2021 10:54:36 WIB
68	Gabriel Batistuta Manullang	 15-09-2021 10:58:54 WIB
69	M.Alfi Syahri Atho illah Nasution	 15-09-2021 11:08:32 WIB

NO	NAME	TTD
70	Irvan Mikhael Sumarlie	 15-09-2021 11:10:03 WIB
71	Rudy Sutanto SE	 15-09-2021 11:10:08 WIB
72	Tambunan Andi	 15-09-2021 11:10:19 WIB

NO	NAME	TTD
73	IFAANO BUASISOKHI HARITA	 15-09-2021 11:13:05 WIB
74	Alvianus Dhima Nuwatiwa	 15-09-2021 11:14:42 WIB
75	Riza Ramdani	 15-09-2021 11:16:05 WIB

NO	NAME	TTD
76	Vissilius Geraldi Kristiawan	 15-09-2021 11:16:12 WIB
77	Floria Lusiana	 15-09-2021 11:16:18 WIB
78	Alexander Triestanto	 15-09-2021 11:16:39 WIB

NO	NAME	TTD
79	rafiansyah iqbal taufiq	 15-09-2021 11:16:56 WIB
80	Tharadina Yustrianti	 15-09-2021 11:16:58 WIB
81	Marcell Cornellius	 15-09-2021 11:17:54 WIB

NO	NAME	TTD
82	Chintya Agathis	 15-09-2021 11:18:01 WIB
83	Syeinando boy naga	 15-09-2021 11:18:06 WIB
84	Budi Sibuea	 15-09-2021 11:18:15 WIB

NO	NAME	TTD
85	gabriel kalalo	 15-09-2021 11:18:29 WIB
86	Andreas Nicolas Nainggo	 15-09-2021 11:19:20 WIB
87	Farrel Christyanto Wijaya	 15-09-2021 11:20:01 WIB

NO	NAME	TTD
88	Tiffany Pingkan Kawilaran	 15-09-2021 11:20:56 WIB
89	Tongon Fernando Hutasoit	15-09-2021 11:21:32 WIB
90	Clarisa andrea	 15-09-2021 11:21:55 WIB

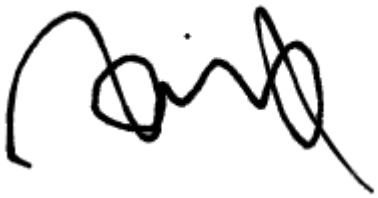
NO	NAME	TTD
91	Reyhan Arisena Johan	 15-09-2021 11:22:42 WIB
92	HARTINI, S.PD	 15-09-2021 11:22:49 WIB
93	Muhammad Irsyad Difa R	 15-09-2021 11:23:13 WIB

NO	NAME	TTD
94	Debby Putri M	 15-09-2021 11:23:47 WIB
95	Wildan Hartadinata	15-09-2021 11:25:54 WIB
96	Diarola Bernike	 15-09-2021 11:26:17 WIB

NO	NAME	TTD
97	Yohanes Ronald	 15-09-2021 11:26:48 WIB
98	FAIZAL JIBRAN	 15-09-2021 11:27:38 WIB
99	Siti Khumairoh Kusuma Arum	 15-09-2021 11:27:42 WIB

NO	NAME	TTD
100	Muhammad Mega Nurhakiim	 15-09-2021 11:29:24 WIB
101	Dhiyaa Dinanza Akbariansyah	 15-09-2021 11:29:39 WIB
102	Shelly Kurniawan	 15-09-2021 11:30:32 WIB

NO	NAME	TTD
103	Jovena Cyrill Christabel	 15-09-2021 11:31:14 WIB
104	Azza Salsabila Febrianti	 15-09-2021 11:33:14 WIB
105	Valencia Grace Natanael	 15-09-2021 11:33:35 WIB

NO	NAME	TTD
106	Nabilla Zaviransyah	 15-09-2021 11:33:39 WIB
107	Moch Rafli Darill Siraz	 15-09-2021 11:33:54 WIB
108	Andriwan Yosua	 15-09-2021 11:34:23 WIB

NO	NAME	TTD
109	Graciela Brenda Louisa	 15-09-2021 11:35:08 WIB
110	Ramunindha Syaidinayu	 15-09-2021 11:35:09 WIB
111	Auralia Marsella Zhaneta	 15-09-2021 11:35:18 WIB

NO	NAME	TTD
112	Golda Evyra Napitupulu	 15-09-2021 11:35:27 WIB
113	Priscilla Junita setiawan	 15-09-2021 11:37:05 WIB
114	Margaretha Dwi Yani	 15-09-2021 11:37:25 WIB

NO	NAME	TTD
115	Yohan Pradytio	 15-09-2021 11:39:32 WIB
116	Kevin Josua Siallagan	 15-09-2021 11:39:33 WIB
117	Evi Hanias Sianturi	15-09-2021 11:39:53 WIB

NO	NAME	TTD
118	Christin Septina Basani	 15-09-2021 11:40:34 WIB
119	debora prasetya	 15-09-2021 11:40:36 WIB
120	Valentino Satrio Kusumo	 15-09-2021 11:41:09 WIB

NO	NAME	TTD
121	Cristina Natalia Sinaga	 15-09-2021 11:41:46 WIB
122	Daffa Diaz Danendra C	 15-09-2021 11:42:56 WIB
123	SILVIA LATUPEIRISSA	 15-09-2021 11:44:19 WIB

NO	NAME	TTD
124	Naufal Ramadhan Cahya	 15-09-2021 11:45:53 WIB
125	Elena Kristina Margaretta	 15-09-2021 11:46:22 WIB
126	Chinta Eliza H.M.S	 15-09-2021 11:47:11 WIB

NO	NAME	TTD
127	Clara Alycia	 15-09-2021 11:47:21 WIB
128	James Triady	 15-09-2021 11:47:52 WIB
129	Reza Erlangga Marsyah	 15-09-2021 11:47:53 WIB

NO	NAME	TTD
130	Rosiana Marito	 15-09-2021 11:49:07 WIB
131	Yael Friskha K	 15-09-2021 11:49:40 WIB
132	Louisa Audyna Prochorus	 15-09-2021 11:51:21 WIB

NO	NAME	TTD
133	Joveliam Abisai	 15-09-2021 11:53:53 WIB
134	Gabriella Elisabeth	 15-09-2021 11:54:15 WIB
135	Ardi Muhamad Farhan	 15-09-2021 11:54:43 WIB

NO	NAME	TTD
136	Cecilia Vania Indrawan	 15-09-2021 11:54:53 WIB
137	Afkaar Naufal Rahman	 15-09-2021 11:55:36 WIB
138	ATO SUPRIANTO, S.ST.	 15-09-2021 11:57:56 WIB

NO	NAME	TTD
139	Ismono,S.H.	 15-09-2021 11:58:47 WIB
140	Ruhulina Br Sebayang	 15-09-2021 12:00:13 WIB
141	johannes dolok saribu	 15-09-2021 12:00:53 WIB

NO	NAME	TTD
142	Sony Setiawan	 15-09-2021 12:00:59 WIB
143	Vianica Herman	 15-09-2021 12:01:06 WIB
144	Ulfah Qisthina Indraswari Sjaf	 15-09-2021 12:01:33 WIB

NO	NAME	TTD
145	Francisco Yudies Nur Mahesa	15-09-2021 12:01:48 WIB
146	Rosalinda Hutabarat	15-09-2021 12:02:08 WIB
147	Jason Arnold Sugiono	 15-09-2021 12:04:15 WIB

NO	NAME	TTD
148	Augusto Advocatio Justine	 15-09-2021 12:04:17 WIB
149	Violetta Valencia	 15-09-2021 12:06:36 WIB
150	Reynanda Rachel Feby	 15-09-2021 12:09:12 WIB

NO	NAME	TTD
151	Vanya Raditya Putri	 15-09-2021 12:09:45 WIB
152	Dewi Lestari	 15-09-2021 12:10:23 WIB
153	Stevanus Reysover Bobby	 15-09-2021 12:17:16 WIB

NO	NAME	TTD
154	Josua Sibarani	 15-09-2021 12:27:01 WIB

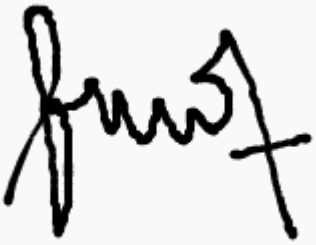
Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Gabriel Revi Saputra	 15-09-2021 13:01:00 WIB

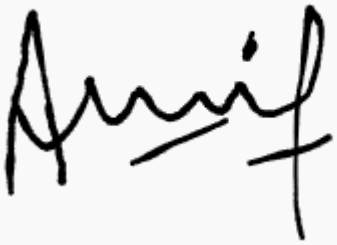
NO	NAME	TTD
2	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	 15-09-2021 13:01:27 WIB
3	Steven Tirta Putra	 15-09-2021 13:01:33 WIB
4	Albert Adhisurya	 15-09-2021 13:01:42 WIB

NO	NAME	TTD
5	Levina Abigail Chandra	 15-09-2021 13:01:50 WIB
6	Vannessa Gan	 15-09-2021 13:01:50 WIB
7	Firdayanti Novalinda	 15-09-2021 13:02:00 WIB

NO	NAME	TTD
8	Callista Rachelia	 15-09-2021 13:02:11 WIB
9	Fidella Febriyani	 15-09-2021 13:02:17 WIB
10	Priscilla Junita setiawan	 15-09-2021 13:02:21 WIB

NO	NAME	TTD
11	Winfritz Jeremia Abner	 15-09-2021 13:02:28 WIB
12	Lucky saputra	 15-09-2021 13:02:44 WIB
13	Joveliam Abisai	 15-09-2021 13:02:49 WIB

NO	NAME	TTD
14	Almira Carissa Bastyan	 15-09-2021 13:02:56 WIB
15	Jason Arnold Sugiono	 15-09-2021 13:02:57 WIB
16	Ekklesia Rohani H	 15-09-2021 13:03:00 WIB

NO	NAME	TTD
17	Dian Handayani	 15-09-2021 13:03:03 WIB
18	RIO CAHYA YOGA PRATAMA	 15-09-2021 13:03:08 WIB
19	ARIF SETIAWAN	 15-09-2021 13:03:12 WIB

NO	NAME	TTD
20	Mochammad Luthfi Mubarak	 15-09-2021 13:03:17 WIB
21	MAUDY SANDRA, S.S	 15-09-2021 13:03:24 WIB
22	Angelica Cassandra Bareto	 15-09-2021 13:03:35 WIB

NO	NAME	TTD
23	Jennifer Debora Tri Lestari	 15-09-2021 13:03:42 WIB
24	Kezia Immanuella Kamsari	 15-09-2021 13:03:50 WIB
25	Velia Fransisca	 15-09-2021 13:04:15 WIB

NO	NAME	TTD
26	rafiansyah iqbal taufiq	 15-09-2021 13:04:39 WIB
27	Auralia Marsella Zhaneta	 15-09-2021 13:04:43 WIB
28	EKO BUDIYANTO	 15-09-2021 13:04:48 WIB

NO	NAME	TTD
29	Ryan Azali	 15-09-2021 13:04:50 WIB
30	Alexander Triestanto	 15-09-2021 13:04:54 WIB
31	TIARA GUMILANG HAMDANI	 15-09-2021 13:05:24 WIB

NO	NAME	TTD
32	Clarisa andrea	 15-09-2021 13:05:40 WIB
33	M Ichan Adhi F	 15-09-2021 13:05:42 WIB
34	Riza Ramdani	 15-09-2021 13:05:54 WIB

NO	NAME	TTD
35	Daniel Hotma Christofel Hutagaol	 15-09-2021 13:06:00 WIB
36	Rickardo Christian Ferdinant	 15-09-2021 13:06:10 WIB
37	Gabriel Batistuta Manullang	 15-09-2021 13:06:32 WIB

NO	NAME	TTD
38	Naufal Ramadhan Cahya	 15-09-2021 13:06:44 WIB
39	Tharadina Yustrianti	 15-09-2021 13:07:41 WIB
40	ALDO YUDISTIRA	 15-09-2021 13:08:02 WIB

NO	NAME	TTD
41	FAIZAL JIBRAN	 15-09-2021 13:08:20 WIB
42	M.Alfi Syahri Atho illah Nasution	 15-09-2021 13:08:40 WIB
43	Ari Surya Kusuma	 15-09-2021 13:08:41 WIB

NO	NAME	TTD
44	Wildan Hartadinata	 15-09-2021 13:09:23 WIB
45	Elviana Samosir	 15-09-2021 13:09:29 WIB
46	gabriel kalalo	 15-09-2021 13:09:33 WIB

NO	NAME	TTD
47	Vianica Herman	 15-09-2021 13:09:36 WIB
48	Nadya Natalie Santosa	 15-09-2021 13:10:04 WIB
49	Ardian Harefa	 15-09-2021 13:10:06 WIB

NO	NAME	TTD
50	MAHARDHIKA G. SITORUS	 15-09-2021 13:10:20 WIB
51	Stevanus Reysover Bobby	 15-09-2021 13:10:51 WIB
52	Jamhur Wardi Saputra	 15-09-2021 13:10:53 WIB

NO	NAME	TTD
53	Chinta Eliza H.M.S	 15-09-2021 13:11:16 WIB
54	Vanya Raditya Putri	 15-09-2021 13:11:21 WIB
55	Reyhan Arisena Johan	 15-09-2021 13:11:28 WIB

NO	NAME	TTD
56	Krisbiantoro Lumbantoruan	 15-09-2021 13:11:45 WIB
57	Prayoga Hadiningrat	 15-09-2021 13:11:58 WIB
58	TIFFANI JOANE SETIAWAN	 15-09-2021 13:12:38 WIB

NO	NAME	TTD
59	Dewi Kurna Ningrum	 15-09-2021 13:13:12 WIB
60	Benny Andreas Sinaga	 15-09-2021 13:13:27 WIB
61	Eko Winarno	 15-09-2021 13:14:50 WIB

NO	NAME	TTD
62	Abdul Zakaria Al Islamey, S.E	 15-09-2021 13:15:54 WIB
63	Ai Permanasari	 15-09-2021 13:16:18 WIB
64	Muhammad Abdul Aziz Nurambiya	 15-09-2021 13:16:23 WIB

NO	NAME	TTD
65	Gabriella Elisabeth	15-09-2021 13:17:03 WIB
66	Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	 15-09-2021 13:17:24 WIB
67	Kevin Alim Rabbani	 15-09-2021 13:17:33 WIB

NO	NAME	TTD
68	Louisa Audyna Prochorus	 15-09-2021 13:17:43 WIB
69	Alfira Kafi Maulani	 15-09-2021 13:19:12 WIB
70	Andrew Bagastio	 15-09-2021 13:19:18 WIB

NO	NAME	TTD
71	Tambunan Andi	 15-09-2021 13:20:49 WIB
72	Magfirah	 15-09-2021 13:21:40 WIB
73	Daffa Diaz Danendra C	 15-09-2021 13:21:48 WIB

NO	NAME	TTD
74	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	 15-09-2021 13:21:57 WIB
75	Ayu Jessy Yustifa Maharani	 15-09-2021 13:22:02 WIB
76	Budi Sibuea	 15-09-2021 13:22:29 WIB

NO	NAME	TTD
77	Yohanes Ronald	 15-09-2021 13:23:29 WIB
78	IFAANO BUASISOKHI HARITA	 15-09-2021 13:25:00 WIB
79	Moch Rafli Darill Siraz	 15-09-2021 13:25:42 WIB

NO	NAME	TTD
80	SILVIA LATUPEIRISSA	 15-09-2021 13:27:04 WIB
81	Cynthia Monica Az Zahro	 15-09-2021 13:27:50 WIB
82	Enoni Nikaoni Harefa	15-09-2021 13:27:58 WIB

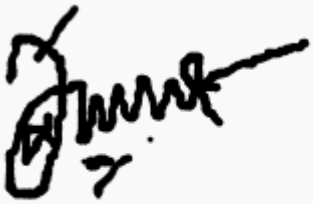
NO	NAME	TTD
83	Cristina Natalia Sinaga	 15-09-2021 13:28:08 WIB
84	Nomensen Freddy Siahaan, S.H., LL.M.	 15-09-2021 13:28:13 WIB
85	Nailur Rohmatul Azkiya	 15-09-2021 13:28:16 WIB

NO	NAME	TTD
86	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	 15-09-2021 13:30:59 WIB
87	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	 15-09-2021 13:31:23 WIB
88	Muhammad Irsyad Difa R	 15-09-2021 13:32:13 WIB

NO	NAME	TTD
89	Vissilius Geraldi Kristiawan	 15-09-2021 13:32:19 WIB
90	Nicholas Jonathan	 15-09-2021 13:34:18 WIB
91	Elena Kristina Margaretta	 15-09-2021 13:35:46 WIB

NO	NAME	TTD
92	Virginnia Melya Iskandar	 15-09-2021 13:36:42 WIB
93	Adzhar Anugerah Trunapasha	 15-09-2021 13:36:43 WIB
94	Debby Putri M	 15-09-2021 13:36:54 WIB

NO	NAME	TTD
95	Rosiana Marito	 15-09-2021 13:38:35 WIB
96	Andriwan Yosua	 15-09-2021 13:39:05 WIB
97	ENDA ARIFIN ZULKARNAIN SIREGAR	 15-09-2021 13:39:11 WIB

NO	NAME	TTD
98	Reynanda Rachel Feby	 15-09-2021 13:39:21 WIB
99	Farrel Christyanto Wijaya	 15-09-2021 13:41:06 WIB
100	Reza Erlangga Marsyah	 15-09-2021 13:41:38 WIB

NO	NAME	TTD
101	Muhammad Mega Nurhakiim	 15-09-2021 13:44:33 WIB
102	Laily Dyah Rahmatika, S.Pd.	 15-09-2021 13:44:51 WIB
103	Vinni El Alexandra	 15-09-2021 13:45:04 WIB

NO	NAME	TTD
104	Yael Friskha K	 15-09-2021 13:46:19 WIB
105	Marcell Cornellius	 15-09-2021 13:46:44 WIB
106	Leonardo	 15-09-2021 13:47:47 WIB

NO	NAME	TTD
107	Azza Salsabila Febrianti	 15-09-2021 13:47:52 WIB
108	safa luthfia gumilang	 15-09-2021 13:48:29 WIB
109	Evan Grady	 15-09-2021 13:49:12 WIB

NO	NAME	TTD
110	Jihan thufailah rizky	 15-09-2021 13:49:50 WIB
111	Syeinando boy naga	 15-09-2021 13:49:52 WIB
112	Clara Alycia	 15-09-2021 13:51:47 WIB

NO	NAME	TTD
113	Dewi Lestari	 15-09-2021 13:51:49 WIB
114	Teti Tiran	 15-09-2021 13:53:27 WIB
115	Evi Hanias Sianturi	15-09-2021 13:53:47 WIB

NO	NAME	TTD
116	Violeta Mashary	 15-09-2021 13:54:47 WIB
117	Abellenka Aurora Aurellia	 15-09-2021 13:55:22 WIB
118	Angga Aldi Saputra	 15-09-2021 13:56:32 WIB

NO	NAME	TTD
119	maria magdalena	 15-09-2021 13:56:54 WIB
120	Floria Lusiana	 15-09-2021 13:57:48 WIB
121	Felicia Chang	 15-09-2021 13:58:57 WIB

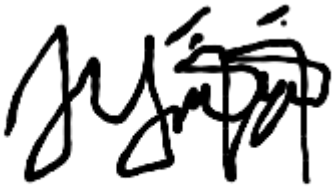
NO	NAME	TTD
122	Golda Evyra Napitupulu	 15-09-2021 13:59:39 WIB
123	Valencia Grace Natanael	 15-09-2021 14:00:15 WIB
124	Dominiques Reggy	 15-09-2021 14:00:25 WIB

NO	NAME	TTD
125	ATO SUPRIANTO, S.ST.	 15-09-2021 14:02:15 WIB
126	Afkaar Naufal Rahman	 15-09-2021 14:02:20 WIB
127	Priska Ayu	 15-09-2021 14:07:31 WIB

NO	NAME	TTD
128	Andreas Nicolas Nainggo	 15-09-2021 14:11:26 WIB
129	Shelly Kurniawan	 15-09-2021 14:13:17 WIB
130	Graciela Brenda Louisa	 15-09-2021 14:17:01 WIB

NO	NAME	TTD
131	Nabilla Zaviransyah	 15-09-2021 14:17:38 WIB
132	inez putri pramono	 15-09-2021 14:19:18 WIB
133	Augusto Advocatio Justine	 15-09-2021 14:21:21 WIB

NO	NAME	TTD
134	Nur Bagus Sajiwo	 15-09-2021 14:24:34 WIB
135	Nur Ajeng Sulistiani	 15-09-2021 14:26:00 WIB
136	Cecilia Vania Indrawan	 15-09-2021 14:29:04 WIB

NO	NAME	TTD
137	Dhiyaa Dinanza Akbariansyah	 15-09-2021 14:30:53 WIB
138	Irma Yundira	 15-09-2021 14:31:39 WIB
139	Chintya Agathis	 15-09-2021 14:35:02 WIB

NO	NAME	TTD
140	Ismono,S.H.	 15-09-2021 14:39:55 WIB
141	Margaretha Dwi Yani	 15-09-2021 14:41:01 WIB
142	Irvan Mikhael Sumarlie	 15-09-2021 14:45:30 WIB

NO	NAME	TTD
143	Adinda putri	 15-09-2021 14:47:44 WIB
144	Aldo Bathara	 15-09-2021 14:48:34 WIB
145	Jovinsca Haylie Venesia	 15-09-2021 14:49:54 WIB

NO	NAME	TTD
146	Kevin Josua Siallagan	 15-09-2021 14:51:35 WIB
147	Christin Septina Basani	 15-09-2021 15:01:07 WIB
148	LIANA SALWA IRENE	15-09-2021 15:03:25 WIB
149	Hari Setyanto, S.Si.,M.M.,Apt.	 15-09-2021 15:04:38 WIB

NO	NAME	TTD
150	johannes dolok saribu	 15-09-2021 15:05:04 WIB
151	chiara zefanya desiree	 15-09-2021 15:05:21 WIB
152	Ulfah Qisthina Indraswari Sjaf	 15-09-2021 15:05:58 WIB

NO	NAME	TTD
153	Francisco Yudies Nur Mahesa	 15-09-2021 15:06:53 WIB
154	HARTINI, S.PD	 15-09-2021 15:07:45 WIB
155	Usman Damani	 15-09-2021 15:10:42 WIB

NO	NAME	TTD
156	Tongon Fernando Hutasoit	 15-09-2021 15:11:33 WIB
157	Nona Fitria Elyusra	 15-09-2021 15:11:56 WIB
158	Angelia Wulandari	 15-09-2021 15:22:29 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Joveliam Abisai	 16-09-2021 07:30:44 WIB
2	Callista Rachelia	 16-09-2021 07:31:02 WIB
3	Budi Sibuea	 16-09-2021 07:31:05 WIB

NO	NAME	TTD
4	Jason Arnold Sugiono	 16-09-2021 07:31:17 WIB
5	Nicholas Jonathan	 16-09-2021 07:31:26 WIB
6	Felicia Chang	 16-09-2021 07:32:04 WIB

NO	NAME	TTD
7	Dian Handayani	 16-09-2021 07:32:22 WIB
8	Vanya Raditya Putri	 16-09-2021 07:32:42 WIB
9	SILVIA LATUPEIRISSA	 16-09-2021 07:33:09 WIB

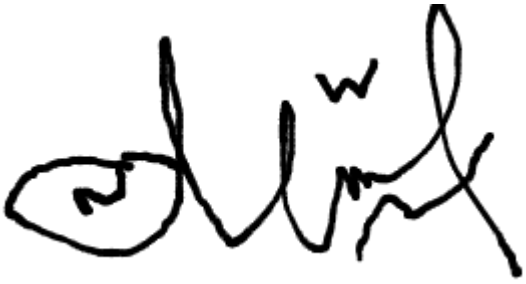
NO	NAME	TTD
10	Tharadina Yustrianti	 16-09-2021 07:33:20 WIB
11	Albert Adhisurya	 16-09-2021 07:33:27 WIB
12	ALDO YUDISTIRA	 16-09-2021 07:33:31 WIB

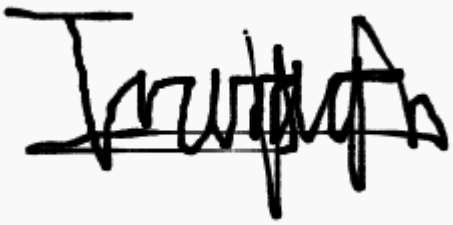
NO	NAME	TTD
13	Riza Ramdani	 16-09-2021 07:33:46 WIB
14	Fidella Febriyani	 16-09-2021 07:33:54 WIB
15	Marcell Cornellius	 16-09-2021 07:34:16 WIB

NO	NAME	TTD
16	Jovena Cyrill Christabel	 16-09-2021 07:34:24 WIB
17	Andrew Bagastio	 16-09-2021 07:34:28 WIB
18	Elviana Samosir	 16-09-2021 07:34:53 WIB

NO	NAME	TTD
19	Jennifer Debora Tri Lestari	 16-09-2021 07:34:53 WIB
20	James Triady	 16-09-2021 07:34:58 WIB
21	Muhammad Irsyad Difa R	 16-09-2021 07:35:04 WIB

NO	NAME	TTD
22	Mochammad Luthfi Mubarak	 16-09-2021 07:35:13 WIB
23	Ari Surya Kusuma	 16-09-2021 07:35:18 WIB
24	maria magdalena	 16-09-2021 07:35:56 WIB

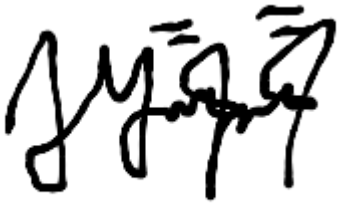
NO	NAME	TTD
25	Ayu Jessy Yustifa Maharani	 16-09-2021 07:36:03 WIB
26	Dewi Kurna Ningrum	 16-09-2021 07:36:15 WIB
27	Priscilla Junita setiawan	 16-09-2021 07:36:25 WIB

NO	NAME	TTD
28	Vannessa Gan	 16-09-2021 07:36:58 WIB
29	TIARA GUMILANG HAMDANI	 16-09-2021 07:37:10 WIB
30	Andriwan Yosua	 16-09-2021 07:37:58 WIB

NO	NAME	TTD
31	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	 16-09-2021 07:38:19 WIB
32	Alexander Triestanto	 16-09-2021 07:38:51 WIB
33	Louisa Audyna Prochorus	 16-09-2021 07:39:16 WIB

NO	NAME	TTD
34	Nadya Natalie Santosa	 16-09-2021 07:39:49 WIB
35	Fauzan Muhamad Fauzi	 16-09-2021 07:40:06 WIB
36	Syeinando boy naga	 16-09-2021 07:40:41 WIB

NO	NAME	TTD
37	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	 16-09-2021 07:40:54 WIB
38	Steven Tirta Putra	 16-09-2021 07:41:07 WIB
39	Jamhur Wardi Saputra	 16-09-2021 07:41:37 WIB

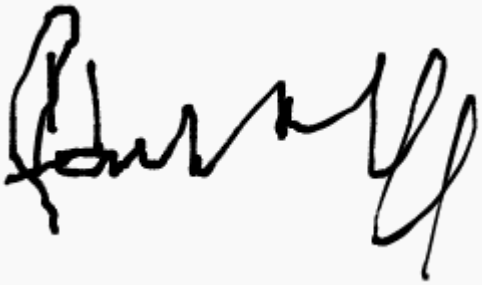
NO	NAME	TTD
40	Irma Yundira	 16-09-2021 07:42:45 WIB
41	Ryan Azali	 16-09-2021 07:42:56 WIB
42	Firdayanti Novalinda	 16-09-2021 07:43:08 WIB

NO	NAME	TTD
43	Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	 16-09-2021 07:44:41 WIB
44	Velia Fransisca	 16-09-2021 07:44:55 WIB
45	EKO BUDIYANTO	 16-09-2021 07:45:37 WIB

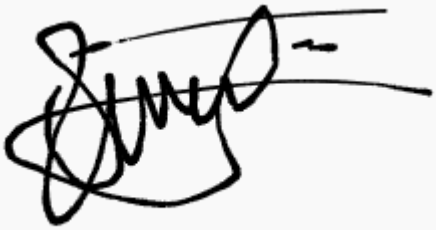
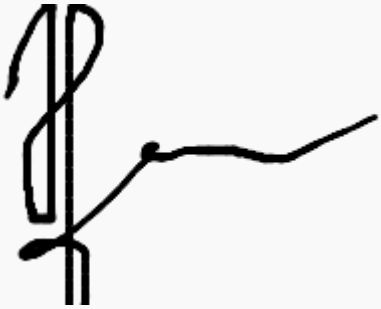
NO	NAME	TTD
46	Alfira Kafi Maulani	 16-09-2021 07:45:42 WIB
47	Yohanes Ronald	 16-09-2021 07:45:44 WIB
48	Prayoga Hadiningrat	 16-09-2021 07:46:14 WIB

NO	NAME	TTD
49	Azza Salsabila Febrianti	 16-09-2021 07:46:24 WIB
50	Naufal Ramadhan Cahya	 16-09-2021 07:47:10 WIB
51	Muhammad Abdul Aziz Nurambiya	 16-09-2021 07:47:21 WIB

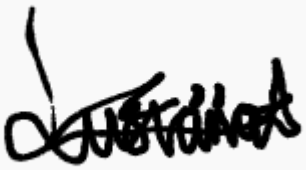
NO	NAME	TTD
52	Golda Evyra Napitupulu	 16-09-2021 07:47:31 WIB
53	Ai Permanasari	 16-09-2021 07:48:14 WIB
54	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	 16-09-2021 07:48:54 WIB

NO	NAME	TTD
55	Rickardo Christian Ferdinant	 16-09-2021 07:48:58 WIB
56	Gabriel Revi Saputra	 16-09-2021 07:49:33 WIB
57	Daniel Hotma Christofel Hutagaol	 16-09-2021 07:50:20 WIB

NO	NAME	TTD
58	Lucky saputra	 16-09-2021 07:50:44 WIB
59	Cristina Natalia Sinaga	 16-09-2021 07:51:05 WIB
60	Violeta Mashary	 16-09-2021 07:51:20 WIB

NO	NAME	TTD
61	gabriel kalalo	 16-09-2021 07:51:24 WIB
62	MAUDY SANDRA, S.S	 16-09-2021 07:53:28 WIB
63	Afkaar Naufal Rahman	 16-09-2021 07:53:51 WIB

NO	NAME	TTD
64	MAHARDHIKA G. SITORUS	 16-09-2021 07:54:22 WIB
65	TIFFANI JOANE SETIAWAN	 16-09-2021 07:54:52 WIB
66	Muhammad Syaif Adli	 16-09-2021 07:54:52 WIB

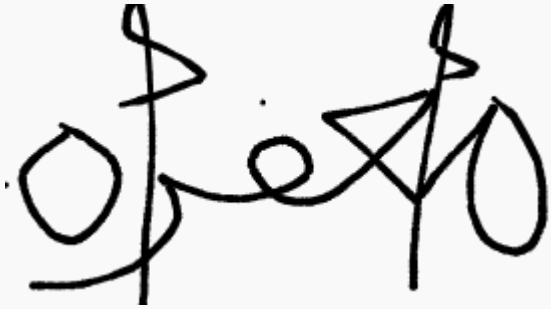
NO	NAME	TTD
67	Reynanda Rachel Feby	 16-09-2021 07:55:09 WIB
68	Vissilius Geraldi Kristiawan	 16-09-2021 07:55:12 WIB
69	Floria Lusiana	 16-09-2021 07:55:43 WIB

NO	NAME	TTD
70	Angelica Cassandra Bareto	 16-09-2021 07:56:27 WIB
71	Auralia Marsella Zhaneta	 16-09-2021 07:56:50 WIB
72	Nur Ajeng Sulistiani	 16-09-2021 07:59:27 WIB

NO	NAME	TTD
73	Nomensen Freddy Siahaan, S.H., LL.M.	 16-09-2021 08:00:26 WIB
74	Kevin Alim Rabbani	 16-09-2021 08:00:36 WIB
75	Usman Damani	 16-09-2021 08:00:37 WIB

NO	NAME	TTD
76	Angga Aldi Saputra	 16-09-2021 08:01:07 WIB
77	RIO CAHYA YOGA PRATAMA	 16-09-2021 08:01:15 WIB
78	Winfritz Jeremia Abner	 16-09-2021 08:01:22 WIB

NO	NAME	TTD
79	Adzhar Anugerah Trunapasha	 16-09-2021 08:02:38 WIB
80	Almira Carissa Bastyan	 16-09-2021 08:04:07 WIB
81	Jovinsca Haylie Venesia	 16-09-2021 08:04:40 WIB

NO	NAME	TTD
82	M.Bahri Al Soddik	 16-09-2021 08:06:12 WIB
83	Magfirah	 16-09-2021 08:07:15 WIB
84	Daffa Diaz Danendra C	 16-09-2021 08:11:36 WIB

NO	NAME	TTD
85	ARIF SETIAWAN	 16-09-2021 08:12:38 WIB
86	Eko Winarno	 16-09-2021 08:14:03 WIB
87	Shelly Kurniawan	 16-09-2021 08:15:47 WIB

NO	NAME	TTD
88	Nailur Rohmatul Azkiya	 16-09-2021 08:19:23 WIB
89	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	 16-09-2021 08:19:50 WIB
90	Yael Friskha K	 16-09-2021 08:19:54 WIB

NO	NAME	TTD
91	Christin Septina Basani	 16-09-2021 08:20:50 WIB
92	Elena Kristina Margaretta	 16-09-2021 08:21:09 WIB
93	Cecilia Vania Indrawan	 16-09-2021 08:21:15 WIB

NO	NAME	TTD
94	Stevanus Reysover Bobby	 16-09-2021 08:23:53 WIB
95	Kezia Immanuella Kamsari	 16-09-2021 08:24:41 WIB
96	Vianica Herman	 16-09-2021 08:25:40 WIB

NO	NAME	TTD
97	Cynthia Monica Az Zahro	 16-09-2021 08:25:53 WIB
98	IFAANO BUASISOKHI HARITA	 16-09-2021 08:26:57 WIB
99	Farrel Christyanto Wijaya	 16-09-2021 08:28:13 WIB

NO	NAME	TTD
100	Evan Grady	 16-09-2021 08:29:25 WIB
101	HARTINI, S.PD	 16-09-2021 08:31:28 WIB
102	Virginnia Melya Iskandar	 16-09-2021 08:38:34 WIB

NO	NAME	TTD
103	Tambunan Andi	 16-09-2021 08:40:07 WIB
104	Reyhan Arisena Johan	 16-09-2021 08:40:38 WIB
105	Evi Hanias Sianturi	16-09-2021 08:41:30 WIB

NO	NAME	TTD
106	ATO SUPRIANTO, S.ST.	 16-09-2021 08:43:34 WIB
107	FAIZAL JIBRAN	 16-09-2021 08:44:33 WIB
108	Irvan Mikhael Sumarlie	 16-09-2021 08:44:40 WIB

NO	NAME	TTD
109	Teti Tiran	 16-09-2021 08:44:52 WIB
110	Debby Putri M	 16-09-2021 08:46:05 WIB
111	Dhiyaa Dinanza Akbariansyah	 16-09-2021 08:46:41 WIB

NO	NAME	TTD
112	Jihan thufailah rizky	 16-09-2021 08:46:47 WIB
113	Jillan Syifa Zahratulmilla	 16-09-2021 08:47:34 WIB
114	M Ichan Adhi F	 16-09-2021 08:48:17 WIB

NO	NAME	TTD
115	Rosiana Marito	 16-09-2021 08:51:21 WIB
116	Naila Haerunnisa	 16-09-2021 08:52:20 WIB
117	Kevin Josua Siallagan	 16-09-2021 08:53:32 WIB

NO	NAME	TTD
118	Ismono,S.H.	 16-09-2021 08:53:50 WIB
119	Tiffany Pingkan Kawilaran	 16-09-2021 08:53:51 WIB
120	Chintya Agathis	 16-09-2021 08:54:45 WIB

NO	NAME	TTD
121	Andreas Nicolas Nainggo	 16-09-2021 08:55:44 WIB
122	Ardian Harefa	 16-09-2021 08:55:57 WIB
123	Laily Dyah Rahmatika, S.Pd.	 16-09-2021 08:59:01 WIB

NO	NAME	TTD
124	Nona Fitria Elyusra	 16-09-2021 09:00:13 WIB
125	Margaretha Dwi Yani	 16-09-2021 09:04:10 WIB
126	Muhammad Mega Nurhakiim	 16-09-2021 09:04:53 WIB

NO	NAME	TTD
127	Valencia Grace Natanael	 16-09-2021 09:06:20 WIB
128	Nova	 16-09-2021 09:13:27 WIB
129	Benny Andreas Sinaga	 16-09-2021 09:15:25 WIB

NO	NAME	TTD
130	Augusto Advocatio Justine	 16-09-2021 09:16:25 WIB
131	Dewi Lestari	 16-09-2021 09:17:10 WIB
132	Ekklesia Rohani H	 16-09-2021 09:17:57 WIB

NO	NAME	TTD
133	Clara Alycia	 16-09-2021 09:23:36 WIB
134	Alvita Syahrani Wibowo	 16-09-2021 09:30:58 WIB
135	Arif Qomarudin	 16-09-2021 09:35:06 WIB

NO	NAME	TTD
136	johannes dolok saribu	 16-09-2021 09:35:16 WIB
137	Aldo Bathara	 16-09-2021 09:36:19 WIB
138	Tongon Fernando Hutasoit	 16-09-2021 09:37:01 WIB

NO	NAME	TTD
139	Rudy Sutanto SE	 16-09-2021 09:40:27 WIB
140	Iffah Mumtazah	 16-09-2021 09:41:26 WIB
141	ELVIRA GABRIELA KEREH	 16-09-2021 09:43:13 WIB

NO	NAME	TTD
142	Enoni Nikaoni Harefa	 16-09-2021 09:44:58 WIB
143	Marsya Shalviera Imanda	 16-09-2021 09:46:43 WIB
144	Graciela Brenda Louisa	 16-09-2021 09:47:25 WIB

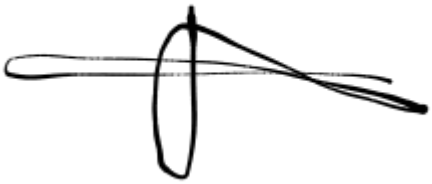
NO	NAME	TTD
145	Ulfah Qisthina Indraswari Sjaf	 16-09-2021 09:52:02 WIB
146	Hari Setyanto, S.Si.,M.M.,Apt.	 16-09-2021 09:53:11 WIB
147	LIANA SALWA IRENE	16-09-2021 09:53:24 WIB
148	Gabriel Batistuta Manullang	 16-09-2021 09:53:27 WIB

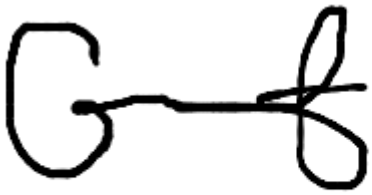
NO	NAME	TTD
149	Clarisa andrea	 16-09-2021 09:54:30 WIB
150	Alvianus Dhima Nuwatiwa	 16-09-2021 09:59:30 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

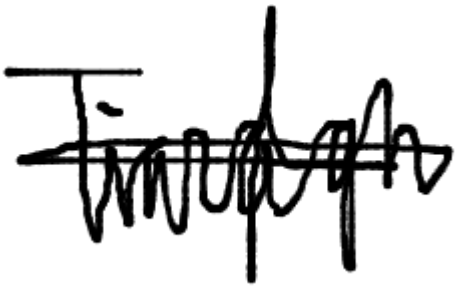
SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Joveliam Abisai	 16-09-2021 10:00:13 WIB
2	Prayoga Hadiningrat	 16-09-2021 10:00:48 WIB
3	Syeinando boy naga	 16-09-2021 10:02:29 WIB

NO	NAME	TTD
4	Callista Rachelia	 16-09-2021 10:02:45 WIB
5	Steven Tirta Putra	 16-09-2021 10:02:46 WIB
6	Nicholas Jonathan	 16-09-2021 10:02:52 WIB

NO	NAME	TTD
7	Nona Fitria Elyusra	 16-09-2021 10:02:59 WIB
8	Gabriel Batistuta Manullang	 16-09-2021 10:03:18 WIB
9	Afkaar Naufal Rahman	 16-09-2021 10:03:30 WIB

NO	NAME	TTD
10	Gabriel Revi Saputra	 16-09-2021 10:03:43 WIB
11	Elviana Samosir	 16-09-2021 10:04:09 WIB
12	Cecilia Vania Indrawan	 16-09-2021 10:04:15 WIB

NO	NAME	TTD
13	Priscilla Junita setiawan	 16-09-2021 10:04:16 WIB
14	TIARA GUMILANG HAMDANI	 16-09-2021 10:04:36 WIB
15	MAHARDHIKA G. SITORUS	 16-09-2021 10:04:37 WIB

NO	NAME	TTD
16	Marcell Cornellius	 16-09-2021 10:05:07 WIB
17	Fidella Febriyani	 16-09-2021 10:05:12 WIB
18	Winfritz Jeremia Abner	 16-09-2021 10:05:18 WIB

NO	NAME	TTD
19	Daniel Hotma Christofel Hutagaol	 16-09-2021 10:05:21 WIB
20	Nadya Natalie Santosa	 16-09-2021 10:05:27 WIB
21	Jason Arnold Sugiono	 16-09-2021 10:05:53 WIB

NO	NAME	TTD
22	inez putri pramono	 16-09-2021 10:06:12 WIB
23	Vannessa Gan	 16-09-2021 10:06:15 WIB
24	Lucky saputra	 16-09-2021 10:06:21 WIB

NO	NAME	TTD
25	Jennifer Debora Tri Lestari	 16-09-2021 10:06:34 WIB
26	Almira Carissa Bastyan	 16-09-2021 10:06:42 WIB
27	Firdayanti Novalinda	 16-09-2021 10:07:19 WIB

NO	NAME	TTD
28	Adzhar Anugerah Trunapasha	 16-09-2021 10:07:22 WIB
29	Jovena Cyrill Christabel	 16-09-2021 10:07:24 WIB
30	Jamhur Wardi Saputra	 16-09-2021 10:07:31 WIB

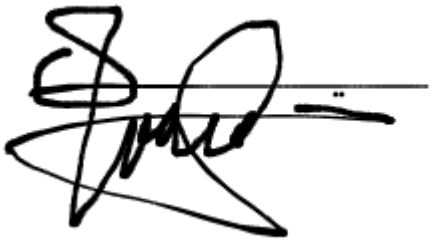
NO	NAME	TTD
31	Andrew Bagastio	 16-09-2021 10:08:01 WIB
32	Evan Grady	 16-09-2021 10:08:33 WIB
33	Louisa Audyna Prochorus	 16-09-2021 10:08:38 WIB

NO	NAME	TTD
34	Aldo Bathara	 16-09-2021 10:09:51 WIB
35	Muhammad Irsyad Difa R	 16-09-2021 10:09:54 WIB
36	Reza Erlangga Marsyah	16-09-2021 10:10:34 WIB

NO	NAME	TTD
37	Leonardo	 16-09-2021 10:10:37 WIB
38	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	 16-09-2021 10:10:56 WIB
39	Vinni El Alexandra	 16-09-2021 10:11:14 WIB

NO	NAME	TTD
40	Albert Adhisurya	 16-09-2021 10:11:46 WIB
41	Jillan Syifa Zahratulmilla	 16-09-2021 10:12:03 WIB
42	Alvita Syahrani Wibowo	 16-09-2021 10:12:04 WIB

NO	NAME	TTD
43	Auralia Marsella Zhaneta	 16-09-2021 10:12:38 WIB
44	Naufal Ramadhan Cahya	 16-09-2021 10:13:11 WIB
45	Mochammad Luthfi Mubarak	 16-09-2021 10:13:39 WIB

NO	NAME	TTD
46	maria magdalena	 16-09-2021 10:14:06 WIB
47	Golda Evyra Napitupulu	 16-09-2021 10:14:42 WIB
48	gabriel kalalo	 16-09-2021 10:15:15 WIB

NO	NAME	TTD
49	Daffa Diaz Danendra C	 16-09-2021 10:15:31 WIB
50	Yael Friskha K	 16-09-2021 10:15:36 WIB
51	ALDO YUDISTIRA	 16-09-2021 10:15:42 WIB

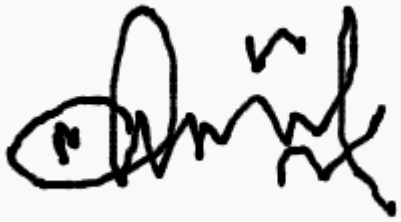
NO	NAME	TTD
52	Eko Winarno	 16-09-2021 10:16:13 WIB
53	Elena Kristina Margaretta	 16-09-2021 10:16:27 WIB
54	Kevin Alim Rabbani	 16-09-2021 10:16:43 WIB

NO	NAME	TTD
55	Felicia Chang	 16-09-2021 10:17:08 WIB
56	Kevin Josua Siallagan	 16-09-2021 10:17:32 WIB
57	Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	 16-09-2021 10:18:11 WIB

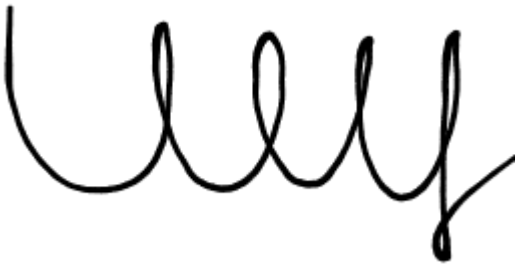
NO	NAME	TTD
58	Fauzan Muhamad Fauzi	 16-09-2021 10:18:39 WIB
59	Gabriella Elisabeth	 16-09-2021 10:19:00 WIB
60	Naila Haerunnisa	 16-09-2021 10:19:31 WIB

NO	NAME	TTD
61	Ai Permanasari	 16-09-2021 10:19:34 WIB
62	Levina Abigail Chandra	 16-09-2021 10:20:02 WIB
63	ENDA ARIFIN ZULKARNAIN SIREGAR	 16-09-2021 10:20:24 WIB

NO	NAME	TTD
64	Sony Setiawan	 16-09-2021 10:21:58 WIB
65	Magfirah	 16-09-2021 10:23:44 WIB
66	Floria Lusiana	 16-09-2021 10:24:07 WIB

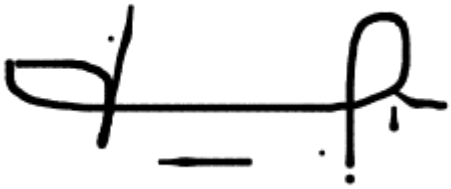
NO	NAME	TTD
67	Dewi Kurna Ningrum	 16-09-2021 10:24:40 WIB
68	James Triady	 16-09-2021 10:25:00 WIB
69	TIFFANI JOANE SETIAWAN	 16-09-2021 10:26:22 WIB

NO	NAME	TTD
70	Adinda putri	 16-09-2021 10:30:09 WIB
71	Angelica Cassandra Bareto	 16-09-2021 10:30:50 WIB
72	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	 16-09-2021 10:31:25 WIB

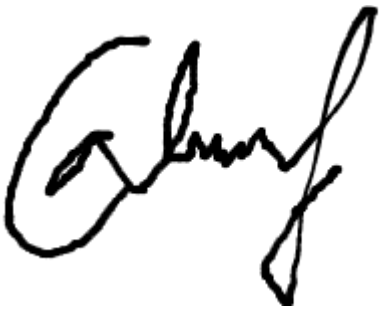
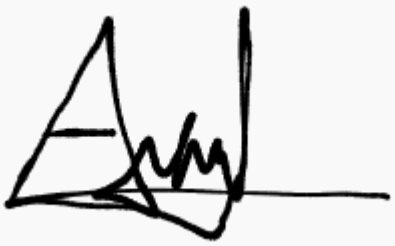
NO	NAME	TTD
73	Budi Sibuea	 16-09-2021 10:31:27 WIB
74	Usman Damani	 16-09-2021 10:31:51 WIB
75	Cristina Natalia Sinaga	 16-09-2021 10:34:04 WIB

NO	NAME	TTD
76	Ekklesia Rohani H	 16-09-2021 10:35:22 WIB
77	Debby Putri M	 16-09-2021 10:35:45 WIB
78	Andriwan Yosua	 16-09-2021 10:41:08 WIB

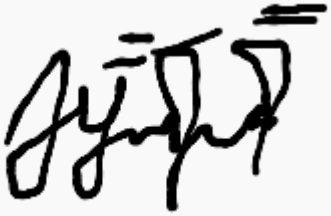
NO	NAME	TTD
79	Shelly Kurniawan	 16-09-2021 10:41:39 WIB
80	Shalma Azzahra Putri Wijaya	 16-09-2021 10:43:36 WIB
81	Angga Aldi Saputra	 16-09-2021 10:44:12 WIB

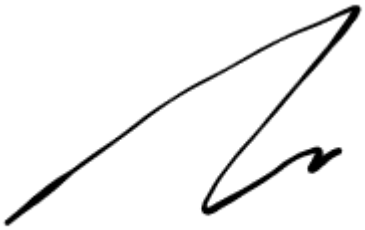
NO	NAME	TTD
82	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	 16-09-2021 10:44:44 WIB
83	Tongon Fernando Hutasoit	16-09-2021 10:46:52 WIB
84	Velia Fransisca	 16-09-2021 10:46:53 WIB

NO	NAME	TTD
85	SILVIA LATUPEIRISSA	 16-09-2021 10:52:43 WIB
86	RIO CAHYA YOGA PRATAMA	 16-09-2021 10:53:04 WIB
87	MAUDY SANDRA, S.S	 16-09-2021 10:54:22 WIB

NO	NAME	TTD
88	Clara Alycia	 16-09-2021 10:54:30 WIB
89	Tambunan Andi	 16-09-2021 10:56:47 WIB
90	Violeta Mashary	 16-09-2021 10:59:20 WIB

NO	NAME	TTD
91	Ismono,S.H.	 16-09-2021 10:59:21 WIB
92	Enoni Nikaoni Harefa	 16-09-2021 10:59:32 WIB
93	Ardian Harefa	 16-09-2021 11:01:38 WIB

NO	NAME	TTD
94	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	 16-09-2021 11:01:52 WIB
95	Irma Yundira	 16-09-2021 11:04:38 WIB
96	Alexander Triestanto	 16-09-2021 11:04:56 WIB

NO	NAME	TTD
97	Camelia Sri Suci Hati	 16-09-2021 11:11:04 WIB
98	Dominiques Reggy	 16-09-2021 11:12:03 WIB
99	Graciela Brenda Louisa	 16-09-2021 11:13:40 WIB

NO	NAME	TTD
100	Benny Andreas Sinaga	 16-09-2021 11:14:00 WIB
101	Ari Surya Kusuma	 16-09-2021 11:14:02 WIB
102	Iffah Mumtazah	 16-09-2021 11:14:40 WIB

NO	NAME	TTD
103	Alfira Kafi Maulani	 16-09-2021 11:14:51 WIB
104	Josua Sibarani	 16-09-2021 11:15:35 WIB
105	Cynthia Monica Az Zahro	 16-09-2021 11:15:51 WIB

NO	NAME	TTD
106	Riza Ramdani	 16-09-2021 11:15:54 WIB
107	Azza Salsabila Febrianti	 16-09-2021 11:15:59 WIB
108	Tiffany Pingkan Kawilaran	 16-09-2021 11:16:50 WIB

NO	NAME	TTD
109	M Ichan Adhi F	 16-09-2021 11:17:07 WIB
110	Christin Septina Basani	 16-09-2021 11:18:02 WIB
111	Yohan Pradytio	 16-09-2021 11:20:01 WIB

NO	NAME	TTD
112	Hari Setyanto, S.Si.,M.M.,Apt.	 16-09-2021 11:20:09 WIB
113	Angelia Wulandari	 16-09-2021 11:26:10 WIB
114	Jovinsca Haylie Venesia	 16-09-2021 11:30:23 WIB

NO	NAME	TTD
115	Chintya Agathis	 16-09-2021 11:32:21 WIB
116	Irvan Mikhael Sumarlie	 16-09-2021 11:34:02 WIB
117	Teti Tiran	 16-09-2021 11:39:26 WIB

NO	NAME	TTD
118	chiara zefanya desiree	 16-09-2021 11:39:55 WIB
119	Augusto Advocatio Justine	 16-09-2021 11:42:02 WIB
120	Clarisa andrea	 16-09-2021 11:43:20 WIB

NO	NAME	TTD
121	Rickardo Christian Ferdinant	 16-09-2021 11:44:08 WIB
122	Dian Handayani	 16-09-2021 11:44:34 WIB
123	EKO BUDIYANTO	 16-09-2021 11:48:20 WIB

NO	NAME	TTD
124	debora prasetya	 16-09-2021 11:49:13 WIB
125	Vissilius Geraldi Kristiawan	 16-09-2021 11:49:51 WIB
126	Sarwan pujianto	 16-09-2021 11:51:16 WIB

NO	NAME	TTD
127	johannes dolok saribu	 16-09-2021 11:52:25 WIB
128	Chinta Eliza H.M.S	 16-09-2021 11:53:14 WIB
129	Vianica Herman	 16-09-2021 11:56:19 WIB

NO	NAME	TTD
130	Reyhan Arisena Johan	 16-09-2021 11:56:28 WIB
131	Stevanus Reysover Bobby	 16-09-2021 11:57:49 WIB
132	Andreas Nicolas Nainggo	 16-09-2021 11:57:57 WIB

NO	NAME	TTD
133	HARTINI, S.PD	 16-09-2021 11:58:25 WIB
134	Ulfah Qisthina Indraswari Sjaf	 16-09-2021 12:00:52 WIB
135	Ayu Jessy Yustifa Maharani	 16-09-2021 12:02:13 WIB

NO	NAME	TTD
136	Abdul Zakaria Al Islamey, S.E	 16-09-2021 12:07:44 WIB
137	Krisbiantoro Lumbantoruan	 16-09-2021 12:08:45 WIB
138	Muhammad Mega Nurhakiim	 16-09-2021 12:13:04 WIB

NO	NAME	TTD
139	Kezia Immanuella Kamsari	 16-09-2021 12:29:05 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Cecilia Vania Indrawan	 16-09-2021 13:00:35 WIB

NO	NAME	TTD
2	Mochammad Luthfi Mubarak	 16-09-2021 13:01:24 WIB
3	Steven Tirta Putra	 16-09-2021 13:01:34 WIB
4	Valentino Satrio Kusumo	 16-09-2021 13:02:06 WIB

NO	NAME	TTD
5	Gabriel Batistuta Manullang	 16-09-2021 13:02:09 WIB
6	Auralia Marsella Zhaneta	 16-09-2021 13:02:37 WIB
7	Louisa Audyna Prochorus	 16-09-2021 13:02:51 WIB

NO	NAME	TTD
8	Sony Setiawan	 16-09-2021 13:02:52 WIB
9	Naufal Ramadhan Cahya	 16-09-2021 13:03:00 WIB
10	Naila Haerunnisa	 16-09-2021 13:03:21 WIB

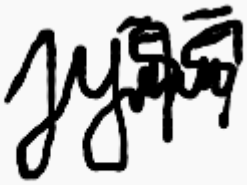
NO	NAME	TTD
11	Ari Surya Kusuma	 16-09-2021 13:05:20 WIB
12	Fidella Febriyani	 16-09-2021 13:05:36 WIB
13	Jamhur Wardi Saputra	 16-09-2021 13:05:46 WIB

NO	NAME	TTD
14	Jason Arnold Sugiono	 16-09-2021 13:06:11 WIB
15	Evi Hanias Sianturi	16-09-2021 13:06:27 WIB
16	LIANA SALWA IRENE	16-09-2021 13:06:42 WIB
17	Ekklesia Rohani H	 16-09-2021 13:06:59 WIB

NO	NAME	TTD
18	Ryan Azali	 16-09-2021 13:07:14 WIB
19	Lucky saputra	 16-09-2021 13:07:23 WIB
20	Prayoga Hadiningrat	 16-09-2021 13:07:47 WIB

NO	NAME	TTD
21	Vissilius Geraldi Kristiawan	 16-09-2021 13:07:55 WIB
22	RIO CAHYA YOGA PRATAMA	 16-09-2021 13:08:06 WIB
23	Jovena Cyrill Christabel	 16-09-2021 13:08:34 WIB

NO	NAME	TTD
24	Nicholas Jonathan	 16-09-2021 13:08:49 WIB
25	Firdayanti Novalinda	 16-09-2021 13:09:25 WIB
26	Kevin Alim Rabbani	 16-09-2021 13:09:25 WIB

NO	NAME	TTD
27	Gabriella Elisabeth	 16-09-2021 13:10:01 WIB
28	Aldo Bathara	 16-09-2021 13:10:07 WIB
29	Irma Yundira	 16-09-2021 13:10:38 WIB

NO	NAME	TTD
30	Clarisa andrea	 16-09-2021 13:10:42 WIB
31	Dewi Kurna Ningrum	 16-09-2021 13:11:13 WIB
32	Albert Adhisurya	 16-09-2021 13:11:13 WIB

NO	NAME	TTD
33	Vannessa Gan	 16-09-2021 13:11:23 WIB
34	Jennifer Debora Tri Lestari	 16-09-2021 13:11:35 WIB
35	Ayu Jessy Yustifa Maharani	 16-09-2021 13:11:57 WIB

NO	NAME	TTD
36	Ardian Harefa	 16-09-2021 13:12:10 WIB
37	Margaretha Dwi Yani	 16-09-2021 13:12:50 WIB
38	Dion Pilipus	 16-09-2021 13:13:18 WIB

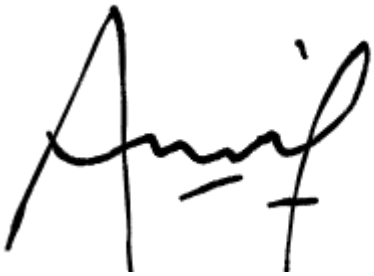
NO	NAME	TTD
39	Tiffany Pingkan Kawilaran	 16-09-2021 13:13:42 WIB
40	Evan Grady	 16-09-2021 13:13:43 WIB
41	Daniel Hotma Christofel Hutagaol	 16-09-2021 13:13:47 WIB

NO	NAME	TTD
42	Muhammad Irsyad Difa R	 16-09-2021 13:14:24 WIB
43	Yohan Pradytio	 16-09-2021 13:14:54 WIB
44	Angelica Cassandra Bareto	 16-09-2021 13:15:25 WIB

NO	NAME	TTD
45	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	 16-09-2021 13:16:45 WIB
46	SILVIA LATUPEIRISSA	 16-09-2021 13:17:24 WIB
47	Jillan Syifa Zahratulmilla	 16-09-2021 13:17:38 WIB

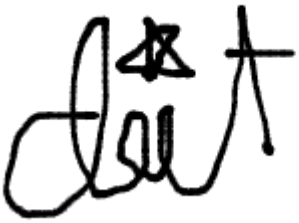
NO	NAME	TTD
48	Callista Rachelia	 16-09-2021 13:18:28 WIB
49	M Ichan Adhi F	 16-09-2021 13:18:31 WIB
50	TIARA GUMILANG HAMDANI	 16-09-2021 13:18:36 WIB

NO	NAME	TTD
51	Levina Abigail Chandra	 16-09-2021 13:19:07 WIB
52	Eko Winarno	 16-09-2021 13:19:09 WIB
53	Dian Handayani	 16-09-2021 13:19:14 WIB

NO	NAME	TTD
54	ARIF SETIAWAN	 16-09-2021 13:20:02 WIB
55	Winfritz Jeremia Abner	 16-09-2021 13:20:11 WIB
56	MAUDY SANDRA, S.S	 16-09-2021 13:20:13 WIB

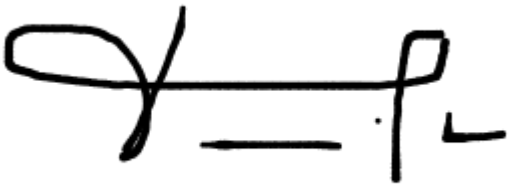
NO	NAME	TTD
57	Tongon Fernando Hutasoit	16-09-2021 13:20:55 WIB
58	Sarwan pujianto	 16-09-2021 13:21:28 WIB
59	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	 16-09-2021 13:21:56 WIB

NO	NAME	TTD
60	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	 16-09-2021 13:24:52 WIB
61	Abdul Zakaria Al Islamey, S.E	 16-09-2021 13:25:07 WIB
62	Fauzan Muhamad Fauzi	 16-09-2021 13:25:33 WIB

NO	NAME	TTD
63	Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	 16-09-2021 13:27:25 WIB
64	Syeinando boy naga	 16-09-2021 13:29:00 WIB
65	Adinda putri	 16-09-2021 13:29:54 WIB

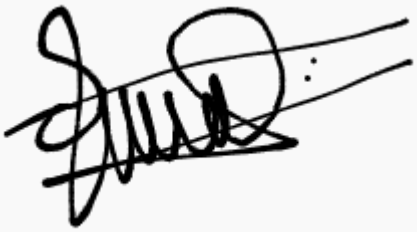
NO	NAME	TTD
66	Jihan thufailah rizky	 16-09-2021 13:31:23 WIB
67	Andrew Bagastio	 16-09-2021 13:32:57 WIB
68	Joveliam Abisai	 16-09-2021 13:33:44 WIB

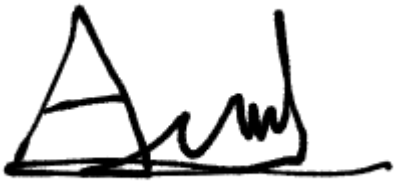
NO	NAME	TTD
69	Clara Alycia	 16-09-2021 13:36:42 WIB
70	Adzhar Anugerah Trunapasha	 16-09-2021 13:38:51 WIB
71	EKO BUDIYANTO	 16-09-2021 13:39:14 WIB

NO	NAME	TTD
72	Velia Fransisca	 16-09-2021 13:39:31 WIB
73	Valencia Grace Natanael	 16-09-2021 13:39:50 WIB
74	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	 16-09-2021 13:40:04 WIB

NO	NAME	TTD
75	Dhiyaa Dinanza Akbariansyah	 16-09-2021 13:40:10 WIB
76	Alexander Triestanto	 16-09-2021 13:41:16 WIB
77	Chinta Eliza H.M.S	 16-09-2021 13:41:28 WIB

NO	NAME	TTD
78	M.Alfi Syahri Atho illah Nasution	 16-09-2021 13:42:15 WIB
79	Alfira Kafi Maulani	 16-09-2021 13:42:58 WIB
80	Hari Setyanto, S.Si.,M.M.,Apt.	 16-09-2021 13:43:15 WIB

NO	NAME	TTD
81	Nur Ajeng Sulistiani	 16-09-2021 13:44:20 WIB
82	Dominiques Reggy	 16-09-2021 13:44:24 WIB
83	gabriel kalalo	 16-09-2021 13:45:45 WIB

NO	NAME	TTD
84	Tambunan Andi	 16-09-2021 13:47:39 WIB
85	Wildan Hartadinata	 16-09-2021 13:50:15 WIB
86	ATO SUPRIANTO, S.ST.	 16-09-2021 13:50:45 WIB

NO	NAME	TTD
87	Benny Andreas Sinaga	 16-09-2021 13:51:01 WIB
88	Nomensen Freddy Siahaan, S.H., LL.M.	 16-09-2021 13:55:55 WIB
89	Shelly Kurniawan	 16-09-2021 13:57:58 WIB

NO	NAME	TTD
90	IFAANO BUASISOKHI HARITA	 16-09-2021 14:00:34 WIB
91	Ismono,S.H.	 16-09-2021 14:00:49 WIB
92	ALDO YUDISTIRA	 16-09-2021 14:04:06 WIB

NO	NAME	TTD
93	Elviana Samosir	 16-09-2021 14:05:43 WIB
94	Kevin Josua Siallagan	 16-09-2021 14:14:16 WIB
95	Dewi Lestari	 16-09-2021 14:17:33 WIB

NO	NAME	TTD
96	Golda Evyra Napitupulu	 16-09-2021 14:18:26 WIB
97	Priscilla Junita setiawan	 16-09-2021 14:18:27 WIB
98	Andreas Nicolas Nainggo	 16-09-2021 14:20:23 WIB

NO	NAME	TTD
99	Andriwan Yosua	 16-09-2021 14:20:23 WIB
100	James Triady	 16-09-2021 14:21:52 WIB
101	Nona Fitria Elyusra	 16-09-2021 14:22:29 WIB

NO	NAME	TTD
102	Reza Erlangga Marsyah	 16-09-2021 14:24:11 WIB
103	Teti Tiran	 16-09-2021 14:26:40 WIB
104	Chintya Agathis	 16-09-2021 14:35:14 WIB

NO	NAME	TTD
105	Irvan Mikhael Sumarlie	 16-09-2021 14:36:42 WIB
106	TIFFANI JOANE SETIAWAN	 16-09-2021 14:44:59 WIB
107	Azza Salsabila Febrianti	 16-09-2021 14:45:01 WIB

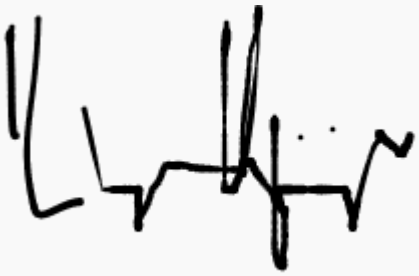
NO	NAME	TTD
108	Riza Ramdani	 16-09-2021 14:45:18 WIB
109	Rosalinda Hutabarat	16-09-2021 14:45:56 WIB
110	HARTINI, S.PD	 16-09-2021 14:47:58 WIB

NO	NAME	TTD
111	Krisbiantoro Lumbantoruan	 16-09-2021 14:52:22 WIB
112	Felicia Chang	 16-09-2021 14:53:57 WIB
113	Priska Ayu	 16-09-2021 14:55:21 WIB

NO	NAME	TTD
114	Muhammad Abdul Aziz Nurambiya	 16-09-2021 14:58:23 WIB
115	Alvita Syahrani Wibowo	 16-09-2021 14:58:49 WIB
116	Almira Carissa Bastyan	 16-09-2021 14:59:30 WIB

NO	NAME	TTD
117	Afkaar Naufal Rahman	 16-09-2021 14:59:37 WIB
118	Gabriel Revi Saputra	 16-09-2021 14:59:41 WIB
119	Camelia Sri Suci Hati	 16-09-2021 15:03:37 WIB

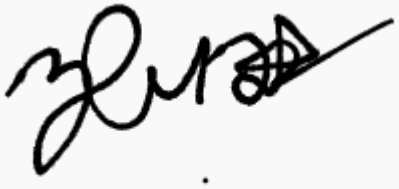
NO	NAME	TTD
120	Cristina Natalia Sinaga	 16-09-2021 15:03:50 WIB
121	chiara zefanya desiree	 16-09-2021 15:04:38 WIB
122	Nadya Natalie Santosa	 16-09-2021 15:04:52 WIB

NO	NAME	TTD
123	ENDA ARIFIN ZULKARNAIN SIREGAR	 16-09-2021 15:05:03 WIB
124	Ulfah Qisthina Indraswari Sjaf	 16-09-2021 15:06:27 WIB
125	johannes dolok saribu	 16-09-2021 15:09:36 WIB

NO	NAME	TTD
126	Laily Dyah Rahmatika, S.Pd.	 16-09-2021 15:10:41 WIB
127	Adelia Ayu Rahmawati	 16-09-2021 15:11:26 WIB
128	Ruhulina Br Sebayang	 16-09-2021 15:15:05 WIB

NO	NAME	TTD
129	Rickardo Christian Ferdinant	 16-09-2021 15:15:31 WIB
130	Farrel Christyanto Wijaya	 16-09-2021 15:17:10 WIB
131	Marcell Cornellius	 16-09-2021 15:17:45 WIB

NO	NAME	TTD
132	Magfirah	 16-09-2021 15:19:32 WIB
133	Christin Septina Basani	 16-09-2021 15:24:16 WIB
134	Floria Lusiana	 16-09-2021 15:24:54 WIB

NO	NAME	TTD
135	ELVIRA GABRIELA KEREH	 16-09-2021 15:29:24 WIB
136	Claudia Megumi	 16-09-2021 15:30:26 WIB

Sistem Informasi Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Debby Putri M	 17-09-2021 07:15:53 WIB
2	Mochammad Luthfi Mubarak	 17-09-2021 07:16:37 WIB
3	Azza Salsabila Febrianti	 17-09-2021 07:17:50 WIB

NO	NAME	TTD
4	Budi Sibuea	 17-09-2021 07:18:07 WIB
5	Afkaar Naufal Rahman	 17-09-2021 07:18:17 WIB
6	Callista Rachelia	 17-09-2021 07:18:27 WIB

NO	NAME	TTD
7	Tambunan Andi	 17-09-2021 07:18:27 WIB
8	Riza Ramdani	 17-09-2021 07:18:32 WIB
9	Louisa Audyna Prochorus	 17-09-2021 07:18:40 WIB

NO	NAME	TTD
10	Fidella Febriyani	 17-09-2021 07:19:00 WIB
11	Jovena Cyrill Christabel	 17-09-2021 07:19:01 WIB
12	Alvita Syahrani Wibowo	 17-09-2021 07:19:12 WIB

NO	NAME	TTD
13	Adzhar Anugerah Trunapasha	 17-09-2021 07:19:17 WIB
14	Nur Ajeng Sulistiani	 17-09-2021 07:19:23 WIB
15	Auralia Marsella Zhaneta	 17-09-2021 07:19:26 WIB

NO	NAME	TTD
16	Jason Arnold Sugiono	 17-09-2021 07:19:34 WIB
17	Jennifer Debora Tri Lestari	 17-09-2021 07:20:07 WIB
18	James Triady	 17-09-2021 07:20:09 WIB

NO	NAME	TTD
19	Ayu Jessy Yustifa Maharani	 17-09-2021 07:20:56 WIB
20	Angelica Cassandra Bareto	 17-09-2021 07:21:25 WIB
21	LIANA SALWA IRENE	17-09-2021 07:21:33 WIB
22	Ari Surya Kusuma	 17-09-2021 07:21:54 WIB

NO	NAME	TTD
23	Jillan Syifa Zahratulmilla	 17-09-2021 07:22:06 WIB
24	Alexander Triestanto	 17-09-2021 07:22:16 WIB
25	Almira Carissa Bastyan	 17-09-2021 07:22:37 WIB

NO	NAME	TTD
26	Abellenka Aurora Aurellia	 17-09-2021 07:22:39 WIB
27	Floria Lusiana	 17-09-2021 07:22:48 WIB
28	Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	 17-09-2021 07:22:53 WIB

NO	NAME	TTD
29	TIFFANI JOANE SETIAWAN	 17-09-2021 07:23:12 WIB
30	gabriel kalalo	 17-09-2021 07:23:27 WIB
31	Farrel Christyanto Wijaya	 17-09-2021 07:23:34 WIB

NO	NAME	TTD
32	Jamhur Wardi Saputra	 17-09-2021 07:24:00 WIB
33	Tharadina Yustrianti	 17-09-2021 07:24:07 WIB
34	Elviana Samosir	 17-09-2021 07:24:13 WIB

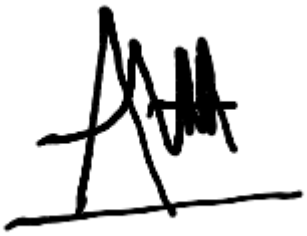
NO	NAME	TTD
35	ALDO YUDISTIRA	 17-09-2021 07:24:41 WIB
36	Daniel Hotma Christofel Hutagaol	 17-09-2021 07:25:00 WIB
37	Usman Damani	 17-09-2021 07:25:22 WIB

NO	NAME	TTD
38	Firdayanti Novalinda	 17-09-2021 07:25:39 WIB
39	Velia Fransisca	 17-09-2021 07:25:50 WIB
40	Jihan thufailah rizky	 17-09-2021 07:26:02 WIB

NO	NAME	TTD
41	HARTINI, S.PD	 17-09-2021 07:26:05 WIB
42	Jovinsca Haylie Venesia	 17-09-2021 07:26:18 WIB
43	Golda Evyra Napitupulu	 17-09-2021 07:26:18 WIB

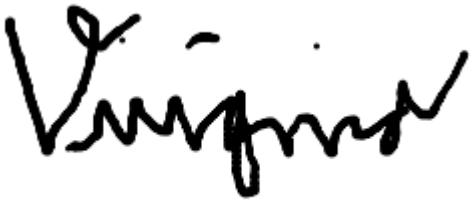
NO	NAME	TTD
44	Marcell Cornellius	 17-09-2021 07:26:21 WIB
45	Felicia Chang	 17-09-2021 07:27:19 WIB
46	Cecilia Vania Indrawan	 17-09-2021 07:27:22 WIB

NO	NAME	TTD
47	ARIF SETIAWAN	 17-09-2021 07:27:49 WIB
48	Nadya Natalie Santosa	 17-09-2021 07:28:18 WIB
49	Camelia Sri Suci Hati	 17-09-2021 07:28:26 WIB

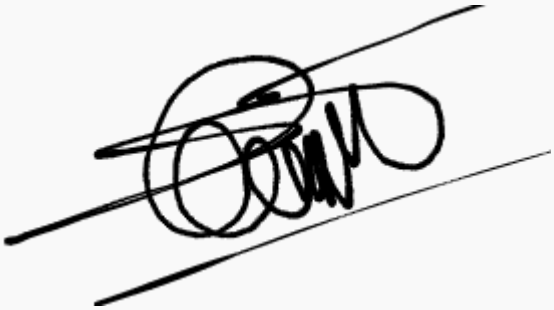
NO	NAME	TTD
50	Ai Permanasari	 17-09-2021 07:29:24 WIB
51	Muhammad Abdul Aziz Nurambiya	 17-09-2021 07:29:30 WIB
52	Margaretha Dwi Yani	 17-09-2021 07:29:33 WIB

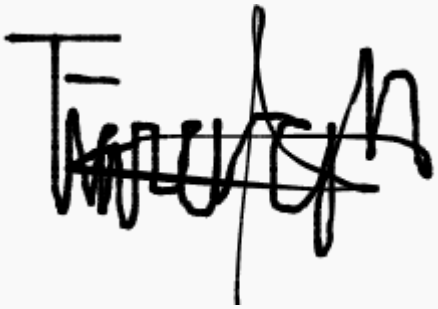
NO	NAME	TTD
53	Shalma Azzahra Putri Wijaya	 17-09-2021 07:29:43 WIB
54	Steven Tirta Putra	 17-09-2021 07:31:18 WIB
55	Lucky saputra	 17-09-2021 07:31:45 WIB

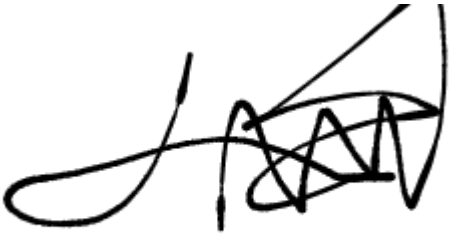
NO	NAME	TTD
56	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	 17-09-2021 07:32:25 WIB
57	Vannessa Gan	 17-09-2021 07:32:29 WIB
58	Angelia Wulandari	 17-09-2021 07:33:06 WIB

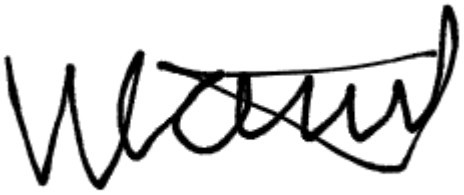
NO	NAME	TTD
59	Rickardo Christian Ferdinant	 17-09-2021 07:33:17 WIB
60	Virginnia Melya Iskandar	 17-09-2021 07:34:37 WIB
61	Andriwan Yosua	 17-09-2021 07:34:39 WIB

NO	NAME	TTD
62	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	 17-09-2021 07:35:07 WIB
63	Leonardo	 17-09-2021 07:35:28 WIB
64	Vissilius Geraldi Kristiawan	 17-09-2021 07:35:52 WIB

NO	NAME	TTD
65	MAUDY SANDRA, S.S	 17-09-2021 07:35:58 WIB
66	Chinta Eliza H.M.S	 17-09-2021 07:36:04 WIB
67	Syeinando boy naga	 17-09-2021 07:36:10 WIB

NO	NAME	TTD
68	Ekklesia Rohani H	 17-09-2021 07:37:23 WIB
69	TIARA GUMILANG HAMDANI	 17-09-2021 07:37:56 WIB
70	Nabilla Zaviransyah	 17-09-2021 07:38:08 WIB

NO	NAME	TTD
71	Nicholas Jonathan	 17-09-2021 07:39:14 WIB
72	johannes dolok saribu	 17-09-2021 07:39:20 WIB
73	Cristina Natalia Sinaga	 17-09-2021 07:40:46 WIB

NO	NAME	TTD
74	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	 17-09-2021 07:41:04 WIB
75	Elena Kristina Margaretta	 17-09-2021 07:41:28 WIB
76	Yael Friskha K	 17-09-2021 07:43:04 WIB

NO	NAME	TTD
77	Winfritz Jeremia Abner	 17-09-2021 07:45:15 WIB
78	Eko Winarno	 17-09-2021 07:46:15 WIB
79	M Ichan Adhi F	 17-09-2021 07:48:43 WIB

NO	NAME	TTD
80	M.Alfi Syahri Atho illah Nasution	 17-09-2021 07:49:30 WIB
81	Tiffany Pingkan Kawilaran	 17-09-2021 07:49:58 WIB
82	Benny Andreas Sinaga	 17-09-2021 07:51:41 WIB

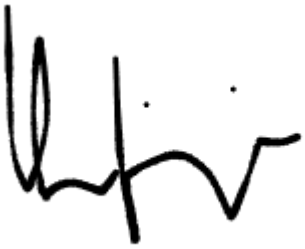
NO	NAME	TTD
83	Reyhan Arisena Johan	 17-09-2021 07:53:16 WIB
84	Fauzan Muhamad Fauzi	 17-09-2021 07:54:16 WIB
85	RIO CAHYA YOGA PRATAMA	 17-09-2021 07:54:37 WIB

NO	NAME	TTD
86	Naila Haerunnisa	 17-09-2021 07:56:02 WIB
87	maria magdalena	 17-09-2021 07:56:15 WIB
88	MAHARDHIKA G. SITORUS	 17-09-2021 07:56:53 WIB

NO	NAME	TTD
89	Adelia Ayu Rahmawati	 17-09-2021 07:56:57 WIB
90	Ardian Harefa	 17-09-2021 07:57:53 WIB
91	Muhammad Irsyad Difa R	 17-09-2021 07:57:53 WIB

NO	NAME	TTD
92	SILVIA LATUPEIRISSA	 17-09-2021 07:59:11 WIB
93	Sarwan pujianto	 17-09-2021 07:59:19 WIB
94	Magfirah	 17-09-2021 08:00:49 WIB

NO	NAME	TTD
95	Ardi Muhamad Farhan	 17-09-2021 08:01:09 WIB
96	Andreas Nicolas Nainggo	 17-09-2021 08:02:14 WIB
97	Ryan Azali	 17-09-2021 08:03:10 WIB

NO	NAME	TTD
98	Nomensen Freddy Siahaan, S.H., LL.M.	 17-09-2021 08:03:40 WIB
99	Dewi Lestari	 17-09-2021 08:04:05 WIB
100	ENDA ARIFIN ZULKARNAIN SIREGAR	 17-09-2021 08:04:38 WIB

NO	NAME	TTD
101	EKO BUDIYANTO	 17-09-2021 08:05:05 WIB
102	Dewi Kurna Ningrum	 17-09-2021 08:05:11 WIB
103	Aldo Bathara	 17-09-2021 08:06:10 WIB

NO	NAME	TTD
104	Kevin Alim Rabbani	 17-09-2021 08:06:51 WIB
105	debora prasetya	 17-09-2021 08:07:44 WIB
106	Adinda putri	 17-09-2021 08:10:37 WIB

NO	NAME	TTD
107	Ismono,S.H.	 17-09-2021 08:11:53 WIB
108	Cynthia Monica Az Zahro	 17-09-2021 08:12:30 WIB
109	Evi Hanias Sianturi	17-09-2021 08:13:43 WIB

NO	NAME	TTD
110	Valencia Grace Natanael	 17-09-2021 08:15:48 WIB
111	chiara zefanya desiree	 17-09-2021 08:16:24 WIB
112	Albert Adhisurya	 17-09-2021 08:16:53 WIB

NO	NAME	TTD
113	Evan Grady	 17-09-2021 08:18:08 WIB
114	Muhammad Mega Nurhakiim	 17-09-2021 08:19:26 WIB
115	Clara Alycia	 17-09-2021 08:19:36 WIB

NO	NAME	TTD
116	Clarisa andrea	 17-09-2021 08:20:43 WIB
117	Gabriel Revi Saputra	 17-09-2021 08:21:35 WIB
118	Alfira Kafi Maulani	 17-09-2021 08:23:58 WIB

NO	NAME	TTD
119	Shelly Kurniawan	 17-09-2021 08:25:46 WIB
120	Kezia Immanuella Kamsari	 17-09-2021 08:28:10 WIB
121	Dhiyaa Dinanza Akbariansyah	 17-09-2021 08:30:52 WIB

NO	NAME	TTD
122	Levina Abigail Chandra	 17-09-2021 08:32:33 WIB
123	Chintya Agathis	 17-09-2021 08:32:44 WIB
124	Nailur Rohmatul Azkiya	 17-09-2021 08:34:04 WIB

NO	NAME	TTD
125	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	 17-09-2021 08:34:10 WIB
126	Violeta Mashary	 17-09-2021 08:35:03 WIB
127	Reza Erlangga Marsyah	 17-09-2021 08:39:01 WIB

NO	NAME	TTD
128	Irma Yundira	 17-09-2021 08:39:41 WIB
129	Irvan Mikhael Sumarlie	 17-09-2021 08:43:21 WIB
130	Joveliam Abisai	 17-09-2021 08:49:19 WIB

NO	NAME	TTD
131	Angga Aldi Saputra	 17-09-2021 08:51:56 WIB
132	Dominiques Reggy	 17-09-2021 08:58:12 WIB
133	ATO SUPRIANTO, S.ST.	 17-09-2021 08:58:49 WIB

NO	NAME	TTD
134	Gabriel Batistuta Manullang	 17-09-2021 09:06:41 WIB
135	ELVIRA GABRIELA KEREH	 17-09-2021 09:07:20 WIB
136	Kevin Josua Siallagan	 17-09-2021 09:07:48 WIB

NO	NAME	TTD
137	Priscilla Junita setiawan	 17-09-2021 09:07:50 WIB
138	Valentino Satrio Kusumo	 17-09-2021 09:07:58 WIB
139	Claudia Megumi	 17-09-2021 09:08:46 WIB

NO	NAME	TTD
140	Christin Septina Basani	 17-09-2021 09:09:01 WIB
141	Teti Tiran	 17-09-2021 09:10:14 WIB
142	Marsya Shalviera Imanda	 17-09-2021 09:10:42 WIB

NO	NAME	TTD
143	Ulfah Qisthina Indraswari Sjaf	 17-09-2021 09:11:31 WIB
144	Nona Fitria Elyusra	 17-09-2021 09:11:50 WIB
145	Nova	 17-09-2021 09:13:37 WIB

NO	NAME	TTD
146	Naufal Ramadhan Cahya	 17-09-2021 09:20:02 WIB
147	Sony Setiawan	 17-09-2021 09:23:46 WIB
148	Dian Handayani	 17-09-2021 09:29:20 WIB

NO	NAME	TTD
149	Tongon Fernando Hutasoit	 17-09-2021 09:35:00 WIB
150	Rudy Sutanto SE	 17-09-2021 09:37:58 WIB
151	Enoni Nikaoni Harefa	 17-09-2021 09:45:16 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dian Handayani	 17-09-2021 09:30:29 WIB
2	Vissilius Geraldi Kristiawan	 17-09-2021 09:30:30 WIB
3	Sarwan pujianto	 17-09-2021 09:30:46 WIB
4	LIANA SALWA IRENE	17-09-2021 09:31:03 WIB

NO	NAME	TTD
5	Ekklesia Rohani H	 17-09-2021 09:31:06 WIB
6	Jovena Cyrill Christabel	 17-09-2021 09:31:36 WIB
7	Debby Putri M	 17-09-2021 09:32:00 WIB

NO	NAME	TTD
8	Firdayanti Novalinda	 17-09-2021 09:32:14 WIB
9	Jamhur Wardi Saputra	 17-09-2021 09:32:58 WIB
10	Gabriel Batistuta Manullang	 17-09-2021 09:33:30 WIB

NO	NAME	TTD
11	M.Alfi Syahri Atho illah Nasution	 17-09-2021 09:34:03 WIB
12	Callista Rachelia	 17-09-2021 09:34:15 WIB
13	Mochammad Luthfi Mubarak	 17-09-2021 09:35:11 WIB

NO	NAME	TTD
14	Tongon Fernando Hutasoit	 17-09-2021 09:35:22 WIB
15	Winfritz Jeremia Abner	 17-09-2021 09:35:30 WIB
16	Elviana Samosir	 17-09-2021 09:35:44 WIB

NO	NAME	TTD
17	Alvita Syahrani Wibowo	 17-09-2021 09:36:01 WIB
18	Floria Lusiana	 17-09-2021 09:36:10 WIB
19	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	 17-09-2021 09:36:40 WIB

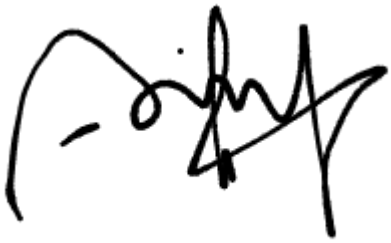
NO	NAME	TTD
20	Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	 17-09-2021 09:36:56 WIB
21	Dewi Kurna Ningrum	 17-09-2021 09:37:12 WIB
22	Jason Arnold Sugiono	 17-09-2021 09:37:20 WIB

NO	NAME	TTD
23	Jillan Syifa Zahratulmilla	 17-09-2021 09:37:29 WIB
24	Angga Aldi Saputra	 17-09-2021 09:37:44 WIB
25	Lucky saputra	 17-09-2021 09:38:03 WIB

NO	NAME	TTD
26	Alexander Triestanto	 17-09-2021 09:38:14 WIB
27	Rudy Sutanto SE	 17-09-2021 09:38:17 WIB
28	Ardian Harefa	 17-09-2021 09:38:23 WIB

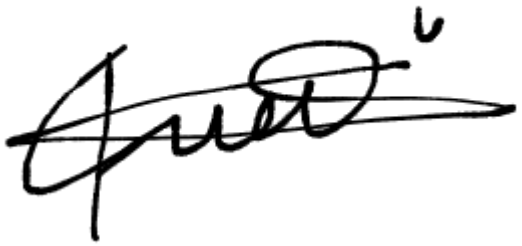
NO	NAME	TTD
29	Budi Sibuea	 17-09-2021 09:38:47 WIB
30	Farrel Christyanto Wijaya	 17-09-2021 09:39:35 WIB
31	Daniel Hotma Christofel Hutagaol	 17-09-2021 09:39:45 WIB

NO	NAME	TTD
32	gabriel kalalo	 17-09-2021 09:40:43 WIB
33	Nomensen Freddy Siahaan, S.H., LL.M.	 17-09-2021 09:41:13 WIB
34	Muhammad Irsyad Difa R	 17-09-2021 09:41:25 WIB

NO	NAME	TTD
35	Syeinando boy naga	 17-09-2021 09:41:29 WIB
36	Ai Permanasari	 17-09-2021 09:42:25 WIB
37	Irvan Mikhael Sumarlie	 17-09-2021 09:44:33 WIB

NO	NAME	TTD
38	Golda Evyra Napitupulu	 17-09-2021 09:44:35 WIB
39	Evan Grady	 17-09-2021 09:45:26 WIB
40	Enoni Nikaoni Harefa	 17-09-2021 09:45:31 WIB

NO	NAME	TTD
41	Marcell Cornellius	 17-09-2021 09:45:44 WIB
42	MAHARDHIKA G. SITORUS	 17-09-2021 09:47:54 WIB
43	Azza Salsabila Febrianti	 17-09-2021 09:47:58 WIB

NO	NAME	TTD
44	Ayu Jessy Yustifa Maharani	 17-09-2021 09:47:59 WIB
45	Angelia Wulandari	 17-09-2021 09:50:57 WIB
46	Evi Hanias Sianturi	17-09-2021 09:50:58 WIB

NO	NAME	TTD
47	Aldo Bathara	 17-09-2021 09:51:22 WIB
48	Felicia Chang	 17-09-2021 09:51:31 WIB
49	Adzhar Anugerah Trunapasha	 17-09-2021 09:51:44 WIB

NO	NAME	TTD
50	ARIF SETIAWAN	 17-09-2021 09:52:07 WIB
51	Almira Carissa Bastyan	 17-09-2021 09:52:27 WIB
52	Hari Setyanto, S.Si.,M.M.,Apt.	 17-09-2021 09:52:45 WIB

NO	NAME	TTD
53	Rickardo Christian Ferdinant	 17-09-2021 09:53:19 WIB
54	Benny Andreas Sinaga	 17-09-2021 09:53:45 WIB
55	SILVIA LATUPEIRISSA	 17-09-2021 09:53:49 WIB

NO	NAME	TTD
56	Clara Alycia	 17-09-2021 09:54:04 WIB
57	inez putri pramono	 17-09-2021 09:55:01 WIB
58	Laily Dyah Rahmatika, S.Pd.	 17-09-2021 09:55:27 WIB

NO	NAME	TTD
59	Jihan thufailah rizky	 17-09-2021 09:55:52 WIB
60	Nailur Rohmatul Azkiya	 17-09-2021 09:55:55 WIB
61	Joveliam Abisai	 17-09-2021 09:56:30 WIB

NO	NAME	TTD
62	Fidella Febriyani	 17-09-2021 09:57:03 WIB
63	TIARA GUMILANG HAMDANI	 17-09-2021 09:57:56 WIB
64	Afkaar Naufal Rahman	17-09-2021 09:58:05 WIB

NO	NAME	TTD
65	johannes dolok saribu	 17-09-2021 09:58:29 WIB
66	Gabriel Revi Saputra	 17-09-2021 09:59:26 WIB
67	Adinda putri	 17-09-2021 09:59:45 WIB

NO	NAME	TTD
68	Violeta Mashary	 17-09-2021 09:59:52 WIB
69	Nur Ajeng Sulistiani	 17-09-2021 10:00:06 WIB
70	Virginnia Melya Iskandar	 17-09-2021 10:00:34 WIB

NO	NAME	TTD
71	Nicholas Jonathan	 17-09-2021 10:00:42 WIB
72	Ismono,S.H.	 17-09-2021 10:01:41 WIB
73	Alvianus Dhima Nuwatiwa	 17-09-2021 10:02:37 WIB

NO	NAME	TTD
74	Reyhan Arisena Johan	 17-09-2021 10:03:38 WIB
75	Ryan Azali	 17-09-2021 10:04:22 WIB
76	EKO BUDIYANTO	 17-09-2021 10:06:28 WIB

NO	NAME	TTD
77	Muhammad Abdul Aziz Nurambiya	 17-09-2021 10:07:11 WIB
78	Yael Friskha K	 17-09-2021 10:07:39 WIB
79	Rosiana Marito	 17-09-2021 10:07:53 WIB

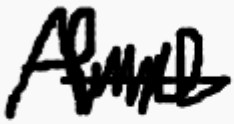
NO	NAME	TTD
80	Jennifer Debora Tri Lestari	 17-09-2021 10:08:27 WIB
81	Riza Ramdani	 17-09-2021 10:09:35 WIB
82	Jovinsca Haylie Venesia	 17-09-2021 10:10:00 WIB

NO	NAME	TTD
83	Vinni El Alexandra	 17-09-2021 10:10:34 WIB
84	Steven Tirta Putra	 17-09-2021 10:14:17 WIB
85	Dhiyaa Dinanza Akbariansyah	 17-09-2021 10:15:23 WIB

NO	NAME	TTD
86	Graciela Brenda Louisa	 17-09-2021 10:15:29 WIB
87	Eko Winarno	 17-09-2021 10:15:59 WIB
88	Tiffany Pingkan Kawilaran	 17-09-2021 10:17:05 WIB

NO	NAME	TTD
89	Priscilla Junita setiawan	 17-09-2021 10:19:26 WIB
90	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	 17-09-2021 10:20:39 WIB
91	Cecilia Vania Indrawan	 17-09-2021 10:21:03 WIB

NO	NAME	TTD
92	Ari Surya Kusuma	 17-09-2021 10:22:34 WIB
93	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	 17-09-2021 10:26:41 WIB
94	TIFFANI JOANE SETIAWAN	 17-09-2021 10:26:44 WIB

NO	NAME	TTD
95	Andreas Nicolas Nainggo	 17-09-2021 10:31:49 WIB
96	Cynthia Monica Az Zahro	 17-09-2021 10:34:25 WIB
97	Alfira Kafi Maulani	 17-09-2021 10:34:39 WIB

NO	NAME	TTD
98	Naila Haerunnisa	 17-09-2021 10:36:13 WIB
99	Christin Septina Basani	 17-09-2021 10:37:38 WIB
100	Louisa Audyna Prochorus	 17-09-2021 10:37:43 WIB

NO	NAME	TTD
101	Abellenka Aurora Aurellia	 17-09-2021 10:38:45 WIB
102	James Triady	 17-09-2021 10:40:26 WIB
103	Cristina Natalia Sinaga	 17-09-2021 10:42:12 WIB

NO	NAME	TTD
104	Dominiques Reggy	 17-09-2021 10:44:24 WIB
105	Nadya Natalie Santosa	 17-09-2021 10:48:59 WIB
106	Chinta Eliza H.M.S	 17-09-2021 10:49:59 WIB

NO	NAME	TTD
107	Fauzan Muhamad Fauzi	 17-09-2021 10:54:33 WIB
108	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	 17-09-2021 10:54:51 WIB
109	Shelly Kurniawan	 17-09-2021 10:55:42 WIB

NO	NAME	TTD
110	Kevin Alim Rabbani	 17-09-2021 10:59:11 WIB
111	Magfirah	 17-09-2021 11:03:43 WIB
112	Vannessa Gan	 17-09-2021 11:07:40 WIB

NO	NAME	TTD
113	Angelica Cassandra Bareto	 17-09-2021 11:10:32 WIB
114	MAUDY SANDRA, S.S	 17-09-2021 11:11:53 WIB
115	ATO SUPRIANTO, S.ST.	 17-09-2021 11:13:44 WIB

NO	NAME	TTD
116	Krisbiantoro Lumbantoruan	 17-09-2021 11:14:17 WIB
117	Tambunan Andi	 17-09-2021 11:14:20 WIB
118	Clarisa andrea	 17-09-2021 11:14:26 WIB

NO	NAME	TTD
119	Sony Setiawan	 17-09-2021 11:16:23 WIB
120	Margaretha Dwi Yani	 17-09-2021 11:16:52 WIB
121	Valencia Grace Natanael	 17-09-2021 11:16:54 WIB

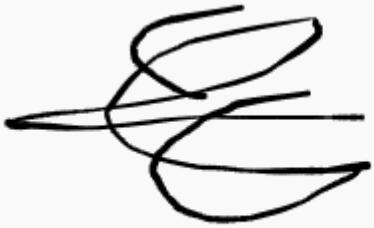
NO	NAME	TTD
122	Adelia Ayu Rahmawati	 17-09-2021 11:28:55 WIB
123	Naufal Ramadhan Cahya	 17-09-2021 11:30:36 WIB
124	Ulfah Qisthina Indraswari Sjaf	 17-09-2021 11:33:39 WIB

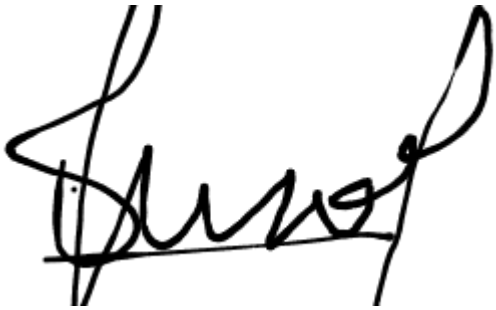
NO	NAME	TTD
125	Auralia Marsella Zhaneta	 17-09-2021 11:37:56 WIB
126	Teti Tiran	 17-09-2021 11:39:51 WIB
127	Yohan Pradytio	 17-09-2021 11:40:32 WIB

NO	NAME	TTD
128	Diarola Bernike	17-09-2021 11:46:35 WIB
129	Camelia Sri Suci Hati	 17-09-2021 11:54:03 WIB
130	M Ichan Adhi F	 17-09-2021 11:54:54 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Evan Grady	 17-09-2021 13:30:23 WIB
2	Alvita Syahrani Wibowo	 17-09-2021 13:30:25 WIB
3	Jason Arnold Sugiono	 17-09-2021 13:30:26 WIB

NO	NAME	TTD
4	Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	 17-09-2021 13:30:35 WIB
5	Floria Lusiana	 17-09-2021 13:31:20 WIB
6	Jennifer Debora Tri Lestari	 17-09-2021 13:31:20 WIB

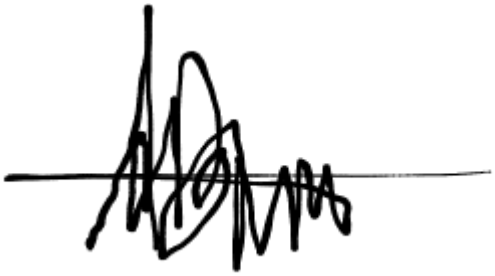
NO	NAME	TTD
7	Debby Putri M	 17-09-2021 13:31:23 WIB
8	Steven Tirta Putra	 17-09-2021 13:31:48 WIB
9	RIO CAHYA YOGA PRATAMA	 17-09-2021 13:31:59 WIB

NO	NAME	TTD
10	Winfritz Jeremia Abner	 17-09-2021 13:32:00 WIB
11	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	 17-09-2021 13:32:40 WIB
12	ALDO YUDISTIRA	 17-09-2021 13:32:45 WIB

NO	NAME	TTD
13	Nabilla Zaviransyah	 17-09-2021 13:32:48 WIB
14	Fidella Febriyani	 17-09-2021 13:32:50 WIB
15	Afkaar Naufal Rahman	 17-09-2021 13:32:57 WIB

NO	NAME	TTD
16	Mochammad Luthfi Mubarak	 17-09-2021 13:33:13 WIB
17	Albert Adhisurya	 17-09-2021 13:33:15 WIB
18	MAUDY SANDRA, S.S	 17-09-2021 13:33:18 WIB

NO	NAME	TTD
19	Wildan Hartadinata	 17-09-2021 13:33:22 WIB
20	Callista Rachelia	 17-09-2021 13:33:45 WIB
21	Margaretha Dwi Yani	 17-09-2021 13:33:49 WIB

NO	NAME	TTD
22	Aldo Bathara	 17-09-2021 13:33:50 WIB
23	Golda Evyra Napitupulu	 17-09-2021 13:34:11 WIB
24	Ari Surya Kusuma	 17-09-2021 13:34:23 WIB

NO	NAME	TTD
25	Almira Carissa Bastyan	 17-09-2021 13:34:43 WIB
26	Ekklesia Rohani H	 17-09-2021 13:35:04 WIB
27	Benny Andreas Sinaga	 17-09-2021 13:35:06 WIB

NO	NAME	TTD
28	EKO BUDIYANTO	 17-09-2021 13:35:15 WIB
29	Syeinando boy naga	 17-09-2021 13:35:35 WIB
30	Jovena Cyrill Christabel	 17-09-2021 13:35:38 WIB

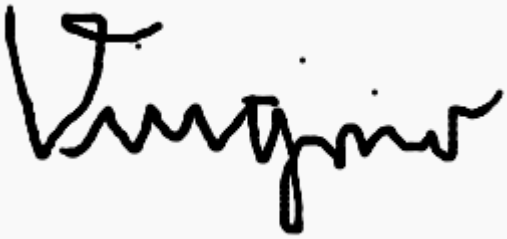
NO	NAME	TTD
31	Enoni Nikaoni Harefa	 17-09-2021 13:36:05 WIB
32	Joveliam Abisai	 17-09-2021 13:36:57 WIB
33	Adzhar Anugerah Trunapasha	 17-09-2021 13:37:43 WIB

NO	NAME	TTD
34	Nur Ajeng Sulistiani	 17-09-2021 13:37:46 WIB
35	Marcell Cornellius	 17-09-2021 13:38:07 WIB
36	Angelia Wulandari	 17-09-2021 13:38:10 WIB

NO	NAME	TTD
37	Budi Sibuea	 17-09-2021 13:38:12 WIB
38	Yohan Pradytio	 17-09-2021 13:38:44 WIB
39	Gabriel Revi Saputra	 17-09-2021 13:38:47 WIB

NO	NAME	TTD
40	Dewi Kurna Ningrum	 17-09-2021 13:39:35 WIB
41	Lucky saputra	 17-09-2021 13:39:43 WIB
42	Jamhur Wardi Saputra	 17-09-2021 13:39:46 WIB

NO	NAME	TTD
43	Muhammad Mega Nurhakiim	 17-09-2021 13:40:43 WIB
44	Ismono,S.H.	 17-09-2021 13:40:44 WIB
45	Jovinsca Haylie Venesia	 17-09-2021 13:40:54 WIB

NO	NAME	TTD
46	Muhammad Irsyad Difa R	 17-09-2021 13:40:56 WIB
47	Virginnia Melya Iskandar	 17-09-2021 13:41:01 WIB
48	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	 17-09-2021 13:42:02 WIB

NO	NAME	TTD
49	Eko Winarno	 17-09-2021 13:42:12 WIB
50	TIARA GUMILANG HAMDANI	 17-09-2021 13:42:46 WIB
51	Louisa Audyna Prochorus	 17-09-2021 13:43:02 WIB

NO	NAME	TTD
52	Naila Haerunnisa	 17-09-2021 13:43:08 WIB
53	Angelica Cassandra Bareto	 17-09-2021 13:43:28 WIB
54	Daniel Hotma Christofel Hutagaol	 17-09-2021 13:43:37 WIB

NO	NAME	TTD
55	Nicholas Jonathan	 17-09-2021 13:43:54 WIB
56	Rickardo Christian Ferdinant	 17-09-2021 13:44:22 WIB
57	Nadya Natalie Santosa	 17-09-2021 13:44:36 WIB

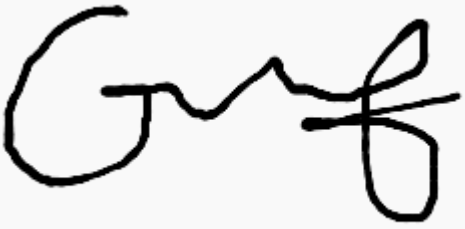
NO	NAME	TTD
58	TIFFANI JOANE SETIAWAN	 17-09-2021 13:44:47 WIB
59	Elena Kristina Margaretta	 17-09-2021 13:44:50 WIB
60	Rosiana Marito	 17-09-2021 13:44:58 WIB

NO	NAME	TTD
61	Ayu Jessy Yustifa Maharani	 17-09-2021 13:45:27 WIB
62	Clara Alycia	 17-09-2021 13:45:34 WIB
63	Cristina Natalia Sinaga	 17-09-2021 13:45:43 WIB

NO	NAME	TTD
64	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	 17-09-2021 13:45:56 WIB
65	Sarwan pujianto	 17-09-2021 13:46:04 WIB
66	MAHARDHIKA G. SITORUS	 17-09-2021 13:46:34 WIB

NO	NAME	TTD
67	Yohanes Ronald	 17-09-2021 13:46:44 WIB
68	Cynthia Monica Az Zahro	 17-09-2021 13:46:59 WIB
69	Kevin Josua Siallagan	 17-09-2021 13:47:24 WIB

NO	NAME	TTD
70	gabriel kalalo	 17-09-2021 13:48:00 WIB
71	James Triady	 17-09-2021 13:48:28 WIB
72	Tongon Fernando Hutasoit	 17-09-2021 13:48:29 WIB

NO	NAME	TTD
73	Yael Friskha K	 17-09-2021 13:49:03 WIB
74	Shelly Kurniawan	 17-09-2021 13:49:09 WIB
75	Gabriel Batistuta Manullang	 17-09-2021 13:49:12 WIB

NO	NAME	TTD
76	Camelia Sri Suci Hati	 17-09-2021 13:49:16 WIB
77	LIANA SALWA IRENE	17-09-2021 13:50:50 WIB
78	Farrel Christyanto Wijaya	 17-09-2021 13:51:43 WIB
79	Reyhan Arisena Johan	 17-09-2021 13:51:50 WIB

NO	NAME	TTD
80	Dhiyaa Dinanza Akbariansyah	 17-09-2021 13:52:17 WIB
81	Riza Ramdani	 17-09-2021 13:52:44 WIB
82	johannes dolok saribu	 17-09-2021 13:55:51 WIB

NO	NAME	TTD
83	Magfirah	 17-09-2021 13:56:30 WIB
84	SILVIA LATUPEIRISSA	 17-09-2021 13:57:57 WIB
85	Sony Setiawan	 17-09-2021 13:58:06 WIB

NO	NAME	TTD
86	Alfira Kafi Maulani	 17-09-2021 13:58:55 WIB
87	Auralia Marsella Zhaneta	 17-09-2021 14:00:04 WIB
88	Kevin Alim Rabbani	 17-09-2021 14:00:57 WIB

NO	NAME	TTD
89	Christin Septina Basani	 17-09-2021 14:01:11 WIB
90	Rudy Sutanto SE	 17-09-2021 14:01:54 WIB
91	Irma Yundira	 17-09-2021 14:02:16 WIB

NO	NAME	TTD
92	Nailur Rohmatul Azkiya	 17-09-2021 14:02:50 WIB
93	Ai Permanasari	 17-09-2021 14:03:27 WIB
94	Valencia Grace Natanael	 17-09-2021 14:05:08 WIB

NO	NAME	TTD
95	Tiffany Pingkan Kawilaran	 17-09-2021 14:05:26 WIB
96	Firdayanti Novalinda	 17-09-2021 14:05:59 WIB
97	Usman Damani	 17-09-2021 14:06:15 WIB

NO	NAME	TTD
98	Evi Hanias Sianturi	17-09-2021 14:06:58 WIB
99	Andreas Nicolas Nainggo	 17-09-2021 14:07:34 WIB
100	Nomensen Freddy Siahaan, S.H., LL.M.	 17-09-2021 14:08:20 WIB

NO	NAME	TTD
101	Tharadina Yustrianti	 17-09-2021 14:09:14 WIB
102	Velia Fransisca	 17-09-2021 14:09:26 WIB
103	Muhammad Abdul Aziz Nurambiya	 17-09-2021 14:10:00 WIB

NO	NAME	TTD
104	Tambunan Andi	 17-09-2021 14:13:32 WIB
105	ATO SUPRIANTO, S.ST.	 17-09-2021 14:15:04 WIB
106	Jihan thufailah rizky	 17-09-2021 14:16:01 WIB

NO	NAME	TTD
107	Dominiques Reggy	 17-09-2021 14:16:10 WIB
108	Violeta Mashary	 17-09-2021 14:17:31 WIB
109	Irvan Mikhael Sumarlie	 17-09-2021 14:18:24 WIB

NO	NAME	TTD
110	Rosalinda Hutabarat	17-09-2021 14:25:53 WIB
111	Graciela Brenda Louisa	 17-09-2021 14:27:03 WIB
112	Clarisa andrea	 17-09-2021 14:28:16 WIB

NO	NAME	TTD
113	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	 17-09-2021 14:30:09 WIB
114	Krisbiantoro Lumbantoruan	 17-09-2021 14:33:20 WIB
115	Fauzan Muhamad Fauzi	 17-09-2021 14:35:37 WIB

NO	NAME	TTD
116	Chintya Agathis	 17-09-2021 14:36:03 WIB
117	chiara zefanya desiree	 17-09-2021 14:37:18 WIB
118	HARTINI, S.PD	 17-09-2021 14:43:29 WIB

NO	NAME	TTD
119	Abellenka Aurora Aurellia	 17-09-2021 14:44:15 WIB
120	ENDA ARIFIN ZULKARNAIN SIREGAR	 17-09-2021 14:48:10 WIB
121	Dian Handayani	 17-09-2021 14:51:29 WIB

NO	NAME	TTD
122	Ulfah Qisthina Indraswari Sjaf	 17-09-2021 14:54:26 WIB
123	Andriwan Yosua	 17-09-2021 14:55:13 WIB
124	Reza Erlangga Marsyah	 17-09-2021 14:57:04 WIB

NO	NAME	TTD
125	Nona Fitria Elyusra	 17-09-2021 14:59:52 WIB
126	Ruhulina Br Sebayang	 17-09-2021 15:01:28 WIB
127	Vissilius Geraldi Kristiawan	 17-09-2021 15:24:34 WIB

NO	NAME	TTD
128	Felicia Chang	 17-09-2021 15:24:45 WIB

TEMPLATE PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN *LOGIN* TERLEBIH DULU DI LAMAN:

pusdik.mkri.id

BISA DIUNDUH JUGA MELALUI GRUP TELEGRAM

Ketentuan Tugas Praktek

- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai Soal
- Tugas Individu
- Mengunduh Template Permohonan PUU dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut

Tugas Praktek dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:
<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Instansi>

Contoh: 94_Maudy Ayunda_Maranatha

Nama File Ms. Word:
<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ < Asal Instansi>

Contoh: 94_Maudy Ayunda_Maranatha

KETENTUAN KHUSUS : **e-SERTIFIKAT**



Batas Waktu Pengumpulan Tugas Praktik Pukul 17.00 WIB Hari Kamis, 16 September 2021

***Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan**



Tugas Praktik yg Dikumpulkan Wajib Orisinal (Dibuat asli oleh Masing-Masing Peserta)



Nilai Tugas Praktik Minimal adalah 60, Nilai di Bawah 60 Tidak Mendapatkan Sertifikat

***Peserta yg Tugas Praktiknya sama (*Copy Paste*), Baik yg Mencontek maupun yg Dicontek, Otomatis Nilainya di Bawah 60**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & *Typo* (20%)

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

KELAS 1

Narasumber : Anna Triningsih

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	Gina Rahmania Utami	JAWA BARAT	0	0	0	0
2	Angelica Cassandra Bareto	NUSA TENGGARA TIMUR	80	75	80	77
3	Gabriel Amadeus Sitompul	SUMATERA UTARA	0	0	0	0
4	Angelina Marlina Fatmawati	JAWA BARAT	0	0	0	0
5	Ayu Jessy Yustifa Maharani	JAWA BARAT	0	0	0	0
6	ENDA ARIFIN ZULKARNAIN SIREGAR	LAMPUNG	85	80	85	82
7	Mochammad Luthfi Mubarak	JAWA BARAT	85	85	80	84
8	Benny Andreas Sinaga	JAWA BARAT	0	0	0	0
9	Dominikus Dara Mone	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	0
10	Andrew Bagastio	JAWA TENGAH	0	0	0	0
11	Callista Rachelia	JAWA BARAT	80	80	85	81
12	Yuni rahmawati	D.K.I. JAKARTA	0	0	0	0
13	Ismono,S.H.	JAWA TIMUR	80	85	80	83
14	EDY SANTOSO, S.A.P.	JAWA TENGAH	0	0	0	0
15	MAHARDHIKA G. SITORUS	SUMATERA UTARA	85	85	85	85
16	I Komang Miarta Wiraguna	BALI	0	0	0	0
17	Viktaria Taradifa	KALIMANTAN BARAT	0	0	0	0
18	Saniyah El Ismah	JAWA TIMUR	0	0	0	0
19	Denny kurniawan	JAWA BARAT	0	0	0	0
20	Nailur Rohmatul Azkiya	JAWA TIMUR	0	0	0	0
21	M.Bahri Al Soddik	RIAU	0	0	0	0
22	Ardian Harefa	JAWA BARAT	85	80	80	81
23	Siti Khumairoh Kusuma Arum	JAWA BARAT	0	0	0	0
24	MAUDY SANDRA, S.S	JAWA TIMUR	85	80	85	82
25	Leo Natanael Simanjorang	ACEH	0	0	0	0
26	ANDINI MURIL	SULAWESI SELATAN	0	0	0	0
27	Rudy Sutanto SE	JAWA TIMUR	0	0	0	0
28	Alamanda Siahaan	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	0
29	Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan	JAWA TIMUR	0	0	0	0
30	KARINA WANTI SORMIN	SUMATERA UTARA	0	0	0	0
31	Irfan Hakim Maridi	SULAWESI SELATAN	0	0	0	0
32	Danisa Puteri Ginanjar	JAWA BARAT	0	0	0	0
33	Nona Fitria Elyusra	SUMATERA UTARA	0	0	0	0
34	Claudia Megumi	JAWA BARAT	85	80	85	82
35	Andi canro si	SUMATERA UTARA	0	0	0	0
36	Ester Julyana	SUMATERA UTARA	0	0	0	0
37	Anandien Ayu Putri Annisti	JAWA TIMUR	0	0	0	0
38	Rosiana Marito	JAWA BARAT	0	0	0	0
39	MISKA PUDHENTA NUKE SAPUTRI	D.I. YOGYAKARTA	0	0	0	0
40	Meutya Larasati Ageng Nurazizah	BANTEN	0	0	0	0
41	Yael Friskha K	JAWA BARAT	0	0	0	0
42	Dr. Sigit Ricahyono, S.S.,M.Pd.	JAWA TIMUR	0	0	0	0
43	Eko Winarno	JAWA BARAT	85	80	85	82
44	Felicitas Citra Permatahati Nainggolam	LAMPUNG	0	0	0	0
45	Lasmi Yohanis Laiskodat	BALI	0	0	0	0
46	Khairullah	D.K.I. JAKARTA	0	0	0	0
47	NUPITA SARI	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	0
48	Elsha Dewi Anggraini	JAWA TIMUR	0	0	0	0
49	Dominiques Reggy	D.K.I. JAKARTA	0	0	0	0
50	Winfritz Jeremia Abner	JAWA BARAT	85	85	85	85
51	Nomensen Freddy Siahaan, S.H., LL.M.	KALIMANTAN TIMUR	0	0	0	0
52	Sarwan pujianto	JAWA BARAT	0	0	0	0
53	Clarence Chandra Sentosa	JAWA BARAT	0	0	0	0
54	I Made Widnyana Putra	BALI	0	0	0	0
55	Natasya Juni Anggi Hutalung	JAWA BARAT	0	0	0	0
56	Iona Febrina Simanjuntak	ACEH	0	0	0	0
57	Ardian Rynaldi	BANTEN	0	0	0	0
58	Ruth Prayscila Simamora, S.H., M.H.	KALIMANTAN BARAT	0	0	0	0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek1@gmail.com** ; Password e-mail: **pusdikmk**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

KELAS 2

Narasumber : Andriani Wahyuningtyas Novitasari

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
59	Irma Yundira	JAWA BARAT	75	75	70	74
60	I Gusti Ayu Widya Dhammayanti	BALI				0
61	Bagus Gibran Prasetyo	BALI				0
62	Silvester harijanto	KALIMANTAN TIMUR				0
63	Firdayanti Novalinda	JAWA BARAT	75	75	70	74
64	I KETUT GDE KUSUMA WARDANA	BALI				0
65	ROMANDA REZA KUSUMA	BANTEN				0
66	Levina Abigail Chandra	JAWA BARAT				0
67	Steven Tirta Putra	D.K.I. JAKARTA				0
68	NUR HALISA	SULAWESI SELATAN				0
69	R.Dendi Krisnandang	JAWA BARAT				0
70	SILVIA LATUPEIRISSA	RIAU	75	75	70	74
71	Ari Surya Kusuma	JAWA TENGAH	75	75	70	74
72	Cyrus Dalbert	KEPULAUAN RIAU				0
73	Komang Juni Antara Yasa	BALI				0
74	Gabriela putri kurniawati	D.K.I. JAKARTA				0
75	Dewi Kurna Ningrum	SUMATERA SELATAN	75	70	75	72
76	Dina Nathalia Syabarudin, S.E.	JAWA BARAT				0
77	Jason Arnold Sugiono	JAWA BARAT	75	70	70	71
78	Fidella Febriyani	JAWA BARAT	75	75	70	74
79	EKO BUDIYANTO	JAWA TENGAH				0
80	Wandelinus Bere	NUSA TENGGARA TIMUR				0
81	Esya aliya pratiwi	D.K.I. JAKARTA				0
82	Alvianus Dhima Nuwatiwa	NUSA TENGGARA TIMUR				0
83	Sandra Monalisa Tamba	SUMATERA UTARA				0
84	RR Ayu Ferawati	BALI				0
85	Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	SUMATERA SELATAN				0
86	WASYS PASKAH SONNENORA	JAWA BARAT				0
87	Dicky Joshe Armando Pelawi	JAWA BARAT				0
88	Abdul Zakaria Al Islamey, S.E	D.K.I. JAKARTA				0
89	ARIF SETIAWAN	SULAWESI TENGGARA				0
90	Hasdiniarto	LAMPUNG				0
91	HERMAN FEBRIAN LABIATMAJA	D.K.I. JAKARTA				0
92	IFAANO BUASISOKHI HARITA	SUMATERA UTARA				0
93	ATO SUPRIANTO, S.ST.	JAWA BARAT				0
94	Dian Sukmawati	D.K.I. JAKARTA				0
95	Nicholas Jonathan	JAWA BARAT	75	75	70	74
96	Sofhie Angela Hagiyanto	JAWA BARAT				0
97	Felicia Chang	SUMATERA UTARA	75	75	70	74
98	Agus Aribowo	JAWA BARAT				0
99	Tambunan Andi	JAWA BARAT	75	75	75	75
100	Ni Ketut Nopi Ariani	BALI				0
101	Vianica Herman	JAWA BARAT				0
102	Eka Puspita, S.Pd, M.Pd	LAMPUNG				0
103	Putu Sintya	BALI				0
104	REYNALDO SEPTIAN EKA PUTRA	JAWA TENGAH	75	75	70	74
105	TIARA GUMILANG HAMDANI	JAWA BARAT	75	70	70	71
106	Ni Wayan Sony Rosita Dewi	BALI				0
107	Yanto Hermawan	D.K.I. JAKARTA				0
108	Billy Junior Budiono	JAWA BARAT				0
109	Muhammad Abdul Aziz Nurambiya	JAWA BARAT	75	75	70	74
110	Ardiansyah	D.K.I. JAKARTA				0
111	ALDO YUDISTIRA	JAWA BARAT	75	75	70	74

112	I Kadek Priangga Mas Dwi Putra	JAWA BARAT				0
113	Lusian Riva	JAWA BARAT				0
114	safa luthfia gumilang	JAWA BARAT				0
115	Syarif Rifain Pandean	SULAWESI TENGAH				0
116	Angga Aldi Saputra	JAWA TIMUR	75	75	70	74

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek2@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

KELAS 3

Narasumber : Abdul Ghoffar

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
117	Rickardo Christian Ferdinant	JAWA BARAT	80	82	82	81.6
118	Jennifer Debora Tri Lestari	JAWA BARAT	80	82	80	81.2
119	Ketut Sudiarta	BALI				0
120	Louisa Audyna Prochorus	JAWA BARAT	80	80	80	80
121	LIANA SALWA IRENE	JAWA BARAT	81	82	82	81.8
122	Kevin Alim Rabbani	JAWA BARAT	82	85	82	83.8
123	Anindya Zahra Srisena	JAWA BARAT				0
124	Albert Adhisurya	RIAU	80	80	80	80
125	Nadya Natalie Santosa	JAWA BARAT	80	80	80	80
126	I Gede Agus Yuliana	JAWA BARAT				0
127	Rahel Octora	JAWA BARAT				0
128	Diarola Bernike	JAWA BARAT				0
129	Nazmi Khaerunisa	JAWA BARAT				0
130	Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas, S.Fil	JAWA BARAT				0
131	Adib Asyari Liulinnuha	JAWA TENGAH				0
132	Adzhar Anugerah Trunapasha	JAWA BARAT	85	85	85	85
133	Amelda Paradita Pusparatna	JAWA TENGAH				0
134	DEDY DWI SETIAWAN S.A.P	JAWA TENGAH				0
135	Eka Wardany	SULAWESI SELATAN				0
136	Aldo Bathara	JAWA BARAT	80	80	80	80
137	Alfin Hidayatulloh	JAWA BARAT				0
138	Zulaili Hairiah	JAWA BARAT				0
139	Zalsa Vionatha	JAWA BARAT				0
140	Yuliana Putri	JAWA BARAT				0
141	Yuda Prana, A.Md., S.T.	JAWA BARAT				0
142	Yosua Darmadi Kosen	JAWA BARAT				0
143	Winston Sinurat	JAWA BARAT				0
144	WAHYU ADY PRAMANA	JAWA BARAT				0
145	Wafa sinta rian kusuma	JAWA BARAT				0
146	Nur Rizky Aulia Rahmah	KALIMANTAN TENGAH				0
147	TIFFANI JOANE SETIAWAN	JAWA BARAT	82	83	82	82.6
148	Cynthia Monica Az Zahro	JAWA TENGAH	85	88	85	86.8
149	Theresia Erica Salim	JAWA BARAT				0
150	Tikwa Petronela Selan	JAWA BARAT				0
151	Tulus Putra Irawan	JAWA BARAT				0
152	Ula Ayu Rahmania	JAWA BARAT				0
153	Ulfah Qisthina Indraswari Sjaf	JAWA BARAT	80	82	80	81.2
154	Vhika Vhickriani Djumatris M	JAWA BARAT				0
155	Vicky Abdillah Fanani	JAWA BARAT				0
156	Vien Immanuel Pakpahan	JAWA BARAT				0
157	Vinni El Alexandra	JAWA BARAT	80	75	80	77
158	Violetta Valencia	JAWA BARAT				0
159	Shalma Azzahra Putri Wijaya	JAWA BARAT				0
160	Sayyid Muhammad Indallah	JAWA BARAT				0
161	Shelly Evanda	JAWA BARAT				0
162	Siprianus Rahesti Kia, S.Sos., CLAP	JAWA BARAT				0
163	Stevanus Reysover Bobby	JAWA BARAT				0
164	Syarifah Wulandari	JAWA BARAT				0
165	TARMIZI ANSHOR	JAWA BARAT				0
166	Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.H.	JAWA BARAT				0
167	Lely adelia br tarigan	SUMATERA UTARA				0
168	Bella angelica chandra	SUMATERA SELATAN				0
169	Margaretha Shintya Candra	ACEH				0

170	Naila Haerunnisa	BANTEN				0
171	Sinta L Y Siagian	PAPUA				0
172	Anugrah Ikbaar	JAWA BARAT				0
173	Irvan Mikhael Sumarlie	JAWA BARAT	77	78	78	77.8
174	Nofri Yeremias Naihati	NUSA TENGGARA TIMUR				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek3@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

KELAS 4

Narasumber : Mohammad Mahrus Ali

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
175	Usman Damani	SULAWESI TENGGARA	70	78	70	74.8
176	Almira Carissa Bastyan	JAWA BARAT	69	70	69	69.6
177	Bella aprilia	JAWA BARAT				0
178	Laily Dyah Rahmatika, S.Pd.	JAWA TIMUR				0
179	Ratih Yulistiya Rahman	JAWA TIMUR				0
180	HENDRI PURNOMO, S.Sos	KEPULAUAN RIAU				0
181	Jamhur Wardi Saputra	SUMATERA SELATAN	70	75	70	73
182	ROBIUL ULA	JAWA TIMUR				0
183	M. Wafi Jauhar	JAWA TIMUR				0
184	Najib Quroisin	JAWA TIMUR				0
185	Mohammad Fakhrul Rozy, SE, S.Kom, MM.	JAWA BARAT				0
186	Miftakhur Rokhmah	JAWA BARAT				0
187	Metta Paramitta Febriani	JAWA BARAT				0
188	Rizki Danuartha	NUSA TENGGARA BARAT				0
189	Ekklesia Rohani H	JAWA BARAT	67	67	65	66.6
190	Nabilla Fachrotul Umami	JAWA BARAT				0
191	Nadia Putri Anggraini	JAWA BARAT				0
192	Nadila Suntika	JAWA BARAT				0
193	Najwa Almira Rahmakuswoyo	JAWA BARAT				0
194	NALANDA WULANDARI, S.Pi., M.Si.	JAWA BARAT				0
195	Ni kadek novia punkyari	JAWA BARAT				0
196	Ni Made Septiya Anggreni	JAWA BARAT				0
197	Nova	JAWA BARAT	70	69	70	69.4
198	Novia Marsella Pardede	JAWA BARAT				0
199	Nur Bagus Sajiwo	JAWA BARAT				0
200	NURCHUMAIRAH PUTRI	JAWA BARAT				0
201	Nurfiandi Lesmana	JAWA BARAT				0
202	Oppie Agustin	JAWA BARAT				0
203	Parjiati,S.E	JAWA BARAT				0
204	Prayoga Hadiningrat	JAWA BARAT				0
205	Priscindy Nazrani Wila, A. Md. Kes	JAWA BARAT				0
206	Putri Suci Mirinda Azizah	JAWA BARAT				0
207	Rahmah,SelE	JAWA BARAT				0
208	Rahmat Fatih Rosyidin	JAWA BARAT				0
209	Randi	JAWA BARAT				0
210	Razita Zaafarani Zahran	JAWA BARAT				0
211	RESKI ANWAR, S.H., M.H.	JAWA BARAT				0
212	Restu Intsia Virgin	JAWA BARAT				0
213	Revalina Bahri	JAWA BARAT				0
214	Reza Erlangga Marsyah	JAWA BARAT				0
215	Reza Iswanto, S.H., M.H.	JAWA BARAT				0
216	Richard Yorris Aruan	JAWA BARAT				0
217	RIO CAHYA YOGA PRATAMA	JAWA BARAT				0
218	Robi atul Adawiyah	JAWA BARAT				0
219	Romadhoni Fata Murgana	JAWA BARAT				0
220	Roni Nugraha Syafroni, S.Pd., M.Pd.	JAWA BARAT				0
221	Rosalinda Hutabarat	JAWA BARAT				0
222	Ryan Azali	JAWA BARAT				0
223	SAFIRA PRIMA INDIRA	JAWA BARAT				0
224	Safrina	JAWA BARAT				0
225	Samsul Hadi	JAWA BARAT				0
226	Dioba Akdemart	JAWA BARAT				0
227	Dr.Chandra S Haratua, S.Sos, MM	JAWA BARAT				0

228	Dzakiyyatul Maulida	JAWA BARAT				0
229	Evan Grady	JAWA BARAT	65	64	60	63.4
230	FAIZAL JIBRAN	JAWA BARAT				0
231	Farah Faatihah Azzahra	JAWA BARAT				0
232	Fatimah Azzahra	JAWA BARAT				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek4@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

KELAS 5

Narasumber : Rima Yuwana Yustikaningrum

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
233	Ferdi Wahyuda	JAWA BARAT				0
234	Fernanda Hono Mendonca	JAWA BARAT	70	80	70	76
235	Ferryawan Dwi Prasetyo	JAWA BARAT				0
236	Festi Remisia Daeli	JAWA BARAT				0
237	Fimia Firda Permatasari	JAWA BARAT				0
238	Fiska Nadia	JAWA BARAT				0
239	Francisco Yudies Nur Mahesa	JAWA BARAT				0
240	Gabriel Batistuta Manullang	JAWA BARAT				0
241	Galang Angga Dian Pradana	JAWA BARAT				0
242	Graciela Brenda Louisa	JAWA BARAT	80	85	70	81
243	Gusnia Ayu Suryaning Candra	JAWA BARAT				0
244	Hana Christine Supriyanto	JAWA BARAT	90	85	90	87
245	Hari Setyanto, S.Si.,M.M.,Apt.	JAWA BARAT				0
246	HERU SALAM, S.Pd	JAWA BARAT				0
247	Himawan Kunto D.A., S.T., M.A.	JAWA BARAT				0
248	I Komang Gede Jaya Artha Kusuma	JAWA BARAT				0
249	I Made Dwipa Adnyana	JAWA BARAT				0
250	I Nyoman Candra Wiguna	JAWA BARAT				0
251	Ian Rahmadhani Putra	JAWA BARAT				0
252	Inneu Nur Wulan	JAWA BARAT				0
253	Ir. Maria Christine Sutandi, M.Sc	JAWA BARAT	70	70	70	70
254	Ir. Teguh Noerhardjanto,S.Hut.,IPM	JAWA BARAT				0
255	Irfa Avrilia Haniva	JAWA BARAT				0
256	ITJE LINDA ROSITA SIMANJUNTAK, SH., M.Hum	JAWA BARAT				0
257	Jacinta Winarto	JAWA BARAT				0
258	Jeny Aurelia	JAWA BARAT				0
259	Jovinsca Haylie Venesia	JAMBI	80	70	70	72
260	Karensia payoh	JAWA BARAT				0
261	Ketina	JAWA BARAT				0
262	Kevin Krisna Garda Aniswara	JAWA BARAT				0
263	Kezia Immanuella Kamsari	JAWA BARAT				0
264	Khaerunnisa Nazmi	JAWA BARAT				0
265	Komang Kusumawardana Putri	JAWA BARAT				0
266	Muhammad Roykhan Zidni	JAWA BARAT				0
267	Christin Septina Basani	JAWA BARAT	90	90	80	88
268	Muhammad Alamsyah, S.I.Kom	JAWA BARAT				0
269	Dewi Lestari	JAWA BARAT	80	75	80	77
270	Leonardo	JAWA BARAT				0
271	Muhammad Idris Nasution	JAWA BARAT				0
272	Shelly Kurniawan	JAWA BARAT	80	90	80	86
273	GINKA MAUDY ADILA	JAWA BARAT				0
274	Anastasius Darma TP Sihaloho	JAWA BARAT				0
275	Ai Permanasari	JAWA BARAT	80	90	90	88
276	Luki, S.H.	JAWA BARAT				0
277	Muhammad Arkaansyah	JAWA BARAT				0
278	Monica Rosalind	JAWA BARAT				0
279	Mutiara Tri Ananda	JAWA BARAT				0
280	Muhammad Avredo	JAWA BARAT				0
281	MOKTAR LUBIS RAUBABA, S. Pd	JAWA BARAT				0
282	Krispinus Duma	KALIMANTAN TIMUR				0
283	Andre Setiawan	JAWA BARAT				0
284	Angelia Wulandari	JAWA BARAT	80	80	80	80
285	Anggi Meilani	JAWA BARAT				0

286	Marsya Andini	JAWA BARAT				0
287	DEWI SEJATI KUSUMANINGRUM	JAWA BARAT				0
288	Ayu Sinta Noviani	JAWA BARAT				0
289	Alwin Rohandi	JAWA BARAT				0
290	ELVIRA GABRIELA KEREH	JAWA BARAT				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek5@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

KELAS 6

Narasumber : Suryo Gilang Romadlon

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
291	Luluk Faridah	JAWA BARAT				0
292	Lutfiah Sungkar	JAWA BARAT				0
293	Vannessa Gan	JAWA BARAT	67	70	67	69
294	Melisa Firnanda	JAWA BARAT				0
295	Daniel Hotma Christofel Hutagaol	JAWA BARAT	70	65	65	66
296	Astari Jihan Napisah, S.H	JAWA BARAT				0
297	Maria Riskalia Da Mano	JAWA BARAT				0
298	Dhiyaa Dinanza Akbariansyah	JAWA BARAT	70	65	65	66
299	ALISYA PUTRI PUSPITA SILALAHI	SUMATERA UTARA				0
300	Vannessa Gan	JAWA BARAT	67	70	67	69
301	Magfirah	JAWA BARAT	70	70	65	69
302	M.Alfi Syahri Atho illah Nasution	JAWA BARAT	73	70	70	71
303	Chintya Agathis	JAWA BARAT	65	70	75	70
304	Jihan thufailah rizky	JAWA BARAT	75	80	75	78
305	Destini Tumonggi Sonda	JAWA BARAT				0
306	Ari Natanael Mangaratua Situmorang	JAWA BARAT				0
307	Warry Santhari Yohana Br. Sembiring	JAMBI	85	85	85	85
308	Mahesvara Sahastiadi Kusuma Putra	JAWA BARAT				0
309	Budi Sibuea	JAWA BARAT	65	65	65	65
310	Calista Aspasia Purnomo	JAWA BARAT				0
311	HARTINI, S.PD	JAWA BARAT	60	65	60	63
312	Ni Made Santi Dewi Novitriani	BALI				0
313	Juwita Priana Sari Agustin	JAWA BARAT				0
314	Atiratul Jannah, S.Pd	JAWA BARAT				0
315	Sony Setiawan	JAWA BARAT	65	65	65	65
316	Asma Nadiyah	JAWA BARAT				0
317	Dian Handayani	LAMPUNG				0
318	Diana Angela Sihaloho	JAWA BARAT				0
319	Arif Qomarudin	JAWA BARAT				0
320	Salsabila suci cahyani	JAWA BARAT				0
321	Aurigae Bee Hendra	JAWA BARAT				0
322	Alfiyah Nur Sangadah	JAWA TENGAH				0
323	Tangka, Verent M Putri	SULAWESI UTARA				0
324	Lucky saputra	JAWA BARAT	70	73	70	72
325	Muhammad Ariansyah Ramadhan	JAWA BARAT				0
326	ARJUN MAHBUBI	JAWA BARAT				0
327	Krisbiantoro Lumbantoruan	JAWA BARAT	67	67	65	67
328	Apriani Djuru	JAWA BARAT				0
329	christian andersen	JAWA BARAT				0
330	Velia Fransisca	JAWA BARAT	67	70	65	68
331	Abellenka Aurora Aurellia	JAWA BARAT				0
332	Maria Christine Sutsndi	JAWA BARAT				0
333	Afkaar Naufal Rahman	JAWA BARAT	72	72	75	73
334	Gabriel Revi Saputra	JAWA BARAT	72	72	75	73
335	Clarisa andrea	JAWA BARAT	67	70	65	68
336	Farrel Christyanto Wijaya	JAWA BARAT	85	85	88	86
337	Budiman Sibuea	SUMATERA UTARA				0
338	Floria Lusiana	JAWA BARAT	85	80	88	83
339	Yosep Myichael H	JAWA BARAT				0
340	Alvita Syahrani Wibowo	JAWA BARAT	73	73	70	72
341	Ruhulina Br Sebayang	JAWA BARAT	60	60	65	61
342	Fransiskus Sinaga	JAWA BARAT				0
343	Mochammad Rakha	JAWA BARAT				0

344	Rifna Ayu Novita Putri	JAWA BARAT				0
345	Valentino Satrio Kusumo	JAWA BARAT				0
346	Atika Wahyuni Dekananda	JAWA BARAT				0
347	Josua Sibarani	JAWA BARAT				0
348	Kevin Josua Siallagan	JAWA BARAT				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek6@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

KELAS 7

Narasumber : Ananthia Ayu Devitasari

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
349	Masya Uikratunnizha	JAWA BARAT				0
350	Joveliam Abisai	JAWA BARAT				0
351	Adinda putri	JAWA BARAT	75	75	75	75
352	Tongon Fernando Hutasoit	JAWA BARAT	80	80	80	80
353	Fauzan Muhamad Fauzi	ACEH				0
354	chiara zefanya desiree	JAWA BARAT				0
355	Enoni Nikaoni Harefa	JAWA BARAT				0
356	Fernando Hasudungan	JAWA BARAT	75	70	75	72
357	Kevin Martien	JAWA BARAT				0
358	Cecilia Vania Indrawan	JAWA BARAT	80	78	78	78.4
359	Muhammad Mega Nurhakiim	JAWA BARAT				0
360	Teti Tiran	BANTEN	75	75	75	75
361	debora prasetya	JAWA BARAT	75	75	75	75
362	gabriel kalalo	D.K.I. JAKARTA	76	76	76	76
363	Debby Putri M	JAWA BARAT	75	70	75	72
364	Augusto Advocatio Justine	JAWA BARAT	75	75	75	75
365	Ardhoeni Absa Syahputri	JAWA BARAT	75	75	75	75
366	Masyhuri Amzah	JAWA BARAT				0
367	Ardi Muhamad Farhan	JAWA BARAT				0
368	Marcell Cornellius	JAWA BARAT	75	76	75	75.6
369	johannes dolok saribu	RIAU	76	76	76	76
370	Siti Rifasya Aurelya Maudyna	JAWA BARAT				0
371	Tharadina Yustrianti	JAWA BARAT	80	80	80	80
372	Muhamad Fajar Ramadhan	JAWA BARAT				0
373	velove esee ervina utoyo	JAWA BARAT				0
374	ALDO SETIAWAN	JAWA BARAT				0
375	I KOMANG MIARTA WIRAGUNA	JAWA BARAT				0
376	Dr. Krispinus Duma, SKM.,M.Kes	JAWA BARAT				0
377	Dr. Chandra S Haratua, S.Sos, MM	JAWA BARAT				0
378	Clara Alycia	JAWA BARAT	75	74	75	74.4
379	Cristina Natalia Sinaga	JAWA BARAT	75	75	75	75
380	HADI RUSLI, AMd.AK., S.H., S.I.P., C.NSP	JAWA BARAT				0
381	rafiansyah iqbal taufiq	JAWA BARAT				0
382	Muhammad Irsyad Difa R	JAWA BARAT	75	75	75	75
383	Syeinando boy naga	JAWA BARAT				0
384	James Triady	JAWA BARAT	75	78	75	76.8
385	Muhammad Anshari	JAWA BARAT				0
386	inez putri pramono	JAWA BARAT	75	75	75	75
387	Sheefa Almaira Koswandi	JAWA BARAT				0
388	JUANDA SITORUS	ACEH				0
389	Golda Evyra Napitupulu	JAWA BARAT	75	75	75	75
390	Hanggoro Purnawan	JAWA BARAT				0
391	tiara tangdililing	JAWA BARAT				0
392	M Ichan Adhi F	JAWA BARAT				0
393	Drs. Masrukhan, M. Pd	JAWA BARAT				0
394	Nur Ajeng Sulistiani	JAWA BARAT	75	77	75	76.2
395	Elena Kristina Margaretta	JAWA BARAT				0
396	Nabilah Citra Fauziyah	JAWA BARAT				0
397	Oktafiani Zendrato	JAWA BARAT				0
398	Andreas Nicolas Nainggo	JAWA BARAT	75	75	75	75
399	Reyhan Arisena Johan	JAWA BARAT	75	75	75	75
400	Jovena Cyrill Christabel	JAWA BARAT	76	76	76	76
401	Priscilla Junita setiawan	JAWA BARAT	75	75	75	75

402	Nurchumairah Putri	JAWA BARAT				0
403	Adelia Ayu Rahmawati	JAWA BARAT	75	70	75	72
404	Camelia Sri Suci Hati	JAWA BARAT	75	75	75	75
405	Yenni Rini Silviana, S.E.	ACEH				0
406	Kevin Christian Komando	JAWA BARAT				0
407	Andriwan Yosua	JAWA BARAT				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: **tugasbimtek7@gmail.com** ; Password e-mail: **mahkamah**

FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

KELAS 8

Narasumber : Intan Permata Putri

NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & *TYPO* (BOBOT 20%)	
408	Nizam Zakka Arrizal,S.H.,M.Kn.	JAWA BARAT				0
409	LA ODE ABID	JAWA BARAT				0
410	Valencia Grace Natanael	JAWA BARAT	75	70	75	72
411	Naufal Ramadhan Cahya	JAWA BARAT				0
412	Alexander Triestanto	JAWA BARAT	75	75	75	75
413	Rismah Putri Baqiatus Sholihah	JAWA BARAT				0
414	Evi Hanias Sianturi	JAWA BARAT	75	75	75	75
415	Indri Sandia Yuda Kartika	JAWA BARAT	80	75	80	77
416	Auralia Marsella Zhaneta	JAWA BARAT				0
417	Sherly Sherlyana Sihite	JAWA BARAT				0
418	SURYA KUSUMA	JAWA BARAT				0
419	Wildan Hartadinata	ACEH				0
420	Ramunindha Syaidinayu	JAWA BARAT				0
421	Billy Junior Budiono	JAWA BARAT				0
422	Reska Tinobawani	JAWA BARAT				0
423	Laurentius Wiragni Sanjaya	JAWA BARAT				0
424	Regina Angela	JAWA BARAT				0
425	Angelique Florencia Iskandar Ohee	JAWA BARAT				0
426	ANIS FUROHIDAH	JAWA BARAT				0
427	Komang Juni Antara Yasa	JAWA BARAT				0
428	MUHAMMAD KAMRAN, S.H.,M.H.,M.Kn.	JAWA BARAT				0
429	Yohan Pradytio	JAWA BARAT	75	75	75	75
430	Gace Gunawan	JAWA BARAT				0
431	BEN IVANDER GULO	JAWA BARAT				0
432	Tiffany Pingkan Kawilaran	JAWA BARAT	75	78	80	77.8
433	Elviana Samosir	JAWA BARAT	75	75	75	75
434	Riza Ramdani	JAWA BARAT	80	75	80	77
435	Alfira Kafi Maulani	JAWA BARAT	85	85	85	85
436	Gabriella Elisabeth	JAWA BARAT				0
437	Yohanes Ronald	JAWA BARAT				0
438	Vissilius Geraldi Kristiawan	JAWA BARAT	75	75	75	75
439	YOSEF VASCO DA	JAWA BARAT				0
440	Villa Angelica	JAWA BARAT	75	75	75	75
441	Edward Septian	JAWA BARAT				0
442	Christina Natalia	JAWA BARAT				0
443	Reynanda Rachel Feby	JAWA BARAT				0
444	Moch Rafli Darill Siraz	JAWA BARAT				0
445	Daffa Diaz Danendra C	JAWA BARAT				0
446	Sifa Noor Fitri	JAWA BARAT				0
447	Vanya Raditya Putri	JAWA BARAT				0
448	Margaretha Dwi Yani	JAWA BARAT				0
449	Carolla Angelique	JAWA BARAT	70	70	70	70
450	Chinta Eliza H.M.S	JAWA BARAT	75	78	80	77.8
451	Virginnia Melya Iskandar	JAWA BARAT	80	80	80	80
452	Claudia Aprilia Inseren	JAWA BARAT	75	80	80	79
453	Nabilla Zaviransyah	JAWA BARAT				0
454	Azza Salsabila Febrianti	JAWA BARAT				0
455	Stevie	JAWA BARAT				0
456	Rama Hasdi	JAWA BARAT				0
457	Miska Pudhenta Nuke Saputri, S.E.	JAWA BARAT				0
458	Arif Qomarudin, S.Pd	JAWA BARAT				0
459	Violeta Mashary	JAWA BARAT				0
460	maria magdalena	JAWA BARAT				0

461	Muhammad Syaif Adli	JAWA BARAT				0
462	Maria Rachel Nethania	JAWA BARAT				0
463	Priska Ayu	JAWA BARAT	75	75	75	75
464	Iffah Mumtazah	JAWA BARAT				0
465	Dion Pilipus	JAWA BARAT				0
466	Jillan Syifa Zahratulmilla	JAWA BARAT				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

NAMA NARASUMBER : ANNA TRININGSIH

KELAS : KELAS 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta yang mengumpulkan tugas hanya sebanyak 11 peserta dari total 58 peserta dalam kelas Bimtek 1.
	Terkait dalam ketepatan waktu pengumpulan tugas, 11 peserta yang mengumpulkan tugas, telah sesuai waktunya;
	Selama kegiatan sesi presentasi, hanya 12 peserta yang hadir dalam kelas online.
	Lebih dari 70% peserta tidak mengumpulkan tugas;
2	Tugas penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dibuat oleh peserta sudah cukup baik dan sesuai dengan sistematika permohonan PUU terhadap UUD 1945.
	Peserta sudah cukup paham terkait dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon, terbukti dari tugas-tugas yang dikumpulkan sudah sebagaian besar menyusun sesuai dengan sistematika penulisan permohonan PUU, walaupun ada 1-2 orang peserta yang sistematikanya permohonannya kurang lengkap
	Templete Permohonan yang telah diberikan oleh Panitia kepada para peserta sangat berguna dan benar-benar dijadikan panduan oleh para peserta dalam menyusun tugasnya yaitu menyusun permohonan PUU
	Sekalipun terkait sistematika permohonan sudah sesuai dengan ketentuannya, terkait penyusunan bagian kedudukan hukum (*legal standing*) dalam tugas peserta masih ada peserta yang belum menjelaskan posisi kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara; kesatuan masyarakat adat, badan hukum atau lembaga negara.
3	Soal penyusunan permohonan yang diberika oleh Panitia merupakan salah satu perkara yang sudah diputus di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 58/PUU-VIII/2010

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

NAMA NARASUMBER : Andriani W. Novitasari

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar peserta telah menyusun permohonan permohonan sesuai dengan materi yang telah disampaikan (sesuai PMK PUU dan UU MK)
	Dari 71 peserta, hanya 3 peserta yang mengirimkan tugas penyusunan permohonan
	Peserta menyusun permohonan pengujian materiil
	Evaluasi terkait Sistematika
2	Sistematika Permohonan yang disusun oleh peserta sudah sesuai dengan template/contoh yang diberikan
	Peserta telah berhasil menggunakan contoh tersebut dengan sangat baik.
	Banyak Peserta yang terpaku pada template, khusus bagian Petitum yang selalu menggunakan Petitum alternative
	Evaluasi Kewenangan Mahkamah
3	Bagian ini telah disusun dengan baik dengan mencantum dasar hukum yang menjadi kewenangan MK serta UU lainnya yang berkaitan dengan pengujian uu ke MK
	Semua peserta dapat menyusun sistematis bagian ini sesuai dengan materi yang telah diberikan
	Semua undang-undang yang relevan telah dicantumkan
	Evaluasi terkait Kedudukan Hukum (Legal Standing)
4	Peserta telah menyusun bagian kedudukan secara sistematis dan logis
	Kedudukan hukum pemohon harus dikaitkan denga kerugian konstitusional pemohon serta yurisprudensi legal standing MK (5 syarat) dan dijabarkan secara substantif-komprehensif
	Peserta telah mencantumkan lima syarat kerugian konstitusional dan disertai penjelasan lebih lanjut (dikaitkan dengan aspek kerugian konstitusional pemohon)
	Evaluasi terkait Pokok Permohonan

5	Peserta perlu menyusun pokok permohonan dengan elaboratif dan lebih menekankan pada aspek pertentangan antara pasal yang dimohonkan dengan landasan pengujian pasal-pasal dalam UUD 1945
	Pokok permohonan lebih fokus pada aspek penentuan konstitusionalitas norma apakah norma yang diajukan bertentangan dengan konstitusi atau tidak
	Pada bagian posita, apabila peserta hendak mencantumkan permintaan putusan bersyarat pada petitum, maka pada bagian posita (pokok permohonan) perlu ada penjabaran yang komprehensif mengapa MK harus memberikan putusan bersyarat. Hal demikian penting agar konsisten antara posita dan petitum
	Evaluasi Terkait Petitum
6	Petitum harus konsisten dengan posita. Peserta telah menyusun dengan baik sesuai pedoman.
	Peserta lebih memilih menggunakan petitum sesuai PMK dan tidak menggunakan putusan bersyarat
	Peserta cukup cermat dalam menyusun petitum
	Secara garis besar peserta telah menyusun permohonan permohonan sesuai dengan materi yang telah disampaikan (sesuai PMK PUU dan UU MK)
7	
8	
9	
10	

11	
12	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

NAMA NARASUMBER : Abdul Ghoffar

KELAS : 3

NO	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara Umum peserta masih mengerjakan sangat “minimalis. Dalam artian, tugas yang dikirimkan hanya sebatas apa yang tertuang dalam template yang telah dibagikan oleh panitia kepada mereka. Tidak ada pengembangan dari template tersebut. Bahkan kalua dilihat dari jumlah halamannya, dari template permohonan uji materiil yang diberikan panitia sebanyak 5 halaman, peserta mengirimkan tugasnya rata-rata 6 halaman. Bahkan ada yang hanya 4 halaman. Paling banyak 7 halaman. Dari sini saja terlihat kalua tidak ada pengembangan dari peserta dari *template* yang diberikan oleh panitia.
2	Mayoritas peserta kurang menjelaskan terkait dengan *legal standing* Pemohon. Harusnya bisa lebih dijelaskan lebih lanjut sehingga terlihat kerugian tersebut kongkrit atau setidaknya potensial dirugikan atas berlakunya norma yang diujikan tersebut.
3	Pada pokok permohonan, mayoritas para peserta juga tidak menjelaskan apa yang ingin disampaikan dalam bangunan argumentasi hukum yang kokoh. Peserta mayoritas hanya menyajikan pasal yang dijadikan batu uji dalam UUD 1945, dan Pasal yang diujikan. Selebihnya tidak ada penjelasan sama sekali. Seharusnya peserta bisa mengembangan dengan menyampaikan berbagai data, pendapat ahli, original intent pasal batu uji maupun pasal yang diujikan, serta perbandingan dengan negara lain.
4	Meski demikian, keadaan demikian masih bisa dimaklumi, mungkin karena waktunya yang sangat terbatas dalam mengerjakan tugas tersebut.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

NAMA NARASUMBER : Mohammad Mahrus Ali

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar peserta telah menyusun permohonan permohonan sesuai dengan materi yang telah disampaikan (sesuai PMK PUU dan UU MK)
	Dari 58 peserta, hanya 6 peserta yang mengirimkan tugas penyusunan permohonan
	Peserta menyusun permohonan pengujian materiil dengan soal yang telah ditentukan oleh Pusdik MK (Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
2	**Evaluasi Sistematika dan Konsistensi Penulisan**
	Sistematika Permohonan yang disusun oleh peserta sudah sesuai dengan template/contoh yang diberikan
	Peserta telah berhasil menggunakan contoh tersebut dengan baik meskipun perlu perhatikan kesalahan penulisan dan kerapian dalam penyusunan permohonan.
	Konsistensi penulisan pasal mulai dari perihal permohonan, kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan dan Petitum. (Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
	Penulisan Pasal 55 ayat (4) perlu disesuaikan dengan kaidah penulisan yang benar.
3	**Evaluasi Kewenangan Mahkamah**
	Bagian ini telah disusun dengan baik dengan mencantum dasar hukum yang menjadi kewenangan MK serta UU lainnya yang berkaitan dengan pengujian uu ke MK
	Semua peserta dapat menyusun sistematis bagian ini sesuai dengan materi yang telah diberikan
	Semua undang-undang yang relevan telah dicantumkan
4	**Evaluasi Kedudukan Hukum (Legal Standing)**
	Peserta telah menyusun bagian kedudukan secara sistematis dan logis, namun perlu disusun secara lebih
	Kedudukan hukum pemohon harus dikaitkan dengan kerugian konstitusional

	pemohon serta yurisprudensi legal standing MK (5 syarat) dan dijabarkan secara substantif-komprehensif
	Peserta telah mencantumkan lima syarat kerugian konstitusional namun belum disertai penjelasan lebih lanjut (dikaitkan dengan aspek kerugian konstitusional pemohon)
5	**Evaluasi Pokok Permohonan**
	Peserta perlu menyusun pokok permohonan dengan elaboratif dan lebih menekankan pada aspek pertentangan antara pasal yang dimohonkan dengan landasan pengujian pasal-pasal dalam UUD 1945
	Pokok permohonan lebih fokus pada aspek penentuan konstitusionalitas norma apakah norma yang diajukan bertentangan dengan konstitusi atau tidak
	Pada bagian posita, apabila peserta hendak mencantumkan permintaan putusan bersyarat pada petitum, maka pada bagian posita (pokok permohonan) perlu ada penjabaran yang komprehensif mengapa MK harus memberikan putusan bersyarat. Hal demikian penting agar konsisten antara posita dan petitum
6	**Evaluasi Petitum**
	Petitum harus konsisten dengan posita. Peserta telah menyusun dengan baik sesuai pedoman.
	Peserta perlu lebih cermat dalam menyusun petitum bersyarat yaitu dengan menguraikan argumentasinya terlebih dahulu pada posita. Hal ini agar koheren/selaras antara posita dan petitum
	Peserta cukup cermat dalam menyusun petitum

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

NAMA NARASUMBER : Rima Yuwana Yustikaningrum

KELAS : 5

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta yang mengumpulkan tugas hanya 9 orang. Dari 9 orang tersebut, rata-rata menuliskan tugasnya hanya dengan copy paste template dan diganti-ganti saja. Peserta perlu diberikan pemahaman bahwa memberikan penjelasan terkait 5 unsur dalam yurisprudensi sangat diperlukan dibagian kedudukan hukum, karena itu yang mempengaruhi apakah permohonan akan dipertimbangkan ke tahap selanjutnya atau tidak.
3	
4	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

NAMA NARASUMBER : Ananthia Ayu Devitasari

KELAS : 7

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar peserta telah menyusun permohonan permohonan sesuai dengan materi yang telah disampaikan (sesuai PMK PUU dan UU MK)
	Peserta menyusun permohonan pengujian materiil
	Evaluasi terkait Sistematika
	Sistematika Permohonan yang disusun oleh peserta sudah sesuai dengan template/contoh yang diberikan
2	Peserta telah berhasil menggunakan contoh tersebut dengan sangat baik.
	Banyak Peserta yang terpaku pada template, khusus bagian Petitum yang selalu menggunakan Petitum alternative
	Evaluasi Kewenangan Mahkamah
	Bagian ini telah disusun dengan baik dengan mencantum dasar hukum yang menjadi kewenangan MK serta UU lainnya yang berkaitan dengan pengujian uu ke MK
3	Semua peserta dapat menyusun sistematis bagian ini sesuai dengan materi yang telah diberikan
	Semua undang-undang yang relevan telah dicantumkan
	Evaluasi terkait Kedudukan Hukum (Legal Standing)
	Peserta telah menyusun bagian kedudukan secara sistematis dan logis
4	Kedudukan hukum pemohon harus dikaitkan denga kerugian konstitusional pemohon serta yurisprudensi legal standing MK (5 syarat) dan dijabarkan secara substantif-komprehensif
	Peserta telah mencantumkan lima syarat kerugian konstitusional dan disertai penjelasan lebih lanjut (dikaitkan dengan aspek kerugian konstitusional pemohon)
	Evaluasi terkait Pokok Permohonan
	Peserta menyusun permohonan pengujian materiil
5	Evaluasi terkait Sistematika

	Sistematika Permohonan yang disusun oleh peserta sudah sesuai dengan template/contoh yang diberikan
	Peserta telah berhasil menggunakan contoh tersebut dengan sangat baik.
	Banyak Peserta yang terpaku pada template, khusus bagian Petitum yang selalu menggunakan Petitum alternative
6	Peserta perlu menyusun pokok permohonan dengan elaboratif dan lebih menekankan pada aspek pertentangan antara pasal yang dimohonkan dengan landasan pengujian pasal-pasal dalam UUD 1945
	Pokok permohonan lebih fokus pada aspek penentuan konstitusionalitas norma apakah norma yang diajukan bertentangan dengan konstitusi atau tidak
	Pada bagian posita, apabila peserta hendak mencantumkan permintaan putusan bersyarat pada petitum, maka pada bagian posita (pokok permohonan) perlu ada penjabaran yang komprehensif mengapa MK harus memberikan putusan bersyarat. Hal demikian penting agar konsisten antara posita dan petitum
	Evaluasi Terkait Petitum
7	Petitum harus konsisten dengan posita. Peserta telah menyusun dengan baik sesuai pedoman.
	Peserta lebih memilih menggunakan petitum sesuai PMK dan tidak menggunakan putusan bersyarat
	Peserta cukup cermat dalam menyusun petitum
8	
9	
10	

11	
12	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

NAMA NARASUMBER : Intan Permata Putri

KELAS : 8

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Pelaksanaan kegiatan pelatihan berjalan lancar dengan 58 peserta dan 16 mengumpulkan tugas untuk membuat permohonan pengujian UU Sistem Pendidikan Nasional dengan Pasal 55 ayat (4) frasa “dapat”.
2	Pelaksanaan sesi evaluasi dihadiri kurang lebih 15 peserta dengan tingkat keaktifan peserta cukup. dimana terdapat 2 orang peserta yang mengajukan pertanyaan.
3	Tugas yang dikumpulkan bervariasi, masih terdapat beberapa tugas yang keluar dari tema yang disusun oleh panitia.
4	Terdapat tugas yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat pula tugas yang masih sumir, dan perlu diberikan keterangan lebih lengkap.

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Sesi I	Konstitusi dan Konstitusionalisme
Narasumber	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	108_ Billy Junior Budiono 1. Bagaimana cara agar masyarakat mengetahui Undang-Undang apa yang sedang dibahas di DPR? 2. Apakah boleh masyarakat luas menafsirkan konstitusi?
2.	359_ Muhammad Mega Nurhakiim Apakah sifat putusan MK adalah final?
3.	459_Violetta Mashary Apakah boleh mengajukan perkara yang sudah pernah diputus oleh MK?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Sesi II	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Adinda Putri 1. Apakah dimungkinkan ada perubahan mekanisme pengambilan keputusan di MK mengingat terkadang setiap hakim memiliki pendapat yang berbeda terkait putusan tersebut? 2. Apakah dapat dimungkinkan terjadi adanya amandemen konstitusi?
2.	359_ Muhammad Mega Nurhakiim Dari kondisi saat ini, apakah memungkinkan untuk pembentuk UU melakukan pemilihan Kepala Daerah dengan mekanisme yang berbeda?
3.	122_ Kevin Alim Rabbani Apakah dimungkinkan jika nantinya lembaga nonstruktural misal kepolisian dapat berubah menjadi lembaga struktural?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Sesi III	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Dr. Hesti Armiwulan, S.H.
Moderator	Bangkit Panji Anarogo

No.	Pertanyaan Peserta
1.	-
2.	-

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Sesi IV	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
Moderator	Imam Margono

No.	Pertanyaan Peserta
1.	359_ Muhammad Mega Nurhakiim Apakah saat UU terbukti bertentangan dengan UUD 1945, bagaimana status keberlakuan UU tersebut?
2.	-

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Sesi IV	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	-
2.	-

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1



Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2



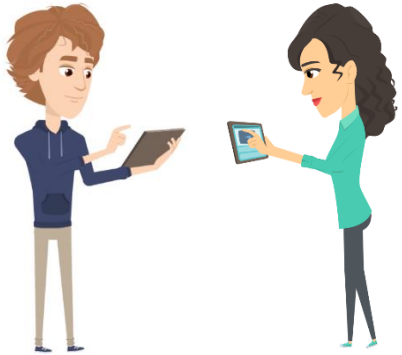
Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3



Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4

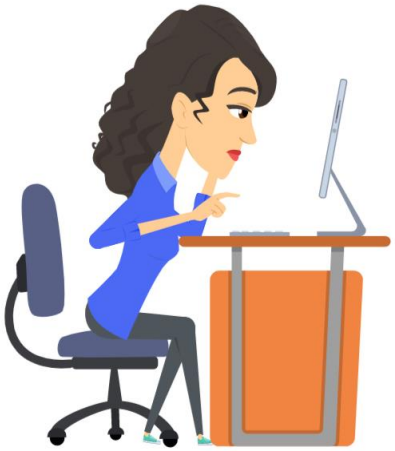


Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

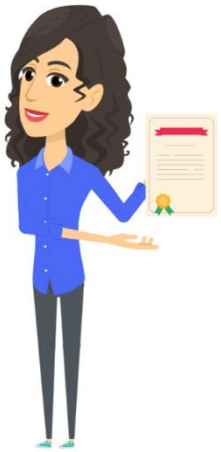
5



Pusdik meregistrasi peserta di laman e-pusdik

6 	**7** 	**8** 
Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi	Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan	Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi
9 	**10** 	**11** 
Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing	Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera	Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12 	**13** 	**14** 
Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator	Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)	Moderator mengatur jalannya diskusi
15 	**16** 	**17** 
Peserta mengisi daftar hadir di akun SIMULTAN masing-masing peserta	Narasumber selesai memberikan materi	Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18 	**19** 	**20** 
Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta	Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test	Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat